



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sesuai Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016 - 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 733, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Seri E Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
17. Peraturan Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016-2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD memuat Visi, Misi, dan Prioritas Program Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rincian Visi, Misi, dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Daerah
 - BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 - BAB VIII : Indikasi rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
 - BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016 – 2021.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

DAERAH METRO	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 22 September 2016

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro

Pada tanggal 22 September 2016

SEKRETAIS DAERAH KOTA METRO,

ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....¹⁵

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (15/MTR/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA METRO
TAHUN 2016-2021**

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang berisi kondisi *existing* pembangunan secara komprehensif, permasalahan dan isu strategis yang ditindaklanjuti dengan strategi dan arah kebijakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam penyusunannya, dokumen RPJMD berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Metro, dan RTRW Kota Metro. Setelah disusun, dokumen RPJMD menjadi pedoman pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu lima tahun.

Berakhirnya pelaksanaan pembangunan Kota Metro periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 yang merupakan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Visi sebagai Kota Pendidikan yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Kota Metro dalam dokumen RPJPD tetap menjadi dasar pembangunan sampai tahun 2025 nanti.

Pelaksanaan RPJMD dijabarkan dalam 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR.....¹⁵.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian dan Proses Penyusunan Dokumen

Pembentukan Kota Metro pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai Daerah Otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang secara substansi saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi kunci keberhasilan bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang berisi kondisi *existing* pembangunan secara komprehensif, permasalahan dan isu strategis yang ditindaklanjuti dengan strategi dan arah kebijakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam penyusunannya, dokumen RPJMD berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Metro, dan RTRW Kota Metro. Setelah disusun, dokumen RPJMD menjadi pedoman pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu lima tahun.

Berakhirnya pelaksanaan pembangunan Kota Metro periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 dan dilantikannya Walikota dan Wakil Walikota Metro periode 2016-2021, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 yang merupakan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Visi sebagai Kota Pendidikan yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Kota Metro dalam dokumen RPJPD tetap menjadi dasar pembangunan sampai tahun 2025 nanti.

Perubahan regulasi dalam proses perencanaan pembangunan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) masih menjadi payung hukum perencanaan, meskipun dalam operasionalisasinya mengalami beberapa perubahan. Perubahan lain terjadi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang fokus pada pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, sampai saat penyusunan dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021, pemerintah belum menerbitkan aturan turunan Undang-Undang tersebut. Kondisi ini memungkinkan dilakukannya review terhadap dokumen RPJMD pada tahun 2017 untuk mengakomodir aturan operasional dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Proses penyusunan dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 dimulai pada awal tahun 2016 dengan mengintegrasikan substansi Naskah Teknokratik RPJMD yang telah disusun pada 2015 lalu. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 disusun sebagai data dasar untuk melanjutkan pembangunan lima tahun kedepan. Adapun proses penyusunan dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

A. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD

Tahapan persiapan penyusunan RPJMD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan RPJMD

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
2. Orientasi mengenai RPJMD
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim RPJMD
4. Pengumpulan Data dan Informasi

B. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

1. Perumusan rancangan awal RPJMD
 - a. Pengolahan data dan informasi;
 - b. Penelaahan RTRW kota Metro dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 - c. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - d. Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - f. Penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;
 - g. Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;

G. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD

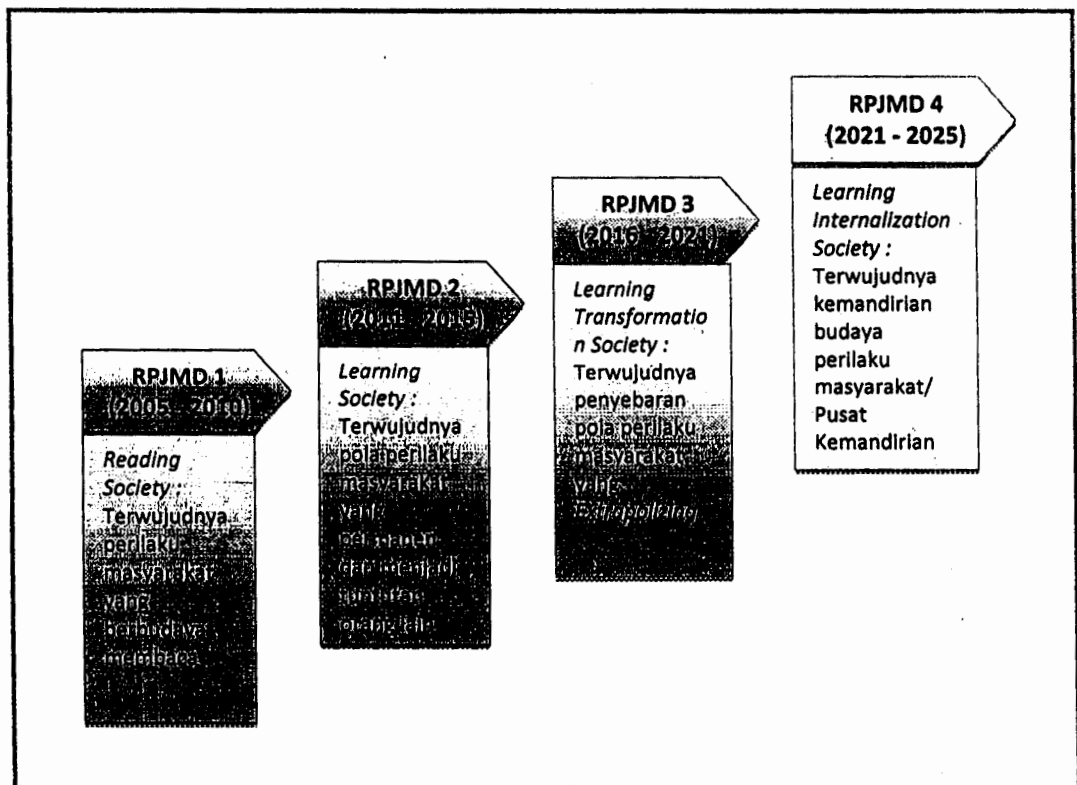
1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
2. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur disertai dengan :
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil evaluasi rancangan akhir RPJMD.
3. Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD
5. Penyampaian Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur untuk diklarifikasi dengan tembusan kepada menteri.

1.1.2. Kedudukan RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 dalam Tahun Rencana RPJPD Kota Metro 2005-2025

RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan pola perilaku masyarakat yang transformatif. Maksud tahapan ini untuk pengembangan kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kota, infrastruktur di seluruh sektor, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemerataan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif secara integratif dengan penekanan pada moral dan nilai agama sebagai landasan berprilaku dan bertindak. Pemanfaatan teknologi untuk membangun perekonomian lokal melalui sumberdaya manusia yang berkarakter wirausaha dan mandiri serta berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip *sustainable development* untuk kualitas hidup manusia yang lebih baik.

Gambar 1.1

Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPD 2005-2025



1.1.3. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD dan Renstra SKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sedangkan tujuan dan sasaran RPJMD diacu oleh SKPD dalam menyusun indikator kinerja dalam Renstra.

Pelaksanaan RPJMD dijabarkan dalam 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Metro tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II

- Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 733, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029;
 18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
 20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro);
 21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031;
 22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025

1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.3.1. Hubungan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dengan RPJMN 2015-2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang saat ini adalah RPJMN 2015-2019. Adapun visi dan misi RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi pembangunan 2015-2019 :

1. Mewujudkan kemanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri.

Selain itu, telaah kebijakan pembangunan juga dilihat dari tiga masalah pokok bangsa dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Berikut akan dijelaskan tiga masalah dimaksud disertai tantangan utama masing-masing masalah.

A. Ancaman Terhadap Wibawa Negara.

Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan ke arah yang lebih baik.

Tantangan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan wibawa negara dapat dikelompokkan atas peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi.

B. Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa.

Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang berwujud (*tangible*) maupun bersifat tak berwujud (*intangible*), bagi kesejahteraan rakyatnya. Tantangan utama dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa mencakup upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, percepatan pemerataan dan keadilan, dan keberlanjutan pembangunan.

C. Intoleransi dan Krisis Kepribadian bangsa.

Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudahkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap "yang berbeda". Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan "dunia tanpa batas" (*borderless-state*) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (*culture shock*) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia.

Tantangan utama pembangunan dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Tabel 1.1

Matrik Hubungan Kebijakan Umum RPJMN dengan RPJMD Kota Metro

NO	RPJMN	RPJMD Kota Metro
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian Lokal dan Kehidupan Sosial Masyarakat 2. Kebijakan pembangunan berbasis tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup
2	Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan	Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian Lokal dan Kehidupan Sosial Masyarakat
3	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim	Kebijakan pembangunan berbasis tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup
4	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	Pembangunan sumber daya manusia yang kreatif, profesional, bermoral, dan berbudaya
5	Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah	kebijakan umum pembangunan dilihat melalui beberapa pendekatan, yaitu pemerataan, partisipasi, dan anggaran berbasis program prioritas (<i>money follow program priority</i>)

1.3.2. Hubungan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dengan RPJMD PROVINSI Lampung Tahun 2015-2019

Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, menjadi salah satu acuan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Sebagai satu kesatuan wilayah di Provinsi Lampung, seluruh kabupaten/kota wajib mengacu rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dengan tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

Dalam kebijakan kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019, Kota Metro secara hirarki ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pusat pendidikan khusus. Untuk itu, dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara provinsi dan Kota Metro agar apa yang telah direncanakan berjalan secara terintegrasi dan tercapainya tujuan pembangunan di seluruh wilayah.

Beberapa isu strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 yang sesuai dengan kondisi Kota Metro menjadi salah satu dasar penyusunan program prioritas selama lima tahun kedepan. Adapun isu strategis dimaksud adalah :

1. Persaingan antar daerah yang ketat dimana efisiensi, produktivitas dan nilai tambah menjadi pertimbangan kinerja.
2. Adanya perubahan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
3. Dinamika politik pada era demokrasi.
4. Terjadinya konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif yang mengakibatkan tidak optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.
5. Ketidakpastian hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota telah memunculkan lemahnya koordinasi dan sinergi pusat dan daerah.
6. Belum optimalnya pengelolaan anggaran daerah.
7. Rendahnya mutu pelayanan publik.
8. Lemahnya manajemen sumberdaya dan aset daerah.
9. Lemahnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan swasta.
10. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai semakin tingginya frekuensi terjadi banjir.
11. Adanya peningkatan penggunaan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi yang mendukung percepatan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Tabel 1.2

Matrik Hubungan Kebijakan Umum RPJMN dengan RPJMD Kota Metro

NO	RPJMD Provinsi Lampung	RPJMD Kota Metro
1	Pengembangan ekonomi wilayah, tata ruang, kawasan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian Lokal dan Kehidupan Sosial Masyarakat 2. Kebijakan pembangunan berbasis tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup
2	Pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial	Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian Lokal dan Kehidupan Sosial Masyarakat
3	Pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan budaya	Pembangunan sumber daya manusia yang kreatif, profesional, bermoral, dan berbudaya
4	Optimalisasi dan efisiensi keuangan daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif

1.3.3. Hubungan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur 2016-2021

Dalam menyusun dokumen strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun,

Pemerintah Kota Metro memperhatikan dokumen perencanaan yang sama di 2 (dua) kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Metro, yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Adapun isu strategis kedua kabupaten tersebut yang berhubungan langsung dengan Kota Metro adalah sebagai berikut :

Kota Metro dulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Bahkan, Kota Metro merupakan ibukota dari Lampung Tengah. Kondisi ini menyebabkan banyaknya aset Lampung Tengah yang masih berada di wilayah Kota Metro. Tidak terkelolanya aset Lampung Tengah tersebut menyebabkan hambatan yang cukup besar dalam kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah Lampung Tengah. Sampai saat ini, Kabupaten Lampung Tengah belum bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dan aset. Untuk itu, masalah pengelolaan aset Lampung Tengah di Kota Metro menjadi salah satu isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah.

Isu strategis terkait dengan Kabupaten Lampung Timur adalah pengembangan Dam Raman sebagai salah satu potensi pariwisata alam Kota Metro. Dam Raman merupakan potensi pariwisata yang berada di 3 (tiga) wilayah, yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro. Dalam pengembangannya dibutuhkan kerjasama lintas wilayah.

Berdasarkan dua permasalahan tersebut, maka dalam dokumen RPJMD Kota Metro disusun isu strategis pengembangan kerjasama wilayah, terutama dengan 2 (dua) kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Metro

1.3.4. Hubungan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dengan RTRW Kota Metro 2011-2031

Penyusunan RPJMD Kota Metro 2016-2021 memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang merupakan dokumen perencanaan penggunaan ruang yang disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Dalam dokumen tata ruang dilakukan pemetaan pengembangan wilayah sebagai pusat

layanan dan kawasan strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam menyusun program prioritas selama lima tahun kedepan diacu dokumen RTRW agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan.

Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009-2029, Kota Metro ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan merupakan satu kesatuan dalam pengembangan kawasan andalan Nasional Bandar Lampung – Metro. Dengan fungsi utama sebagai : (1) Pusat Pemerintahan Kota; (2) Pusat Perdagangan dan Jasa; (3) Pusat Pendidikan Khusus. Selain itu, Kota Metro bersama Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi dalam bidang Pengembangan Kawasan Pendidikan Unggulan Terpadu Berbasis Potensi Lokal.

Pusat pelayanan di wilayah Kota Metro merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional, yang meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Berdasarkan pembagian pusat pelayanan tersebut, maka di Kota Metro dilihat dari hirarki dapat diketahui pusat pelayanan sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Pusat, yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Timur dan Metro Barat. Dua kecamatan ini melayani Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Iring Mulyo, melayani masing-masing Kelurahan Tejosari, Tejoagung, Yosodadi, dan Yosorejo. Sedangkan Kelurahan Mulyojati melayani Kelurahan Mulyosari, Ganjar Agung, dan Ganjar Asri.
3. Pusat Lingkungan terdapat di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Utara. Dua kecamatan ini melayani Sub Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Margorejo, melayani Kelurahan Margodadi, Sumber Sari, dan Rejo Mulyo. Sedangkan Kelurahan Banjarsari melayani Kelurahan Purwoasri, Purwosari, dan Karang Rejo.

Pusat-pusat pelayanan perkotaan yang perlu didorong maupun dibatasi pertumbuhannya adalah :

- a. Kecamatan Metro Pusat; merupakan pusat pelayanan kota yang melayani wilayah Kota Metro dan regional daerah *hinterland*-nya, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa,

- pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat. Sebagai pusat kota maka perkembangannya sangat pesat dibandingkan kawasan lainnya terutama masalah permukiman. Sebagai ibukota maka perlu adanya penataan ruang dan perlu dibatasi serta dikendalikan penggunaan lahannya.
- b. Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Barat; merupakan kawasan pendidikan tinggi di Kota Metro dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial yang memadai sehingga dimasa yang akan datang diperkirakan akan tumbuh secara cepat. Hal ini karena banyak mahasiswa luar Kota Metro yang menimba ilmu. Dua kecamatan ini arahkan untuk menjadi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).
 - c. Kelurahan Banjarsari; merupakan pusat pelayan di Utara kota namun jumlah fasilitas sosial dan aksesibilitasnya masih relatif kurang, sehingga fungsinya masih sebagai pusat lingkungan. Namun untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah perlu adanya dorongan pada kawasan ini. Kawasan ini diarahkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan sedang dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan jasa.
 - d. Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Ganjaragung, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejoagung, Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Rejomulyo; merupakan daerah yang masih tertinggal sehingga perlu didorong pertumbuhannya. Kelurahan ini diarahkan menjadi Pusat Lingkungan (PL) sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan pada kawasan ini.
 - e. Kecamatan Metro Selatan; merupakan kawasan pertanian yang subur dengan lahan persawahan terluas di Kota Metro. Sehingga untuk menjaga lahan pertanian berkelanjutan perlu adanya pembatasan dan pengendalian penggunaan lahan. Ke depan kawasan ini diarahkan untuk kawasan permukiman terbatas namun tetap mendorong tumbuhnya perdagangan dan jasa guna melayani kawasan sekitar.

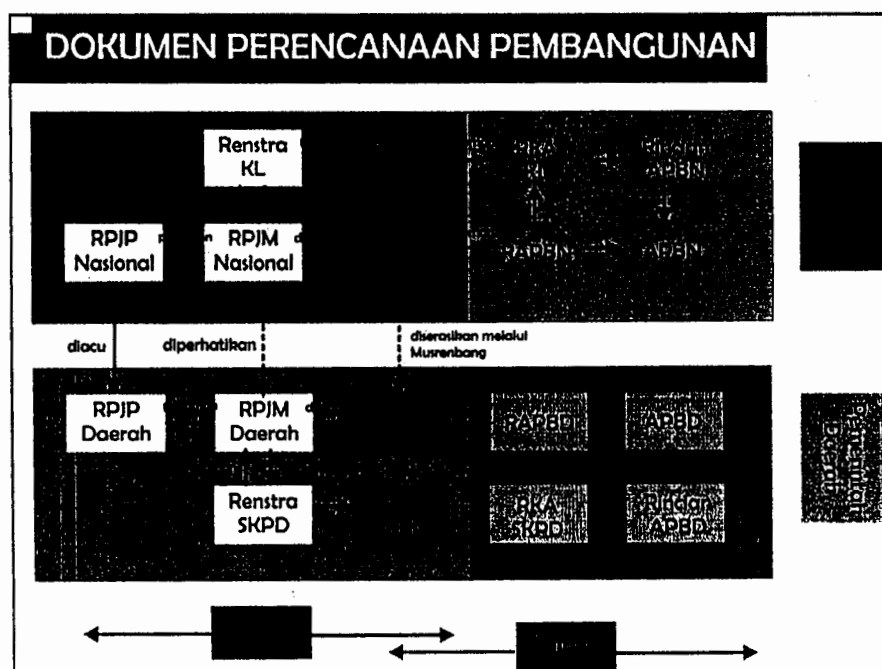
Tabel 4.1
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Metro

1.	KECAMATAN METRO PUSAT	1. Pusat Pemerintahan 2. Perdagangan dan jasa	REGIONAL DAN KOTA

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

		3. Perkantoran 4. Pendidikan 5. Kesehatan 6. Permukiman	
1.	KECAMATAN METRO TIMUR	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman 3. Pendidikan Tinggi 4. Kesehatan 5. Wisata	KOTA DAN LOKAL
2.	KECAMATAN METRO BARAT	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman 3. Pendidikan Tinggi 4. Kesehatan 5. Wisata	KOTA DAN LOKAL
3.	KECAMATAN METRO UTARA	1. Perdagangan dan Jasa 2. Wisata 3. Pendidikan Tinggi 4. Kesehatan 5. Pertanian 6. Peternakan 7. Permukiman 8. Industri	KOTA DAN LOKAL
1.	KELURAHAN PURWOASRI,	1. Perdagangan dan Jasa	LOKAL
2.	KELURAHAN KARANGREJO,	2. Pertanian	
3.	KELURAHAN GANJARAGUNG,	3. Peternakan	
4.	KELURAHAN YOSOREJO,	4. Perikanan	
5.	KELURAHAN TEJOAGUNG,	5. Permukiman	
6.	KELURAHAN MARGOREJO	6. Pendidikan	
7.	DAN KELURAHAN REJOMULYO	7. Kesehatan	
		8. Wisata	

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

- 3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2010-2015
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2010-2015
- 3.3. Kerangka Pendanaan

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan**Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah****Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah****Bab IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**

1.5. Maksud dan Tujuan**1.5.1. Maksud Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Metro 2016-2021**

Penyusunan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai upaya perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, profesional serta menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan.

Dokumen RPJMD Kota Metro 2016-2021 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Metro dan Renstra SKPD Pemerintah Kota Metro.

1.5.2. Tujuan Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Metro 2016-2021

RPJMD Kota Metro 2016-2021 disusun bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah melalui analisa data dan informasi pembangunan serta evaluasi kinerja pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya.
2. Merumuskan isu strategis berdasarkan permasalahan pembangunan
3. Merumuskan penjelasan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang akan menjadi kerangka besar pelaksanaan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Penetapan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan
5. Menentukan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO

1.

2.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada jaman pemerintahan Belanda, Kota Metro masih merupakan hutan belantara yang merupakan bagian dari wilayah Marga Nuban yang kemudian dibuka oleh para kolonisasi pada tahun 1936. Pada tahun 1937 resmi diserahkan oleh Marga Nuban dan sekaligus diresmikan sebagai Pusat Pemerintahan *Onder Distrik* (setingkat Kecamatan). Pada jaman pemerintahan Jepang, *onder distrik* tersebut tetap diakui dengan nama *Sonco* (Camat). Pada jaman pelaksanaan kolonisasi selain Metro juga terbentuk *onder distrik*, yaitu Pekalongan, Batanghari, Sekampung dan Trimurjo. Kelima *onder distrik* ini mendapat rencana pengairan teknis bersumber dari Way Sekampung yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para kolonisasi-kolonisasi yang sudah bermukim di bedeng-bedeng dimulai dari bedeng I bertempat di Trimurjo dan Bedeng 62 di Sekampung, yang kemudian bedeng tersebut diberi nama.

Pada jaman Jepang, pengairan teknis masih terus dilanjutkan karena pada waktu pemerintahan Belanda belum juga terselesaikan. Setelah Indonesia merdeka, pengairan tersebut masih terus dilanjutkan sesuai dengan pengembangan teknis yang direncanakan hingga sekarang. Dengan berlakunya pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945 maka Metro menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati pertama yang menjabat adalah Burhanuddin (1945 – 1948).

Sebelum menjadi Kota Administratif Metro, Metro merupakan suatu wilayah kecamatan, yakni kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) kelurahan dan 11 (sebelas) desa. Adapun 6 (enam) kelurahan tersebut, antara lain : 1) Metro; 2) Mulyojati; 3) Tejosari; 4) Yosodadi; 5) Hadimulyo; dan 6) Ganjar Agung. Sedangkan 11 (sebelas) desa tersebut, antara lain : Karangrejo, Banjarsari, Purwosari, Margorejo, Rejomulyo, Summersari, Kibang, Margototo, Margajaya, Sumber Agung, dan Purbosembodo.

Atas dasar Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam perkembangannya, 5 (lima) desa di seberang (sebelah selatan) Way Sekampung dibentuk menjadi 1 (satu) kecamatan, yaitu Kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana (sekarang masuk menjadi Kabupaten Lampung Timur). Pada tahun yang sama terbentuk 2 (dua) wilayah, yaitu Sukadana dan Gunung Sugih.

Dengan kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kota Administratif Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan juga pusat pemerintahan. Maka wajar bila dengan kondisi tersebut, Kotatiff Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Metro.

Harapan untuk memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta bersama dengan Kota Dumai (Riau), Kota Cilegon dan Kota Depok (Jawa Barat), Kota Banjarbaru (Kalsel), dan Kota Ternate (Maluku Utara).

Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Metro Raya, terdiri dari :

1. Kelurahan Metro
2. Kelurahan Ganjar Agung
3. Kelurahan Yosodadi
4. Kelurahan Hadimulyo
5. Desa Banjarsari
6. Desa Purwosari
7. Desa Karangrejo

b. Kecamatan Bantul, terdiri dari :

1. Kelurahan Mulyojati
2. Kelurahan Tejosari
3. Desa Margorejo
4. Desa Rejomulyo
5. Desa Sumbersari

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kelurahan.

2.1.1. Geografi

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Metro merupakan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta. Sebagai daerah otonom dengan status kota yang kedua yang ada di Provinsi Lampung, Metro menjadi salah satu pusat pertumbuhan kota. Selain itu, kedudukannya yang berada di tengah Provinsi Lampung, yang secara geografis terletak pada 5°6" – 5°8" Lintang Selatan dan 105°17" – 105°19" Bujur Timur, menjadikannya sebagai penghubung dari dan ke berbagai kabupaten di sekitarnya, baik melalui jalur jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.

Luas wilayah Kota Metro 68,74 km² atau 0,19% dari luas Provinsi Lampung yang besarnya 3.528.835 km². Sedangkan batas-batas wilayah administrasi Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Wilayah administrasi Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan. Kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Metro Utara seluas 19,64 km² atau 28,57% dari luas wilayah Kota Metro, sementara yang paling kecil adalah

Kecamatan Metro Barat seluas 11,28 km² atau 16,41% terhadap luas wilayah Kota Metro.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administratif Kota Metro

1.	Metro Pusat	1. Metro	2,28	3,32
		2. Imopuro	1,19	1,73
		3. Hadimulyo Timur	3,37	4,90
		4. Hadimulyo Barat	1,50	2,18
		5. Yosomulyo	3,37	4,90
		Sub total	11,71	17,04
2.	Metro Utara	1. Banjarsari	5,75	8,36
		2. Purwosari	2,55	3,71
		3. Purwoasri	3,62	5,27
		4. Karangrejo	7,72	11,23
		Sub total	19,64	28,57
3.	Metro Selatan	1. Rejomulyo	4,75	6,91
		2. Margorejo	2,46	3,58
		3. Margodadi	2,87	4,18
		4. Sumpersari Bantul	4,25	6,18
		Sub total	14,33	20,85
4.	Metro Timur	1. Iring Mulyo	1,89	3,22
		2. Yosodadi	3,36	4,89
		3. Yosorejo	1,22	1,77
		4. Tejosari	3,76	5,47
		5. Tejo Agung	1,55	2,25
		Sub total	11,78	17,14
5.	Metro Barat	1. Mulyojati	2,95	4,29
		2. Mulyosari	3,03	4,41
		3. Ganjar Agung	2,88	4,19
		4. Ganjarsari	2,42	3,52
		Sub total	11,28	16,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro

2. Topografi, Geologi, Hidrologi, dan Klimatologi

Topografi Kota Metro berupa daerah dataran alluvial, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 25 meter sampai 75 meter dari permukaan laut, dan dengan kemiringan antara 0-5%. Hanya sedikit wilayah yang berombak sampai bergelombang, yaitu di bagian Utara dan Selatan kota dengan kemiringan antara 6-15%. Pada dataran di daerah sungai terdapat endapan permukaan alluvium (campuran liat galuh dan pasir) dengan tanah lotosol dan podsolik.

Wilayah Kota Metro dibatasi oleh aliran sungai Way Sekampung pada bagian Selatan dan Way Raman di sebelah Utara. Selain itu dalam wilayah Kota

GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO III. 4

Metro mengalir sungai Way Batanghari dan Way Bunut. Pada musim kemarau debit air Way Batanghari mencapai 9-10 m³/detik dan pada musim hujan mencapai 500 m³/detik, sedangkan debit Way Bunut pada musim kemarau mencapai 5-6 m³/detik dan pada musim hujan mencapai 100-200 m³/detik. Wilayah yang dialiri kedua sungai tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Kota Metro dengan arah aliran kearah Timur. Keberadaan sungai di Kota Metro sangat menunjang pengembangan sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan.

Kota Metro beriklim tropis, sebagaimana kondisi iklim wilayah Provinsi Lampung pada umumnya. Secara terperinci kondisi iklim di Kota Metro terletak di garis khatulistiwa pada posisi 5° Lintang Selatan yang beriklim Humid Tropis, dengan arah angin laut yang bertiup dari Samudra Indonesia dan Laut Jawa. Pada bulan November sampai Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, sedangkan pada bulan Juli sampai Agustus bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam.

Pada ketinggian antara 30-62 meter dari permukaan laut, temperatur udara rata-rata berkisar 26°C-28°C, dengan suhu udara rata-rata siang hari 28°C. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33°C dan temperatur minimum 22°C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 80%-88% dan akan semakin tinggi pada tempat yang lebih tinggi.

Rata-rata curah hujan Kota Metro adalah antara 1.921,07 mm per tahun. Bulan hujan berkisar antara September sampai Mei dengan curah hujan tertinggi pada Januari sampai Maret, sedangkan bulan kering terjadi pada Juni sampai Agustus.

3. Penggunaan Lahan

Jika dilihat dari luas lahan berdasarkan penggunaan lahan Tahun 2014, wilayah Kota Metro terdiri dari lahan sawah seluas 2.904,56 hektar (49%); rumah dan pekarangan seluas 2.381,10 hektar (40%); hutan rakyat 138 hektar (2,3%); rawa 23 hektar (0,38%); kolam 75 hektar (1,25%); tegalan/kebun 148,90 hektar (2,5%); padang rumput 12 hektar (0,2%); jalan, sungai, danau, lahan tandus, dan lain lain seluas 215,25 hektar (3,6%); ladang/huma 83 hektar (1,38%).

Tabel 2.2
Luas Lahan Menurut Penggunaan Kota Metro Tahun 2015

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1.	Sawah	2.904,56	49

2.	Rumah, bangunan, dan halaman	2.381,10	40
3.	Hutan rakyat	138,00	2,3
4.	Rawa	23,00	0,38
5.	Kolam	75,00	1,25
6.	Tegal/kebun	148,90	2,,5
7.	Ladang/huma	83,00	1,38
8.	Padang rumput	12,00	0,2
9.	Jalan, sungai, danau, lahan tandus, dan lain lain	215,25	3,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro

2.1.2. Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Metro Tahun 2015, penduduk Kota Metro per 31 Desember 2015 berjumlah 158.415 jiwa terdiri dari 79.191 jiwa laki-laki dan 79.224 jiwa perempuan dengan kepadatan 2.304 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di wilayah kecamatan Metro Pusat yang merupakan pusat perekonomian, perdagangan dan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya data jumlah dan kepadatan penduduk Kota Metro tahun 2015 disajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Metro Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah (Jumlah)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (Jumlah/km ²)
1.	Metro Pusat	24.854	25.266	50.120	11,72	4.276
2.	Metro Utara	13.720	13.406	27.126	19,64	1.381
3.	Metro Selatan	7.471	7.499	14.970	14,33	1.044
4.	Metro Timur	19.169	19.493	38.662	11,78	3.282
5.	Metro Barat	13.977	13.560	27.537	11,28	2.411
	Jumlah	79.191	79.224	158.415	68,70	2.304

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Jumlah penduduk laki-laki di Kota Metro lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini bisa dilihat dari *sex ratio* yaitu sebesar 99,96. Berdasarkan sajian data tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup lengkap, serta fungsinya sebagai pusat pemerintahan menjadikan Kecamatan Metro Pusat memiliki daya tarik yang lebih besar bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sebaliknya Kecamatan Metro Selatan berada lebih jauh dari pusat pemerintahan serta akses ke kecamatan ini relatif terbatas dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Metro.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk usia produktif (16-64 tahun) Kota Metro sebesar 114.634 jiwa atau 72,36% dari jumlah penduduk, sedangkan penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 64 tahun) berjumlah 43.781 jiwa atau 27,64 %. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Penduduk Kota Metro Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015

Kelompok Umur	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
0	1385	1406	2791
1-2	2757	2614	5371
3-4	2883	2678	5561
5-6	2941	2716	5657
7-12	8171	7710	15881
13-15	4163	4357	8520
16-18	4614	5245	9859
19-24	8522	8659	17181
25-44	25045	24822	49867
45+	18710	19017	37727
Jumlah	79.191	79.224	158.415

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar. Bila dilihat dari nilai TFR (Total Fertility Rate) Kota Metro tahun 2010-2015 yang berkisar di angka 2,02 sampai 2,2, maka dapat dikatakan bahwa jumlah kelahiran yang rendah menjadi salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan penduduk di Kota Metro. Asumsi ini juga didukung dengan data Contraceptive Prevalance Rate (CPR) tahun 2010-2015 yang

cukup tinggi dan Unmeet Need yang rendah. Berikut disajikan dalam tabel data TFR, CPR, dan Unmet Need di Kota Metro Tahun 2010-2015.

Tabel
TFR, CPR dan Unmet Need Kota Metro Tahun 2010-2015

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,2	-	2,14	2,08	-	2,02
2.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	74,21	93,9	73,02	72,24	72,37	72,27
3.	Unmet Need	15,9	15,38	16,3	16,56	16,1	15,94

Sumber : SUSENAS dan BKKB-PP Kota Metro

Berikut disajikan Data Kependudukan Kota Metro Tahun 2012-2015 (Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010).

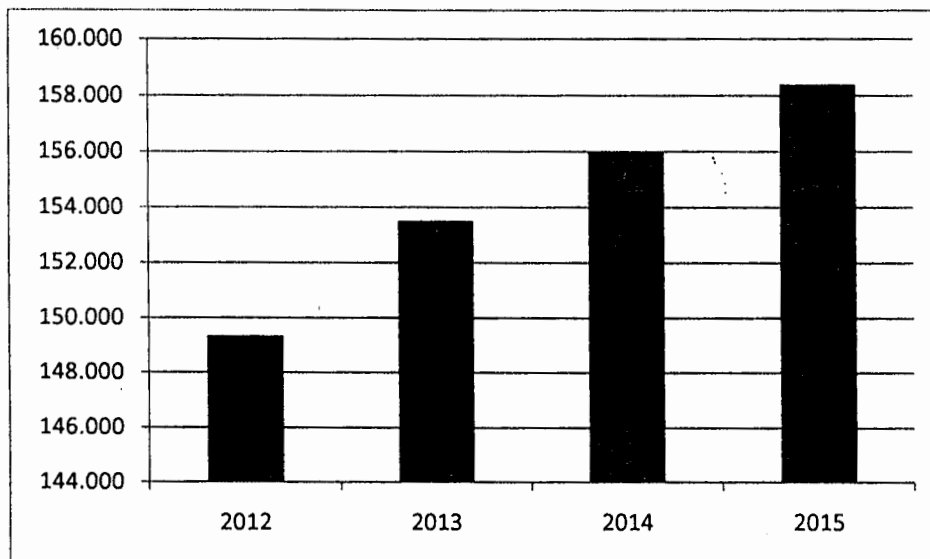
Tabel 2.5
Data Kependudukan Kota Metro Tahun 2012-2015
(Proyeksi Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010)

		2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk	149.361	153.517	155.992	158.415
2.	Pertumbuhan Penduduk	1,57	2,78	1,61	0,34
3.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	2.173	2.233	2.269	2.305
4.	Sex Ratio (L/P)	100,81	100,18	100,21	99,96
5.	Jumlah Rumah Tangga	38.909	38.968	38.998	40.069
6.	Rata-Rata ART (jiwa/RT)	4	3	4	4

Sumber : BPS Kota Metro, 2016

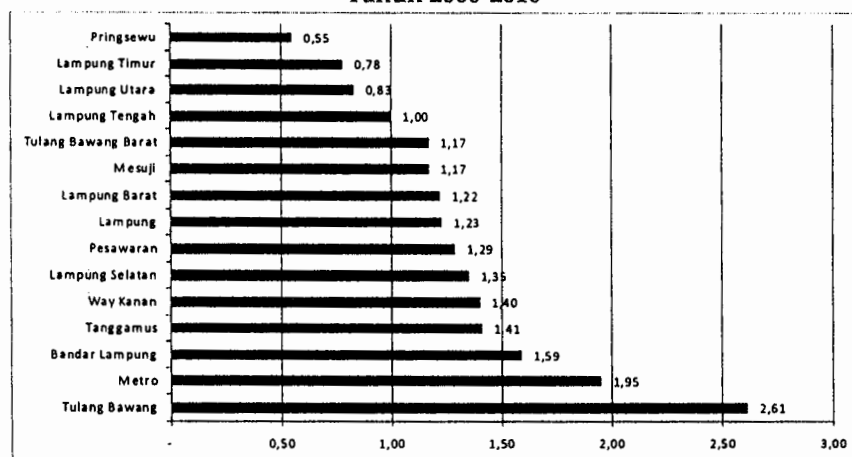
Grafik mengenai pertumbuhan penduduk di Kota Metro selama kurun waktu 2012-2015 disajikan pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Grafik Jumlah Penduduk Kota Metro 2012-2015



Sumber : BPS

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Lampung
Tahun 2000-2010



Sumber : BPS

Berdasarkan gambar 2.2. dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Metro (tahun 2000-2010) adalah sebesar 2,61 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Metro tersebut menduduki urutan tertinggi kedua di Provinsi Lampung, setelah Kabupaten Tulang Bawang.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah

Aspek kesejahteraan masyarakat yang juga menjadi aspek adaya saing daerah terdiri dari kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi dengan beberapa indikator berikut ini :

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran tunggal dan sederhana yang memuat tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ketiga komponen IPM tersebut dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.

Pada dasarnya IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan/atau bahkan antar waktu.

Tabel 2.6
Indeks Komponen IPM di Kota Metro Tahun 2010-2015
(Metode Penghitungan Baru)

Indeks Komponen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,59	70,62	70,65	70,68	70,98	70,98
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,74	13,08	13,47	13,85	14,25	14,26
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,4	9,74	9,75	10,47	10,54	10,55
Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan (Rp.000)	9.953.	10.061.	10.281	10.494	10.606	10.707
IPM	74,72	75,29	75,36	75,47	76,08	76,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro 2014

Berdasarkan hasil penghitungan Kota Metro memiliki nilai IPM tertinggi dibandingkan dengan 15 (lima belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dengan nilai IPM 75,10 pada tahun 2015, yang tertinggi berikutnya adalah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai IPM nya masing-masing 74,81 dan 67,61. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM terendah yaitu Kabupaten Mesuji dengan nilai IPM sebesar 59,79. Dari data ini dapat memberikan indikasi bahwa daerah yang memiliki fasilitas pendidikan yang tinggi, mempunyai akses yang mudah dengan daerah lain, dan sebagai pusat perdagangan dan jasa akan memiliki nilai IPM yang tinggi.

Tabel 2.7
Perbandingan Angka IPM Kabupaten/Kota Dan Provinsi
Se-Provinsi Lampung Tahun 2010-2015
(Metode Perhitungan Baru)

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Lampung Barat	60,93	61,92	62,51	63,21	63,54	64,54
2	Tanggamus	60,09	60,63	61,14	61,89	62,67	63,66
3	Lampung Selatan	61,07	61,95	62,68	63,35	63,75	65,22
4	Lampung Timur	63,23	64,10	65,10	66,07	66,42	67,10
5	Lampung Tengah	64,14	64,71	65,60	66,57	67,07	67,61
6	Lampung Utara	61,82	62,67	62,93	64,00	64,89	65,20
7	Way Kanan	61,27	62,04	62,79	63,92	64,32	65,18
8	Tulang Bawang	63,21	63,67	64,11	64,91	65,83	66,08
9	Pesawaran	58,64	59,44	59,98	60,94	61,70	62,70
10	Pringsewu	*	64,86	65,37	66,14	66,58	67,55
11	Mesuji	*	57,32	57,67	58,16	58,71	59,79
12	Tulang Bawang Barat	*	60,13	60,77	61,46	62,46	63,01
13	Pesisir Barat	*	*	*	58,95	59,76	60,55
14	Bandar Lampung	71,11	72,04	72,88	73,93	74,34	74,81
15	Metro	71,37	72,23	72,86	74,27	74,98	75,10
16	Lampung	62,71	63,30	63,97	65,74	66,49	67,25

Sumber : BPS Provinsi Lampung

*)masih tergabung dengan kabupaten induk

b. Koefisien Gini Ratio

Tabel 2.8
Tingkat ketimpangan Distribusi Pendapatan Menurut Koefisien Gini Ratio di Kota Metro, 2012-2015

Tahun	Nilai Gini Ratio
(1)	(2)
2012	0,3364
2013	0,4149
2014	0,3447
2015*	0,2623

Sumber : Badan Pusat Statistik

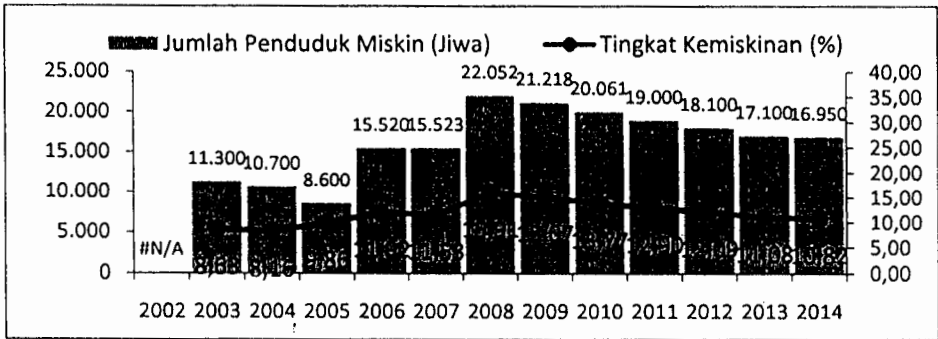
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai Rasio Gini Kota Metro pada 2015 kembali turun. Sehingga bila tahun lalu Kota Metro memasuki kategori ketimpangan sedang, maka pada tahun ini kembali masuk pada kategori ketimpangan rendah. Hal ini perlu diapresiasi dan dipertahankan oleh pemerintah Kota Metro, agar distribusi pendapatan penduduk

Kota Metro relatif merata. Pencapaian tingkat pendapatan per kapita Kota Metro yang terus meningkat dan TPT Kota Metro yang juga menurun secara signifikan sangat baik dan perlu untuk dipertahankan.

c. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan menjadi masalah krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan maupun kemampuan daya beli. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin Kota Metro selama tahun 2008-2014 cenderung semakin menurun. Pada tahun 2008 persentase penduduk miskin Kota Metro sebesar 15,91% dari jumlah penduduk Kota Metro. Pada tahun berikutnya tingkat kemiskinan di Kota Metro menurun secara konsisten menjadi 15,07% (2009), 13,77% (2010), 12,90% (2011), 12,09% (2012), 11,08% (2013) dan 10,82% (2014). Data mengenai tingkat kemiskinan di Kota Metro tahun 2008-2014 disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Gambar 2.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Metro Tahun 2003-2014

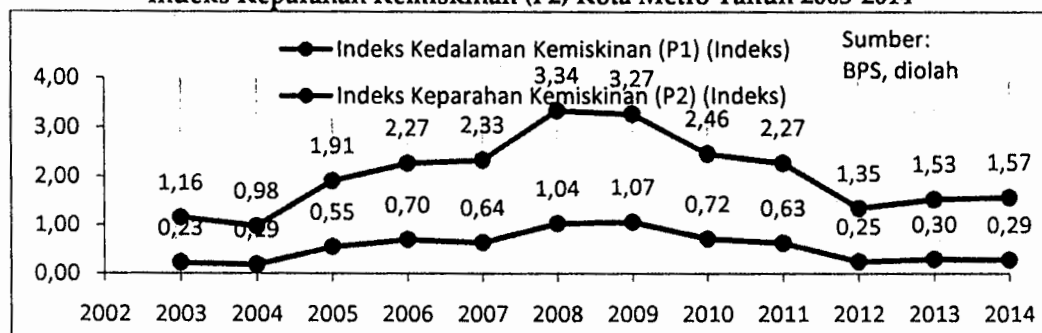


Sumber : BPS

Namun demikian perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Metro selama periode 2008-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008-2012 P1 dan P2 cenderung mengalami penurunan tetapi pada tahun 2013 P1 mulai mengalami peningkatan dari 1,35 (2012) menjadi 1,53 (2013) dan 1,57 (2014). Demikian pula halnya dengan P2 yang mengalami peningkatan dari 0,25 (2012) menjadi 0,30 (2013) dan 0,29 (2014). Hal ini perlu diwaspadai karena meningkatnya P1 dan P2 menunjukkan semakin lebarnya ketimpangan antara penduduk miskin dan penduduk miskin dikhawatirkan

semakin jatuh ke jurang kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Metro Tahun 2008-2014 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Metro Tahun 2003-2014

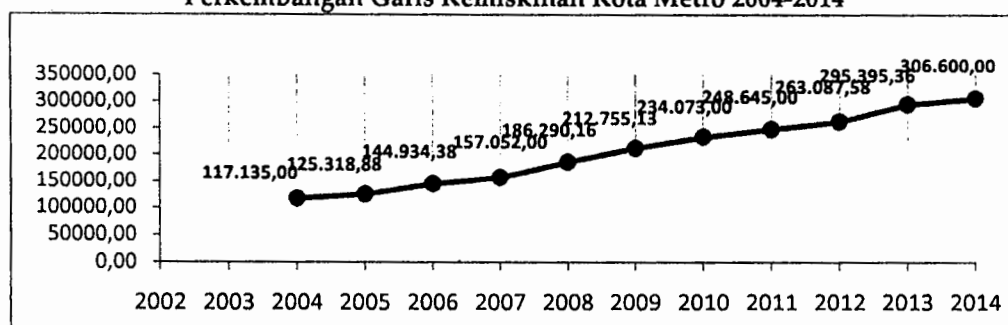


Sumber : BPS

Persentase penduduk miskin diukur dengan menggunakan pendekatan tingkat konsumsi yaitu tingkat konsumsi 2.100 kkal per kapita per hari. Artinya apabila tingkat konsumsi penduduk kurang dari 2.100 kkal per hari, maka dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah konversi tingkat konsumsi menjadi pendapatan yang kemudian dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Apabila pendapatan penduduk kurang dari angka pendapatan tersebut, maka dapat dikategorikan berada di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kota Metro selama periode 2004-2014 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 garis kemiskinan Kota Metro meningkat dari Rp 295.395,- (2013) menjadi Rp 306.600,-. Untuk lebih jelasnya perkembangan garis kemiskinan Kota Metro 2004-2014 dapat dilihat pada gambar 2.5.

Gambar 2.5
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Metro 2004-2014



Sumber : BPS

Berdasarkan data PPLS 2011, penyebaran individu dan rumah tangga miskin (RTM) di Kota Metro tidak merata dan terpusat di Kecamatan Metro Pusat.

Jumlah individu, jumlah rumah tangga miskin per kecamatan di Kota Metro berdasarkan basis data terpadu (PPLS 2011) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Jumlah Individu, Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) per-Kecamatan di Kota Metro Berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah RTM	Persentase RTM	Persentase RTM
1	Metro Pusat	12.174	36,75	2.957	34,73
2	Metro Utara	6.120	18,47	1.638	19,24
3	Metro Barat	3.862	11,66	1.024	12,03
4	Metro Timur	6.945	20,96	1.788	21,00
5	Metro Selatan	4.027	12,16	1.108	13,01

Sumber : Basis Data Terpadu (PPLS 2011)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah RTM terbanyak terdapat di kecamatan Metro Pusat sebesar 38,71% dan Metro Timur sebesar 20,26%. Sedangkan kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan memiliki jumlah RTM yang relatif kecil yaitu 12,17% dan 12,38%. Hal ini dikarenakan wilayah kecamatan Metro Pusat dan Metro Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dan menjadi pusat aktifitas perekonomian dan perdagangan yang memiliki daya tarik sehingga banyak didatangi dan dihuni oleh penduduk miskin yang berusaha mencari penghasilan dan bermata pencaharian terutama di sektor informal.

d. Pertumbuhan PDRB dan PDRB Per-Kapita

Indikator perekonomian yang dikenal secara luas untuk mengukur hasil-hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB tersebut selain dapat diketahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat dilihat kontribusi masing-masing sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperlihatkan oleh kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Dalam kurun waktu tahun 2010-2015, kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Metro berfluktuasi pada kisaran 5,49 persen sampai dengan 6,77 persen. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2013 (6,77 persen), sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2015 (5,49 persen). Laju pertumbuhan ekonomi Kota Metro tahun 2015 sebesar 5,49 persen. Pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hal ini terjadi sesuai dengan perlambatan ekonomi nasional.

Tabel 2.10
PDRB data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro 2010-2015 (Tahun Dasar 2010)

Tahun	PDRB Kota Metro (Rp. Miliar)		Laju Pertumbuhan (%)
	2010	2011	
2010*	2.542.072,2	2.542.072,2	-
2011*	2.841.590,5	2.695.657	6,04
2012*	3.191.358,3	2.876.024,8	6,69
2013*	3.531.720,0	3.070.593,1	6,77
2014**	4.004.622,1	3.268.892,2	6,46
2015***	4.325.796,4	3.448.505,0	5,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro

Catatan : * Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

*** Angka Sangat Sementara

Salah satu sisi untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pendapatan perkapita yang ditunjukkan oleh nilai PDRB perkapita. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya, dimana pada tahun 2010 PDRB perkapita Kota Metro sebesar 17.413.200 rupiah menjadi 25.672.000 rupiah pada tahun 2014.

Tabel 2.11
PDRB per Kapita Kota Metro Tahun 2010-2014

No	Tahun	PDRB per Kapita (Rp. Miliar)
1.	2010	17.413,2
2.	2011	19.124,2
3.	2012	21.118,5
4.	2013*	23.005,4
5.	2014**	25.672,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2015

Catatan : * Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

Dalam beberapa analisis, kegiatan ekonomi sering dikelompokkan berdasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi. Berdasarkan output dan inputnya kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu :

1. *Sektor primer*, mencakup sektor pertanian dan sektor pertambangan/penggalan. Input kelompok ini berasal dari alam.
2. *Sektor Sekunder*, mencakup sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor bangunan. Input sektor ini berasal dari sektor primer.

3. *Sektor Tersier*, mencakup sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Input sektor ini berasal dari sektor sekunder dengan outputnya berupa jasa-jasa.

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB Kota Metro sebagian besar dibentuk oleh sektor tersier yaitu sebesar 82,34 persen dari total PDRB Kota Metro. Hal ini sesuai dengan status Kota Metro sebagai daerah perkotaan yang telah maju, yang biasanya didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa.

Tabel 2.12
Distribusi Persentase Kelompok Sektor Terhadap PDRB Kota Metro
Tahun 2010-2015 (Tahun Dasar 2010)

No	Urutan Sektor	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Primer	6,58	6,53	6,4	6,2	5,98	2,75
2	Sekunder	17,21	16,94	16,93	16,82	16,69	10,98
3	Tersier	76,21	76,53	76,67	76,98	77,33	86,27
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metr, 2016

Catatan : * Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

*** Angka Sangat Sementara

- e. Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke Tahun Dasar 2010
- Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009.

Tabel 2.13
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian	B. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan	C. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	D. Pengadaan Listrik dan Gas
	E. Pengadaan Air
5. Konstruksi	F. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan

	Sepeda Motor
7. Pengangkutan dan Komunikasi	H. Transportasi dan Pergudangan
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	J. Informasi dan Komunikasi
8. Keuangan, Real estat, dan jasa perusahaan	K. Jasa Keuangan
	L. Real Estat
	M,N. Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	P. Jasa Pendidikan
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	R,S,T,U. Jasa Lainnya

f. Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Metro telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Metro.

Tabel 2.14
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2010–2015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,58	6,53	6,40	6,20	5,98	2,75
B Pertambangan dan Penggalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Industri Pengolahan	17,03	16,77	16,77	16,67	16,54	7,57
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	3,21
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,20
F Konstruksi	6,72	6,52	6,40	6,12	6,34	2,65
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,91	19,88	19,33	18,73	18,31	0,15
H Transportasi dan Pergudangan	7,01	6,77	6,62	6,99	7,27	13,08
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,31	2,47	2,47	2,43	2,47	11,15
J Informasi dan Komunikasi	6,43	6,33	6,59	6,61	6,40	9,36
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,17	7,42	7,78	8,07	8,05	2,39
L Real Estat	6,00	6,08	5,97	5,94	6,01	6,49
M, N Jasa Perusahaan	0,53	0,58	0,60	0,65	0,73	7,47
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,50	7,38	7,70	8,05	8,29	5,39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
P Jasa Pendidikan	4,97	5,29	5,67	5,93	5,92	7,25
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,08	5,30	5,18	5,18	5,25	7,55
R, S, T, Jasa lainnya U	2,58	2,51	2,36	2,28	2,27	8,92
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100

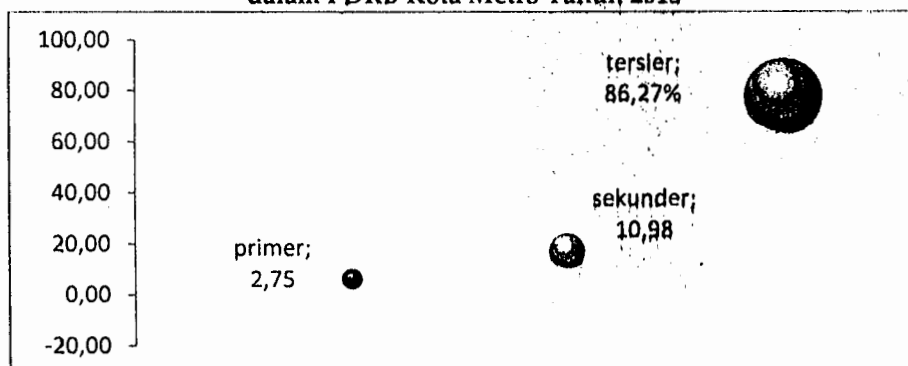
Sumber : BPS Kota Metro

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, kemudian lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha Jasa Lainnya, dan lapangan usaha Industri Pengolahan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 7 persen.

Gambar 2.6
Kontribusi Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier
dalam PDRB Kota Metro Tahun 2015



Sumber : BPS Kota Metro

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, kontribusi lapangan usaha terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Metro dari lapangan usaha Tersier atau Jasa – Jasa, mulai dari kategori F hingga kategori U. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan usaha jasa – jasa berkembang pesat di Kota Metro, oleh sebab itu pemerintah daerah perlu memperhatikan fasilitas pendukung agar lapangan usaha ini dapat berkembang lebih pesat lagi.

g. Laju Inflasi

Selama tahun 2015 tingkat inflasi di Kota Metro senilai 2,67%, angka ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 7 (tujuh tahun terakhir).

Tabel 2.15
 Nilai Inflasi Tahun Kalender di Kota Metro,
 Kota Bandarlampung dan Indonesia Tahun 2009-2015

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Metro	3,07	8,18	3,40	3,85	7,40	6,50	2,67
Kota Bandarlampung				4,30	7,56	8,36	4,68
Indonesia				4,30	8,38	8,36	3,35

Sumber : BPS Kota Metro, 2013

Pada tabel di atas terlihat bahwa setiap tahunnya angka inflasi di Kota Metro relatif selalu lebih rendah dibandingkan angka inflasi di Kota Bandarlampung maupun nasional.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variable aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan :

- A. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 1. Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan karena peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar

pembangunan sehingga peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa besar persentase penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang disebut dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Selain itu APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS Kota Metro tahun 2010 s.d 2014 per jenjang pendidikan disajikan dalam Tabel 2.16 berikut.

Tabel. 2.16
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Metro Tahun 2010-2014

		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	14.890	15.053	15.138	15.453	15.659
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	15.135	15.191	15.297	15.453	15.659
1.3	APS SD/MI	98,38	99,09	98,96	100,00	100,00
2	SMP/MTS					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	7.959	7.975	8.254	8.379	8.489
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.389	8.448	8.480	8.472	8.489

2.3	APS SMP/MTs	94,87	94,40	97,34	98,90	100,00
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	7.373	7.744	7.537	7.951	8.196
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9.701	9.704	9.716	9.762	9.827
3.3	APS SMA	76,00	79,80	77,57	81,45	83,40

Sumber : BPS Kota Metro

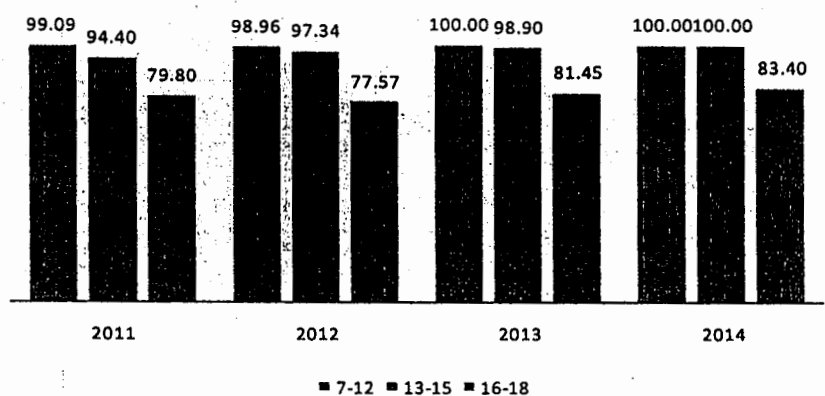
Dari tabel 2.16 dapat dilihat bahwa secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah partisipasi penduduk untuk bersekolah. Fenomena ini dapat disebabkan karena semakin tinggi suatu jenjang pendidikan maka semakin tinggi pula kualifikasi yang dibutuhkan baik secara intelektual maupun ekonomi. Selain itu dengan masuknya mereka dalam dunia kerja berdampak pula pada menurunnya angka partisipasi sekolah.

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 dan 2014 APS penduduk usia 7-12 tahun mencapai 100 persen yang berarti semua penduduk pada kedua kelompok usia tersebut sudah mengenyam pendidikan setingkat SD/MI. Demikian pula APS penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,1% dari 98,90% (2013) meningkat menjadi 100%. Hal ini berarti bahwa semua penduduk usia 13-15 pada tahun 2014 sudah mengenyam pendidikan setingkat SMP/MTS.

Berdasarkan Gambar 2.7 dapat pula dilihat bahwa di tahun 2014 terjadi kenaikan APS SMA sebesar 1,95% dari 81,45 menjadi 83,40. Bila dilihat dari perkembangannya ternyata pada tahun 2013 pada jenjang pendidikan usia 16-18 tahun juga terjadi kenaikan yang cukup tinggi yakni sekitar 3,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2012) yang sebesar 77,57 persen. Hal ini menunjukkan perkembangan yang baik karena jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang SMA semakin tinggi.

Gambar 2.7

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Metro Tahun 2011 s.d 2014 (Persen)



Sumber : BPS Kota Metro

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan bahwa siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. APK menurut kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Metro tahun 2010 s.d. 2014 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kelompok Usia Sekolah
di Kota Metro Tahun 2010—2014

No	Kelompok Usia Sekolah	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	SD/MI (7-12 tahun)	101,32	101,32	101,19	102,49	111,12

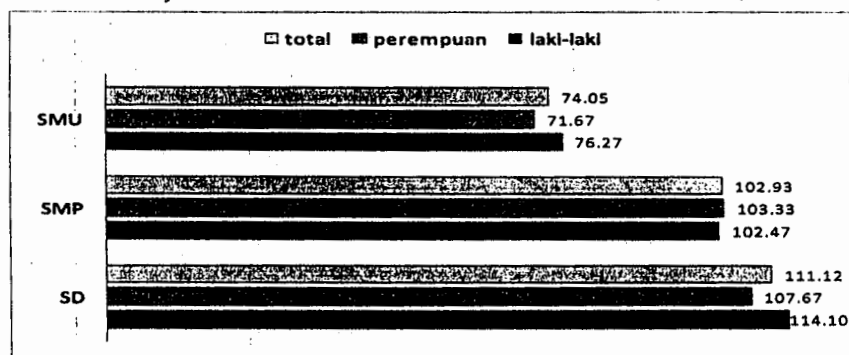
2.	SMP/MTs (13-15 tahun)	83,12	91,21	106,22	112,89	102,93
3.	SMA/MA/SMK (16-18 tahun)	93,53	84,95	79,54	70,39	74,05

Sumber : BPS Kota Metro

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa pada tahun 2013, nilai APK SD Kota Metro sebesar 102,49 persen yang artinya dari 100 penduduk usia sekolah pada jenjang SD/MI (7-12 tahun) terdapat 102 murid SD/MI, tanpa melihat usianya. Nilai APK SD/MI di Kota Metro ternyata lebih kecil dibandingkan dengan APK SMP/MTs. Hal ini bisa disebabkan adanya kebijakan Dinas Pendidikan yang mensyaratkan bahwa jika ingin memasuki jenjang pendidikan SD minimal harus berusia 7 (tujuh) tahun.

Dalam perkembangannya, pada tahun 2014 nilai APK SD/MI meningkat dari 102,49 menjadi 111,12. Demikian pula nilai APK SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari 70,39 di tahun 2013 menjadi 74,05 di tahun 2014. Namun sebaliknya untuk APK SMP/MTs terjadi penurunan dari 112,89 di tahun 2013 menjadi 102,93 di tahun 2014.

Gambar 2.8
Angka Partisipasi Kasar Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Metro Tahun 2014 (Persen)



Sumber : BPS Kota Metro

Berdasarkan Gambar 2.8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 APK SD dan SMU untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang artinya partisipasi penduduk laki-laki yang sedang mengenyam pendidikan SD dan SMU lebih banyak dibandingkan dengan partisipasi penduduk perempuan. Sedangkan untuk APK SMP untuk laki-laki dan perempuan relatif tidak berbeda jauh yaitu masing-masing sebesar 102,47 dan 103,33. Angka Partisipasi Kasar Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Metro Tahun 2014 secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.8

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. APM Kota Metro tahun 2010 s.d. 2014 disajikan dalam Tabel 2.18 berikut.

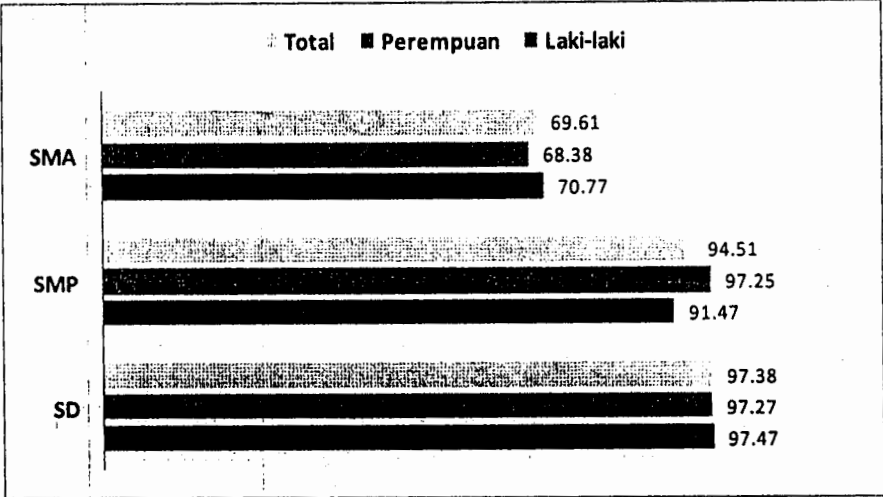
Tabel 2.18
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Metro
Tahun 2010 s.d 2014

No.	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	SD/MI (7-12 tahun)	95,10	92,52	91,98	96,11	97,38
2.	SMP/MTs (13-15 tahun)	71,63	68,91	83,24	95,18	94,51
3.	SMA/MA/SMK (16-18 tahun)	67,51	62,03	62,57	66,09	69,61

Sumber : BPS Kota Metro

Pada tahun 2013, APM SD/MI Kota Metro adalah 96,11 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, sekitar 96 orang bersekolah di bangku SD/MI. APM SD/MI tersebut meningkat di tahun 2014 yaitu menjadi 97,38 persen. Demikian pula dengan APM SMA/MA/SMK yang pada tahun 2013 adalah sebesar 66,09 kemudian meningkat menjadi 69,61 persen di tahun 2014. Sebaliknya terjadi penurunan APM SMP/MTs dari 95,18 persen di tahun 2013 menjadi 94,51 persen di tahun 2014. Dari Gambar 2.18 dapat diperoleh gambaran bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah Angka Partisipasi Murninya.

Gambar 2.9
Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut
Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin
di Kota Metro Tahun 2014 (Persen)



Sumber : BPS Kota Metro

Gambar 2.9 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Metro Tahun 2014. Berdasarkan Gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 APM SD untuk perempuan dan laki-laki relatif sama yaitu 97,27 dan 97,47. Sedangkan APM SMP untuk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Namun sebaliknya di tingkat SMA, APM untuk laki-laki (70,77) lebih tinggi dibandingkan dengan APM perempuan (68,38).

d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kota Metro per jenjang pendidikan selama kurun waktu 2010-2014.

Tabel. 2.19
Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah di Kota Metro Tahun 2010-2014

		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI					
1.1	Jumlah sekolah	64	64	64	66	66
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	15.135	15.191	15.297	15.453	15.659
1.3	Perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah	1 : 236,48	1 : 237,36	1 : 239,02	1 : 234,14	1 : 237,26

	penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
2	SMP/MTS					
2.1	Jumlah sekolah	29	30	30	29	29
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.389	8.448	8.480	8.472	8.489
2.3	Perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	1 : 289,28	1 : 281,60	1 : 282,67	1 : 292,14	1 : 292,72
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah sekolah	39	40	40	42	44
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9.701	9.704	9.716	9.762	9.827
3.3	Perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	1 : 248,74	1 : 242,60	1 : 242,90	1 : 232,43	1 : 223,34

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro, BPS Kota Metro

Selama kurun waktu 2010-2012 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah SD/MI. Namun pada tahun 2013 terdapat penambahan jumlah sekolah SD/MI, dari 64 menjadi 66 sehingga rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI meningkat dari 1 : 239,02 di tahun 2012 menjadi 1 : 234,14 dan di tahun 2014 adalah sebesar 1 : 237,26. Angka rasio ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/MI menampung sebanyak 237 siswa.

Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTS mengalami peningkatan selama kurun 2010-2012 namun pada tahun berikutnya terjadi penurunan dari 1 : 282,67 di tahun 2012 menjadi 1 : 292,14 di tahun 2013 dan 1 : 292,72 di tahun 2014. Hal ini dapat disebabkan berkurangnya jumlah sekolah SMP/MTS yang ada yaitu sebelumnya 30 sekolah di tahun 2012 menjadi 29 sekolah di tahun 2013 dan tahun 2014.

Berbeda dengan SD/MA dan SMP/MTS rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK selama kurun waktu 2010-2014 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 1 : 248,74 pada tahun 2010 menjadi 1 : 232,43 pada tahun 2013 dan 1 : 223,34 pada tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan jumlah sekolah SMA/MA/SMK.

e. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Selama kurun waktu 2010-2013 rasio ketersediaan guru di Kota Metro untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS mengalami penurunan. Namun kemudian di tahun 2014 rasio ketersediaan guru SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan karena rasionya semakin kecil. Artinya ketersediaan tenaga pengajar per 10.000 murid jumlahnya semakin memadai. Pada tahun 2013, perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid SMA/MA/SMK adalah 1 : 9,53. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 guru SMA/MA/SMK melayani (mengajar) 9,53 ~ 10 orang murid SMA/MA/SMK. Pada tahun 2014 rasion tersebut hampir sama yaitu sebesar 1 : 9,30. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan guru dan murid di Kota Metro per jenjang pendidikan selama kurun waktu 2010-2014.

Tabel. 2.20
Perbandingan Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Metro Tahun 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI					
1.1	Jumlah guru	1.512	1.230	1.225	1.028	1.240
1.2	Jumlah murid	15.380	18.883	18.883	19.387	17.323
1.3	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	1 : 14,62	1 : 15,35	1 : 15,41	1 : 18,86	1 : 13,97
2	SMP/MTS					
2.1	Jumlah guru	959	997	997	950	918
2.2	Jumlah murid	9.540	9.512	9.512	10.705	11.294
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah guru	1.512	1.549	1.549	1.622	1.622
3.2	Jumlah murid	15.380	16.017	16.017	15.452	15.077

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro

f. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata

Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah kelas serta perbandingan jumlah murid terhadap jumlah kelas sangat mempengaruhi proses belajar mengajar dan keberhasilan pendidikan. Berikut disajikan data perbandingan jumlah guru per kelas rata-rata terhadap jumlah murid di Kota Metro tahun 2010-2014.

Tabel. 2.21
Rasio Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Metro
Tahun 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI					
1.1	Jumlah guru	1.512	1.230	1.225	1.028	1.181
1.2	Jumlah kelas	619	651	658	706	706
1.3	Rasio jumlah guru terhadap jumlah kelas	1 : 2,44	1 : 1,89	1 : 1,86	1 : 1,46	1 : 1,67
1.4	Jumlah murid	15.380	18.883	18.883	19.387	17.019
1.5	Rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas	1 : 24,85	1 : 29,01	1 : 28,70	1 : 27,46	1 : 24,11
1.6	Rasio guru/kelas terhadap jumlah murid	1 : 2,44 : 24,85	1 : 1,89 : 29,01	1 : 1,86 : 28,70	1 : 1,46 : 27,46	1 : 1,67 : 24,11
2	SMP/MTS					
2.1	Jumlah guru	959	997	997	950	1.212
2.2	Jumlah kelas	132	298	298	341	341
2.3	Rasio jumlah guru terhadap jumlah kelas	1 : 7,27	1 : 3,35	1 : 3,35	1 : 2,79	1 : 3,55
2.4	Jumlah murid	9.540	9.512	9.512	10.705	12.361
2.5	Rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas	1 : 72,27	1 : 31,92	1 : 31,92	1 : 31,39	1 : 36,25
2.6	Rasio gur/kelas terhadap jumlah murid	1 : 7,27 : 72,27	1 : 3,35 : 31,92	1 : 3,35 : 31,92	1 : 2,79 : 31,39	1 : 3,55 : 36,25
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah guru	1.512	1.549	1.549	1.622	1.638
3.2	Jumlah kelas	366	487	487	473	516
3.3	Rasio jumlah guru terhadap jumlah kelas	1 : 4,13	1 : 3,18	1 : 3,18	1 : 3,43	1 : 3,17
3.4	Jumlah murid	15.380	16.017	16.017	15.452	15.137
3.5	Rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas	1 : 42,02	1 : 32,89	1 : 32,89	1 : 32,67	1 : 29,34
3.6	Rasio guru/kelas terhadap jumlah murid	1 : 4,13 : 42,02	1 : 3,18 : 32,89	1 : 3,18 : 32,89	1 : 3,43 : 32,67	1 : 3,17 : 29,34

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro

g. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Angka putus sekolah di Kota Metro sangat rendah. Data mengenai jumlah siswa putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Metro disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.22
GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO

Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Metro
Tahun 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI					
1.1	Jumlah siswa putus sekolah	2	6	6	0	0
1.2	Jumlah seluruh siswa	15.380	18.883	18.883	19.387	17.323
1.3	Angka Putus Sekolah (persentase)	0,01	0,03	0,03	0	0
2	SMP/MTS					
2.1	Jumlah siswa putus sekolah	8	11	11	0	0
2.2	Jumlah seluruh siswa	9.540	9.512	9.512	10.705	11.294
2.3	Angka Putus Sekolah (persentase)	0,08	0,11	0,11	0	0
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah siswa putus sekolah	121	58	58	0	0
3.2	Jumlah seluruh siswa	15.380	16.017	16.017	15.452	15.077
3.3	Angka Putus Sekolah (persentase)	0,79	0,36	0,36	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro

Berdasarkan data di atas, angka putus sekolah terkecil ada pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu berkisar 0,01 dan 0,03. Sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mencapai 0,79 di tahun 2010, namun di tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,36. Sebaliknya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan dari 0,08 di tahun 2010 menjadi 0,11 di tahun 2011 dan 2012. Peningkatan angka putus sekolah ini kemungkinan disebabkan oleh biaya pendidikan yang cukup tinggi sehingga sejumlah siswa tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah. Namun demikian, pada tahun 2013 dan 2014 angka putus sekolah di Kota Metro relatif tidak ada.

2. Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang mendasar dan harus dipenuhi oleh Pemerintah. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan umum di bidang kesehatan, diantaranya dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

a. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, maka akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Jumlah rumah sakit di Kota Metro pada tahun 2010-2014 sebanyak 7 unit terdiri dari rumah sakit umum daerah 1 unit, rumah sakit swasta 3 unit, rumah sakit bersalin 2 unit, rumah sakit khusus lainnya 1 unit. Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Metro tahun 2013 mencapai 1 : 21.931 penduduk. Hal ini berarti bahwa 1 rumah sakit di Kota Metro melayani 21.931 penduduk. Sedangkan di tahun 2014 rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Metro adalah 1 : 22.285.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rasio ketersediaan rumah sakit di Kota Metro dalam kurun waktu tahun 2010-2014.

Tabel 2.23
Rasio Jumlah Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk di Kota Metro
Tahun 2010-2014

No	Jenis Rumah Sakit	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3	3
3.	Rumah Sakit Bersalin	2	2	2	2	2
4.	Rumah Sakit khusus lainnya	1	1	1	1	1
	Jumlah Rumah Sakit	7	7	7	7	7
	Jumlah Penduduk	145.471	147.050	149.361	153.517	155.992
	Rasio	1 : 20.782	1 : 21.007	1 : 21.337	1 : 21.931	1 : 22.285

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

Indikator-indikator yang dipakai terkait dengan pelayanan di rumah sakit antara lain; pemanfaatan tempat tidur / *Bed Occupancy Rate* (BOR), rata-rata lama hari perawatan / *Average Length of Stay* (ALOS), rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur/*Turn Over Internal* (TOI), presentase pasien keluar yang meninggal/*Gross Death Rate* (GDR), dan presentase pasien yang keluar meninggal <24 jam perawatan/*Net Death Rate* (NDR). Adapun data jumlah ketersediaan tempat tidur dan indikator pelayanan beberapa rumah sakit di Kota Metro pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Indikator Pelayanan Rumah Sakit Kota Metro Tahun 2015

No	Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur	BOR	ALOS	TOI	GDR	NDR
----	-------------	---------------------	-----	------	-----	-----	-----

No	Nama Rumah Sakit	Tempat Tidur	Tempat Tidur per 1000 Penduduk	Tempat Tidur per 1000 Penduduk	Tempat Tidur per 1000 Penduduk	Tempat Tidur per 1000 Penduduk	Tempat Tidur per 1000 Penduduk
1	RSUD A. Yani	233	67,1	3	2	48,6	24,1
2	RSU Mardi Waluyo	200	70,0	3	1	46,2	23,4
3	RSU Islam	63	55,9	3	2	21,9	9,2
4	RSU Muhammadiyah	78	44,2	1	1	2,0	0,5
5	RS AMC	73	83,0	0	1	1,0	0,3
6	RSB Asih	35	9,9	2	8	-	-
7	RSB Permata Hati	31	64,1	3	1	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro, 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa RSUD A. Yani memiliki jumlah tempat tidur terbanyak yaitu 233 unit dan diikuti oleh RSU Mardi Waluyo sebanyak 200 unit. Pemanfaatan tempat tidur rumah sakit (*Bed Occupation Rate/BOR*) di antara rumah sakit di Kota Metro menunjukkan pencapaian yang bervariasi.

- b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Metro pada tahun 2013 mencapai 1 : 5.686. Ini berarti bahwa 1 Puskesmas/Poliklinik/Pustu harus melayani penduduk sebanyak 5.686 jiwa. Sedangkan di tahun 2014 rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Metro adalah 1 : 5.777. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan adalah 2 : 1 yang artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas. Berikut adalah data mengenai rasio puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap Jumlah Penduduk di Kota Metro tahun 2010-2014.

Tabel. 2.24
Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap Jumlah Penduduk di Kota Metro Tahun 2010-2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1.1	Jumlah Puskesmas	11	11	11	11	11
1.2	Jumlah Poliklinik	10	10	10	10	10
1.3	Jumlah Pustu	6	6	6	6	6
1.4	Jumlah Total Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	27	27	27	27	27
	Jumlah Penduduk	145.471	147.050	149.361	153.517	155.992
2.1	Rasio Puskesmas per	1 : 13.225	1 : 13.368	1 : 13.578	1 : 13.956	1 : 14.181

	satuan penduduk					
2.2	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	1 : 14.547	1 : 14.705	: 14.936	1 : 15.352	1 : 155.992
2.3	Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 24.245	1 : 24.508	1 : 24.894	1 : 25.586	1 : 25.999
2.4	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan Penduduk	1 : 5.388	1 : 5.446	1 : 5.532	1 : 5.686	1 : 5.777
3.1	Jumlah Kecamatan	5	5	5	5	5
3.2	Jumlah Desa/Kelurahan	22	22	22	22	22
3.3	Rasio Puskesmas per Kecamatan	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

c. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu fasilitas penunjang kesehatan yang diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi balita. Semakin banyak jumlah ketersediaannya semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio posyandu per satuan balita merupakan rasio dari jumlah posyandu per 1000 balita. Berdasarkan data rasio jumlah posyandu terhadap jumlah balita, pada tahun 2010, rasio posyandu per satuan balita adalah 12,199. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 balita dilayani oleh 12 posyandu. Rasio tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya yaitu menjadi 11 (2013) yang berarti setiap 1000 balita dilayani oleh 11 posyandu. Hal ini dikarenakan jumlah posyandu berkurang sedangkan di sisi lain jumlah balita semakin bertambah. Pada tahun 2014 jumlah posyandu bertambah menjadi 155. Namun demikian rasio posyandu per satuan balita relatif sama seperti tahun sebelumnya yaitu 11. Hal ini dikarenakan meskipun jumlah posyandu bertambah namun di sisi lain jumlah balita juga semakin meningkat.

Tabel. 2.25
Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita
di Kota Metro Tahun 2010-2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Posyandu	152	154	149	149	155
2.	Jumlah Balita	12.460	12.595	12.793	13.651	13.728
3.	Rasio Posyandu per satuan balita (1000)	12	12	12	11	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro, BPS Kota Metro

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2014 terjadi kenaikan jumlah dokter spesialis dan dokter gigi di Kota Metro. Jumlah dokter spesialis meningkat dari 46 menjadi 68 dan jumlah dokter gigi meningkat dari 15 menjadi 20. Berdasarkan perhitungan jumlah dokter per satuan jumlah penduduk maka diperoleh rasio dokter umum di Kota Metro pada tahun 2013 adalah sebesar 59 per 100.000 penduduk sedangkan pada tahun 2014 adalah sebesar 54 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 yang tercantum dalam Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013, rasio dokter umum adalah 40 per 100.000 penduduk. Hal ini berarti rasio dokter umum di Kota Metro telah memenuhi target nasional. Rasio dokter gigi pada tahun 2013 adalah 10 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2014 adalah 13 per 100.000 penduduk, sedangkan target kebutuhan tenaga kesehatan untuk rasio dokter gigi adalah 12 per 100.000 penduduk. Secara umum ketersediaan dan kecukupan dokter di Kota Metro sudah memadai. Adapun rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Metro tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.26
Rasio Jumlah Dokter per 100.000 Penduduk
di Kota Metro Tahun 2010-2014

No.	Kategori	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dokter spesialis	17	43	54	46	68
2.	Dokter umum	64	76	103	90	84
3.	Dokter gigi	18	17	23	15	20
4.	Jumlah penduduk	145.471	147.050	149.361	153.517	155.992
5.	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	12	29	36	30	44
6.	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	44	52	69	59	54
7.	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	12	12	15	10	13

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro, BPS

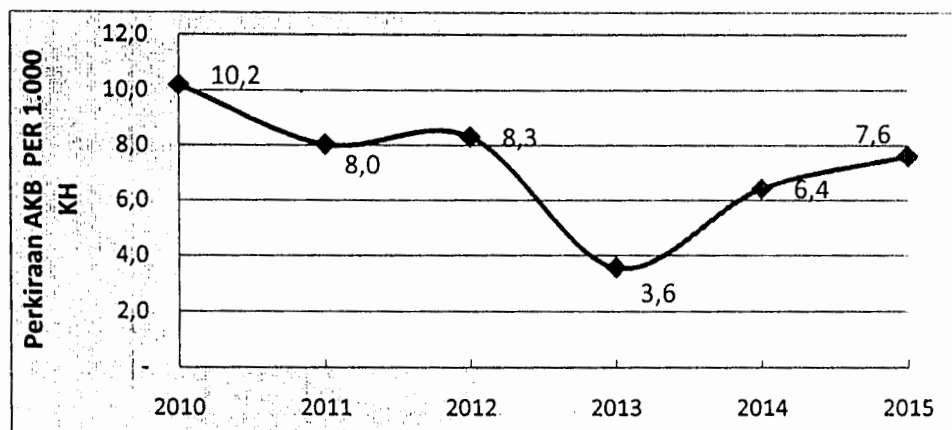
e. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator penting yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi indikator yang sangat sensitif untuk

mengetahui permasalahan kesehatan terutama yang berkaitan dengan penyebab kematian dan tingkat keberhasilan program kesehatan. Selain itu AKB menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Metro, selama kurun waktu 2010-2015 AKB per 1000 KH di Kota Metro berfluktuatif. AKB di Kota Metro sempat mengalami penurunan selama periode 2010-2013 dari 10,2 menjadi 3,6 per 1000 KH. Namun pada tahun 2015 AKB kembali meningkat dua kali lipat menjadi 7,6 per 1000 KH. Kecenderungan angka kematian bayi di Kota Metro selama periode 2010-2015 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.10
Perkiraan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Metro tahun 2010-2015



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

Perhitungan AKB per 1000 KH tersebut merupakan angka perkiraan yang diperoleh berdasarkan jumlah kasus kematian bayi sebelum mencapai usia satu tahun dari jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama. Tahun 2015 terdapat 22 kasus kematian bayi dari 2.888 kelahiran hidup (diperkirakan 7,6 per 1000 KH). Angka tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah kematian bayi sebanyak 22 dari 3.427 kelahiran hidup (diperkirakan 6,4 per 1000 KH) pada tahun 2014 dan 12 kasus kematian bayi dari 3.365 kelahiran hidup (diperkirakan 3,6 per 1000 KH) pada tahun 2013. Tahun 2012 terdapat kasus kematian bayi sebanyak 27 orang dari 3.251 kelahiran hidup (diperkirakan 8,3 per 1000 kelahiran hidup). Angka tersebut menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya dimana pada tahun 2011 terdapat kematian bayi sebanyak 26 orang dari 3.239 kelahiran hidup

(diperkirakan 8 per 1000 kelahiran hidup) dan tahun 2010 terdapat 31 kasus kematian bayi dari 3.039 kelahiran hidup.

Untuk mencapai target *Millenium Development Goals* (MDG), Indonesia berkomitmen menurunkan Angka Kematian Bayi sebesar dua per tiga dari angka di tahun 1990 atau menjadi 20 per 1000 kelahiran bayi pada tahun 2015. Perkiraan AKB Kota Metro sudah melampaui target AKB MDGs 2015 yang sebesar 20 per 1000 kelahiran hidup. Meskipun demikian perlu dicermati bahwa berdasarkan perkembangan AKB selama periode 2010-2015 terlihat adanya peningkatan kematian bayi di tahun 2015 yang perlu diwaspadai dan ditangani secara serius agar tidak kembali meningkat di tahun-tahun mendatang.

Kematian bayi di Kota Metro umumnya terjadi pada masa neonatal (0-28 hari). Hampir 77 % dari seluruh angka kematian bayi di Kota Metro terjadi pada masa neonatal, sedangkan 23 % pada umur 1 bl – 1th. Dari hasil pengkajian kasus kematian neonatal di Kota Metro antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir, kurangnya pengetahuan dan keterampilan bidan dalam mendeteksi dan menangani kasus neonatal resiko tinggi. Adapun penyebab kematian bayi selama tahun 2015 disebabkan karena jantung bawaan 3 kasus, fibris dan kejang 1 kasus dan 1 kasus aspirasi.

Kemampuan tenaga kesehatan dan adanya fasilitas dalam hal perawatan neonatal esensial adalah suatu keharusan dalam upaya penurunan angka kematian bayi. Kemampuan dan fasilitas tersebut meliputi persalinan yang bersih dan aman, stabilitas suhu, inisiasi pernapasan spontan, inisiasi menyusui ASI dini, dan pencegahan infeksi serta pemberian imunisasi. Dari hasil pengkajian kasus kematian banyak faktor yang mempengaruhi bertambahnya kasus kematian neonatal di Kota Metro antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan bidan dalam mendeteksi dan menangani kasus neonatal resiko tinggi sedangkan di tingkat pelayanan rujukan kurangnya kolaborasi di ruang operasi dengan dokter spesialis anak dan kurangnya ruang neonatus yang tersedia baik di Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Swasta.

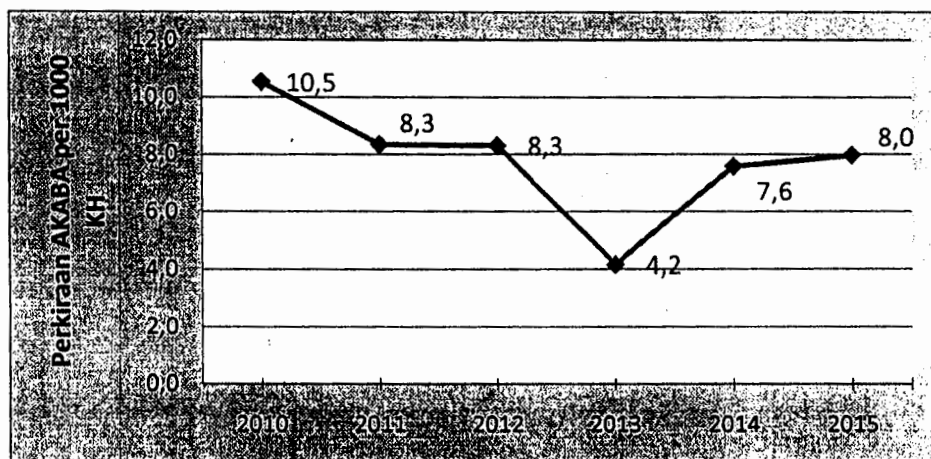
f. Angka Kematian Anak Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (1-<5 tahun) menggambarkan peluang untuk meninggal pada fase antara umur 1 tahun dan sebelum umur 5 tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang

berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi penyakit infeksi dan kecelakaan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Metro, selama kurun waktu 2010-2015, AKABA per 1000 KH mencapai angka tertinggi yaitu 10,5 per 1000 KH pada tahun 2010 dan kemudian menurun menjadi 8,3 per 1000 KH di tahun 2011 dan 2012. Meskipun sempat menurun drastis, namun AKABA per 1000 KH pada tiga tahun berikutnya cenderung meningkat tajam yaitu menjadi 4,2 per 1000 KH (2013), 7,6 per 1000 KH (2014) dan 8,0 per 1000 KH (2015). Data perkiraan AKABA per 1000 KH Kota Metro Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.11
Perkiraan Angka Kematian Akaba per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Metro Tahun 2010-2015



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro (berdasarkan data matematik)

AKABA per 1000 KH di atas diperoleh berdasarkan perhitungan jumlah kasus kematian balita yang meninggal pada fase antara umur 1 tahun dan sebelum umur 5 tahun. Tahun 2015 terdapat 32 kasus kematian balita dari 2.888 kelahiran hidup (diperkirakan 8,0 per 1000 KH) Angka tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah kematian balita sebanyak 26 dari 3.427 kelahiran hidup (diperkirakan 7,6 per 1000 KH) pada tahun 2014 dan 14 kasus kematian balita dari 3.365 kelahiran hidup (diperkirakan 4,2 per 1000 KH) pada tahun 2013. Tahun 2012 dan 2011 perkiraan AKB adalah 8,3 per 1000 KH dimana berturut-turut terdapat kasus kematian balita sebanyak 27 orang dari 3.251 kelahiran hidup (2012) dan 27 orang dari 3.239 KH (2011). Angka tertinggi adalah pada tahun 2010 yaitu 32 kasus kematian balita dari 3.039 kelahiran hidup (diperkirakan 10,5 per 1000 KH).

Bila dibandingkan dengan target Nasional AKABA sebesar 23 per 1000 KH maka berdasarkan data di atas AKABA per 1000 KH di Kota Metro sudah lebih baik.

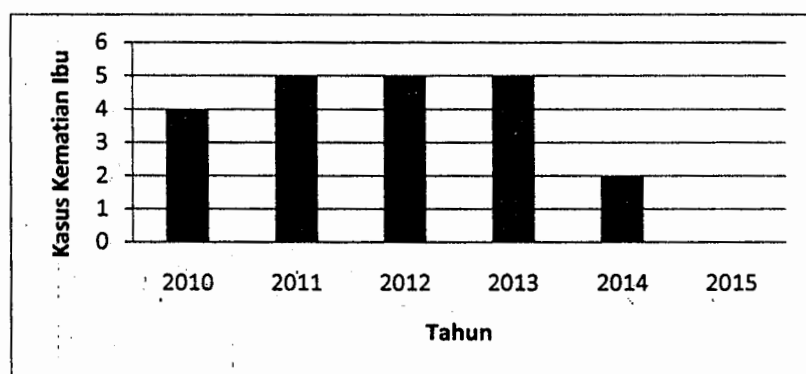
Meskipun demikian melihat kecenderungan perkiraan AKABA per 1000 KH selama 2010-2015 yang semakin meningkat maka perlu perhatian dan penanganan yang lebih serius untuk mencegah terjadinya kematian balita di masa mendatang.

g. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu merupakan cermin status kesehatan masyarakat terutama kesehatan wanita. Angka kematian ibu dapat menggambarkan status gizi, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, serta menunjukkan rendahnya keadaan sosial ekonomi.

Jumlah kasus kematian ibu melahirkan di Kota Metro cenderung menurun selama kurun waktu 2010-2015. Pada tahun 2010 terdapat 4 kasus kematian ibu dari 3.039 KH (diperkirakan 131,6 per 100.000 KH). Pada tahun berikutnya kasus kematian ibu meningkat yaitu masing-masing terdapat 5 kasus kematian dari 3.239 KH, (2011) 3.251 KH (2012) dan 3.365 KH (2013) sehingga berturut-turut perkiraan AKI adalah 154,4 per 100.000 KH, 153,8 per 100.000 KH dan 148,6 per 100.000 KH. Adapun di tahun 2014 terdapat 2 kasus kematian ibu dari 2.888 kelahiran hidup (diperkirakan 58,4 per 100.000 KH) sedangkan di tahun 2015 tidak didapati kasus kematian ibu. Jumlah kasus kematian ibu di Kota Metro tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.12
Kasus Kematian Ibu Kota Metro tahun 2010-2015

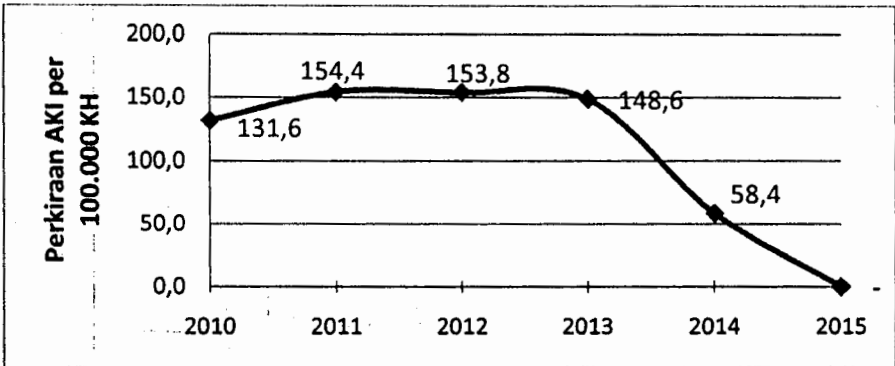


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

Angka kematian ibu secara riil di Kota Metro tidak bisa diperoleh karena Angka Kematian Ibu (AKI) didisain untuk tingkat nasional melalui kegiatan survey,

namun sebagai bahan evaluasi Adapun perkiraan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Kota Metro tergambar di bawah ini:

Gambar 2.13
Perkiraan Angka Kematian Ibu Kota Metro tahun 2010-2015



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro (berdasarkan metode matematik)

h. Morbiditas

Morbiditas atau angka kesakitan dapat diartikan sebagai keadaan sakit yaitu adanya penyimpangan dari keadaan kesehatan yang normal. Angka kesakitan mencerminkan situasi derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah dan berkaitan erat dengan kejadian kematian.

Meningkatnya umur harapan hidup dan perubahan struktur umur penduduk ke arah usia tua menyebabkan terjadinya transisi epidemiologis, yang ditandai dengan masih tingginya penyakit infeksi dan meningkatnya penyakit non infeksi. Gambaran sepuluh besar penyakit pada pasien rawat jalan di puskesmas tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27
Sepuluh Penyakit Terbanyak pada Pasien Rawat Jalan
di Puskesmas Kota Metro Tahun 2015

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH	%
1	Hipertensi	895	23
2	Nesofaringitis akut	556	16
3	Dyspepsia	431	12
4	Infeksi saluran pernafasan akut	392	11
5	Diabetes mellitus	374	10
6	Myalgia	251	7
7	Gastritis	243	7
8	Hypotensi	170	4
9	Arthrosis	149	4
10	Sakit kepala	129	4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Metro, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyakit terbanyak yang diderita oleh pasien rawat jalan di puskesmas didominasi oleh penyakit hipertensi dengan persentase sebanyak 23%. Penyakit infeksi akut lainnya juga merupakan penyakit yang menempati urutan teratas pada 10 penyakit terbanyak yang diderita oleh pasien rawat jalan puskesmas dengan prosentase sebanyak 11%. Meskipun penyakit infeksi masih mendominasi, namun penyakit non-infeksi juga perlu diperhatikan mengingat penyakit hipertensi yang berhubungan dengan faktor perilaku menempati urutan terbesar pasien rawat jalan puskesmas.

Untuk mengetahui gambaran mengenai penyakit terbanyak yang diderita pasien dan memerlukan penanganan di rumah sakit, dapat dilihat dari data sepuluh besar penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di RSUD A. Yani Metro. Tabel 2.28 menyajikan sepuluh penyakit terbanyak yang diderita oleh pasien rawat inap di RSUD A. Yani.

Tabel 2.28
Sepuluh Penyakit Terbanyak Pada Pasien Rawat Inap
RSUD A. Yani Kota Metro Tahun 2015

NO	NAMA PENYAKIT	JUMLAH	(%)
1	Gagal Ginjal Lainnya	994	18.96
2	Demam Berdarah Dengue	603	11.50
3	Diare & Gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu	587	11.20
4	Pneumonia	538	10.26
5	Diabetes Melitus YTT	494	9.42
6	Cedera Intrakranial	458	8.74
7	Stroke tak menyebut perdarahan atau infark	442	8.43
8	Neoplasma Ganas Bronkus dan Paru	418	7.97
9	Perdarahan Intrakranial	358	6.83
10	Dispepsia	348	6.64

Sumber : RSUD A. Yani Kota Metro

Berdasarkan tabel 2.28 dapat dilihat bahwa penyakit gagal ginjal merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh pasien rawat inap yaitu sejumlah 994 pasien atau 18,96% sedangkan demam berdarah dengue menempati posisi kedua terbanyak yaitu 603 pasien atau 11,50%. Melihat perkembangan penyakit tidak menular terutama penyakit gagal ginjal yang cenderung meningkat maka

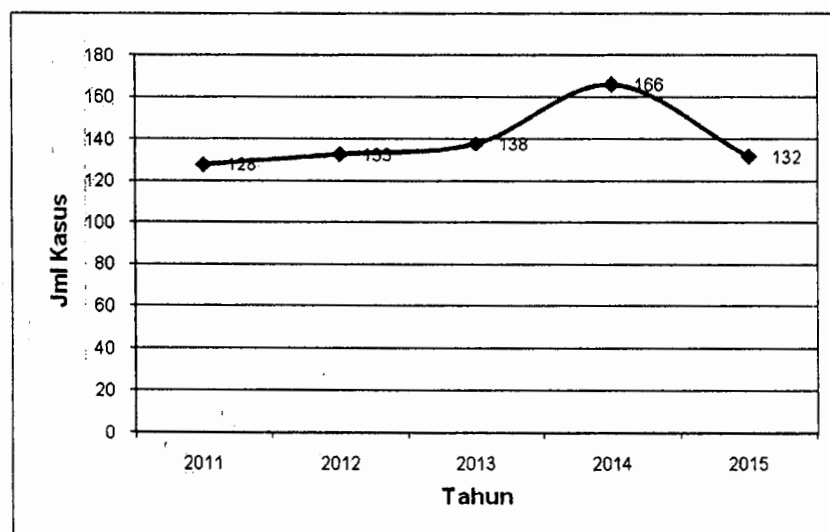
penanganannya perlu dilakukan secara lebih intensif dengan menyediakan fasilitas yang memadai. Secara umum, selama dua dekade terakhir, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, sehingga penyakit tidak menular telah menjadi beban utama. Meskipun demikian beban dari penyakit menular masih cukup berat.

i. Penyakit Menular

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Pneumonia

Pneumonia masih menjadi penyebab kematian bayi dan balita di Indonesia. kematian balita akibat pneumonia pada akhir tahun 2000 di Indonesia diperkirakan sekitar 4,9/1000 balita. (Depkes, 2004). Adapun angka kesakitan diperkirakan mencapai 250 hingga 299 per 1000 anak balita setiap tahunnya. Pneumonia juga sering berada dalam daftar 10 penyakit terbanyak baik di puskesmas maupun rumah sakit. Sebanyak 40 – 60 % kunjungan berobat di Puskesmas dan 15 – 30 % kunjungan berobat di bagian rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit disebabkan oleh ISPA. Episode penyakit batuk pilek pada balita di Indonesia diperkirakan sebesar 3 sampai 6 kali per tahun. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Metro, temuan kasus Pneumonia pada balita selama periode waktu 2011 – 2014 terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2011 dan menurun pada tahun 2015, seperti tergambar dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 2.14
Kasus Pneumonia pada Balita Kota Metro tahun 2011-2015

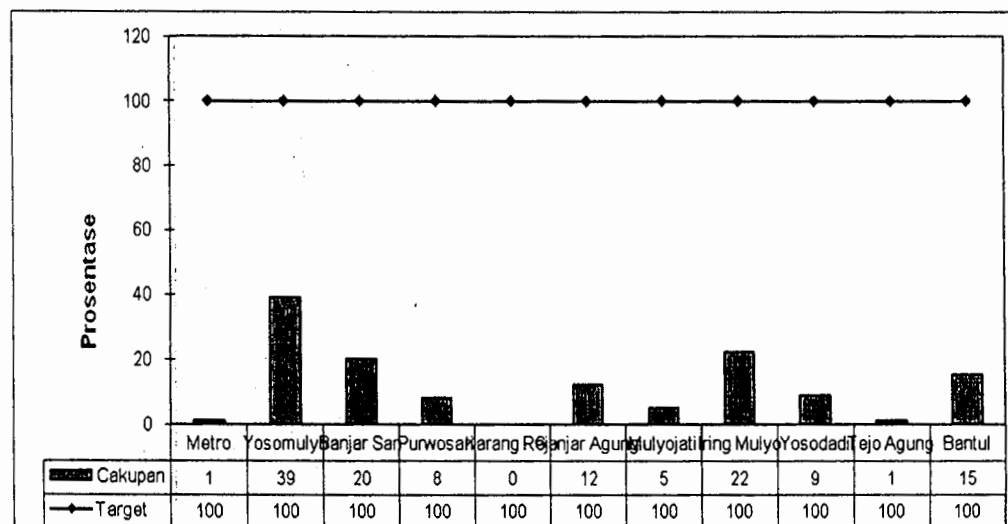


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

Pada tahun 2015 di Kota Metro ditemukan 132 penderita pneumonia balita. Namun penemuan kasus pneumonia tersebut kemungkinan dapat lebih tinggi daripada angka tersebut. Jumlah populasi balita untuk Program P2 ISPA Kota Metro tahun 2015 adalah sebanyak 13.184 jiwa. Sasaran penemuan penderita pneumonia balita Kota Metro tahun 2015 adalah 1.318 kasus (10% dari jumlah balita). Target penemuan penderita pneumonia balita sebesar 10% dari jumlah sasaran (1.318 kasus). Adapun realisasi temuan penderita pneumonia pada balita tahun 2015 adalah sebanyak 132 kasus, yang artinya realisasi penemuan dan penanganan penderita pneumonia hanya sebesar 10 % dari jumlah sasaran. Hal ini dapat disebabkan karena tenaga kesehatan yang telah dilatih Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) tidak melakukan Desinfo kepada petugas lain di Puskesmas dalam rangka penjangkaran kasus ISPA pneumonia di Puskesmas, atau penyakit pneumonia hanya ada pada pasien dengan jumlah tersebut. Upaya pengendalian penyakit ISPA Pneumonia difokuskan pada upaya penemuan kasus secara dini dan tata laksana kasus yang cepat dan tepat melalui MTBS.

Cakupan penemuan penderita pneumonia pada balita paling banyak terdapat di Puskesmas Yosomulyo sebesar 39 % dan terendah di Puskesmas Karang Rejo sebesar 0%. Realisasi penemuan penderita pneumonia pada balita per-puskesmas dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:

Gambar 2.15
Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita Menurut Puskesmas
Kota Metro Tahun 2015



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

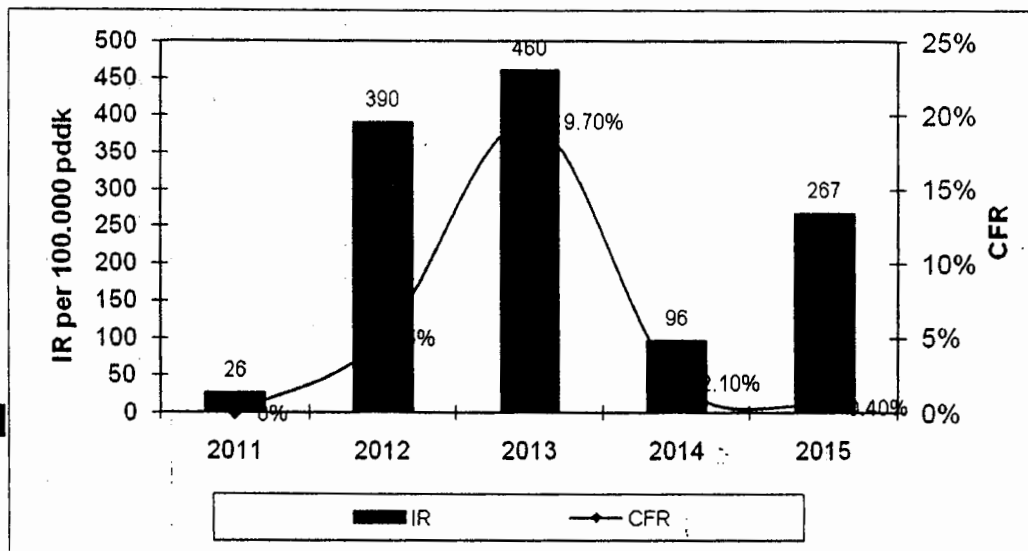
Secara umum realisasi penemuan penderita pneumonia pada balita di Kota Metro masih jauh dari target. Hal ini dapat disebabkan kemungkinan memang tidak ada kasus pneumonia di wilayah puskesmas atau petugas puskesmas belum dapat menemukan kasus balita pneumonia (ketidakmampuan diagnosa).

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* ini berpotensi menimbulkan kepanikan karena penyebarannya yang cepat dan beresiko kematian. Kota Metro merupakan daerah *endemis* DHF atau Demam Berdarah (DBD). Setiap tahun jumlah kasus selalu tinggi dimana *Incidence Rate* pada tahun 2011 sebanyak 26 kasus dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2012 terjadi peningkatan yang sangat tinggi yaitu 390 kasus yang kemudian meningkat lagi pada tahun 2013 dengan 460 kasus. Meskipun pada tahun 2014 jumlah kasus DBD sempat menurun yaitu 146 kasus namun pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 267 kasus.

Adapun *Incidence Rate* (IR) DBD pada tahun 2011 adalah 17,68 per 100.000 penduduk dan tahun 2012 meningkat menjadi 260,5 per 100.000 penduduk, dan meningkat lagi tahun 2013 menjadi 298,6 per 100.000 penduduk dan tahun 2014 menjadi 95,8 per 100.000 penduduk dan tahun 2015 menjadi 173,4 per 100.000 penduduk. Perkembangan jumlah kasus DBD di Kota Metro selama periode waktu 2011–2015 tergambar dalam grafik berikut:

Gambar 2.16
Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk & Case Fatality Rate DBD
Kota Metro tahun 2011-2015

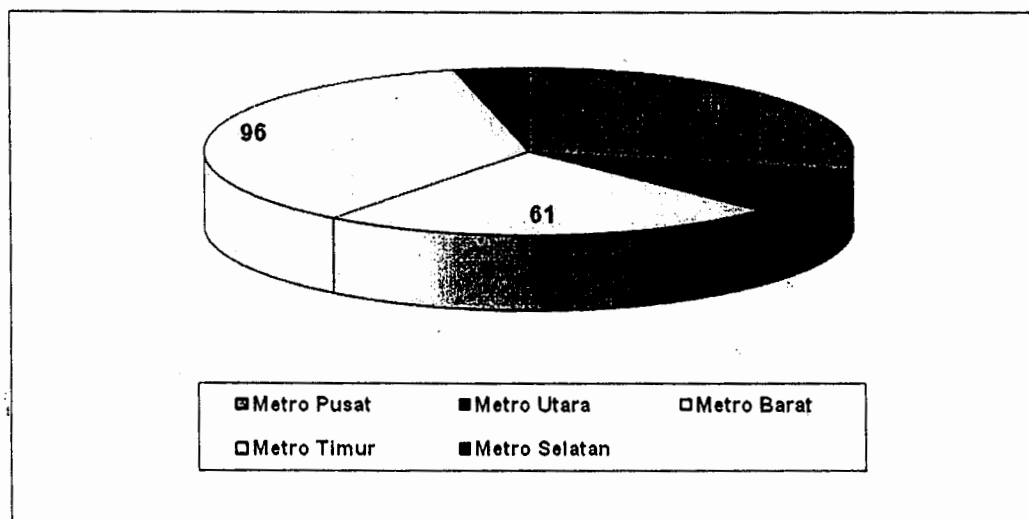


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

Incidence rate DBD pada tahun 2015 meningkat dan *Case Fatality Rate* (CFR) tahun 2015 menurun. *Case fatality Rate* (CFR) menunjukkan keganasan suatu penyakit juga untuk menilai kualitas penanganan yang dilakukan (Roestam, A UI 2009). Pada tahun-tahun sebelumnya CFR akibat penyakit DBD di Kota Metro selalu di bawah target nasional yaitu <2,5%. Pada tahun 2011 meningkat 9,9 % pada tahun 2012 dan tahun 2013 meningkat sangat tinggi dan pada tahun 2014 menurun menjadi 2,1 % dan menurun lagi pada tahun 2015 menjadi 0,40 %. Hal ini telah mencapai target < 2,5 %.

Jumlah kelurahan yang terkena DBD selama tahun 2011-2015 tersebar di 22 kelurahan dari 5 kecamatan yang ada di Kota Metro. Pada tahun 2015, kecamatan yang mempunyai kasus DBD terbanyak adalah Kecamatan Metro Timur dengan 96 kasus di Puskesmas Ganjar Agung, dan kecamatan dengan jumlah kasus terkecil adalah Kecamatan Metro Selatan sebanyak 10 kasus. Berikut ini adalah gambaran distribusi kasus DBD per kecamatan:

Gambar 2.17
Distribusi Kasus DBD Kota Metro per Kecamatan
Tahun 2015



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

Banyak faktor yang menyebabkan masih banyaknya jumlah penderita DBD antara lain karena kepadatan rumah, mobilitas penduduk, belum optimalnya program pemberantasan vektor (nyamuk *Aedes Aegypti*), dan perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal. Dengan demikian perlu kerjasama antara berbagai elemen baik masyarakat, pemerintah maupun swasta untuk melakukan upaya agar jumlah kasus DBD di Kota Metro dapat ditekan.

Jumlah kasus penyakit DBD cenderung meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Untuk itu perlu adanya kewaspadaan dini pada saat terjadi perubahan musim dari musim panas ke musim hujan, baik pada pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan melalui jaringannya yaitu Puskesmas dan poskeskel serta masyarakat itu sendiri. Diperlukan penanganan yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyakit DBD. Upaya pemberantasan DBD di Kota Metro antara lain dilakukan dengan pembentukan tim pokjanal DBD tingkat kota dan tingkat kecamatan, fogging fokus, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) DBD.

Angka Bebas Jentik (ABJ) merupakan tolok ukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mencegah DBD. Oleh karena itu pendekatan pemberantasan DBD yang berwawasan kepedulian masyarakat merupakan salah satu alternatif pendekatan baru. Surveilans vektor dilakukan melalui kegiatan pemantauan jentik oleh petugas kesehatan maupun juru/kader pemantau jentik (Jumantik/Kamantik). Pengembangan sistem surveilans vektor secara berkala perlu terus dilakukan terutama dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan pola penyebaran kasus. Penemuan penderita secara dini dengan penegakan diagnosa yang tepat juga harus dilakukan untuk memastikan penanganan penderita sehingga dapat menekan angka kematian akibat penyakit DBD.

Tabel 2.29
Realisasi Program P2DBD Kota Metro Tahun 2015

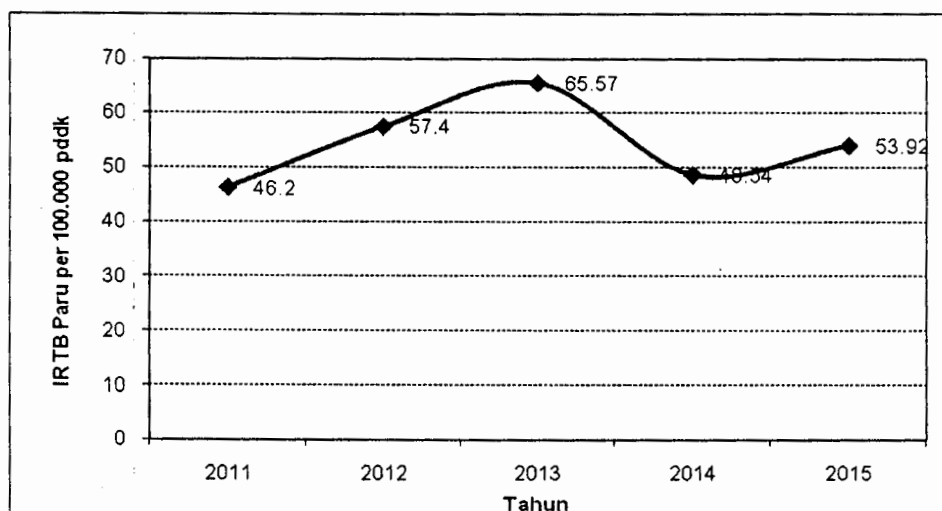
NO	INDIKATOR	TAHUN 2015	
		TARGET	REALISASI
1	Prosentase Kejadian DBD ditangani Sesuai Standard (%)	100%	100 %
2	Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk)	51%	173,4%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

Dari data di atas harus diwaspadai karena angka tersebut masih belum memenuhi target nasional artinya dari kasus TB yang ditemukan dan diobati telah dilakukan manajemen kasus dengan baik tetapi perlu diupayakan lebih maksimal dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pengobatan penderita TB. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan penanggulangan TBC, prioritas ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan, penggunaan obat yang rasional dan paduan obat yang sesuai dengan strategi DOTS.

Penemuan kasus baru penderita baru BTA Positif selama tahun 2011 - 2013 mengalami peningkatan dan menurun tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan. Pada tahun 2011 temuan kasus mencapai 68 kasus (46,2 per 100.000 penduduk), dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan kasus yaitu 86 kasus (57,4 per 100.000 penduduk) dan tahun 2013 menjadi 101 kasus (65,57 per 100.000 penduduk) dan tahun 2014 ada 74 kasus (48,54 per 100.000 penduduk) dan tahun 2015 Gambaran lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.19
Angka Kasus Baru / Incidence Rate TB Paru BTA+ (per 100.000 penduduk) Kota Metro Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

Grafik diatas menggambarkan bahwa secara umum ada penurunan dan peningkatan jumlah kasus selama periode tahun 2010-2015. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan penemuan kasus baru BTA Positif.

Penyakit infeksi menular seksual dan HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang sulit untuk teregistrasi di pelayanan kesehatan karena penderita cenderung untuk tertutup dalam mencari pengobatan penyakitnya. Seperti diketahui bahwa penderita HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, dimana kasus penderita HIV/AIDS yang sebenarnya mungkin lebih banyak dari yang terpantau. Hal ini dikarenakan penderita HIV/AIDS pada umumnya tersembunyi dan menutupi penyakitnya karena masih adanya stigma di masyarakat yang mengucilkan dan mengasingkan penderita HIV/AIDS dari pergaulan. Sebagai gambaran bahwa bila terdapat 1 kasus/penderita HIV/AIDS maka diperkirakan terdapat sekitar 100 orang disekitarnya berpotensi terkena HIV/AIDS.

Perlu diwaspadai dan diantisipasi bahwa penderita HIV/AIDS dari tahun ke tahun di Kota Metro cenderung meningkat. Berdasarkan laporan Sistem Surveillance Terpadu (SST) HIV/AIDS, selama periode 2008-2015 total kasus penyakit HIV/AIDS di Kota Metro yang berhasil terpantau adalah sebanyak 50 kasus (38 laki-laki dan 12 perempuan) dimana 28 orang diantaranya telah meninggal dunia. Pada tahun 2008 dan 2009 terdapat masing-masing 4 kasus dimana semua penderita telah meninggal. Jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun berikutnya cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2010 terdapat 8 kasus (6 diantaranya meninggal), tahun 2011 terdapat 3 kasus (3 meninggal), tahun 2012 terdapat 8 kasus (3 diantaranya meninggal), tahun 2013 terdapat 12 kasus (4 diantaranya meninggal), tahun 2014 terdapat 4 kasus (2 diantaranya meninggal) dan tahun 2015 terdapat 7 kasus (2 diantaranya meninggal). Untuk lebih jelasnya data jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Metro selama periode 2008-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Jumlah Kasus HIV/AIDS Kota Metro
Berdasarkan Laporan Surveilans HIV-AIDS
Tahun 2008-2015

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status	
			Meninggal	HiV

1	2008	4	4	-
2	2009	4	4	-
3	2010	8	6	2
4	2011	3	3	-
5	2012	8	3	5
6	2013	12	4	8
7	2014	4	2	2
8	2015	7	2	5
	Total	50	28	32

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi daerah Kota Metro yang dapat menggambarkan aspek pelayanan umum di bidang urusan pekerjaan umum beberapa diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan mantap dan tidak mantap. Proporsi kondisi mantap di Kota Metro mengalami peningkatan dari 95% (tahun 2010) menjadi 99% (2013). Namun pada tahun 2014 proporsi jalan yang mantap menurun 76% persen. Berikut disajikan data mengenai panjang jaringan jalan di Kota Metro berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2010-2014.

Tabel 2.30
Proporsi Jaringan Jalan di Kota Metro Berdasarkan Kondisi
Tahun 2010 s.d. 2014

	Kondisi	Panjang Jalan (km)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kondisi Mantap (km)	375,45	374,7	376,4	388,36	313,54
3.	Kondisi Tidak Mantap (km)	17,6	18,35	16,65	4,69	99,18

5.	Jalan Secara Keseluruhan	393,05	393,05	393,05	393,05	412,72
	Proporsi Kondisi Mantap (%)	95	96	95	99	76
	Proporsi Kondisi Tidak Mantap (%)	5	4	5	1	24

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro

b. Kondisi Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan Irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air. Pengaturan air meliputi penyediaan, pengambilan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaan. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Panjang total jaringan irigasi Kota Metro pada tahun 2015 adalah sepanjang 217,453 km yang terdiri dari saluran primer 20,007 km, saluran sekunder 30,53 km, dan saluran tersier 166,916 km. Jaringan irigasi primer di Kota Metro adalah yang berasal dari jaringan irigasi sungai Way Sekampung dan Kali Bunut. Jaringan irigasi yang ada di Kota Metro merupakan jaringan irigasi yang dibangun pada jaman Belanda. Kondisi jaringan irigasi di Kota Metro Tahun 2013 disajikan dalam tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31
Kondisi Jaringan Irigasi di Kota Metro Tahun 2015

No.	Jenis Jaringan	Kondisi Jaringan Irigasi			Total Panjang (km)
		Saluran Primer	Saluran Sekunder	Saluran Tersier	
1.	Jaringan Tersier	52,212 km 31,28 (%)	57,502 km 34,45 (%)	57,502 km 34,27 (%)	166,916 km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro

Tabel 2.31 menunjukkan bahwa jaringan irigasi tersier di Kota Metro yang kondisinya baik adalah 31,28% atau 52,212 km dari total panjang 166,916 km.

Kondisi Kota Metro terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik atau introduksi) guna mendukung manfaat langsung

dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan.

Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaan RTH diantaranya adalah fungsi ekologis, sosial, ekonomi, arsitektural dan nilai estètika. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit adalah 30% dimana 10% diantaranya adalah RTH private (RTH yang berada di lahan milik pribadi seperti rumah atau kebun) dan 20% adalah RTH publik. Luas RTH di Kota Metro pada tahun 2015 adalah sebesar 24,5% atau seluas 1.684 ha dari total luas Kota Metro 6.874 ha.

Tabel 2.32
Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah
Di Kota Metro Tahun 2010 s.d 2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	1.512 ha	1.512 ha	1.650 ha	1.650 ha	1.650 ha	1.684 ha
2.	Luas wilayah (ha)	6.874 ha	6.874 ha	6.874 ha	6.874 ha	6.874 ha	6.874 ha
3.	Persentase	22%	22%	24%	24%	24%	24,5%

Sumber : Bappeda Kota Metro

b. Rasio Bangunan yang Memiliki IMB per Satuan Bangunan

Setiap orang/badan usaha di Kota Metro yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini untuk pengendalian pemanfaatan ruang.

Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Metro adalah sebanyak 4.250 unit di tahun 2012 dan 4.513 unit di tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah bangunan di Kota Metro yang telah ber-IMB adalah baru mencapai 12,80 persen atau unit dari total jumlah bangunan 42.324. Sedangkan tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 13,12%.

Tabel 2.33
Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Metro
Tahun 2012 s.d 2015

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	4.250	4513	5418	5683
2.	Jumlah Bangunan	40.951	42.825	42.324	43.325
3.	Persentase Bangunan ber-IMB	10,39%	10,79%	12,80%	13,12%

Sumber : Dinas Tata Kota dan Pariwisata Metro, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan pelayanan umum urusan perumahan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase luas permukiman yang tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Penataan permukiman merupakan salah satu masalah yang ditangani oleh pemerintah Kota Metro terkait dengan permukiman. Persentase luas pemukiman yang tertata di Kota Metro tahun 2010 -2013 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.34
Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kota Metro
Tahun 2010 s.d. 2013

No	Kategori	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1.	Luas area permukiman tertata (ha)	1.947	2.654	2.654	2.671
2.	Total luas area permukiman (ha)	2.374	2.925	2.925	2.978
3.	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	82,01	90,74	90,74	89,69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro

b. Rasio Pemukiman Layak Huni Dan Rasio Rumah Layak Huni

Permukiman dan rumah layak huni merupakan salah satu cerminan kesejahteraan. Pemerintah Kota Metro telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu. Hal ini bertujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat. Sampai dengan tahun 2013, luas permukiman layak huni di Kota Metro mencapai 2.611 ha, sedangkan jumlah rumah layak huni mencapai 26.703 buah dari 40.364 rumah tangga di Kota Metro atau sekitar 66%.

Tabel 2.35
Jumlah Permukiman dan Rumah Layak Huni di Kota Metro
Tahun 2010 s.d 2013

No.	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Luas permukiman layak (ha)	2.114	2.730	2.730	2.611
2	Luas wilayah permukiman (ha)	2.374	2.925	2.925	2.978
3	Persentase kawasan permukiman layak huni	89	93	93	88
4	Jumlah rumah layak huni (unit)	25.214	26.001	26.100	26.703
5	Jumlah rumah tangga (RT)	-	-	38.909	40.364
6	Persentase rumah layak huni	-	-	67%	66%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro

c. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kota Metro dilakukan oleh PDAM dan non perpipaan. Perkembangan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih melalui PDAM cenderung meningkat selama periode 2010-2014. Namun demikian apabila jumlah rumah tangga yang mendapatkan air bersih dari PDAM dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga maka persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dari PDAM baru sekitar 2,98% (2012), 3,12% (2013) dan 4,04% (2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa selain dari PDAM, masih banyak rumah tangga di Kota Metro yang mendapatkan air bersih dari sumber lain berupa sumur. Berikut adalah data jumlah dan proporsi rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih dari PDAM di Kota Metro dalam kurun waktu 2011-2015 baik dari PDAM maupun non perpipaan.

Tabel 2.36
Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih
di Kota Metro Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	118.676	121.135	125.500	128.724	141.338
2.	Jumlah rumah tangga	148.586	151.117	153.517	155.992	158.415
3.	Persentase rumah tangga berakses air bersih	79,87	80,16	81,75	82,52	89,22

Sumber : PDAM Kota Metro

5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja merupakan aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data tentang rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.37
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Metro
Tahun 2010-2014

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Pol PP	168	166	166	147	163
2.	Jumlah Penduduk	145.471	147.050	149.361	153.517	155.992
3.	Rasio Jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	11,55	11,29	11,11	9,58	10,45

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro

b. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat

secara luas. Rasio jumlah linmas dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memelihara ketentraman/ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Data tentang rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.38
Rasio Jumlah Linmas di Kota Metro Tahun 2010-2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Linmas	220	220	220	220	220
2.	Jumlah Penduduk	145.471	147.050	149.361	153.517	155.992
3.	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	15,12	14,96	14,73	14,33	14,10

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro

c. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling per desa/kelurahan dapat menggambarkan ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling, akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Data tentang rasio poskamling di Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.39
Rasio Pos Siskamling di Kota Metro Tahun 2010-2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Pos Siskamling	207	229	251	273	273
2.	Jumlah Desa dan Kelurahan	22	22	22	22	22
3.	Rasio Pos Kamling per desa/kelurahan	9,41	10,41	11,41	12,41	12,41

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro

6. Sosial

Kondisi pelayanan umum Kota Metro terkait dengan urusan sosial, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja rasio tempat ibadah. Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Untuk itu keberadaan sarana/tempat ibadah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan kehidupan beragama.

Tabel. 2.40
Rasio Tempat Ibadah di Kota Metro Tahun 2014

No.	Tempat Ibadah	2011	2012	2013	2014
1.	Masjid	131	130	136	133
2.	Mushola	215	207	211	237
	Jumlah	346	337	347	370
	Jumlah pemeluk	136.684	137.409	141.240	136.839
	Rasio	1 : 395	1 : 408	1 : 407	1 : 369
3.	Gereja	19	19	21	18
	Jumlah pemeluk	8.158	9.525	9.773	5.426
	Rasio	1 : 429	1 : 501	1 : 465	1 : 301
4.	Pura	2	2	2	2
	Jumlah pemeluk	508	528	572	1.872
	Rasio	1 : 254	1 : 264	1 : 286	1 : 936
5.	Vihara	3	3	3	3
	Jumlah pemeluk	1.700	1.899	1.932	1.331
	Rasio	1 : 567	1 : 633	1 : 644	1 : 444

Sumber : BPS Kota Metro

a. **Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar sesuai dengan kriteria Permensos RI No. 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS.

Berdasarkan hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi/Sumber Kesejahteraan Sosial di Kota Metro Tahun 2014 yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat dan TKSK dapat dipetakan permasalahan sosial di Kota Metro berdasarkan jumlah kepadatannya. Berdasarkan data yang diperoleh dibuatlah rentang kepadatan PMKS sebagai berikut:

- Jumlah PMKS diatas 501 dengan kategori padat

- Jumlah PMKS antara 201 s.d 500 dengan kategori sedang
- Jumlah PMKS dibawah 200 dengan kategori rendah

Tabel 2.41
Jumlah PMKS Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan
Di Kota Metro Tahun 2014

No	Kelurahan	Jumlah PMKS	Kategori
I	Kecamatan Metro Pusat		
	Metro	912	Tinggi
	Imopuro	332	Sedang
	Hadimulyo Barat	725	Tinggi
	Hadimulyo Timur	307	Sedang
	Yosomulyo	288	Sedang
	Jumlah I	2.564	
II	Kecamatan Metro Utara		
	Banjarsari	653	Tinggi
	Purwosari	258	Sedang
	Purwoasri	78	Rendah
	Karangrejo	572	Tinggi
	Jumlah II	1.561	
III	Kecamatan Metro Barat		
	Ganjar Agung	341	Sedang
	Ganjar Asri	229	Sedang
	Mulyojati	117	Rendah
	Mulyosari	150	Rendah
	Jumlah III	837	
IV	Kecamatan Metro Timur		
	Tejosari	217	Sedang
	Tejo Agung	156	Rendah
	Iringmulyo	1377	Tinggi
	Yosodadi	111	Rendah
	Yosorejo	165	Rendah
	Jumlah IV	2.026	
V	Kecamatan Metro Selatan		
	Margorejo	103	Rendah
	Margodadi	128	Rendah
	Sumbersari Bantul	107	Rendah
	Rejomulyo	159	Rendah
	Jumlah V	497	
	Jumlah Total	7.485	

Sumber : Dinsosnaker dan PM Kota Metro

Berdasarkan tabel jumlah sebaran PMKS di Kota Metro tahun 2014 di atas dapat dilihat bahwa terdapat lima kelurahan yang memiliki kepadatan PMKS yang tinggi yaitu kelurahan Metro dan Hadimulyo Barat (Kecamatan Metro Pusat), Banjarsari, dan Karangrejo (Kecamatan Metro Utara) dan Iringmulyo (Kecamatan Metro Timur). Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Selatan memiliki jumlah PMKS yang relatif rendah.

Dari total 7.485 PMKS yang terdata, sebagian besar adalah fakir miskin yaitu 55,3 % atau 4.141 jiwa dan lanjut usia terlantar sebesar 25,2% atau 1.885 jiwa. PMKS lainnya yang jumlahnya cukup tinggi adalah perempuan rawan sosial 8,9% yang diikuti oleh anak terlantar 2,0% dan anak dengan kedisabilitas (ADK) 1,7%. Data PMKS Kota Metro Tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Rekapitulasi Data PMKS Kota Metro Tahun 2014

No.	Jenis PMKS	Jumlah (Jiwa)	%
1	Anak Balita terlantar	47	0,6%
2	Anak terlantar	153	2,0%
3	Anak yg berhadapan dgn hukum	1	0,0%
4	Anak jalanan	0	0,0%
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	125	1,7%
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	0	0,0%
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	0,0%
8	Lanjut usia terlantar	1.885	25,2%
9	Penyandang disabilitas	236	3,2%
10	Tuna susila	0	0,0%
11	Gelandang	2	0,0%
12	Pengemis	0	0,0%
13	Pemulung	54	0,7%
14	Kelompok minoritas	0	0,0%
15	Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (BWBLP)	39	0,5%
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (data pada Dinkes)	0	0,0%
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	13	0,2%
18	Korban Trafficking	0	0,0%
19	Korban tindak kekerasan	59	0,8%
20	Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)	5	0,1%
21	Korban bencana alam	0	0,0%
22	korban bencana sosial	0	0,0%
23	Perempuan rawan sosial	663	8,9%
24	Fakir miskin	4.141	55,3%
25	Keluarga bermasalah sosial	62	0,8%
26	Komunitas adat terpencil	0	0,0%

JUMLAH	7.485	100,0%
--------	-------	--------

Sumber : Dinsosnaker dan PM Kota Metro

B. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

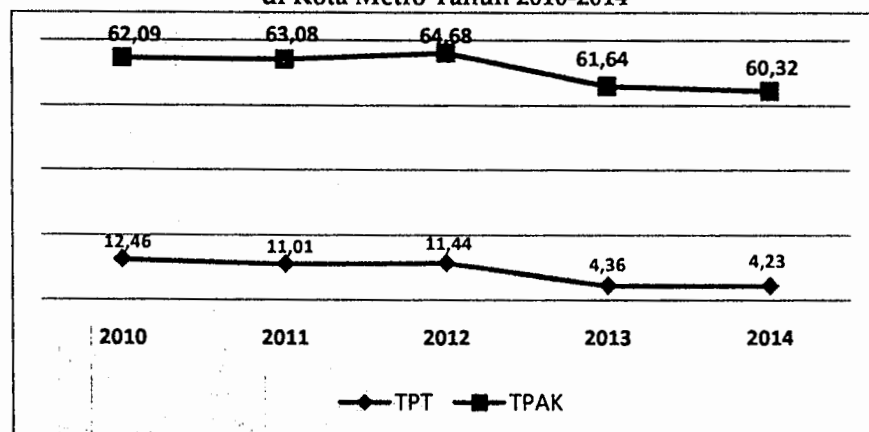
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15+). TPAK menggambarkan potensi supply atau ketersediaan SDM dalam pasar kerja. Pada tahun 2012 TPAK di Kota Metro mencapai 64,51%. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2011. Berikut adalah gambaran mengenai beberapa indikator ketenagakerjaan di Kota Metro tahun 2010-2014.

Gambar 2.20
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut TPAK dan TPT
di Kota Metro Tahun 2010-2014



Sumber : BPS

Grafik di atas menunjukkan bahwa trend tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2010-2012 cenderung meningkat yaitu 12,46%, 11,01% dan 11,44%. Demikian pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung meningkat yaitu 62,09%, 63,08% dan 64,68%. Namun kemudian terjadi penurunan TPT yang signifikan menjadi 4,36% (2013) dan 4,23% (2014). Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa tingkat pengangguran di Kota Metro dalam dua tahun terakhir semakin berkurang.

Data ketenagakerjaan Kota Metro tahun 2012-2015 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.43
Data Ketenagakerjaan Kota Metro Tahun 2012-2015 (%)

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,65	61,64	60,32	60,36
2.	Tingkat Pengangguran (%)	11,48	4,36	4,23	5,12
3.	Bekerja (%)	88,52	95,64	95,77	94,88
4.	Bekerja di sektor pertanian	10,23	16,10	9,13	13,28
5.	Bekerja di sektor manufaktur	23,37	18,37	23,04	17,69
6.	Bekerja di sektor jasa-jasa	66,39	65,54	67,83	69,03

Sumber : BPS Kota Metro

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan umum urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta.

Tabel. 2.44
Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 s.d. 2014

No	Jenis Kelamin	2010	2011	2012	2013	2014
----	---------------	------	------	------	------	------

5.	Pengangkutan	Dump Truck	6
		Arm Roll Truck	6
		Truck Kontainer	2
6.	Pembuangan/Daur ulang	TPA	1

Sumber : Dinas Tata Kota Metro

Pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan truk pengangkut sampah. Semakin banyak sampah yang diproduksi oleh penduduk maka semakin banyak jumlah truk sampah yang diperlukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya timbunan sampah yang berlebihan di setiap rumah tangga maupun TPS. Dengan jumlah truk pengangkut sampah yang memadai diharapkan proses pengangkutan sampah akan berjalan tepat waktu. Perbandingan truk pengangkut sampah terhadap jumlah penduduk di Kota Metro.

Tabel. 2.50
Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kota Metro Tahun 2010-2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah truk pengangkut sampah (unit)	18	18	18	20	19
2.	Jumlah Daya Tampung Truk (m ³)	6 m ³ /truk	6 m ³ /truk	6 m ³ /truk	6 m ³ /truk	6 m ³ /truk
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	145.471	147.050	149.361	153.517	155.992
4.	Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah terhadap Jumlah Penduduk	1 : 8.081	1 : 8.169	1 : 8.297	1 : 7.675	

Sumber : Dinas Tata Kota Metro

5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pembangunan dibidang administrasi kependudukan merupakan landasan bagi pembangunan di berbagai bidang lainnya, sehingga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional. Kondisi pengelolaan administrasi kependudukan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, namun pemerintah Kota Metro memiliki komitmen yang serius untuk melakukan pembenahan mendasar pada data base kependudukan agar lebih valid dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan prima dengan meyakinkan masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Penduduk Yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan . Salah satu bentuk tertib administrasi kependuduka dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Jumlah penduduk Kota Metro yang sudah memiliki KTP, KK, dan Akte Kelahiran dari tahun 2010 s.d 2013 menunjukkan peningkatan, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk selama kurun waktu 2010 s.d 2014. Pada tahun 2010 jumlah penduduk yang memiliki KTP adalah sebanyak 87.210 jiwa. Pada tahun berikutnya jumlah kepemilikan KTP meningkat menjadi 89.327 di tahun 2011, 90.527 di tahun 2012 dan 94.254 di tahun 2013. Demikian pula dengan jumlah penduduk yang memiliki KK. Terdapat peningkatan jumlah kepemilikan KK dari 39.538 pada tahun 2010 menjadi 46.738 kepemilikan KK di tahun 2013 dan 49.311 di tahun 2014.

Akte kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang juga meningkat jumlah kepemilikannya sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk khususnya angka kelahiran. Kesadaran masyarakat akan pentingnya akte kelahiran menyebabkan jumlah kepemilikan akte kelahiran terus meningkat selama periode 2010-2013. Pada tahun 2011 jumlah akte kelahiran sebesar 9.767. Jumlah tersebut merupakan jumlah kepemilikan akte kelahiran yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2010, sebanyak 3.438 dan tahun berikutnya yaitu 4.475 (2012) dan 4.556 (2013). Sedangkan di tahun 2014 jumlah kepemilikan akte kelahiran adalah sebesar 4.205.

Jumlah kepemilikan akte nikah menggambarkan pernikahan pasangan (non muslim) yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selama kurun waktu 2010 s.d 2013 jumlah kepemilikan akte nikah mengalami penurunan. Terdapat 101 akte nikah di tahun 2010, dan 102 akte nikah di tahun 2011. Pada tahun berikutnya, jumlah kepemilikan akte nikah adalah sebanyak 66 (2012) dan 44 (2013). Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di tahun 2014 jumlah kepemilikan akte nikah kembali meningkat menjadi 53.

Dengan meningkatnya jumlah kepemilikan dokumen kependudukan, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan telah semakin meningkat. Hal ini juga tidak terlepas dari pelayanan terhadap administrasi kependudukan yang telah semakin membaik. Data mengenai

jumlah penduduk menurut kepemilikan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah di Kota Metro tahun 2010-2014 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah di Kota Metro Tahun 2010 s.d 2014

No	Kepemilikan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	KTP					
	a. Sudah memiliki	87.210	89.327	90.527	94.254	91.791
	b. Belum memiliki	19.665	25.856	25.128	20.041	25.297
2.	KK	39.538	42.761	44.153	46.738	49.311
3.	Akte Kelahiran	3.438	9.767	4.475	4.556	4.205
4.	Akte Nikah (non muslim)	101	102	66	44	53

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro

KTP Elektronik (KTP-el) adalah KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang dilengkapi dengan *chip* berisi rekaman elektronik dan berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. KTP elektronik (KTP-el) juga berfungsi sebagai dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada data base kependudukan nasional. Oleh karena itu semua penduduk diharuskan memiliki KTP elektronik sebagai identitas resmi kependudukan.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, persentase kepemilikan KTP- elektronik sejak dimulainya perekaman awal untuk KTP-elektronikl pada tahun 2012 sampai dengan Agustus 2016 sudah mencapai 92,60%.

Tabel 2.52
Realisasi Cakupan Penerbitan dan Perekaman
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kota Metro
per 31 Agustus 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	164.213
2.	Jumlah Wajib KTP	114.947
3.	Jumlah KTP-el tercetak	106.448

4.	Jumlah KTP Siap Cetak (PRR)	1.611
5.	% Kepemilikan KTP-el	92,60%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran pelayanan umum terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat, diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Kelompok Binaan LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Hal tersebut juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

Jumlah LPM yang ada di Kota Metro adalah sebanyak 22 LPM dimana setiap kelurahan terdapat 1 (satu) LPM dengan anggota rata-rata 12 orang dan jumlah kelompok binaan LPM 330. Hal ini berarti setiap LPM melakukan pembinaan terhadap 15 kelompok binaan. Data mengenai jumlah LPM dan kelompok binaan LPM di Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.52
Jumlah LPM dan Kelompok Binaan LPM di Kota Metro
Tahun 2010-2015

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah LPM	22	22	22	22	22	22
2.	Jumlah Kelompok Binaan LPM	330	330	330	330	330	330
3.	Rata-rata kelompok binaan LPM per LPM	15	15	15	15	15	15

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro

b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK dan menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan melalui PKK.

Jumlah Kader PKK di Kota Metro selama kurun waktu 2010-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terdapat 5.122 orang kader PKK dengan jumlah kader aktif sebanyak 67,40% dan tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah kader menjadi 5.519 orang dengan jumlah kader aktif sebanyak 74,83%. Untuk kelompok binaan PKK secara umum jumlahnya meningkat dari 2.641 kelompok binaan di 2010 menjadi 2.764 kelompok di 2014. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari Posyandu, BKB, UP2K-PKK, Pos PAUD, Kebun Toga, dll.

Tabel. 2.53
Jumlah Kader PKK dan Kelompok Binaan PKK di Kota Metro
Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Kader PKK	5.122	4.705	5.134	4.882	5.519	5.519
2.	Jumlah Kader PKK Aktif	3.452	3.266	3.651	3.601	4.130	4.130
3.	Persentase Kader PKK Aktif	67,40%	69,42%	71,11%	73,76%	74,83%	74,83%
4.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	2.641	2.932	2.829	2.821	2.764	2.764

Sumber : PKK Kota Metro

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti

jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Berikut disajikan Data Kependudukan Kota Metro Tahun 2012-2015 (Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010).

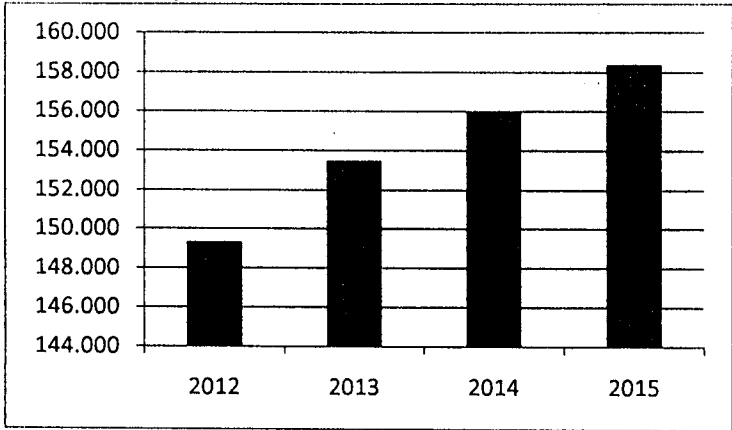
Tabel 2.54
Data Kependudukan Kota Metro Tahun 2012-2015
(Proyeksi Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010)

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk	149.361	153.517	155.992	158.415
2.	Pertumbuhan Penduduk	1,57	2,78	1,61	0,34
3.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	2.173	2.233	2.269	2.305
4.	Sex Ratio (L/P)	100,81	100,18	100,21	99,96
5.	Jumlah Rumah Tangga	38.909	38.968	38.998	40.069
6.	Rata-Rata ART (jiwa/RT)	4	3	4	4

Sumber : BPS Kota Metro, 2016

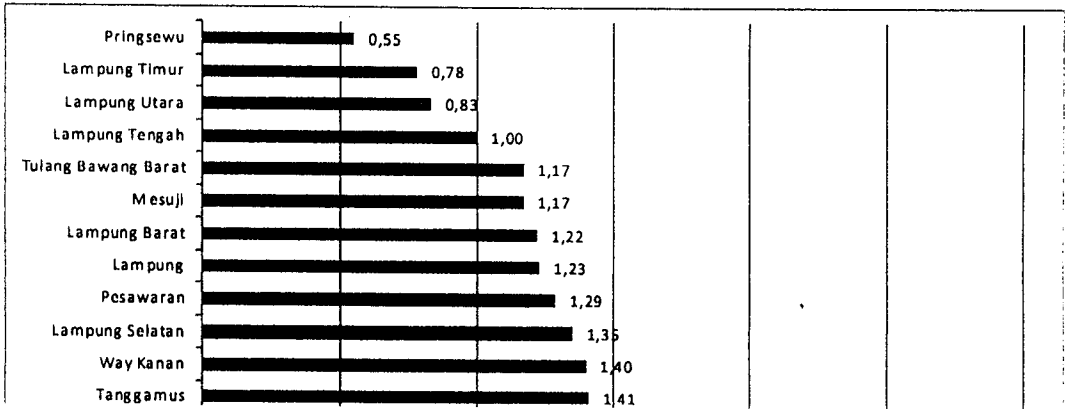
Grafik mengenai pertumbuhan penduduk di Kota Metro selama kurun waktu 2010-2014 disajikan pada Gambar 2.22 berikut.

Gambar 2.22
Grafik Jumlah Penduduk Kota Metro 2012-2015



Sumber : BPS

Gambar 2.23
Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Lampung
Tahun 2000-2010



Berdasarkan gambar 2.23 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Metro (tahun 2000-2010) adalah sebesar 2,61 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Metro tersebut menduduki urutan tertinggi kedua di Provinsi Lampung, setelah Kabupaten Tulang Bawang.

8. Perhubungan

Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan pelayanan umum urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Rasio Izin Trayek

Seluruh angkutan umum yang beroperasi di suatu wilayah wajib memiliki izin trayek. Ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Namun demikian, belum semua angkutan umum yang beroperasi di Kota Metro memiliki ijin trayek. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.55
Rasio Izin Trayek di Kota Metro Tahun 2010-2014

No	Indikator	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Izin Trayek	-	125	160	60	29
2.	Jumlah Penduduk	145.471	147.050	149.361	153.517	154.013
3.	Rasio Izin Trayek	-	0,09	0,11	0,04	0,02

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro

b. Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi. Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kota Metro pada tahun 2010 mencapai 420 unit. Jumlah ini merupakan yang terbanyak selama kurun waktu 2010-2013. Pada tahun berikutnya jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang adalah sebanyak 102 unit (tahun 2011), 256 unit (tahun 2012) dan 137 unit (tahun 2013). Pada tahun 2014 jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang adalah sebanyak 141 unit. Data mengenai jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.56
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kota Metro
Tahun 2010-2014

No	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	420	102	256	137	141

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro

9. Komunikasi dan Informatika

Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan urusan komunikasi dan informatika salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi. Dewasa ini sarana prasarana dan teknologi komunikasi serta informasi telah berkembang dengan sangat pesat dan mengubah cara hidup manusia. Cara berkomunikasi, cara belajar, cara berbisnis adalah sebagian yang berubah drastis akibat adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk melakukan pemrosesan, mendapatkan, menyusun, menyimpan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Data yang berkualitas akan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Tabel 2.57
Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Teknologi Komunikasi dan Informasi
di Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2014

No	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	2	4	4	41	41

2.	Jumlah sistem informasi yang ada	2	3	3	4	4
3.	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda	-	-	-	33	58
4.	Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi di Kota Metro mengalami peningkatan terutama yang berkaitan dengan layanan internet. Hal ini dapat dilihat dengan semakin bertambahnya jumlah SKPD yang memiliki akses internet yang dikelola melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro. Pada tahun 2010, hanya terdapat 2 (dua) SKPD yang memiliki akses internet dan pada tahun 2014, terdapat 41 (empat puluh satu) SKPD yang sudah memiliki akses internet dengan jumlah hotspot sebanyak 58 titik. Hal ini berarti bahwa semua SKPD telah memiliki akses internet. Media yang digunakan untuk penyebaran informasi di Kota Metro ada 2 (dua) jenis yaitu melalui stasiun radio "Metropolis" milik Pemerintah Kota Metro dan website resmi pemerintah Kota Metro.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Gambaran mengenai pelayanan umum di bidang koperasi usaha kecil dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

- Jumlah Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan BPR/LKM

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Semakin banyaknya koperasi yang aktif maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan. Jumlah koperasi di Kota Metro selama kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terdapat peningkatan jumlah koperasi sebanyak 14% dari yang semula 168 koperasi di tahun 2010 menjadi 191 koperasi di tahun 2014. Namun demikian, hanya sekitar 65%-67% koperasi yang aktif. Data mengenai jumlah dan keragaan koperasi di Kota Metro disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
Jumlah Koperasi dan Keragaman Koperasi di Kota Metro
Tahun 2010-2014

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Koperasi	168	175	182	188	191

Jumlah Koperasi	168	179	186	188	191
Jumlah Koperasi tidak aktif	62	62	64	64	64
Jumlah Koperasi aktif	112	117	122	124	127
Persentase Koperasi aktif	67%	65%	66%	66%	66%
Jumlah anggota (orang)	22.459	22.740	22.931	22.971	23.043
Tenaga kerja (orang)	373	368	370	370	392
Yang melaksanakan RAT	60	61	37	40	43

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Sektor UMKM sangat penting dan memerlukan penanganan yang serius di Kota Metro. Walaupun sebagian besar masyarakat masih bertumpu pada sektor pertanian namun upaya untuk lebih mengembangkan sektor UMKM masih menjadi perhatian dalam memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan.

Jumlah pelaku UMKM di Kota Metro mengalami peningkatan yang drastis. Dari total jumlah pelaku usaha sebanyak 4.339 di tahun 2011 meningkat sebanyak 90,3% menjadi 8.255 di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM di Kota Metro telah mengalami pertumbuhan yang pesat di hampir semua jenis pelaku usaha, baik pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha menengah. Semakin banyak jumlah UKM menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Data mengenai jumlah pelaku UKM di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Jumlah Pelaku UMKM di Kota Metro Tahun 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Jumlah Pelaku Usaha Mikro	4265	4481	6889	6984
Jumlah Pelaku Usaha Kecil	37	37	954	1100
Jumlah Pelaku Usaha Menengah	37	37	122	171
Jumlah Seluruh Pelaku Usaha	4339	4555	7965	8255

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro

BPR adalah salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposit*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin

banyak jumlah BPR dan LKM, diharapkan dapat member kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan untuk meningkatkan perekonomiannya. Jumlah BPR/LKM yang ada di Kota Metro pada tahun 2011 adalah sebanyak 5 unit. Sedangkan pada tahun 2012 sampai 2014 terdapat 6 BPR/LKM.

Tabel 2.60
Jumlah BPR/LKM di Kota Metro Tahun 2010-2014

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah BPR/LKM	5	6	6	6	6

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro

11. Penanaman Modal

Pelayanan umum di bidang penanaman modal, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja mengenai jumlah investor berskala daerah, nasional maupun asing serta jumlah uang yang diinvestasikan. Kehadiran investor dewasa ini semakin dibutuhkan untuk meningkatkan penanaman modal dalam rangka melaksanakan program atau kegiatan pembangunan. Penanaman modal diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal tersebut ditanamkan.

Melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, Pemerintah Kota Metro membuka peluang bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya untuk melakukan usaha di Kota Metro. Berdasarkan data Kantor PMPTSP Kota Metro, terdapat 136 investasi yang tercatat tahun 2015. Sebanyak 31 investasi (22,8%) bergerak di bidang jasa dan sisanya bergerak di bidang perdagangan. Berikut disajikan dalam tabel jumlah investor di Kota Metro tahun 2013-2015.

Tabel 2.61
Jumlah Investor di Kota Metro Tahun 2013-2015

NO	TAHUN	JUMLAH INVESTOR	NILAI INVESTASI
1	2013	238	Rp. 79.704.829.000
2	2014	206	Rp. 87.515.000.000
3	2015	136	Rp. 86.924.317.000

Sumber : KPMPTSP Kota Metro, 2016

12. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran pelayanan umum terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, secara tidak langsung menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda. Demikian pula halnya dengan organisasi olah raga. Banyaknya jumlah organisasi olah raga menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperanserta dalam pembangunan.

Jumlah organisasi pemuda maupun organisasi olahraga di Kota Metro mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011-2013. Pada tahun 2011, organisasi pemuda berjumlah 10 organisasi kemudian bertambah menjadi 11 pada tahun 2012 dan 12 pada tahun 2013. Meskipun peningkatan jumlah tersebut relatif kecil namun hal tersebut bisa menunjukkan bahwa pemberdayaan dan peran serta masyarakat terutama pemuda dalam pembangunan semakin aktif. Demikian pula dengan jumlah organisasi olah raga mengalami peningkatan dari 18 organisasi pada tahun 2011 menjadi 12 organisasi pada tahun 2013.

Tabel 2.62
Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga di Kota Metro Tahun 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Jumlah Organisasi Pemuda	10	11	12	12
Jumlah Organisasi Olah Raga	18	19	20	20

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

13. Statistik

Gambaran pelayanan umum terkait dengan urusan statistik diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Statistik. Salah satu instrument analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data dan informasi statistik. Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara

umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja atau pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu dokumen statistik dapat berfungsi sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Beberapa dokumen statistik yang dimaksud adalah PDRB, IPM, Metro Dalam Angka, Inkesra, IKM, IHK. Data mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.63
Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Metro Tahun 2010-2014

No.	Dokumen Statistik	2010		2011		2012		2013		2014	
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak
1.	PDRB	√		√		√		√		√	
2.	IPM	√		√		√		√		√	
3.	Metro Dalam Angka	√		√		√		√		√	
4.	Indeks Gini Ratio	√		√		√		√		√	
5.	Inkesra	√		√		√		√		√	
6.	ICOR	√		√		√		√		√	
7.	IHK	√		√		√		√		√	

Sumber : Bappeda Kota Metro

14. Perpustakaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan beberapa diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Adanya perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Kota Metro memiliki 1 (satu) buah perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Metro. Selain itu terdapat pula perpustakaan desa (rumah pintar) yang tersebar di hampir setiap kelurahan. Rumah Pintar tersebut pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan Pemerintah.

No	Indikator	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah mobil unit perpustakaan keliling	1	1	1	1	1
2.	Jumlah motor pelayanan perpustakaan	-	-	-	-	-
3.	Total	1	1	1	1	1

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro

15. Kearsipan

Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan urusan kearsipan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan pengelolaan arsip secara baku. Berdasarkan data dari SKPD pengelola arsip yaitu Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro, dari 35 SKPD di Kota Metro, baru 66% SKPD yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2014. Hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan SDM pengelola arsip yang menangani pengelolaan arsip secara baku untuk masing-masing SKPD. Data mengenai pengelolaan arsip secara terpadu di Kota Metro tahun 2010-2014 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67
Pengelolaan Arsip secara Baku di Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2014

No	Indikator	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	14	16	18	20	23
2.	Jumlah SKPD	35	35	35	35	35
3.	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	40%	46%	51%	57%	66%

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro

b. Peningkatan SDM Pengelola Arsip Terpadu

Mengelola arsip memerlukan teknik atau cara mengelola arsip yang baik, benar dan terpadu. Hal ini bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan arsip. Jumlah SDM yang diperlukan untuk mengelola arsip secara terpadu di Kota Metro pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebanyak 35 orang. Namun dari jumlah tersebut yang telah mendapatkan pelatihan adalah baru sebanyak 6 orang atau 17 %.

Jumlah SDM yang telah melakukan pelatihan di tahun 2013 dan 2014 tersebut tidak mengalami kenaikan yang berarti karena hanya bertambah sebanyak 1 orang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data mengenai pengelola arsip terpadu di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.68
Pengelolaan Arsip Terpadu di Kota Metro
Tahun 2010 s.d. 2014

No.	Indikator	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah SDM pengelola arsip yang diperlukan	35	35	35	35	35
2.	Jumlah SDM pengelola arsip yang telah melakukan pelatihan	5	5	5	6	6
3.	Persentase SDM pengelola arsip yang telah melakukan pelatihan	15%	15%	15%	17%	17%

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan 6 (enam) urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Pertanian

Gambaran pelayanan umum terkait dengan urusan pertanian diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Produktivitas Komoditas Pangan

Produktivitas padi di Kota Metro cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2010-2013. Bila pada tahun 2010 produktivitas padi mencapai 6,28 ton/ha, maka pada tahun 2013 menurun menjadi 5,75 ton/ha. Demikian pula pada tahun 2011 dan 2012 dimana produktivitas padi adalah sebesar 5,60 ton/ha dan 5,98 ton/ha. Produktivitas jagung di Kota Metro pada tahun 2012 sebesar 9,57 ton/ha merupakan yang tertinggi selama kurun waktu 2010-2013. Jumlah tersebut melebihi 2 (dua) kali lipat produktivitas jagung di tahun sebelumnya 2010 dan 2011 yaitu sebesar 4,73 ton/ha dan 4,44 ton/ha. Produktivitas jagung di tahun 2013 adalah yang terendah yaitu 4,15 ton/ha.

Sayuran merupakan salah satu komoditas pangan yang cukup penting. Produktivitas sayuran di Kota Metro mengalami peningkatan dari 4.402,00 kg/ha di tahun 2010 menjadi 13.981,66 kg/ha di tahun 2013. Data mengenai produktifitas padi, palawija dan sayuran di Kota Metro tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Produktivitas Komoditas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan di Kota Metro
Tahun 2010 s.d 2015

No.	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi						
	Luas Tanam (ha)	3.955,60	4.734,00	4.389,00	4.064,50	3.142	5.864
	Luas Panen (ha)	3.816,00	4.733,00	4.389,00	4.057,10	3.141,50	5.842
	Produksi (ton)	23.948,50	26.506,00	26.246,00	23.34,63	19.155,24	33.889
	Produktivitas (ton/ha)	6,28	5,60	5,98	5,75	5,99	5,81
2.	Jagung						
	Luas Tanam (ha)	1.022,00	960,00	477,00	637,00	783	123
	Luas Panen (ha)	993,00	950,00	477,00	607,00	783,25	25
	Produksi (ton)	4.697,10	4.214,26	4.563,00	2.518,05	1.319,20	588
	Produktivitas (ton/ha)	4,73	4,44	9,57	4,15	46,00	3,40
3.	Sayuran						
	Luas Tanam (ha)	244,00	347,00	332,60	320,00	267,00	210,00
	Luas Panen (ha)	378,00	347,00	332,60	320,00	267,00	210,00
	Produksi (kg)	1.663.815	2.042,30	2.950.050	4.474.130	30.439.000	26.680.000
	Produktivitas (kg/ha)	4.402,00	5,90	8.869,66	13.981,66	114.003,75	127.047,62

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro

b. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011-2014. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro adalah sebesar 6,53% atas dasar harga berlaku dan 6,45% atas dasar harga konstan. Kontribusi ini kemudian menurun pada tahun

berikutnya menjadi 6,40% atas dasar harga berlaku dan 6,28% atas dasar harga konstan pada tahun 2012. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.70
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Metro
Tahun 2011 s.d 2014 (juta rupiah)

1.	Jumlah PDRB				
	Atas Dasar Harga Berlaku	185.646,6	204.174,2	219.070,2	239.524,3
	Atas Dasar Harga Konstan	173.854,3	180.561,6	186.888,7	192.168
2.	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB				
	Atas Dasar Harga Berlaku	6,53	6,40	6,20	5,98
	Atas Dasar Harga Konstan	6,45	6,28	6,09	5,88

Sumber : BPS Kota Metro

c. Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Jumlah produksi daging di Kota Metro mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2013. Pada tahun 2010, produksi daging sebesar 1.150.396 kg dengan konsumsi daging 8,7 kg/kapita/tahun. Jumlah produksi daging tersebut mengalami peningkatan pada tahun berikutnya yaitu 1.221.997 kg (2011), 1.237.998,80 kg (2012) dan 1.291.022,30 kg (2013). Sedangkan konsumsi daging pada tahun 2011, 2012 dan 2013 relatif stabil yaitu 8,89 kg/kapita/tahun.

Konsumsi telur di Kota Metro pada tahun 2010 mencapai 14,77 kg/kapita/tahun dengan jumlah produksi 1.681.000 kg. Jumlah konsumsi ini meningkat menjadi 15,82 kg/kapita/tahun pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Namun produksi telur mengalami penurunan menjadi 902.831 kg (2011), 686.301,40 kg (2012) dan 867.219,70 kg (2013).

Produksi susu di Kota Metro dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami penurunan dari 74.898 liter pada tahun 2010 menjadi 23.880,40 liter pada tahun 2013. Namun konsumsi susu relative stabil yaitu 2,46 liter/kapita/tahun. Konsumsi susu di Kota Metro tersebut masih jauh dibawah angka konsumsi susu nasional yang sebesar 6,10 liter/kapita/tahun. Data mengenai jumlah produksi dan konsumsi daging, telur dan susu di Kota Metro tahun 2010-2015 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.71
Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu di Kota Metro
Tahun 2010 s.d 2015

|--|--|--|--|--|--|

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Daging						
	Produksi (kg)	1.150.396,00	1.221.997,00	1.237.993,80	1.291.022,30	2.276,611	5.379,529
	Konsumsi (kg/kapita/tahun)	8,7	8,89	8,89	8,89	-	-
2	Telur						
	Produksi (kg)	1.681.000,00	902.831,00	686.301,40	867.219,70	619.608,7	453.652,2
	Konsumsi (kg/kapita/tahun)	14,77	15,82	15,82	15,82	-	-
3	Susu						
	Produksi (liter)	74.898,00	70.794,00	15.851,80	23.880,40	33.821	31.898,8
	Konsumsi (liter/kapita/tahun)	2,45	2,46	2,46	2,46	-	-

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro

2. Pariwisata

Wilayah Kota Metro termasuk wilayah yang kurang memiliki potensi pariwisata karena hanya memiliki satu lokasi wisata alam yaitu bendungan/dam raman di Kecamatan Metro Utara. Namun demikian Pemerintah Kota Metro berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap lokasi wisata yang telah ada dan melengkapi fasilitas pendukung wisata sehingga dapat lebih menarik bagi pengunjung. Selain itu perlu dilakukan pula pengembangan terhadap lokasi-lokasi yang memiliki potensi wisata seperti di lokasi Bumi Perkemahan, Kelurahan Summersari, Metro Selatan yang akan dikembangkan menjadi daerah agrowisata. Karena keterbatasan data jumlah kunjungan wisata di Kota Metro, analisis terhadap rata-rata kunjungan per obyek wisata tidak dilakukan.

3. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pertanian. Kota Metro tidak memiliki laut sehingga pengembangan sektor perikanan di Kota Metro diarahkan untuk budidaya ikan kolam air tawar. Jenis ikan yang dikembangkan meliputi lele, patin, gurami, mas dan nila. Jumlah produksi ikan selama kurun waktu 2010-2013 secara keseluruhan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 produksi ikan kolam air tawar sebesar 1.671,00 ton. Tahun berikutnya produksi ikan mengalami peningkatan menjadi 1.708,92 ton (2011), 1.836,54 ton (2012) dan 1.841,24 ton (2013). Jumlah produksi ikan di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Jumlah Produksi Ikan Kolam di Kota Metro (ton) Tahun 2010 s.d 2015

No.	Spesies	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Lele	1.106,00	1.067,65	1.084,85	1.016,71	118	1096,342
2.	Patin	470,00	381,57	330,84	263,88	161,16	157,937
3.	Gurame	70,00	202,00	344,11	529,70	546,3	553,024
4.	Mas	-	55,00	69,24	30,15	-	-
5.	Nila	25,00	2,70	7,50	8,00	9,85	9,153
Jumlah Total		1.671,00	1.708,92	1.836,54	1.841,24		

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro

4. Perdagangan

Gambaran mengenai pelayanan umum yang terkait dengan bidang perdagangan dan industri diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kota Metro. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Metro merupakan ketiga terbesar setelah sektor jasa-jasa serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Metro mengalami kenaikan selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2014. Pada tahun 2011 kontribusi sektor perdagangan terhadap pencapaian PDRB Kota Metro atas dasar harga berlaku adalah sebesar 19,88% dan atas dasar harga konstan adalah 6,67%. Meskipun jumlah PDRB sektor perdagangan mengalami kenaikan, namun persentasenya mengalami penurunan. Data mengenai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Metro Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Metro
Tahun 2011 s.d 2014 (juta rupiah)

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah PDRB				
	Atas Dasar Harga Berlaku	536.822,9	573.887,8	609.169,1	647.728,9
	Atas Dasar Harga Konstan	185.280,1	204.120,1	216.060,8	253.884,0
2.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB				
	Atas Dasar Harga Berlaku	19,88	19,33	18,73	18,31
	Atas Dasar Harga Konstan	6,67	6,58	6,51	6,48

Sumber : BPS Kota Metro

5. Industri

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006).

Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan 2011 – 2015

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam : (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Metro tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Metro Tahun Anggaran 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	513,712,195,552	551,000,592,346	618,314,052,297	705,769,933,206	741,455,624,140	9.67
1.1	Pendapatan Asli Daerah	41,998,998,914	48,377,824,856	73,038,244,839	97,421,477,067	127,567,680,290	32.62
1.1.1	Pajak Daerah	6,158,571,584	6,807,598,744	11,291,481,100	12,651,879,441	14,309,185,603	25.39
1.1.2	Retribusi Daerah	2,514,943,447	4,217,549,646	4,980,519,054	5,375,635,672	4,942,794,855	21.42

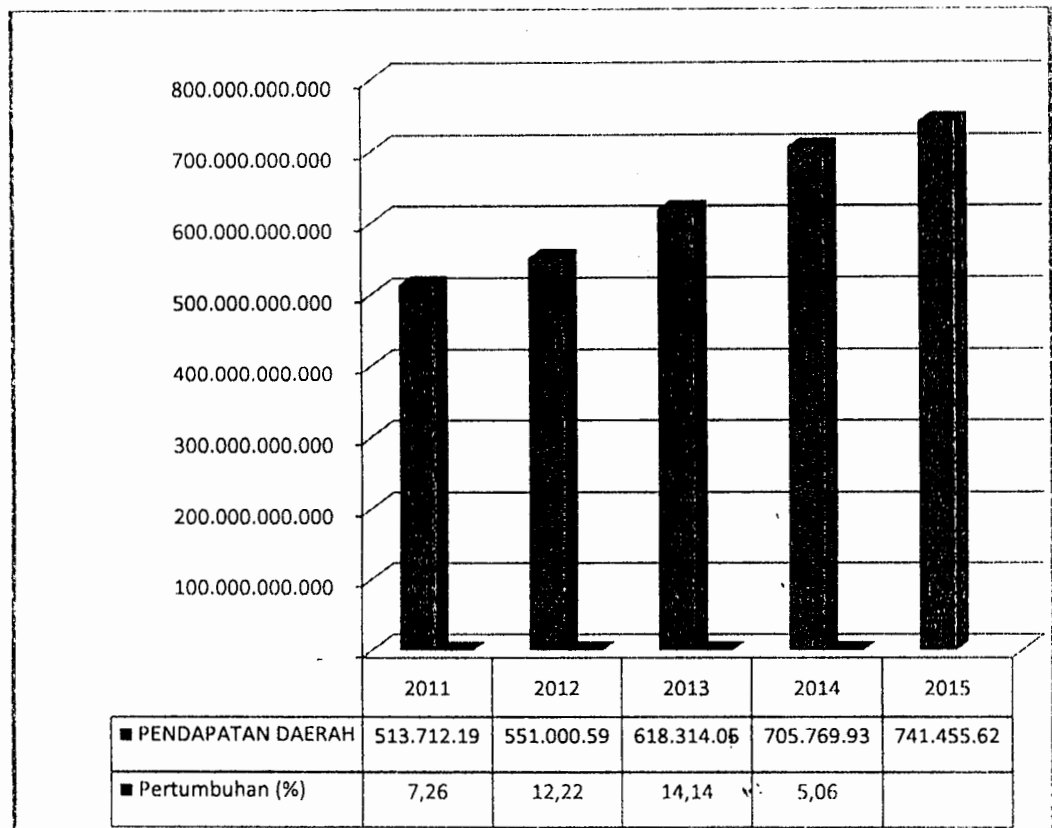
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,576,543,753	2,056,949,123	2,884,797,831.09	3,389,937,354	3,797,944,260	25.07
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	31,748,940,130	35,295,727,343	53,881,446,854	76,004,024,600	104,517,755,573	35.60
1.2	Dana Perimbangan	337,363,980,597	406,176,881,782	451,227,114,937	487,715,129,640	494,176,895,418	10.22
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	42,334,726,597	49,419,518,782	40,349,167,937	9,012,728,640	23,796,405,418	(10.98)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	271,502,754,000	330,158,143,000	374,201,187,000	414,624,161,000	422,921,330,000	11.94
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	23,526,500,000	26,599,220,000	36,676,760,000	34,078,240,000	47,459,160,000	20.78
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	134,349,216,040	96,445,885,708	94,048,692,521	120,633,326,499	119,711,048,432	(0.80)
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	21,597,789,567	19,453,629,346	23,420,367,315	36,285,142,850	35,347,822,586	15.70
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otsus	96,336,172,800	56,212,967,000	69,290,881,000	77,989,976,000	83,267,628,000	0.23
1.3.3	Pendapatan Lain-lain	16,415,253,673	20,779,289,363	1,337,444,206.28	6,358,207,649	1,095,597,846	56.41

Sumber : BPKAD Kota Metro

Ket. : *) data unaudit

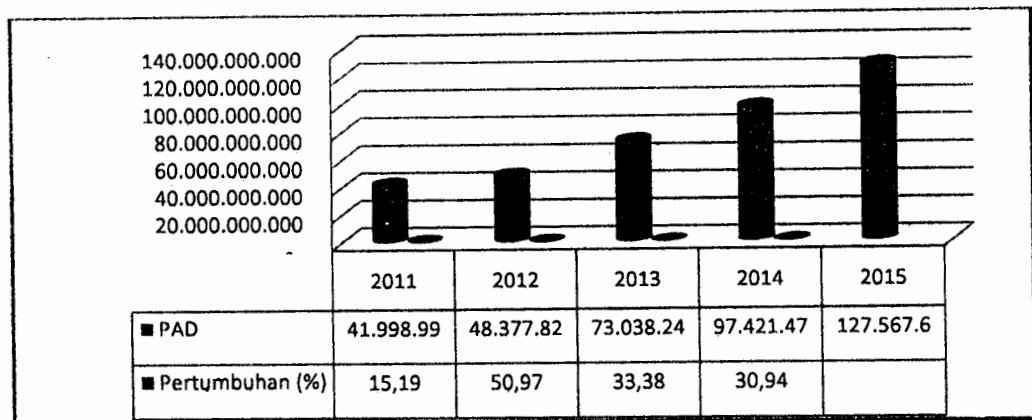
Berdasarkan data selama tahun 2011-2015, perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Metro cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, total pendapatan daerah Kota Metro adalah sebesar Rp 513.712.198.552,- . Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi Rp 741.455.624.140 dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 9,67%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Metro dalam lima tahun terakhir terus mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut direpresentasikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2013 sebesar 6,77% atau di atas rata-rata nasional sebesar 5,78%. Gambaran peningkatan dan pertumbuhan pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut.

Gambar 3.1
Grafik Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2011-2015



Komponen utama dari pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 nilai PAD Kota Metro masih sekitar Rp 41.998.998.914,-, nilai per tahun terus meningkat dengan kenaikan rata-rata 32,62% pertahun, dan tahun 2015 nilai PAD menjadi Rp 127.567.680.290,-. Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Gambaran peningkatan dan pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada grafik 3.2 berikut.

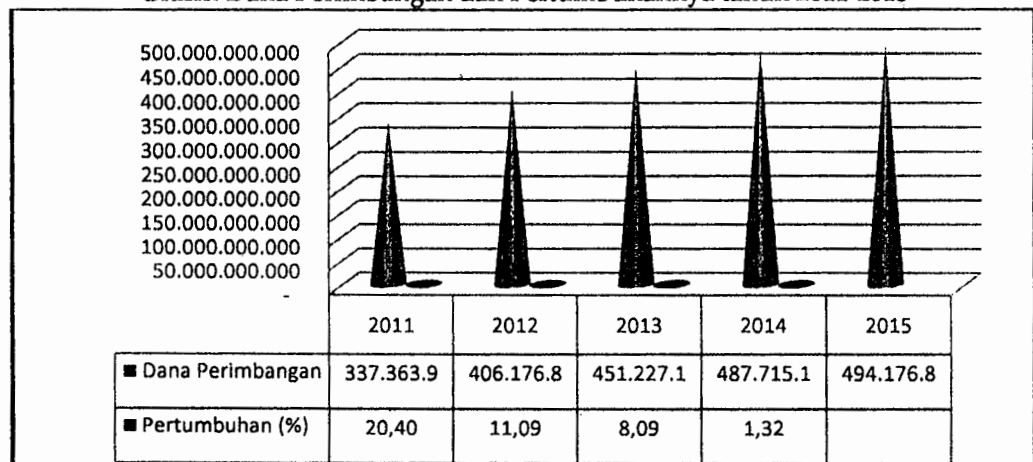
Gambar 3.2
Grafik Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya
Tahun 2011-2015



Pada sisi dana perimbangan, nilainya juga mengalami peningkatan yang luar biasa besar. Tahun 2011 masih sebesar Rp 337.363.980.597,-, pada tahun 2015 nilainya meningkat menjadi Rp 494.176.895.418,- dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 10,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan transfer dana yang begitu besar untuk Kota Metro. Maka dengan peningkatan ini, perekonomian Kota Metro dapat tumbuh dengan baik, dan dapat mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan oleh pejabat pemerintah di Kota Metro telah berjalan cukup baik.

Gambaran peningkatan dan pertumbuhan dana perimbangan dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut.

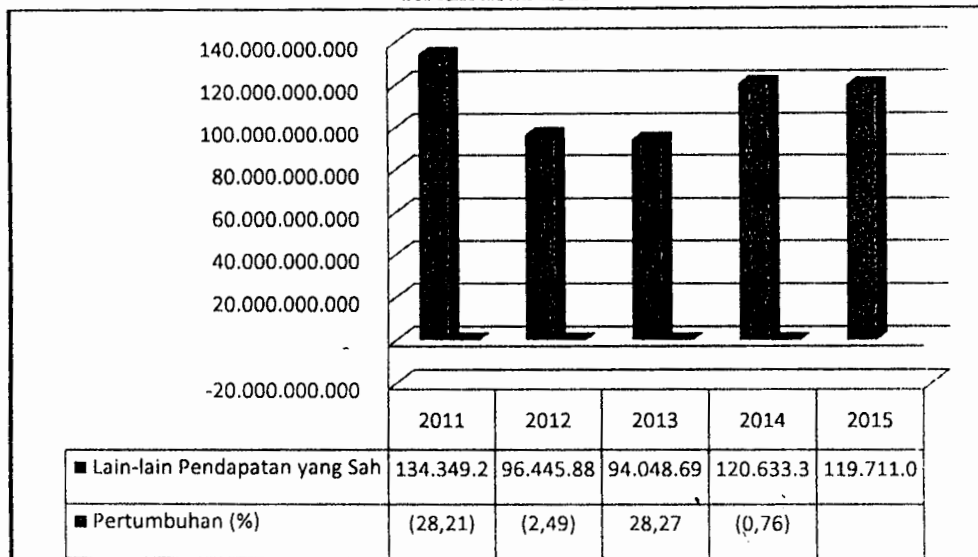
Gambar 3.3
Grafik Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya tahun 2011-2015



Sedangkan pada pendapatan lain yang sah, pertumbuhannya relatif berfluktuasi dibandingkan komponen pendapatan daerah yang lain. Tahun 2011 nilainya Rp134.349.216.040,-, akan tetapi pada tahun 2015 nilainya

menjadikannya Rp119.711.048.432,-, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,80%.Gambaran peningkatan dan pertumbuhan lain-lainPendapatanyang sah Kota Metro tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik 3.4berikut.

Gambar 3.4
Grafik Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pertumbuhannya
Tahun 2011-2015

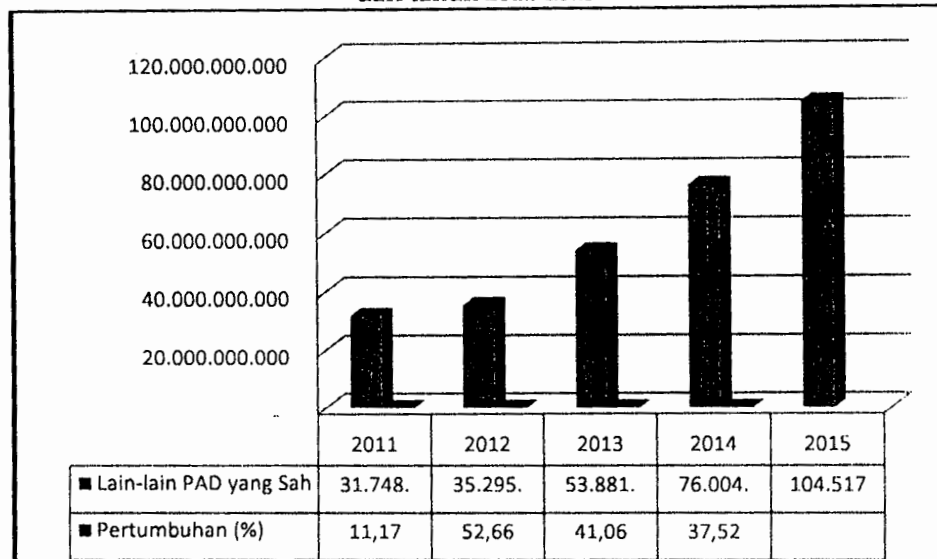


Lain-lain pendapatan yang sah dalam lima tahun terakhir nilainya selalu berfluktuasi, namun komponen ini tidak begitu dipengaruhi oleh perekonomian, dan didalam pengelolaannya lebih dimanfaatkan untuk kesejahteraan publik secara umum.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro tahun 2011-2015masih didominasi oleh sumbangan dari lain-lain PAD yang sah (sekitar 81,93% pada tahun 2015).Urutan kedua adalah pajak daerah (sekitar 11,22% pada tahun 2015), berikutnya adalah retribusi daerah (sekitar 3,87% pada tahun 2015), dan terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar 2,98% pada tahun 2015.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tahun 2011sampai dengan tahun 2015 pertumbuhannya selalu meningkat, dimana salah satu komponen yang mendominasi adalah pendapatan BLUD RSUD A. Yani.Gambaran peningkatan dan pertumbuhan lain-lain PAD yang sahKota Metro tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik 3.5berikut.

Gambar3.5
Grafik Lain-lain PAD yang Sah dan Pertumbuhannya
dari tahun 2011-2015



Sedangkan perkembangan pendapatan dari BUMD dirasa sudah cukup baik, namun mengingat kontribusinya yang masih rendah maka perlu untuk lebih ditingkatkan.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

APBD Pemerintah Kota Metro selama kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2011 kekuatan belanja daerah Kota Metro sebesar Rp514.796.885.444,- dan tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp757.883.425.365,- dengan peningkatan rata-rata per tahun

sebesar 10,33%. Meskipun nilai belanja daerah meningkat namun laju pertumbuhannya berfluktuatif dan cenderung menurun, pada tahun 2012 pertumbuhan belanja daerah sebesar 0,74%, tahun 2013 pertumbuhan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 17,48%, dan tahun 2014 pertumbuhan lebih kecil dibanding tahun 2013 namun lebih tinggi dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 13,91% dan 2015 pertumbuhan menurun menjadi 9,20%. Rincian perkembangan Belanja Daerah disajikan sebagaimana tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Metro
Tahun Anggaran 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan (%)
I.	BELANJA DAERAH	514,796,885,444.00	518,616,362,046.82	609,265,220,466.90	694,000,976,646.00	757,883,425,365.00	10.33
1.1	Belanja Tidak Langsung	273,599,135,546.00	301,829,204,886.82	326,819,012,131.90	355,473,352,180.00	349,033,342,430.00	6.39
1.1.1	Belanja Pegawai	249,574,838,440	283,304,693,315.82	309,198,254,851.90	335,838,413,136	337,120,337,130	7.91
1.1.2	Hibah	20,719,091,750	17,510,956,250.00	17,009,026,500	18,504,985,720	11,270,136,600	- 12.16
1.1.3	Bantuan Sosial	2,925,716,521	473,146,521	70,000,000.00	5,000,000	-	- 90.47
1.1.4	Bantuan Keuangan	-	-	473,064,416.00	1,117,413,324	642,868,700	48.43
1.1.5	Belanja Tidak Terduga	379,488,835	540,408,800.00	68,666,364.00	7,540,000	-	- 58.48
1.2	Belanja Langsung	241,197,749,898	216,787,157,160	282,446,208,335	338,527,624,466	408,850,082,935	15.20
1.2.1	Belanja Pegawai	24,780,287,248	28,677,384,885	35,527,540,814	26,195,426,323	32,779,600,389	9.62
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95,490,515,500	113,254,459,240	142,473,794,581	184,596,585,597	210,632,662,487	22.02
1.2.3	Belanja Modal	120,926,947,150	74,855,313,035	104,444,872,940	127,735,612,546	165,437,820,059	13.31

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja tidak langsung selama periode 2011-2015, setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 6,39%. Belanja langsung selama periode 2011-2015, setiap tahunnya juga mengalami kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 15,20%. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi anggaran belanja daerah selama periode 2011-2015, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah setiap tahunnya belum mencapai 100%, hal ini antara lain dikarenakan pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus datangnya sering terlambat sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan, efisiensi pelaksanaan kegiatan (sisa lelang), dan Penggunaan DBHCHT dibatasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009. Maka daerah sangat berhati-hati dalam penggunaannya sehingga berdampak pada realisasi penyerapan anggaran. Namun demikian dari tahun ketahun realisasinya semakin meningkat meski belum mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semakin baik.

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Metro
Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Berambah/ (Berkurang)
2011	550,702,615,520	514,796,885,444	93.48	- 35,905,730,076.00
2012	580,158,460,823	518,616,362,046.82	89.39	- 61,542,098,776.18
2013	686,262,526,418.60	609,265,220,466.90	88.78	- 76,997,305,951.70
2014	763,339,885,570	694,000,976,646	90.92	- 69,338,908,924.00
2015**	805,897,245,099.62	757,883,425,365	94.04	- 48,013,819,734.62

Sumber : BPKAD Kota Metro

Ket. *) data unaudit

Sedangkan target realisasi belanja pegawai Kota Metro tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Metro
Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Berambah/ (Berkurang)
2011	262,770,414,651	249,574,838,440	94.98	- 13,195,576,211
2012	335,875,641,606	283,304,693,315.82	84.35	- 52,570,948,290
2013	351,652,763,934	309,198,254,851.90	87.93	- 42,454,509,082
2014	371,426,296,145	335,838,413,136	90.42	- 35,587,883,009
2015**	353,246,097,025.62	337,120,337,130	95.43	- 16,125,759,896

Sumber : BPKAD Kota Metro

Ket. *) data unaudit

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya belanja pegawai selama periode 2011-2015, setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,91% namun realisasinya tidak mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas dan atau meninggal pada tahun anggaran berjalan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran belanja

pegawai. Sementara di dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai harus penuh sesuai dengan kebutuhan dalam satu tahun anggaran.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kota Metro mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 dan rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Metro
Tahun Anggaran 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
I.	PEMBIAYAAN DAERAH	36,104,037,448.46	31,977,596,510.11	62,483,985,028.60	70,446,991,192.60	77,394,935,949.52	26.64
1.1	Penerimaan Pembiayaan	39,197,414,358.46	35,059,084,470.11	64,431,855,697.60	71,546,991,192.60	82,234,697,522.02	24.80
1.1.1	SiLPA	39,164,401,606.46	35,019,347,556.11	64,361,826,809.60	71,532,816,858.60	82,215,947,753.02	24.82
1.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	33,012,752	39,736,914	70,028,888	14,174,334	18,749,769	12.28
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	3,093,376,910	3,081,487,960	1,947,870,669	1,100,000,000	4,839,761,573	64.82
1.2.1	Penyertaan Modal	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	12.50
1.2.2	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	2,093,376,910	2,081,487,960	947,870,669	100,000,000	3,339,761,572.50	773.82

Sumber : BPKAD Kota Metro

Ket. *) data unaudit

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPAtahun lalu, besarnya SiLPAtahun lalu perkembangannya cenderung mengalami peningkatanrata-rata per tahun sebesar24,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Metro masih perlu diperbaiki.

Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponenpenyertaan modal, hal ini untuk memperkuat kepemilikan saham Pemerintah Kota Metro di Bank Lampung.

3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kota Metro selama kurun waktu 2011-2014 seperti terlihat pada Tabel 3.6 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut.

Tabel 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Metro
Tahun Anggaran 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	1,752,295,475,344	1,941,480,221,147	2,069,858,700,009	2,207,351,333,565	8.02
1.1	Aset Lancar	62,193,566,069	104,241,581,048	122,062,289,706	149,116,290,073	35.62
1.1.1	Kas	40,615,731,457	72,427,750,982.60	71,532,816,858.60	82,223,247,753.02	30.68
1.1.2	Piutang	16,288,959,499	25,958,628,669.09	42,511,398,604.85	54,954,518,846.99	50.80
1.1.3	Persediaan	5,288,875,113	5,855,201,396.50	8,018,074,243.00	11,938,523,473.00	32.18
1.2	Investasi Jangka Panjang	6,581,457,352	7,581,457,352	8,581,457,352	9,581,457,352	13.35
1.2.1	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-
1.2.2	Investasi Permanen	6,581,457,352	7,581,457,352.03	8,581,457,352.03	9,581,457,352.03	13.35
1.3	Aset Tetap	1,637,943,610,671	1,782,738,180,155	1,891,143,171,849	2,000,584,875,548	6.90
1.3.1	Tanah	575,447,999,565	628,562,654,049.00	628,572,654,049.00	628,572,654,049.00	3.08

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.3.2	Peralatan dan Mesin	133,608,834,194	141,686,256,562.00	158,287,753,618.00	174,844,921,381.00	9.41
1.3.3	Gedung dan Bangunan	304,198,451,135	354,998,000,207.00	384,796,730,873.00	428,843,230,958.00	12.18
1.3.4	Jalan Irigasi dan Jaringan	615,181,098,036	625,612,727,001.00	664,553,171,896.00	729,603,341,612.00	5.90
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	5,132,029,305	31,156,587,336.00	35,557,980,263.00	37,850,122,548.00	175.89
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	4,375,198,436	721,955,000.00	19,374,881,150.00	870,605,000.00	801.55
1.4	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.5	Aset Lainnya	45,576,841,252	46,919,002,592	48,071,781,102	48,068,710,592	1.80
1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	44,471,180,000	43,156,720,000.00	43,156,720,000.00	43,156,720,000.00	- 0.99
1.5.2	Aset Tak Berwujud	579,148,000	1,148,806,340.00	1,489,876,340.00	2,298,514,340.00	60.78
1.5.3	Aset Lain-lain	526,513,252	2,613,476,252.00	3,425,184,762.00	2,613,476,252.00	134.58
2	KEWAJIBAN	19,822,153,722	24,007,276,195	29,117,869,928	19,218,025,353	2.80
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	18,527,371,760	23,082,431,937	29,117,869,928	19,218,025,353	5.58
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	148,471	763,116.00	-	-	104.66
2.1.2	Utang Bunga dan Denda	9,935,628,269	12,742,440,927.68	13,490,203,795.00	-	- 21.96
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5,595,896,143	4,832,216,555.02	4,809,191,895.00	3,339,761,572.50	-14.89
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	2,995,698,877	5,507,011,338.00	10,818,474,238.00	15,878,263,780.34	75.68
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	1,294,781,962	924,844,259	-	-	- 42.86
2.2.1	Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	1,294,781,962	924,844,258.61	-	-	- 42.86
3	EKUITAS DANA	1,731,543,546,132	1,917,472,944,952	2,040,740,830,081	2,188,133,308,212	8.13
3.1	Ekuitas Dana Lancar	43,684,289,488	81,159,149,111	92,944,419,778	129,898,264,720	46.69
3.1.1	SilPA	35,019,347,556	64,361,826,809.60	71,532,816,858.60	82,215,947,753.02	36.62
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan	5,596,235,430	8,065,161,057.00	-	7,300,000.00	14.71
3.1.3	Cadangan Piutang	16,307,054,677	25,958,628,669.09	42,511,398,604.85	54,954,518,846.99	50.74
3.1.4	Cadangan Persediaan	5,288,875,113	5,855,201,396.50	8,018,074,243.00	11,938,523,473.00	32.18
3.1.5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-18,527,223,289	- 23,081,668,820.70	- 29,117,869,928.00	-19,218,025,352.84	5.58
3.2	Ekuitas Dana Investasi	1,687,859,256,644	1,836,313,795,840	1,947,796,410,303	2,058,235,043,492	6.85
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	6,581,457,352	7,581,457,352.03	8,581,457,352.03	9,581,457,352.03	13.35
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1,637,943,610,671	1,782,738,180,155.00	1,891,143,171,849.00	2,000,584,875,548.00	6.90
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	45,576,841,252	46,919,002,592.00	48,071,781,102.00	48,068,710,592.00	1.80
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-2,242,652,631	- 924,844,258.61	-	-	- 52.92
3.3	Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,751,365,699,853	1,941,480,221,147	2,069,858,700,009	2,207,351,333,565	8.04

Sumber : BPKAD Kota Metro

Selama kurun waktu 2011-2015,perkembangan jumlahaset Pemerintah Kota Metro mengalami perkembanganyangmeningkat, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8,02%. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan

persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraandengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kota Metro dalam kurun waktu 4 tahun (2011-2015) berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,80%.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain.

Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Sedangkan rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo.

Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rata-rata pertumbuhan rasio keuangan Kota Metro Tahun Anggaran 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Rata-Rata Pertumbuhan Rasio Keuangan Kota Metro
Tahun Anggaran 2011-2014

	2011	2012	2013	2014	Rata-rata (%)
Rasio Likuiditas					
- Rasio Lancar (Current ratio)	3.36	4.52	4.19	7.76	4.96
- Rasio Quick	307.24	426.26	391.66	713.80	459.74
Rasio Solvabilitas					
- Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	1.19	1.24	1.41	0.87	1.18

- Rasio Hutang terhadap Modal	98.81	98.76	98.59	99.13	98.82
Rasio Aktivitas					
- Rata-rata Umur Piutang	108.70	80.82	87.07	47.04	80.91
- Rata-rata Umur Persediaan	183.63	182.50	182.50	182.50	182.78

Dari Tabel 3.7 terlihat selama tahun 2011-2014 rasio lancar mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan likuiditas Pemerintah Kota Metro cukup bagus karena kemampuan membayar utangnya tinggi. Namun rasio ini mengalami penurunan pada tahun 2013 karena adanya utang bagi hasil pajak dan bukan pajak. Trend *quick ratio* hampir sama polanya dengan *current ratio*. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2012, tetapi tingginya *quick ratio* memberikan jaminan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Metro dalam melunasi utang jangka pendeknya tinggi.

Rasio utang terhadap aset serta utang terhadap total modal menunjukkan tingkat *leverage* Pemerintah Kota Metro. Nilai *leverage* menunjukkan kisaran angka dibawah 2%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aset Pemerintah Kota Metro didanai dari modal sendiri. Rendahnya tingkat *leverage* mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Metro pada kondisi yang kuat.

Secara umum kondisi keuangan yang dicerminkan melalui rasio neraca dan APBD dapat ditunjukkan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Kota Metro terhadap APBD. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah kota dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan kota.

Tabel 3.8
Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Metro
Tahun 2011-2015

Tahun	APBD	Bantuan Pemerintah Pusat (Pant. Bant. Keuangan)	Rasio Kemandirian (2/3x100)
1	2	3	4
2011	42,102,812,101.00	370,492,344,448.00	11.36
2012	48,377,824,855.84	406,176,881,782.00	11.91
2013	73,038,244,838.51	451,227,114,937.00	16.19
2014	97,421,477,067.36	487,715,129,640.00	19.98
2015**	127,567,680,290.11	494,176,895,418.00	25.81

Sumber : BPKAD Kota Metro

Ket. *) data unaudit

Dari tabel 3.8.diatas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Metro masih rendah. Semakin rendah rasio kemandirian mempunyai arti bahwa tingkat ketergantungan kota terhadap bantuan pemerintah pusat semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Data di atas, meskipun terjadi perkembangan yang cukup signifikan di tahun 2015, menunjukkan rendahnya rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Metro. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Metro terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi.

3.1.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kota Metro pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, sebagai berikut:

1) Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kota Metro sebagaimana tertuang pada Tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Metro
Tahun Anggaran 2011-2015

No	Uraian	2011			2012			2013			2014			2015			Rata-rata	Tingkat Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Proporsi	Anggaran	Realisasi	Proporsi	Anggaran	Realisasi	Proporsi	Anggaran	Realisasi	Proporsi	Anggaran	Realisasi	Proporsi		
	BELANJA	550,702,615,520	514,796,885,444	93.48	580,158,460,823	518,616,362,047	89.39	686,262,526,418	609,265,220,466	88.78	763,339,885,570	694,000,976,646	90.92	805,897,245,099.62	757,883,425,365.00	94.04		91.32
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	287,885,729,651	273,599,135,546	95.04	324,940,996,480	301,829,204,887	92.89	372,521,839,358	326,819,012,131	87.73	394,456,204,145	355,473,352,180	90.12	365,766,233,626	349,033,342,430	95.43		92.24
1	Belanja Pegawai	262,770,414,651	249,574,838,440	94.98	304,799,200,056	283,304,693,315.82	92.95	351,652,763,934	308,198,254,851	87.93	371,426,296,145	335,838,413,136	90.42	353,246,097,026	337,120,337,130	95.43		92.34
2	Belanja Hibah	21,156,065,000	20,719,091,750	97.93	18,241,796,424	17,510,956,250	95.99	17,809,825,424	17,009,026,500	95.50	19,484,575,000	18,504,985,720	94.97	11,270,136,600.00	11,270,136,600.00	100.00		96.88
3	Belanja Bantuan Sosial	3,459,250,000	2,925,716,521	84.58	500,000,000	473,146,521	94.63	1,059,250,000	70,000,000	6.61	901,050,000	5,000,000	0.55	-	-	0.00		37.27
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa			0.00			0.00	500,000,000	473,064,416	94.61	1,144,263,000	1,117,413,324	97.65	750,000,000.00	642,868,700.00	85.72		55.60
5	Belanja Tidak Terduga	500,000,000	379,488,835	75.90	1,400,000,000	540,408,800	38.60	1,500,000,000	68,666,364	4.58	1,500,000,000	7,540,000	0.50	500,000,000.00	-	-100.00		3.92
B.	BELANJA LANGSUNG	262,816,885,869	241,197,749,898	91.77	255,217,464,343	216,787,157,160	84.94	313,740,687,060	282,446,208,335	90.03	368,883,681,425	338,527,624,466	91.77	440,131,011,474.00	408,850,082,935.00	92.89		90.28
1	Belanja Pegawai	26,634,570,050	24,780,287,248	93.04	31,076,441,550	28,677,384,885	92.28	37,897,310,042	35,527,540,814	93.75	28,584,860,592	26,196,426,323	91.64	35,738,407,707.00	32,779,600,389.00	91.72		92.49
2	Belanja Barang dan Jasa	102,362,322,036	95,490,515,500	93.29	122,815,196,931	113,254,459,240	92.22	155,601,418,275	142,473,794,581	91.56	200,428,107,942	184,596,585,597	92.10	228,108,993,924	210,632,662,487	92.34		92.30
3	Belanja Modal	133,819,993,783	120,926,947,150	90.37	101,325,825,862	74,855,313,035	73.88	120,241,958,743	104,444,872,940	86.86	139,870,712,891	127,735,612,546	91.32	176,283,609,843	165,437,820,059	93.85		87.26

Sumber : BPKAD Kota Metro
Ket. *) data unaudit

Berdasarkan Tabel 3.9, diperoleh gambaran bahwa, proporsi anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung lebih besar dibanding anggaran dan realisasi Belanja Langsung setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana APBD Kota Metro untuk mendanai program pembangunan selama ini relatif lebih kecil.

Dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat, realisasi mengalami kenaikan dari Rp273.599.135.546,- (2011) menjadi Rp349.033.342.430,- (2015), dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap anggaran mencapai 92,24%. Sedangkan tingkat realisasi Belanja Langsung dari tahun 2011 sebesar 91,77% sampai dengan tahun 2015 sebesar 92,89%, dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 90,28% atau lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung.

2) Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Metro
Tahun Anggaran 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
	BELANJA DAERAH	365,009,014,688	417,059,687,918	439,683,813,172	477,510,491,524	488,874,540,109
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	249,574,838,440	283,304,693,316	309,198,254,852	335,838,413,136	337,120,337,130
I.1	Belanja Pegawai	249,574,838,440	283,304,693,316	309,198,254,852	335,838,413,136	337,120,337,130
1	Gaji dan Tunjangan	210,294,289,104	228,472,206,695	240,814,217,507	253,006,746,574	262,018,383,335
2.	Tambahan Penghasilan PNS	37,916,926,300	53,003,444,000	66,049,410,370	80,362,345,579	72,543,939,765
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,001,980,000	1,140,880,000	1,726,000,000	1,725,250,000	1,774,900,000
4.	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	361,643,036	688,162,621	608,626,975	744,070,983	783,114,030
II.	BELANJA LANGSUNG	115,434,176,248	133,754,994,602	130,485,558,320	141,672,078,388	151,754,202,979
II.1	Belanja Pegawai	24,780,287,248	28,677,384,885	35,527,540,814	34,127,991,210	39,029,425,003
1.	Honorarium PNS	9,766,924,100	12,286,453,965	14,731,579,050	12,200,500,950	15,343,758,181
2.	Honorarium Non PNS	9,965,016,618	10,223,878,000	9,960,035,050	8,159,723,600	11,713,579,758

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
3.	Uang Lembur	3,012,848,630	3,682,437,250	4,712,627,700	4,819,775,773	4,759,712,950
4.	Penunjang Pelaksanaan Pendidikan	1,675,497,900	-	-	-	-
5.	Biaya Umum Peningkatan Kesejahteraan	360,000,000	2,484,615,670	5,344,726,014	7,935,914,887	6,249,324,614
6.	Belanja Pegawai BLUD RSUD A. Yani	-	-	778,573,000	1,012,076,000	963,049,500
II.2	Belanja Barang dan Jasa	90,653,889,000	105,077,609,717	94,958,017,506	107,544,087,178	112,724,777,976
1.	Biaya Bahan Habis Pakai	8,499,610,516	10,161,460,071	11,041,523,299	12,849,141,330	13,502,889,572
2.	Bahan/Material	10,644,138,868	12,825,387,297	5,908,743,168	5,111,331,890	5,915,868,103
3.	Biaya Jasa Kantor	29,416,304,360	30,961,303,852	19,871,056,782	27,309,227,840	28,772,673,944
4.	Premi Asuransi	3,194,116,931	3,577,397,644	4,377,992,643	6,259,919,506	6,182,276,166
5.	Perawatan Kendaraan Bermotor	4,452,297,373	4,994,777,442	5,061,764,821	6,628,408,673	6,488,438,336
6.	Cetak dan Penggandaan	7,520,363,069	9,626,777,268	10,676,469,227	12,046,190,378	10,777,721,790
7.	Sewa Rumah/Gedung	735,565,000	899,737,000	1,039,047,500	750,371,726	1,700,017,620
8.	Sewa Sarana Mobilitas	148,330,000	307,935,000	346,550,000	301,340,000	272,125,000
9.	Sewa Alat Berat	-	-	-	-	-
10.	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	322,441,100	454,167,500	521,360,000	713,691,000	2,284,901,000
11.	Belanja Makan dan Minum	7,595,265,732	9,352,368,355	9,460,655,525	11,093,662,365	12,748,732,375
12.	Belanja Pakaian Dinas	377,306,000	452,949,000	509,348,700	998,553,000	449,259,000
13.	Belanja Pakaian Kerja	627,243,500	546,365,700	548,227,750	1,178,727,000	876,399,300
14.	Belanja Pakaian Khusus	433,452,500	748,445,800	578,501,250	625,605,500	1,199,161,200
15.	Belanja Perjalanan Dinas Pegawai	10,670,270,564	12,779,158,385	12,667,939,532	10,336,760,699	10,277,657,568
16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	160,550,000	144,925,000	145,000,000	-	-
17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek	2,736,862,805	3,038,721,550	2,561,739,900	1,246,740,405	1,183,153,450
18.	Belanja Pemeliharaan	3,119,770,682	4,205,732,853	9,020,467,409	8,753,230,166	9,318,750,886
19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek Pemimpin dan Anggota DPRD	-	-	621,630,000	1,341,185,700	774,752,666

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2011-2015, rata-rata pertumbuhan belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur adalah sebesar 7,47%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif cukup lebih besar, hal ini dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Apabila dilihat proporsi dan perkembangan proporsinya, belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur

dari tahun 2011 ke tahun 2015 semakin menurun yaitu dari 70,48% pada tahun 2011 menjadi 64,10% di tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Metro Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran Belanja (Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase (%)
	(a)	(b)	(a)/(b)x100
2011	365,009,014,688	517,890,262,354	70.48
2012	417,059,687,918	521,697,850,007	79.94
2013	439,683,813,172	611,213,091,136	71.94
2014	477,510,491,524	695,100,976,646	68.70
2015*	488,874,540,109	762,723,186,938	64.10

Sumber : BPKAD Kota Metro

Ket. *) data unaudit

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang

sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

A. Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk itu, digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan, dan bertanggungjawab.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan serta memberikan lebih banyak alternatif pilihan model layanan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah.
- d. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

- e. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui dukungan analisa data baik melalui Asumsi Dasar (AD) maupun Celah Fiskal (CF).
- f. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui dukungan analisa data yang diperlukan Pemerintah baik instrument umum Indeks Fiskal Netto (IFN) maupun instrument khusus berupa karakteristik wilayah.
- g. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional.
- h. Meningkatkan hubungan/kerjasama antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Provinsi Lampung, dan dengan Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH).
- i. Mengembangkan fasilitas kerjasama dengan kabupaten/kota di bidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka kebijakan belanja daerah selama tahun anggaran 2011-2015 sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015,
- b. Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja,
- c. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif,
- d. Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015,
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kota Metro dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Kota Metro,
- f. Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,
- g. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Metro, dan



- h. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan khusus (DAK, Cukai Hasil Tembakau dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja utama Pemerintah Kota Metro sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

C. Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja,
- 2) Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD,
- 3) Defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

3.2.1 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Metro sebagaimana tabel berikut.

Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran Pemerintah Kota Metro dalam kurun tahun 2011-2015 dapat digambarkan pada Tabel di bawah.

Tabel 3.12
Perkembangan Defisit Riil Anggaran Kota Metro
Tahun Anggaran 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
Realisasi Pendapatan Daerah	513,712,195,552	551,000,592,346	618,314,052,297	705,769,933,206	741,455,624,140
Belanja Daerah	514,796,885,444	518,616,362,047	609,265,220,467	694,000,976,646	757,883,425,365
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,093,376,910	3,081,487,960	1,947,870,669	1,100,000,000	4,839,761,573
Defisit Riil	- 4,178,066,802	9,302,742,339	7,100,961,161	10,668,956,560	21,267,562,798

Sumber : BPKAD Kota Metro
Ket. *) data unaudit

Dari tabel 3.12 tersebut, terlihat bahwa terdapat defisit riil anggaran selamatahun 2011-2014 yang cenderung menurun. Tahun 2011 defisit riil anggaran sebesar Rp. 4.178.066.802,-, tahun 2012 terjadi surplus anggaran sebesar Rp 9.302.742.339,-, begitupun pada tahun 2013 – 2014 terjadi surplus anggaran, masing-masing sebesar Rp. 7.100.961.161,- dan Rp. 10.668.956.560,-, sedangkan padatahun 2015 kembali mengalami sebesar Rp. 21.267.562.798,-.

Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.13
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Metro
Tahun Anggaran 2011-2015

Uraian	Proporsi dari total Defisit Riil				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	39,164,401,606	35,019,347,556	64,361,826,810	71,532,816,859	82,215,947,753
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	33,012,752	39,736,914	70,028,888	14,174,334	18,749,769

Sumber : BPKAD Kota Metro

Ket. *) data unaudit

Di masa mendatang diharapkan SiLPA harus semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Metro.

3.2.2 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kota Metro pada 5 (lima) tahun terakhir, tertuang pada tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Metro
Tahun Anggaran 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015**	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	249,954,327,275	283,845,102,116	309,266,921,216	335,845,953,136	337,120,337,130	7.8
1	Gaji dan Tunjangan	210,294,289,104	228,472,206,695	240,814,217,507	253,006,746,574	262,018,383,335	5.6
2	Tambahan Penghasilan PNS	37,916,926,300	53,003,444,000	66,049,410,370	80,362,345,579	72,543,939,765	19.0
3	Belanja	1,001,980,000	1,140,880,000	1,726,000,000	1,725,250,000	1,774,900,000	17.0

	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH						
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	361,643,036	688,162,621	608,626,975	744,070,983	783,114,030	26.56
5	Belanja Tidak Terduga	379,488,835	540,408,800	68,666,364	7,540,000		58.48
B.	BELANJA LANGSUNG	45,562,329,180	49,694,939,009	72,144,314,105	107,117,592,120	134,142,471,778	31.99
1	Belanja Operasional Pelayanan (Rutin)	45,562,329,180	49,694,939,009	40,352,337,545	53,046,697,349	54,946,278,018	6.33
2	Belanja Pilkada	-	-	-		10,982,636,600	25.00
3	Belanja BLUD	-	-	31,791,976,560	54,070,894,771	68,213,557,160	49.06
C.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,093,376,910	2,081,487,960	947,870,669	100,000,000	4,839,761,572	1148.82
1	Pembayaran Pokok Utang	2,093,376,910	2,081,487,960	947,870,669	100,000,000	4,839,761,572	1148.82

Sumber : BPKAD Kota Metro

Ket. *) data unaudit

Selama periode tahun 2011-2015, rata-rata pertumbuhan belanja wajib dan mengikat adalah 7,87% per tahun. Hal ini menunjukkan alokasi belanja untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat cenderung mengalami peningkatan seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang harus dipenuhi.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas

keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2021

Berdasarkan capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2011 - 2015, maka pendapatan sampai dengan tahun 2021 diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, serta BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah..
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
5. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
6. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
7. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

8. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
9. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.
9. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak.
10. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
11. Perubahan tariff pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
12. Perluasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah (perluasan *tax based*) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
13. Penyesuaian NJOP PBB di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan menggunakan peta zona nilai tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan nilai pasar dan transaksi jual beli.

Gambaran proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2016 – 2021 dapat diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Metro
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tercatat Musi 2016	Proyeksi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.1	Pendapatan Asli Daerah	105,719,360,172	115,086,986,921	131,361,144,310	149,978,505,514	171,281,040,075	195,661,122,711
1.1.1	Pajak Daerah	13,472,000,000	14,874,000,000	16,539,888,000	18,392,355,456	20,452,299,267	22,742,956,785
1.1.2	Retribusi Daerah	5,691,901,200	6,151,887,200	6,716,015,256	7,331,873,855	8,004,206,688	8,738,192,441
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,797,944,259	4,000,000,000	4,422,400,000	4,889,405,440	5,405,726,654	5,976,571,389
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	82,757,514,713	90,061,099,721	103,682,841,054	119,364,870,763	137,418,807,466	158,203,402,095
1.2	Dana Perimbangan	591,484,568,340	591,484,568,340	612,097,662,016	612,097,662,016	612,097,662,016	612,097,662,016
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	21,605,435,000	21,605,435,000	20,068,208,300	20,068,208,300	20,068,208,300	20,068,208,300
1.2.2	Dana Alokasi Umum	463,881,055,000	463,881,055,000	486,031,375,376	486,031,375,376	486,031,375,376	486,031,375,376
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	105,998,078,340	105,998,078,340	105,998,078,340	105,998,078,340	105,998,078,340	105,998,078,340
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	126,941,344,494	127,941,376,000	130,306,745,500	130,306,745,500	130,306,745,500	130,306,745,500

1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	35,029,968,494	36,030,000,000	38,395,369,500	38,395,369,500	38,395,369,500	38,395,369,500
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otsus	91,911,376,000	91,911,376,000	91,911,376,000	91,911,376,000	91,911,376,000	91,911,376,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		824,145,273,006	834,512,931,261	873,765,551,826	892,382,913,030	913,685,447,591	938,065,530,227

Sumber : BPKAD, Dispenda, data diolah

Dari Tabel 3.15 di atas diproyeksikan bahwa proyeksi pendapatan daerah selama 5 tahun ke depan (2016 – 2021) akan mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 14,19% per tahun, terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Selain itu, peningkatan PAD dilakukan dengan meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja BUMD, serta lain-lain PAD sesuai dengan standard dan acuan yang ditentukan.

3.3.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016 - 2021

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021

dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif, dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;

2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Metro yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kota Metro;
5. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
6. Mengakomodir program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
7. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
8. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan dan 10% untuk pembiayaan kesehatan.

Kebutuhan belanja langsung daerah tahun 2016 – 2021 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun 2015, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015, dengan mempertimbangkan komitmen dan dinamika kebijakan nasional.

Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, belanja operasional rutin, belanja operasional BLUD dan belanja untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota di tahun 2021.

Proyeksi kebutuhan belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada 3.16.

Tabel 3.16
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat
Pemerintah Kota Metro Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Target 2016	Proyeksi				
			2017	2018	2019	2020	2021
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	407,809,319,864	415,896,838,461	424,097,616,022	432,503,413,023	441,119,354,948	49,950,695,422
1	Gaji dan Tunjangan	318,143,543,864	326,097,132,461	334,249,560,772	342,605,799,791	351,170,944,786	359,950,218,406
2	Tambahan Penghasilan Guru PNS	86,911,376,000	86,911,376,000	86,911,376,000	86,911,376,000	86,911,376,000	86,911,376,000
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,886,800,000	1,933,970,000	1,982,319,250	2,031,877,231	2,082,674,162	2,134,741,016
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	67,600,000	54,360,000	954,360,000	954,360,000	954,360,000	954,360,000
B.	BELANJA LANGSUNG	55,907,692,240	56,848,781,450	57,878,295,840	58,856,651,609	59,924,870,174	71,924,619,526
	Belanja Pegawai	10,709,008,432	10,746,123,966	10,853,585,206	10,891,446,763	11,000,361,230	11,038,983,804
1	Belanja Pegawai BLUD	3,711,553,432	3,748,668,966	3,786,155,656	3,824,017,213	3,862,257,385	3,900,879,959
2	Belanja Pegawai Honoror	6,997,455,000	6,997,455,000	7,067,429,550	7,067,429,550	7,138,103,846	7,138,103,846
	Belanja Barang dan Jasa	45,198,683,808	46,102,657,484	47,024,710,634	47,965,204,847	48,924,508,943	60,885,635,722
1	Belanja Operasional Pelayanan (Rutin)	45,198,683,808	46,102,657,484	47,024,710,634	47,965,204,847	48,924,508,943	49,902,999,122
2	Belanja Pilkada						10,982,636,600
TOTAL (A+B)		463,717,012,104	472,745,619,911	481,975,911,862	491,360,064,632	501,044,225,122	521,875,314,948

Sumber : BPKAD, data diolah

3.3.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 - 2021

Proyeksi pembiayaan daerah di masa yang akan datang dari sisi penerimaan yaitu menggunakan perkiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sedangkan dari sisi pengeluaran dengan melakukan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban. Gambaran proyeksi pembiayaan daerah tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.17

Tabel 3.17
 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Metro
 Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Target APBD Murni 2016	Proyeksi				
			2017	2018	2019	2020	2021
3.1	Penerimaan Pembiayaan	49,445,419,716	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
3.1.1	SilPA	49,445,419,716	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
3.2.1	Penyertaan Modal	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

Sumber : BPKAD, data diolah

SilPA tahun 2017-2021 diproyeksikan tetap, namun demikian tahun-tahun mendatang diharapkan proses perencanaan dan penganggaran akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup : penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi : Pengeluaran pembiayaan direncanakan penyertaan modal BUMID disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMID dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMID.

3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2017 – 2021, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai
 Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Metro
 Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Target APBD Murni 2016	Proyeksi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	24,145,273,006	834,512,931,261	873,765,551,826	892,382,913,030	913,685,447,591	938,065,530,227
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	49,445,419,716	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
Total Penerimaan		873,590,692,722	864,512,931,261	903,765,551,826	922,382,913,030	943,685,447,591	968,065,530,227
Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta Prioritas Utama		463,717,012,104	472,745,619,911	481,975,911,862	491,360,064,632	501,044,225,122	521,875,314,948
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		409,873,680,618	391,767,311,350	421,789,639,964	431,022,848,399	442,641,222,470	446,190,215,278

Sumber :Bappeda dan BPKAD, data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 kelompok prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.19.Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota 2016-2021, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan. Program Prioritas I juga harus berhubungan dengan kepentingan publik, berskala besar, dan memiliki nilai manfaat yang tinggi yang memberikan dampak luas pada masyarakat.

Prioritas II,dialokasikan untuk mendanai prioritas belanja SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Disamping itu juga mendanai program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Kebijakan alokasi anggaran untuk prioritas II diarahkan pada :

1. Bidang Pendidikan
 - a. Peningkatan sarana prasarana pendidikan melalui penyediaan seragam sekolah gratis untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan
 - b. Pemerataan pelayanan pendidikan untuk mewujudkan *education for all*.
 - c. Peningkatan koordinasi, komunikasi, dan peran serta seluruh stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses dan output pendidikan.
2. Bidang Kesehatan
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan kesehatan
 - c. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
 - d. Penanggulangan penyakit endemik
 - e. Pengembangan budaya hidup sehat
3. Bidang Ekonomi
 - a. Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata keluarga untuk meningkatkan perekonomian lokal masyarakat
 - b. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perdagangan dan jasa
 - c. Pengembangan strategi pemasaran produk lokal di wilayah Kota Metro, regional Provinsi Lampung dan di tingkat nasional
 - d. Peningkatan kerjasama swasta untuk meningkatkan produktivitas UMKM.
 - e. Penataan pasar tradisional dan pasar modern untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi lokal.
4. Bidang Infrastruktur
 - a. Peningkatan perencanaan infrastruktur jaringan jalan, irigasi, drainase dan air minum yang terintegrasi

- b. Peningkatan kualitas drainase kota
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas kota.
 - d. Peningkatan kualitas dan sanitasi hunian.
 - e. Optimalisasi penataan ruang yang berkelanjutan
5. Bidang Reformasi Birokrasi
- a. Peningkatan akses pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, fasilitasi pelayanan di ruang publik, dan pemanfaatan teknologi informasi
 - b. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penggunaan pendekatan *money follow program priority* dalam sistem penganggaran, serta pengendalian kinerja dengan pendekatan partisipatif.
6. Sosial
- a. Program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
 - b. Pemberian bantuan pembangunan dan sarana prasarana rumah ibadah
 - c. Penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan produktivitas UMKM

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja untuk memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan belanja tidak langsung yang dilakukan dengan prinsip pengembangan Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Kota Metro dan Pemerintah Provinsi melalui pendekatan sektoral dan spasial, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada

pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

- b) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan partai politik yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kota kepada provinsi. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan partai politik diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kota Metro.
- c) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Kota Metro yang sifatnya mendesak dan darurat.

Tabel 3.19
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Metro Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Target APBD Murni 2016	Proyeksi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kapasitas Keuangan Daerah	873,590,692,722	864,512,931,261	903,765,551,826	922,382,913,030	943,685,447,591	968,065,530,227
	Dikurangi :						
	Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	463,717,012,104	472,745,619,911	481,975,911,862	491,360,064,632	501,044,225,122	521,875,314,948
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	409,873,680,618	391,767,311,350	421,789,639,964	431,022,848,399	442,641,222,470	446,190,215,278
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	55,000,000,000	56,100,000,000	57,222,000,000	58,366,440,000	59,533,768,800	60,724,444,176
3	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	328,932,902,618	309,207,717,790	337,578,854,533	345,127,847,259	355,028,321,307	356,825,056,092
4	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III	25,940,778,000	26,459,593,560	26,988,785,431	27,528,561,140	28,079,132,363	28,640,715,010
5	Surplus Anggaran Riil/Berimbang						

Sumber : Bappeda dan BPKAD, data diolah

Dengan demikian, kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat ditampilkan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Metro Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Target 2016	Proyeksi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN DAERAH	824,145,273,006	834,512,931,261	873,765,551,826	892,382,913,030	913,685,447,591	938,065,530,227
1.1	Pendapatan Asli Daerah	105,719,360,172	115,086,986,921	131,361,144,310	149,978,505,514	171,281,040,075	195,661,122,711
1.1.1	Pajak Daerah	13,472,000,000	14,874,000,000	16,539,888,000	18,392,355,456	20,452,299,267	22,742,956,785
1.1.2	Retribusi Daerah	5,691,901,200	6,151,887,200	6,716,015,256	7,331,873,855	8,004,206,688	8,738,192,441
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,797,944,259	4,000,000,000	4,422,400,000	4,889,405,440	5,405,726,654	5,976,571,389
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	82,757,514,713	90,061,099,721	103,682,841,054	119,364,870,763	137,418,807,466	158,203,402,095
1.2	Dana Perimbangan	591,484,568,340	591,484,568,340	612,097,662,016	612,097,662,016	612,097,662,016	612,097,662,016
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	21,605,435,000	21,605,435,000	20,068,208,300	20,068,208,300	20,068,208,300	20,068,208,300
1.2.2	Dana Alokasi Umum	463,881,055,000	463,881,055,000	486,031,375,376	486,031,375,376	486,031,375,376	486,031,375,376
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	105,998,078,340	105,998,078,340	105,998,078,340	105,998,078,340	105,998,078,340	105,998,078,340
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	126,941,344,494	127,941,376,000	130,306,745,500	130,306,745,500	130,306,745,500	130,306,745,500
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	35,029,968,494	36,030,000,000	38,395,369,500	38,395,369,500	38,395,369,500	38,395,369,500
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otsus	91,911,376,000	91,911,376,000	91,911,376,000	91,911,376,000	91,911,376,000	91,911,376,000
2	BELANJA DAERAH	872,090,692,722	863,012,931,261	902,265,551,826	920,882,913,030	942,185,447,591	966,565,530,227
2.1	Belanja Tidak Langsung	432,250,097,864	440,856,432,021	449,586,401,453	458,531,974,162	467,698,487,311	477,091,410,432
	Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	407,809,319,864	415,896,838,461	424,097,616,022	432,503,413,023	441,119,354,948	449,950,695,422
	Belanja Prioritas III	24,440,778,000	24,959,593,560	25,488,785,431	26,028,561,140	26,579,132,363	27,140,715,010
2.2	Belanja Langsung	439,840,594,858	422,156,499,240	452,679,150,373	462,350,938,868	474,486,960,281	489,474,119,795
	Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	55,907,692,240	56,848,781,450	57,878,295,840	58,856,651,609	59,924,870,174	71,924,619,526
	Prioritas I	55,000,000,000	56,100,000,000	57,222,000,000	58,366,440,000	59,533,768,800	60,724,444,176
	Prioritas II	328,932,902,618	309,207,717,790	337,578,854,533	345,127,847,259	355,028,321,307	356,825,056,092
	Surplus/Defisit	-47,945,419,716	-28,500,000,000	-28,500,000,000	-28,500,000,000	-28,500,000,000	-28,500,000,000
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan	49,445,419,716	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
3.2	Pengeluaran	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

Sumber :Bappeda dan BPKAD, data diolah

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. TELAAH LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di Kota Metro dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Berikut disajikan rekomendasi KLHS untuk perencanaan lima tahun kedepan berupa kebijakan, strategi dan rekomendasi. Adapun rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rekomendasi KLHS

NO	ZONA	REKOMENDASI
1.	Pendidikan	Pengembangan area/kawasan pendidikan agar memperhatikan sarana prasarana penunjang (jalan akses, air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dll)
2.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Zona Pariwisata agar disosialisasikan kepada bagian perijinan pembangunan (IMB), sehingga sesuai dalam mengeluarkan IMB; • Pengembang pariwisata agar memperhatikan sarana prasarana penunjang (jalan akses, air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dll);
3.	Pertanian	Perlu dilakukan sosialisasi penetapan Zona Pertanian sehingga tidak akan terjadi perubahan fungsi
4.	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Zona RTH agar dipublikasikan kepada stakeholder dan masyarakat sehingga tidak akan terjadi perubahan fungsi • Zona RTH dapat 'dibangun' sehingga mempunyai fungsi ganda selain sebagai sarana RTH • Pengembangan RTH kota perlu pemilihan model dan jenis tanaman yang sesuai dengan karakter kegiatan dimana RTH kota tersebut akan ditempatkan.
5.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Zona Perumahan (kepadatan tinggi, sedang) agar disosialisasikan kepada bagian perijinan pembangunan (IMB), sehingga sesuai dalam mengeluarkan IMB • Pengembangan permukiman agar memperhatikan sarana prasarana penunjang (jalan akses, air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dll)
6.	Perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Zona Perdagangan dan Jasa agar disosialisasikan kepada bagian perijinan pembangunan (IMB), sehingga sesuai dalam mengeluarkan IMB

		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan area/kawasan perdagangan dan jasa agar memperhatikan sarana prasarana penunjang (jalan akses, air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dll)
7.	Industri	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan industri kecil/mikro harus disertai dengan pembangunan IPAL Komunal oleh pemerintah yang selanjutnya dioperasikan dan dipelihara oleh para pemilik industri kecil/mikro
8.	Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilengkapi dengan panataan drainase yang baik sehingga tidak akan menimbulkan genangan; Perlu dilakukan sosialisasi khususnya untuk penetapan Zona Perikanan sehingga tidak akan terjadi perubahan fungsi lahan
8.	Suaka Alam dan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan lindung setempat kota yang akan memberikan perlindungan terhadap sempadan pantai; Pengembangan kawasan lindung setempat kota yang akan memberikan perlindungan sempadan sungai;

Tabel 4.2
Kebijakan dan Strategi KLHS

No	Kebijakan	Strategi
1.	Peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pelayanan wilayah secara sinergis untuk mendukung perwujudan kota pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Membagi wilayah kota menjadi wilayah-wilayah pengembangan dan menetapkan pusat dan sub pusat pelayanan kota serta pusat pelayanan lingkungan yang didukung oleh kelengkapan prasarana dan sarana kota secara memadai. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan wilayah secara proporsional sesuai rencana struktur ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
2.	Peningkatan pembangunan dan pengembangan sistem dan jaringan prasarana transportasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan untuk mendukung terwujudnya keseimbangan perkembangan antar wilayah sesuai rencana struktur ruang kota yang ditetapkan. Membangun dan meningkatkan prasarana terminal barang dan penumpang yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi lokal dan regional. Mengembangkan prasarana dan sarana angkutan umum serta menyediakan angkutan umum massal. Mendukung pembangunan dan pengembangan sistem jaringan kereta api. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
3.	Peningkatan jangkauan dan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan jangkauan dan kualitas

	Indikator	Strategi
	kualitas pelayanan telekomunikasi, energi/kelistrikan, sumberdaya air serta infrastruktur perkotaan lainnya.	<p>pelayanan jaringan air bersih.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan jangkauan pelayanan, sarana prasarana, serta kualitas pengelolaan persampahan dan air limbah. 3. Mengembangkan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan energi kelistrikan dan sarana penerangan jalan umum. 4. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah. 5. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan jaringan drainase untuk mengatasi masalah banjir dan genangan air. 6. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana. 7. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan jalur sepeda. 8. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pemadam kebakaran. 9. Meningkatkan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan sumber daya air serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air, konservasi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
4.	Pelestarian dan melindungi kawasan lindung dari alih fungsi lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan tersebut dari bahaya longsor dan erosi. 2. Mengembangkan kawasan yang potensial sebagai kawasan lindung pada garis sempadan sungai/anak sungai dan jalur rel kereta api, dan RTH koridor jalan. 3. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan konservasi pada kawasan lindung sekitar bendungan Way Raman, sempadan sungai/anak sungai, kawasan resapan air, sumber mata air, serta kawasan lindung lainnya. 4. Meningkatkan pengawasan serta memperketat perizinan terhadap kegiatan yang dapat merusak kawasan lindung.
5.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

No.	Kegiatan	Strategi
		<p>kerusakan lingkungan hidup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya buatan secara bijaksana untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. 4. Melaksanakan pengendalian serta memberikan sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 5. Menetapkan area mitigasi/evakuasi bencana serta menanggulangi bencana alam.
6.	Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada serta mengendalikan alih fungsi RTH ke fungsi lain. 2. Melaksanakan ekstensifikasi RTH serta mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi untuk menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. 4. Meningkatkan fungsi dan proporsi RTH pada kawasan terbangun.
7.	Peningkatan keseimbangan pembangunan antar wilayah serta keterpaduan sektor pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan lokasi dan kegiatan budidaya sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan pada seluruh wilayah. 2. Mempertahankan pusat pemerintahan yang ada serta mendorong pengembangan pelayanan pemerintahan ke arah selatan kota untuk mengurangi tekanan pembangunan di kawasan pusat kota sekaligus meningkatkan keseimbangan pembangunan antar wilayah. 3. Mempertahankan dan memelihara prasarana dan sarana pendidikan pada lokasi yang sudah tertata, serta mengembangkan kawasan pendidikan Iringmulyo Metro Timur, kawasan pendidikan Mulyojati Metro Barat dan sekitarnya, serta kawasan pendidikan lainnya. 4. Mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis pendidikan dan potensi sumber daya alam, serta mendukung pengembangan kegiatan agropolitan dan agrowisata ke arah utara dan selatan kota.

1.	Laki-laki	18 (75%)	18 (72%)	18 (72%)	19 (76%)	18 (72%)
2.	Perempuan	6 (25%)	7 (28%)	7 (28%)	6 (24%)	7(28%)
3.	Jumlah Total	24	25	25	25	25

Sumber : Badan Pusat Statistik

b. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan penderitaan baik secara fisik, seksual , psikologis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga. Jumlah kasus KDRT di Kota Metro yang dilaporkan ke Polres Kota Metro pada tahun 2010 adalah sebanyak 18 kasus. Angka ini sempat meningkat pada tahun 2011 menjadi 20 kasus namun pada tahun berikutnya, kasus KDRT yang dilaporkan mengalami penurunan yaitu 17 kasus pada tahun 2012 dan 13 kasus pada tahun 2013. Demikian pula halnya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, selama kurun waktu 2010-2013 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan, dari 18 kasus pada tahun 2010 menjadi hanya 3 kasus pada tahun 2013. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2010 mencapai 37 kasus namun pada tahun 2011, 2012 dan 2013 menurun menjadi masing-masing 6 kasus, 20 kasus dan 16 kasus. Data mengenai jumlah kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Polres Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.45
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
yang dilaporkan ke Polres Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2013

No.	Kategori	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	KDRT	18	20	17	13	59	50
2.	Kekerasan Terhadap Perempuan	18	12	14	3	15	33
3.	Kekerasan Terhadap Anak	37	7	20	16	14	9
4.	Jumlah Total	73	39	51	32	88	92

Sumber : Badan Pusat Statistik

11. Keluarga Berencana

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan umum di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Tujuan program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) orang anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Metro, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Metro adalah sebanyak 2-3 orang.

b. Rasio Akseptor KB

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kota Metro cukup baik yaitu TFR sebesar 2,3. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Metro mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kota Metro saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting daripada kuantitasnya. Berkaitan dengan hal itu berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kota Metro pada tahun 2010 adalah sebanyak 20.048 peserta dari 21.760 pasangan usia subur dengan rasio akseptor KB sebesar 92,13. Jumlah ini mengalami penurunan di tahun berikutnya dengan rasio akseptor KB yaitu 74,19 pada tahun 2011, 73,21 pada tahun 2012 dan 78,60 pada tahun 2013. Untuk lebih jelasnya data mengenai datae Akseptor KB di Kota Metro tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Data Akseptor KB di Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2014

No	Kategori	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah PUS	27.531	27.705	25.356	24.553
2.	Jumlah Peserta KB (Akseptor KB)	20.425	20.282	19.931	18.561
3.	Jumlah tidak ber-KB	7.106	7.423	5.425	5.992
4.	Persentase Akseptor KB	74,19	73,21	78,60	75,60

Sumber : BKKB dan PP Kota Metro, BPS Kota Metro

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan. Mewujudkan ketahanan pangan dengan berbasiskan pada kemandirian penyediaan pangan lokal adalah tugas pemerintah bersama dengan masyarakat. Kemandirian pangan ini menjadi semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial.

Tabel. 2.47
Ketersediaan Pangan Utama di Kota Metro Tahun 2011-2014

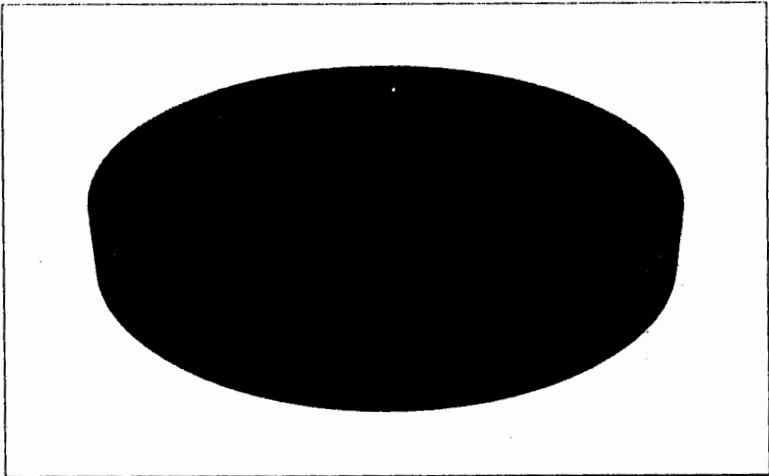
No.	Indikator	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	13.531,5	14.381,69	14.658,95	10.247,18
2.	Jumlah penduduk (Jiwa)	147.050	149.361	153.517	154.013
3.	Jumlah konsumsi pangan utama (ton)	15.319,67	15.560,43	15.800,88	16.045,07
4.	Persentase jumlah konsumsi pangan utama terhadap ketersediaan pangan utama	113,22	108,20	107,79	156,58

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan

Berdasarkan data mengenai ketersediaan pangan utama di Kota Metro, dapat dilihat bahwa Jumlah ketersediaan pangan di Kota Metro pada tahun 2011 sebanyak 13.531,5 ton, dengan jumlah konsumsi oleh 147.050 jiwa penduduk sebanyak 15.319,67 ton (113,22%). Jumlah ketersediaan pangan utama dan konsumsi pangan pada tahun berikutnya meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah ketersediaan pangan yaitu 10.247,18 ton dengan konsumsi pangan utama oleh 154.013 jiwa penduduk sebanyak 16.045,07 ton (156,58%).

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada Pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan. Demikian pula halnya dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah kabupaten/kota diantaranya adalah UU No. 7 tahun



Sistem pengelolaan persampahan di Kota Metro dimulai dari sumber timbunan sampah sampai dengan pemrosesan akhir di TPA Karangrejo, Metro Utara.

Tabel 2.48
Persentase Volume Sampah yang Tertangani di Kota Metro
Tahun 2011 - 2014

No	Indikator	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah volume sampah yang tertangani (m ³)	220 m ³ /hari	220 m ³ /hari	220 m ³ /hari	246 m ³ /hari
2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	320	330	340	356
3.	Persentase	68,75%	66,66%	64,70%	69,10%

Sumber: Dinas Tata Kota Metro

b. Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah per satuan Penduduk

Pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan truk pengangkut sampah. Berikut ini disajikan data mengenai sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Metro.

Tabel. 2.49
Sistem Pengelolaan Persampahan yang Ada di Kota Metro
Tahun 2015

No	Kategori Kegiatan	Saluran yang digunakan	Volume (m ³)
1.	User Interface	Kotak sampah/Bak Sampah	225
2.	Pengumpulan setempat	Motor roda 3	12
3.		Gerobak sampah	50
4.	Penampungan Sementara	Kontainer	16

No.	Kebijakan	Strategi
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengembangkan industri berbasis bahan baku lokal dan kegiatan agribisnis yang berorientasi pada pasar regional, nasional dan internasional di wilayah utara dan selatan kota. 6. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya. 7. Meningkatkan pengembangan ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagai upaya untuk meningkatkan ruang terbuka publik dan pusat aktifitas sosial budaya masyarakat.
8.	Pengoptimalan pengelolaan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan memberikan insentif perkembangan kawasan budidaya yang sesuai dengan rencana tata ruang. 2. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa baik tradisional maupun modern secara terpadu dan sinergis. 3. Menata dan merevitalisasi sarana dan prasarana pasar tradisional serta kawasan permukiman kumuh. 4. Memberikan kemudahan dan perangkat insentif bagi pembangunan dan pengembangan kegiatan pendidikan yang memiliki keunggulan dan berdaya saing.
9.	Pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan ketentuan dan rencana peruntukannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperketat perizinan dan meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan fungsi ruang. 2. Membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. 3. Membatasi luas lantai bangunan perumahan yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha, serta menyediakan prasarana yang memadai terutama prasarana parkir, RTH, dan tempat resapan air. 4. Mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang tidak tertata dan tumpah ke jalan serta keberadaan sektor informal/pedagang kaki lima (PKL). 5. Mengendalikan dan menertibkan pusat perbelanjaan, pertokoan eceran, dan/pasar modern untuk diarahkan ke lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. 6. Memberikan sanksi disinsentif dan/atau relokasi bagi kegiatan budidaya yang tidak sesuai lagi lokasinya serta melanggar garis

No	Kelembagaan	Strategi
		sempadan jalan, sempadan sungai/anak sungai, termasuk lembaga pendidikan yang tidak menyediakan tempat parkir secara memadai sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi kapasitas desain jaringan jalan.

4.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah Kota Metro pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

Permasalahan pembangunan yang akan disajikan dalam dokumen RPJMD ini dihasilkan dari analisa data yang disajikan dalam Bab II, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015, dan hasil Survey Harapan Masyarakat Kota Metro Tahun 2015.

Tabel 4.2.
Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
1.	Pendidikan.	<p>a. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan di Kota Metro. Tolok ukur pelayanan yang diberikan adalah sarana prasarana dan sumberdaya manusia. Pelayanan cenderung diarahkan pada sekolah-sekolah tertentu, terutama sekolah yang dulunya melaksanakan sistem RSBI.</p> <p>b. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik. Tolok ukur dilihat dari kualifikasi pendidikan dan persepsi masyarakat tentang permasalahan sektor pendidikan. Berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Metro Tahun 2016, sebanyak 21% tenaga pendidik pada pendidikan dasar belum berkualifikasi S1. Kondisi ini juga didukung dengan persepsi masyarakat tentang permasalahan pendidikan yang menyatakan kualitas guru rendah sebanyak 41%.</p> <p>c. Belum optimalnya sosialisasi maupun pelaksanaan perubahan kebijakan kurikulum pendidikan. Tolok</p>

		<p>ukur dilihat dari persepsi masyarakat tentang permasalahan sektor pendidikan.</p> <p>d. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan inklusif. Keterbatasan sumberdaya manusia yang menguasai pola pendidikan inklusif dan masih kurangnya sarana prasarana pendidikan inklusif serta sosialisasi pendidikan inklusif di masyarakat.</p> <p>e. Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal. Indikator pencapaian yang masih memerlukan perhatian adalah kualitas tenaga pendidik.</p> <p>f. Pola pendidikan yang berkarakter dan agamis belum dominan.</p>
2.	Kesehatan.	<p>a. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Tolok ukur pelayanan yang diberikan adalah sumberdaya manusia dan sarana prasarana. "jiwa melayani" yang masih rendah merupakan permasalahan utama dalam bidang kesehatan. Sedangkan sarana prasarana rujukan di RSUD Ahmad Yani masih perlu ditingkatkan.</p> <p>b. Prosedur pelayanan yang kurang efektif dan efisien. Tolok ukur dilihat dari persepsi masyarakat tentang permasalahan sektor kesehatan.</p>
3.	Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat.	<p>a. Kurangnya lapangan kerja yang ada di Kota Metro. Kondisi ini disebabkan kurangnya kebijakan yang mendukung investasi di Kota Metro serta belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan skill khusus untuk menciptakan masyarakat wirausaha yang mandiri.</p> <p>b. Belum optimalnya peran lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat.</p> <p>c. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana di Kelurahan.</p>
4.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.	<p>1. Masih lemahnya penataan administrasi kependudukan. Tolok ukur kualitas administrasi kependudukan adalah data kependudukan yang belum memadai.</p> <p>2. Kualitas pelayanan yang masih rendah. Tolok ukur dilihat dari persepsi masyarakat yang menyoroti tentang lamanya waktu pelayanan dan berbelit-belit.</p>
5.	Kepemudaan dan Olahraga.	<p>a. Belum optimalnya pembinaan olahraga dan organisasi kepemudaan dari pemerintah.</p> <p>b. Keterbatasan sarana prasarana dan kurang optimalnya pengelolaan sarana prasarana olahraga yang ada.</p> <p>c. Kurangnya koordinasi antar Dinas Pendidikan dan Dinas Tata Kota yang memiliki keterkaitan peran dan fungsi dalam pembinaan kepemudaan dan</p>

		olahraga.
6.	Perpustakaan.	<p>a. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan. Tolok ukur pelayanan dilihat dari sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Keterbatasan jumlah dan masih rendahnya kualitas SDM pengelola menjadi permasalahan utama dalam pelayanan. Selain itu, fasilitas pendukung perpustakaan dan koleksi buku yang masih terbatas.</p> <p>b. Masih belum memadainya fasilitas pendukung pelayanan perpustakaan berbasis IT.</p> <p>c. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.</p>
7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Belum optimalnya perlindungan terhadap anak. Keterbatasan kebijakan terhadap perlindungan dan pengembangan anak serta kurangnya tindak lanjut kasus kekerasan pada anak.
8.	Pertanian.	Belum optimalnya upaya peningkatan produktifitas pertanian untuk mengatasi luas lahan yang semakin menurun, permasalahan irigasi dan kapasitas kelembagaan di bidang pertanian.
9.	Pangan.	Belum optimalnya pengembangan literasi pangan (keamanan dan keragaman pangan).
10.	Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	<p>Belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil dan menengah. Permasalahan utama adalah :</p> <p>a. sulitnya industri kecil mengakses bantuan modal dari pihak perbankan. Hal ini disebabkan pelaku industri kecil tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yang diajukan oleh pihak bank.</p> <p>b. Kurangnya pengembangan dan pelatihan skill khusus pada industri kecil. Ketika permintaan menjadi tinggi, produsen tidak dapat memenuhi.</p> <p>c. Pemasaran yang tidak optimal, baik dari sisi kemasan produk yang tidak menarik maupun teknik distribusi.</p> <p>d. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap industri kecil. Tolok ukur dilihat dari persepsi masyarakat pada sektor perekonomian.</p>
11.	Perdagangan.	Belum optimalnya upaya revitalisasi pasar tradisional. Kondisi ini dapat dilihat dari pengaturan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern dan pembangunan infrastruktur pasar.
12.	Penanaman Modal.	<p>a. Belum optimalnya kebijakan pendukung investasi, baik kebijakan teknis maupun non teknis.</p> <p>b. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur penarik investasi. Tolok ukur salah satunya dilihat dari kondisi jalan yang ada di Kota Metro, baik jalan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah.</p>
13.	Perikanan.	Kurangnya upaya peningkatan produktivitas sektor perikanan darat.

14.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum terintegrasinya dokumen induk perencanaan infrastruktur jaringan jalan, irigasi, drainasen dan air minum. b. Masih buruknya kualitas drainase. c. Penyediaan utilitas umum perkotaan yang belum memadai. d. Masih sedikitnya cakupan pelayanan air bersih jaringan perpipaan kota. e. Belum maksimalnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan penataan ruang yang berkelanjutan.
15.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya kualitas hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama sanitasi dan utilitas permukiman. b. Persentasi perumahan yang bersanitasi baik masih rendah. c. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan saluran air limbah rumah tangga yang layak.
16.	Lingkungan Hidup.	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. b. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
17.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan manajemen informatika. b. Belum banyak tersedia lahan parkir yang memadai terutama dipusat-pusat keramaian.
18.	Birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyaknya praktek KKN dalam perekrutan pegawai negeri sipil. Tolok ukur dilihat dari persepsi masyarakat tentang permasalahan birokrasi. b. Belum optimalnya peningkatan dan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Tolok ukur dilihat dari persentase PAD dalam APBD.

4.1. ISU STRATEGIS

Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan isu strategis pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan dari kebijakan nasional, regional maupun lokal daerah. Hal terpenting yang diperhatikan dalam menyusun isu strategis adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah Kota Metro.

Isu strategis yang akan disajikan dikelompokkan berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan umum (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

4.1.1. Urusan Wajib

A. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a) Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, baik secara infrastruktur maupun sumberdaya manusia.
- b) Peningkatan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- c) Optimalisasi pelaksanaan pendidikan inklusif.

2. Kesehatan

- a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta manajemen pelayanan.
- b) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit.
- c) Peningkatan budaya hidup sehat masyarakat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Peningkatan perencanaan infrastruktur jaringan jalan, irigasi, drainase dan air minum yang terintegrasi
- b) Peningkatan kualitas drainase kota
- c) Peningkatan pelayanan air bersih jaringan perpipaan kota
- d) Peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas kota.
- e) Optimalisasi penataan ruang yang berkelanjutan dengan pengendalian alih fungsi lahan.
- f) Pengembangan Kota Metro sebagai kota penyangga Bandar Lampung Metropolitan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Peningkatan kualitas dan sanitasi hunian.
- b) Peningkatan kerjasama antar stakeholder dalam pelayanan kebutuhan permukiman.

- c) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembuangan limbah rumah tangga yang layak.
- 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - a) Peningkatan budaya dan kesadaran hukum masyarakat.
 - b) Peningkatan pelayanan perlindungan masyarakat.
- 6. Sosial
 - a) Penanggulangan kemiskinan
 - b) Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat.
 - c) Peningkatan karakter dan jati diri bangsa.
- B. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1. Tenaga Kerja
 - a) Optimalisasi penyediaan lapangan kerja dan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
 - b) Peningkatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian masyarakat melalui inovasi, teknologi, dan ekonomi kreatif.
 - 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak melalui penyediaan infrastuktur khusus perempuan dan anak (ruang publik anak).
 - 3. Pangan
 - a) Peningkatan ketahanan dan keragaman (literasi) pangan.
 - b) Menjaga stabilitas inflasi daerah terutama pada harga bahan pokok.
 - 4. Lingkungan Hidup
 - a) Optimalisasi pengendalian, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
 - b) Peningkatan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
 - c) Peningkatan infrastruktur pembuangan limbah.
 - 5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a) Peningkatan penataan administrasi kependudukan.
 - b) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam administrasi kependudukan.
 - c) Peningkatan manajemen pelayanan melalui pelayanan cepat, murah dan profesional.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui re-packaging program pemberdayaan masyarakat.
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Optimalisasi pemanfaatan struktur demografi.
 - b) Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
8. Perhubungan
 - a) Penguatan konektivitas antar wilayah di Kota Metro dan wilayah Kota Metro dengan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
 - b) Peningkatan kapasitas infrastruktur perhubungan.
 - c) Penyediaan lahan parkir dan peningkatan manajemen lahan parkir.
9. Komunikasi dan Informatika
 - a) Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan.
 - b) Peningkatan manajemen komunikasi dan informasi pembangunan.
 - c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan manajemen informatika.
10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a) Peningkatan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dalam perekonomian lokal.
 - b) Optimalisasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - c) Peningkatan usaha kecil dan menengah di bidang permodalan.
11. Penanaman Modal
 - a) Peningkatan iklim yang kondusif bagi investasi.
 - b) Peningkatan infrastruktur penarik investasi.
12. Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Optimalisasi pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan olahraga.
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
13. Statistik
 - a) Optimalisasi penyediaan, penyusunan dan publikasi data dan informasi statistik.
14. Kebudayaan

- a) Peningkatan upaya pelestarian kebudayaan daerah.
- b) Optimalisasi pemanfaatan kebudayaan daerah dalam rangka penguatan perekonomian lokal.

15. Perpustakaan

- a) Peningkatan budaya baca masyarakat.
- b) Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah dan sekolah berbasis IT.

16. Kearsipan

- a) Peningkatan manajemen kearsipan.
- b) Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam bidang kearsipan.

C. Urusan Pilihan

1. Pertanian

- a) Alih fungsi lahan pertanian
- b) Peningkatan produktivitas pertanian

2. Kelautan dan Perikanan

- a) Peningkatan produktivitas budidaya perikanan darat.

3. Pariwisata

- a) Optimalisasi pengembangan wisata alam.
- b) Peningkatan keragaman tujuan wisata melalui lokasi, kuliner, artefak budaya, dan kesenian daerah.

4. Kehutanan

- a) Pelestarian hutan kota sebagai ruang terbuka hijau.

5. Perdagangan

- a) Optimalisasi revitalisasi pasar tradisional sebagai peggerak perekonomian lokal.
- b) Peningkatan pengaturan pasar tradisional dan pasar modern untuk menjaga stabilitas perekonomian pasar tradisional.

6. Perindustrian

- a. Pengembangan industri pengolah hasil pertanian.
- b. Pengembangan industri mikro, menengah dan UMKM melalui ekonomi kreatif.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi merupakan cita-cita atau tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa visi pembangunan dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Dalam periode 2016-2021, Visi Pembangunan Kota Metro adalah **"Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif"**. Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh *stakeholder* di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro 2016-2021, terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu :

1. Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat yang berbudaya belajar di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan penyebaran pola perilaku pembelajar. Kota Pendidikan yang menjadi komitmen masyarakat dengan Pemerintah Kota Metro dalam RPJMD ini masih menjadi isu utama dengan fokus tahun 2016-2021 adalah pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan derajat kesehatan sebagai prasyarat terbentuknya sumberdaya manusia yang positif, kreatif, dan inovatif. Kota pendidikan dengan masyarakat yang berbudaya belajar akan dicapai melalui pendidikan inklusif dengan prinsip "education for all", pendidikan lifeskill, pendidikan keagamaan, dan pendidikan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
2. Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman, nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi, cocok untuk semua umur dan semua golongan, yang dapat menjadi ciri khas dan daya tarik Kota Metro. Wisata Keluarga sebagai program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi isu kedua dalam pelaksanaan

pembangunan lima tahun kedepan. Zona nyaman Kota Metro yang akan dibangun sebagai pondasi wisata keluarga diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* pada perekonomian lokal masyarakat Kota Metro, wajah Kota Metro, dan kondisi sosial masyarakat Kota Metro. Visi Wisata Keluarga akan dicapai melalui pemanfaatan potensi existing wisata alam dan buatan, seperti penataan taman-taman tematik, pengembangan Bumi Perkemahan dan Dam Raman, pembangunan tugu-tugu kota, penataan Gedung Wanita, pusat kuliner Nuwo Intan, Taman Merdeka dan Masjid Takwa. Visi Wisata Keluarga juga akan dicapai melalui pengembangan industri kreatif sebagai salah satu unsur penunjang pariwisata

3. Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa pembangunan di seluruh bidang yang didukung sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik. Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan akan diwujudkan melalui pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan pemanfaatan potensi lokal.
4. Pembangunan partisipatif mengandung arti penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk mewujudkan *good governance*. Masyarakat akan menjadi perencana, pelaksana dan pengendali sehingga terjadi persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan. Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya integrasi dan kekuatan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat dan kerja profesional pemerintah.

5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan harapan terwujudnya "Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang *good governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.2.1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai subjek pembangunan. Kualitas manusia yang dilihat dari pendidikan formal, pendidikan informal, karakter dan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya dan beragama, serta derajat kesehatan sebagai modal terbentuknya sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas. Sumberdaya manusia yang berbudaya belajar sebagaimana penjabaran kota pendidikan yang akan dicapai sampai tahun 2025 nanti.

Perkuatan sumberdaya manusia akan memberikan efek lanjutan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Manusia yang berkualitas akan menciptakan perubahan terhadap wajah kota serta kehidupan sosial dan ekonomi kota yang mengedepankan faktor moral, agama, dan lingkungan hidup untuk melahirkan sebuah kemajuan peradaban.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 adalah Pendidikan; Kesehatan; Pemuda dan Olahraga; Kebudayaan; Perpustakaan; Kearsipan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

5.2.2. Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Metro berbasis potensi lokal dimana sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata menjadi domain ekonomi lokal masyarakat saat ini.

Masyarakat akan ditempatkan dalam sebuah sistem perekonomian yang pelaksana kegiatan, pengawasan dan hasil kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Investasi akan terus dipicu dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal Kota Metro. Keterbatasan sumberdaya alam akan disiasati melalui industri kreatif dengan manajemen yang lebih profesional dari hulu sampai hilir.

Sektor pertanian masih menjadi agenda prioritas dengan pertimbangan tingkat kesuburan lahan, produktivitas serta sumberdaya pertanian yang unggul dan produktif. Sedangkan sektor pariwisata yang memiliki prioritas lebih tinggi sebagai salah satu tujuan visi akan diarahkan kepada wisata keluarga yang dapat memberikan efek besar terhadap perekonomian lokal masyarakat.

Perekonomian sebuah kota tentunya akan didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Tingkat aksesibilitas jasa dan perdagangan oleh kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Metro memiliki share sektor terbesar dalam PDRB Kota Metro lima tahun terakhir. Kondisi ini akan terus diperkuat dengan peningkatan pelayanan dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Urusan yang terkait dengan Misi 2 adalah Perdagangan; Perindustrian; Pariwisata; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Pangan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Pemberdayaan Masyarakat; Tenaga Kerja; Sosial.

5.2.3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan

Misi ini adalah upaya untuk mendukung dan memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Peningkatan kualitas infrastruktur akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip integrasi, *development for all* dan *sustainable development*.

Urusan yang terkait dengan Misi 3 adalah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika

- 5.2.4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang *good governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik

Misi ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efektif, efisien, responsif, dan berkeadilan melalui kelembagaan yang kokoh, sumberdaya aparatur yang profesional dan manajemen pemerintahan yang berkualitas dengan menitikberatkan pada pelayanan publik.

Urusan yang terkait dengan misi 4 adalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Penanaman Modal; Urusan Pemerintahan Umum

5.3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian isu strategis dan permasalahan pembangunan serta penjabaran visi dan misi pembangunan, tujuan dan sasaran akan disajikan dalam matrik berikut ini :

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

Metro Kota, Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020			
		1.1.4. Peningkatan pendidikan inklusif	1. Jumlah sekolah berbasis inklusif dan pusat sumber	18 sekolah	23 sekolah	28 sekolah	33 sekolah	38 sekolah			
		1.1.5. Peningkatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	1. Jumlah pemustaka yang berkunjung	63.525 orang	63.752 orang	64.064 orang	64.065 orang	64.065 orang			
		1.1.6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	109/100.000	90/100.000	80/100.000	75/100.000	70/100.000			
		2. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	8/1000	7,8/1000	7,5/1000	7,2/1000	7/1000				
		3. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	7,5/1000	7,2/1000	7/1000	6,8/1000	6,5/1000				
		4. Angka harapan hidup	71,15	71,31	71,47	71,63	71,79				
		1.1.7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	1. Rasio puskesmas, poliklinik, pusat persatuan penduduk	1 : 5.700	1 : 5.700	1 : 5.700	1 : 5.700	1 : 5.600			
			2. Rasio posyandu terhadap jumlah balita	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100			

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif								
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020
		1.1.8. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	1. Cakupan peserta PBI-JKN	100%	100%	100%	100%	100%
		1.1.9. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1. Cakupan keluarga sehat	5.700 klg	6.000 klg	6.200 klg	6.500 klg	6.800 klg
		1.1.10 Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB	1. Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	70%	70%	71%	71%	72%
			2. Angka Kelahiran Total (TFR)/WUS (Wanita Usia Subur 15-49 th)	2,02	2,02	2,01	2,01	2,01
			3. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 th (ASFR)	20/1000 kelahiran	18/1000 kelahiran	15/1000 kelahiran	10/1000 Kelahiran	5/1000 Kelahiran
		1.1.11. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Persentase penanganan kasus untuk perempuan dan anak korban kekerasan	25%	40%	50%	60%	70%
		1.1.12. Pemenuhan hak dasar anak	1. Jumlah Kelurahan layak anak	0	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan
		1.2. Meningkatkan prestasi pemuda	1. Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	5 lembaga	6 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V.9

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V. 10

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, dan mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan perencanaan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Setelah strategi dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran, kemudian ditetapkan arah kebijakan dari setiap strategi. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan di Kota Metro tahun 2016 - 2021 disajikan dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021

VISI : Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif				
MISI I: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	1.1 Pemerataan peningkatan pelayanan pendidikan dan kualitas pelayanan pendidikan	1.1.1 Peningkatan angka partisipasi sekolah	1.1.1.1 Peningkatan pendidikan	1.1.1.1 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
		1.1.2 Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1.1.2.1 Peningkatan pendidikan dan manajemen kependidikan	1.1.2.1 Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan manajemen kependidikan
		1.2 Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.	1.2.1 Peningkatan sarana pendidikan	1.2.1.1 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
	1.3 Peningkatan kualitas belajar	1.3.1 Mengoptimalkan proses belajar mengajar	1.3.1.1 Peningkatan Pelayan Dasar	1.3.1.1 Peningkatan Pelayan Pendidikan Dasar
		1.3.2 Mengembangkan kreatifitas dan kecakapan hidup siswa	1.3.2.1 Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.	1.3.2.1 Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
	1.4 Pengembangan Pendidikan Inklusif	1.4.1 Pemenuhan sarana prasarana anak berkebutuhan khusus	1.4.1.1 Penyediaan Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	1.4.1.1 Penyediaan Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
		1.4.2 Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK)	1.4.2.1 Meningkatkan kompetensi Pembimbing Khusus (GPK).	1.4.2.1 Meningkatkan kompetensi Guru Pembimbing Khusus (GPK).

1.5 Pemasarakan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	1.5.1 Mengembangkan Perpustakaan Daerah, Rumah Pintar, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Keliling.	1.5.1.1 Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah
1.6 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1.6.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	1.5.1.2 Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan
1.7 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.	1.7.1 Pemenuhan standar pelayanan puskesmas dan jaringannya.	1.6.1.1 Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan
1.8 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	1.7.2 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar	1.7.1.1 Penerapan manajemen puskesmas yang profesional dan akuntabel.
1.9 Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.	1.8.1 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin melalui PBI-JKN	1.7.2.1 Meningkatkan sarana prasarana dan manajemen rumah sakit.
	1.9.1 Penguatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS).	1.7.2.2 Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis.
		1.8.1.1 Meningkatkan kepesertaan PBI-JKN yang tepat sasaran
		1.9.1.1 Mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

<p>2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan</p> <p>3. Pengembangan dan Pelestarian budaya lokal</p>	<p>1.10 Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB</p> <p>1.11 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak</p> <p>1.12 Pemenuhan hak dasar anak.</p>	<p>1.10.1 Meningkatkan kualitas promosi KB dan konseling kesehatan reproduksi.</p> <p>1.11.1 Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.</p> <p>1.12.1 Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)</p> <p>2.1.1 Meningkatkan sarana prasarana dan membina organisasi kepemudaan dan olahraga</p>	<p>1.10.1.1 Meningkatkan kelestarian dan kemandirian peserta KB</p> <p>1.11.1.1 Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.</p> <p>1.12.1.1 Terwujudnya Kota Metro sebagai Kota Layak Anak.</p>
	<p>2.1 Peningkatan prestasi pemuda di seluruh bidang.</p>	<p>2.1.1 Meningkatkan kesadaran dan keragaman budaya.</p>	<p>2.1.1.1 Mengembangkan kreatifitas dan life skill kepemudaan dan olahraga.</p>
	<p>3.1 Pengembangan budaya dalam masyarakat.</p>	<p>3.1.1 Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya.</p>	<p>3.1.1.1 Meningkatkan pemasyarakatan seni dan budaya</p>
	<p>MISI II : Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa pertanian, dan pariwisata dalam rangka penanggulangan kemiskinan</p>		
	<p>1. Pengembangan wisata keluarga</p>	<p>1.1 Peningkatan Kepariwisataaan Daerah</p> <p>1.2 Peningkatan peran swasta dan sektor informal dalam mendukung pengembangan wisata keluarga</p>	<p>1.1.1.1 Mendorong tumbuhnya industri kreatif pendukung pariwisata daerah</p> <p>1.1.1.2 Meningkatkan sinergi pengembangan industri pariwisata daerah</p> <p>1.2.1.1 Mendorong tumbuhnya sektor swasta pendukung pengembangan wisata keluarga</p>

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan utilitas kota yang berawasan

lingkungan.	konektivitas antar kelurahan.	pergerakan orang dan barang/jasa.
1.1.2.1	1.1.2 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jembatan untuk kelancaran transportasi antar kelurahan	1.1.2.1 Memantapkan kondisi jembatan untuk mendukung kelancaran transportasi antar kelurahan.
1.2	1.2.1 Mengembangkan infrastruktur permukiman yang sehat.	1.2.1.1 Pembangunan dan pemerataan infrastruktur permukiman.
	1.2.2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.	1.2.2.1 Pembangunan sarpras air bersih dan sanitasi untuk peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi perkotaan guna mendukung program 100-0-100
1.2.3	1.2.3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan listrik dan PJU	1.2.3.1 Pembangunan dan pemerataan pelayanan listrik dan PJU
1.3.1	1.3.1 Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.	1.3.1.1 Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan darat guna mendukung peningkatan pelayanan pergerakan penumpang dan barang/jasa.
1.3.2	1.3.2 Meningkatkan kualitas pemeliharaan prasarana lalu lintas serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas.	1.3.2.1 Meningkatkan jumlah prasarana lalu lintas untuk mendukung keselamatan berlalu lintas di wilayah kota.

1.3.3	Meningkatkan pemanfaatan e-government dalam pelayanan publik.	1.3.3.1	Memperluas cakupan layanan internet SKPD s/d kelurahan
		1.3.3.2	Meningkatkan kualitas jaringan internet guna mendukung pelayanan publik berbasis IT.
1.4	Terwujudnya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang kota yang konsisten.	1.4.1	Meningkatkan kualitas aparatur dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
		1.4.1.1	Menjadikan RTRW sebagai acuan pembangunan dan investasi
		1.4.1.2	Peningkatan peran kelembagaan penataan ruang
1.5	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.	1.4.1.3	Penegakkan aturan dalam pengendalian tata ruang
		1.5.1	Melakukan rehabilitasi, konservasi dan integrasi regulasi terhadap pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup
		1.5.2	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
1.5.2.1	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1.5.1.1	Perwujudan lingkungan hidup yang mendukung pembangunan berawasan lingkungan dan berkelanjutan
		1.5.2.1	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

1.6	Peningkatan kualitas utilitas kota dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata.	1.6.1	Mengembangkan potensi utilitas kota sebagai ikon pariwisata keluarga	1.6.1.1	Penataan, pengembangan dan pembangunan taman kota sebagai tujuan wisata keluarga
1.7	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bencana	1.7.1	Meningkatkan system proteksi bahaya kebakaran	1.7.1.1	Menyediakan sarana dan prasarana system proteksi bahaya kebakaran
		1.7.2	Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	1.7.2.1	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan serta mitigasi bencana

MISI IV : Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang <i>good governance</i> melalui peningkatan kualitas pelayanan public						
1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja birokrasi dan Kualitas sistem internal pengendalian pemerintah	1.1.1	Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan meningkatkan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal	1.1.1.1	Optimalkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
					1.1.1.2	Upaya Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal
					1.2.1.1	Penyediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu dan tepat waktu

masyarakat.					
1.3	Peningkatan sumberdaya aparatur	1.3.1	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah.	1.2.1.2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan
				1.3.1.1	Upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah melalui proses peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang tugas
				1.3.1.2	Penempatan personil aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan kualitas kinerja aparatur
1.5	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.5.1	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah	1.5.1.1	Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
				1.5.1.2	Penguatan regulasi daerah untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan
				1.5.1.3	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah
1.5.2	Upaya Peningkatan PAD harus Selalu dilakukan baik Melalui Intensifikasi maupun Ekstensifikasi	1.5.2.1	Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan		

1.6 Peningkatan pelayanan publik dan pelayanan birokrasi	1.6.1 Meningkatkan setiap aspek pelayanan, guna tercapainya kepuasan yang baik bagi masyarakat	1.6.1.1 Dorongan untuk memperoleh kategori baik dalam pencapainan IKM
	1.6.2 Meningkatkan sistem dan cakupan layanan kependudukan	1.6.1.2 Membangun mekanisme pengaduan publik yang aksesibel oleh public
	1.6.3 Meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan perizinan	1.6.2.1 Meningkatkan indeks kepuasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan
	1.6.4 Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan Daerah	1.6.3.1 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan kualitas aparatur pelayanan perizinan
	1.6.5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Arsip Daerah	1.6.4.1 Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Data pembangunan melalui Pengembangan Informasi Teknologi
1.7 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.7.1 Penegakan regulasi sesuai konsekuensi hukum, didukung oleh penyediaan informasi publik secara transparan, serta optimalisasi penegakan dan kepastian hukum melalui usulan atau penerbitan peraturan	1.6.5.1 Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan Arsip Daerah
		1.7.1.1 Penegakan sistem reward dan punishment sesuai dengan regulasi yang berlaku

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum pembangunan di Kota Metro untuk kurun waktu 2016-2021 merupakan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Sebagai tindak lanjut dan implementasi visi dan misi pembangunan Kota Metro periode 2016-2021, kebijakan umum pembangunan akan dilihat melalui beberapa pendekatan, yaitu pemerataan, partisipasi, dan anggaran berbasis program prioritas (*money follow program priority*).

Pemerataan menjadi salah satu kata kunci dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi saja, melainkan di seluruh wilayah Kota Metro sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Metro tahun 2011-2031. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan, maka Kecamatan Metro Pusat dan Metro Timur memiliki tingkat yang paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Namun, hal ini bukan berarti pembangunan akan difokuskan pada dua wilayah tersebut. Dengan asumsi bahwa jika terjadi pemerataan pembangunan maka tingkat pertumbuhan di seluruh daerah akan meningkat. Strategi yang akan dipilih adalah pembangunan infrastruktur sesuai dengan fungsi wilayah dan pengalihan konsentrasi kegiatan.

Pendekatan kedua adalah partisipatif. Partisipatif memiliki arti bahwa pelaksanaan pembangunan melibatkan seluruh *stakeholders*. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan tidak dapat diintervensi secara penuh oleh pemerintah, maka pelaksanaan pembangunan perlu melibatkan partisipasi *stakeholders* secara aktif. Tujuan lainnya adalah agar terjadinya persamaan persepsi tentang pelaksanaan pembangunan antara pemerintah dan seluruh masyarakat. Pendekatan partisipatif merupakan strategi pemberdayaan masyarakat dengan prinsip profesionalitas.

Pendekatan terakhir adalah *money follow program priority*. Sistem penganggaran pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berangkat dari program prioritas. Visi dan misi yang dioperasionalkan kedalam program

prioritas menjadi penentu pelaksanaan kegiatan di SKPD. Artinya SKPD yang mengemban program prioritas akan mendapatkan anggaran yang optimal.

7.1.1. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian Lokal dan Kehidupan Sosial Masyarakat

Infrastruktur merupakan sub sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan.

Infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar.

Infrastruktur, yang sering disebut pula prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan problem sosial dan lingkungan.

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan modal sosial masyarakat (*social overhead capital*) yaitu barang-barang modal esensial sebagai tempat bergantung bagi perkembangan ekonomi dan merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan

infrastruktur yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur adalah *basic determinant* atau kunci bagi perkembangan ekonomi. Kebijakan pengembangan infrastruktur selama lima tahun kedepan dilakukan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah dan memperhatikan kebutuhan pengguna infrastruktur tersebut.

7.1.2. Kebijakan Pembangunan Berbasis Tata Ruang dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan merupakan common isu di seluruh belahan bumi. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan. Pertumbuhan ekonomi menjadi alasan kuat untuk pembangunan fisik yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Selama kurun waktu lima tahun kedepan, pembangunan akan diarahkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 dengan memperhatikan pola dan struktur ruang. Beberapa kebijakan terkait dengan tata ruang yang memperhatikan isu lingkungan hidup antara lain mengembangkan RTH untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah serta mengembangkan, menata, mempertahankan, dan/atau meningkatkan kualitas kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata kota.

Selain itu, kebijakan pembangunan terkait isu lingkungan hidup juga akan dilakukan melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sebelumnya telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan dengan potensi yang tinggi mendukung produktivitas dan efisiensi produksi. LP2B untuk lima tahu kedepan diarahkan pada Kecamatan Metro Utara dan Metro Selatan sebagai basis produksi padi. Keseluruhan kebijakan pembangunan berbasis tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup akan disesuaikan dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS).

7.1.3. Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Kreatif, Profesional, Bermoral, dan Berbudaya

Pembangunan di daerah merupakan tugas seluruh masyarakat Kota Metro sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Selama lima tahun kedepan, masyarakat akan diposisikan sebagai subjek atas program-program pembangunan. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia. Tujuan pertama adalah membangun sumber daya manusia yang kreatif. Kondisi ini didasarkan atas persaingan global yang menjadi tantangan seluruh bangsa. Selain itu, kondisi sumber daya alam yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat, memerlukan manusia-manusia yang kreatif dan inovatif.

Selain kreatif, sumber daya manusia dituntut untuk bekerja secara profesional. Artinya, mereka mampu mempertanggungjawabkan hasil olah pikir dan perilaku mereka yang tercermin dalam sebuah karya. Kondisi ini sangat diperlukan dimana salah satu pribadi yang berdaya saing dilihat dari profesionalitasnya. Disiplin, tata pada peraturan, dan berkualitas merupakan indikator sumber daya manusia yang profesional. Profesionalitas harus pula diimbangi dengan kemampuan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang tumbuh di masyarakat, budaya serta nilai-nilai agama. Hal ini dibutuhkan untuk menghasilkan pembangunan yang arif dan bijaksana.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang kreatif, profesional, bermoral, dan berbudaya, dilakukan melalui seluruh sektor. Pada sektor kesehatan dilakukan peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan dari tenaga medis, infrastruktur, administrasi pelayanan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui sektor pendidikan, kepemudaan, olahraga, ketenagakerjaan, industri, pemberdayaan perempuan dan sektor lainnya berupa pembinaan, fasilitasi, dan pemberdayaan.

7.1.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien

Otonomi daerah memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk masalah keuangan daerah. Masalah yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah Kota Metro adalah masih tingginya ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan rendahnya *share* Pendapatan Asli Daerah pada struktur APBD Kota Metro. Kondisi ini memerlukan strategi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, maka sistem penganggaran

menggunakan prinsip *money follow program priority*. Artinya, alokasi anggaran mengikuti program prioritas yang telah ditetapkan untuk mendukung perwujudan visi dan misi. Pada kondisi ini efektif dapat diterjemahkan sebagai penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Keterbatasan APBD untuk membiayai pembangunan juga akan disiasati dengan prinsip efisiensi dan partisipasi *stakeholders*. Efisien dalam arti bagaimana penggunaan keuangan dapat menghasilkan output sebesar-besarnya dan outcome seluas-luasnya. Sedangkan partisipasi *stakeholders* dilakukan sebagai strategi lain untuk menyiasati keterbatasan APBD.

7.2. Kebijakan Lintas Sektor

7.2.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat sektoral, parsial dan berjangka pendek, tetapi kebijakan yang konsisten, terpadu dan terencana. Kebijakan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor policy*). Kebijakan yang berpihak kepada orang miskin tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor development*) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor growth*).

Atas dasar hal tersebut diperlukan sinkronisasi kebijakan sebagai acuan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi non-pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. Penanggulangan kemiskinan merupakan hasil kumulatif dari seluruh proses pembangunan, setiap upaya pembangunan hasilnya akan berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan seperti pembangunan jalan, jembatan, investasi sektor swasta, bahkan pengangkatan pegawai. Namun ada program-program yang langsung dialokasikan dengan sasaran khusus penduduk miskin sebagai bentuk afirmasi terhadap kemiskinan. Adapun kebijakan umum penanggulangan kemiskinan di Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan mengembangkan sektor riil pada usaha mikro dan kecil (UMK).
2. Meningkatkan peran koperasi dalam penyediaan modal bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

3. Meningkatkan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan nonformal untuk kecakapan hidup (*life skill*)
4. Meningkatkan partisipasi pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pendanaan pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja.
5. Penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan terutama bagi penduduk miskin.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang tinggi terutama bagi penduduk miskin.
7. Meningkatkan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan berbasis kelurahan dengan fokus pada Rumah Tangga Miskin (RTM), individual dan kelompok masyarakat. Penanggulangan kemiskinan berbasis kelurahan dilakukan dengan cara:

1. Mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas SKPD untuk penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan permasalahan khusus di tiap kelurahan.
2. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber pendanaan : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta (*Corporate Social Responsibility*) dan swadaya masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan permasalahan khusus di tiap kelurahan.
3. Fokus bidang penanggulangan kemiskinan di Kota Metro selama kurun 2016-2021 akan dilakukan untuk bidang (1) pendidikan (2) kesehatan (3) perumahan/pemukiman/prasarana dasar (4) ketahanan pangan dan (5) tenaga kerja

7.3. Program Pembangunan Daerah

Program prioritas ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah pada saat pemilihan dan disusun berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah daerah. Program prioritas pembangunan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan
 - a. Peningkatan sarana prasarana pendidikan melalui penyediaan seragam sekolah gratis untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan
 - b. Pemerataan pelayanan pendidikan untuk mewujudkan *education for all*.

- c. Peningkatan koordinasi, komunikasi, dan peran serta seluruh stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses dan output pendidikan.
- 2. Bidang Kesehatan
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan kesehatan
 - c. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
 - d. Penanggulangan penyakit endemik
 - e. Pengembangan budaya hidup sehat
- 3. Bidang Ekonomi
 - a. Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata keluarga untuk meningkatkan perekonomian lokal masyarakat
 - b. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perdagangan dan jasa
 - c. Pengembangan strategi pemasaran produk lokal di wilayah Kota Metro, regional Provinsi Lampung dan di tingkat nasional
 - d. Peningkatan kerjasama swasta untuk meningkatkan produktivitas UMKM.
 - e. Penataan pasar tradisional dan pasar modern untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi lokal.
- 4. Bidang Infrastruktur
 - a. Peningkatan perencanaan infrastruktur jaringan jalan, irigasi, drainase dan air minum yang terintegrasi
 - b. Peningkatan kualitas drainase kota
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas kota.
 - d. Peningkatan kualitas dan sanitasi hunian.
 - e. Optimalisasi penataan ruang yang berkelanjutan
- 5. Reformasi Birokrasi
 - a. Peningkatan akses pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, fasilitasi pelayanan di ruang publik, dan pemanfaatan teknologi informasi
 - b. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penggunaan pendekatan *money follow program priority* dalam sistem penganggaran, serta pengendalian kinerja dengan pendekatan partisipatif.

6. Sosial

- a. Program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- b. Pemberian bantuan pembangunan dan sarana prasarana rumah ibadah
- c. Penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan produktivitas UMKM.



No	Substansi	Sasaran	Indikator	Kategori	Kategori	Capaian Kerja		Kategori	Program dan Kegiatan	Bidang Urusan	Instansi
						Orang	Waktu				
1.5	Peningkatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	2) Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK)	b. Meningkatkan kompetensi Guru Pembimbing Khusus (GPK).	Jumlah guru yang telah mengikuti pendidikan KTT bagi guru pembimbing khusus	orang	5	25	Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan			
1.6	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	a. Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Terselenggaranya program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan	
1.7	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	1) Pemenuhan standar pelayanan puskesmas dan jaringannya.	a. Penerapan manajemen puskesmas yang profesional dan akuntabel.	1. Jumlah puskesmas terakreditasi	Jumlah	0	12	Program standarisasi Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan	

1.11	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1) Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.	a. Pemberian layanan (konse-ling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan	1. Peningkatan program perlindungan perempuan	Kegiatan	6 keg	6 keg	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	BKKB-PP
1.12	Pemenuhan hak dasar anak	1) Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)	a. Terwujudnya Kota Metro sebagai Kota Layak Anak	1. Jumlah kluster anak	kluster	7 Kluster	7 Kluster	Program pelayanan kesejahteraan social anak	Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Disosnaker PM
				2. Tertatnya administrasi kependudukan	Kegiatan	8 keg	8 keg	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Disdukcapil
2. 2.1	Peningkatan prestasi pemuda di seluruh bidang	1) Meningkatkan sarana prasarana dan membina organisasi kepemudaan dan olahraga	a. Mengembangkan kreatifitas dan life skill kepemudaan dan olahraga.	1. Bertambahnya organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	9 organisasi	4 organisasi	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Dikbudpora
				2. Meningkatnya Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	40	25	Program Pembinaan dan Pemasyarakan Olahraga		Dinas Dikbudpora
				3. Meningkatnya kualitas manajemen organisasi kepemudaan	Organisasi	9	4	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		Dinas Dikbudpora
				4. Meningkatnya sarana prasarana olahraga	Prestasi	40	25	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga		Dinas Dikbudpora
3. 3.1	Pengembangan budaya dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya.	a. Meningkatkan pemasyarakatan seni dan budaya	1. Meningkatnya jumlah sanggar yang aktif	Sanggar	53	40	Program Pengembangan Nilai Budaya	Urusan Kebudayaan	Dinas Dikbudpora
				2. Meningkatnya jumlah even seni dan budaya berbasis masyarakat	even	4	2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Dinas Dikbudpora
				3. Meningkatnya jumlah prestasi bidang seni dan budaya	prestasi	6	5	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Dinas Dikbudpora

.....

daerah			2. % Pemanfaatan Teknologi pertanian	%	60%	100%	Program Peningkatan Teknologi Pertanian	Menengah	Dinas Pertanian
			3. % Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan	%	100%	100%	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan		BP4K
			4. % Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani	%	100%	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM Penyuluh dan Petani		BP4K
			5. % Pengembangan Budidaya Perikanan	%	100%	100%	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		Dinas Pertanian
			6. % Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	%	100%	100%	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Dinas Pertanian
			7. % Peningkatan Pendapatan Petani	%	50%	70%	Program Kesejahteraan Petani		Dinas Pertanian
			8. Kegiatan Peningkatan efisisensi perdagangan dalam negeri	Kegiatan	5 Keg	7 keg	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri		Dinas Perdagangan dan Pasar
			9. Jumlah Pasar	Jumlah	5	5	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan		Dinas Perdagangan dan Pasar
			10. Jumlah Pedagang kaki lima dan asongan yang terbina	Jumlah	100	100	Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan		Dinas Perdagangan dan Pasar
			11. % Peningkatan kemampuan teknologi industri	%	100%	100%	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Dinas Koperindag dan UMKM
			1. Dikenalnya produk-produk kota metro pada ajang pameran	%	100%	100%	Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Dinas koperindag dan UMKM
			2. Tercapainya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan	%	100%	100%	Program Pengembangan Kewirausahaan dan		Dinas koperindag dan

[illegible]

2.4	Peningkatan Ketahanan Pangan	1) Meningkatkan ketersediaan dan penangan kerawanan pangan.	a. Meningkatkan ketersediaan pangan dan antisipasi kerawanan pangan.	1. Tingkat ketersediaan pangan pokok beras	ton	58	100	Program peningkatan ketahanan pangan	Urusan Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
2.5	Pemberdayaan perempuan untuk mendukung peningkatan kualitas ekonomi rumah tangga	1) Pengembangan Kelompok Wanita Tani (KWT)	a. Meningkatkan penerapan teknologi dan inovasi pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas produksi pertanian, perikanan dan peternakan.	1. % pemanfaatan teknologi pertanian 2. % pemanfaatan teknologi peternakan	%	60	100	Program peningkatan teknologi pertanian Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Urusan Pertanian	BP4K Dinas Pertanian
Misi III : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota yang Terintegrasi dan Berkelanjutan										
1. 1.1	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	1) Meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan kota untuk memperlancar konektivitas antar kelurahan.	a. Meningkatkan kondisi transportasi jalan kota guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa.	1. % panjang jalan dalam kondisi baik - Jalan - Jembatan 2. % panjang jalan yang telah memiliki drainase	% Jumlah %	80% ± 557 km 55	85% 57	Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan jalan dan jembatan program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Urusan Pekerjaan Umum	Dinas PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU dan Perumahan Rakyat
		2) Meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan jembatan untuk kelancaran transportasi antar kelurahan.	a. Meningkatkan kondisi jembatan untuk mendukung kelancaran transportasi antar kelurahan.	1. % panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik 2. % peningkatan panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik 3. % pemanfaatan data base jalan	% % %	80% ± 557 km 80% ± 557 km 80%	85% 85% 98%	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan program inspeksi kondisi jalan dan jembatan program pembangunan	Urusan Pekerjaan Umum	Dinas PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU dan Perumahan Rakyat Dinas PU dan Perumahan Rakyat

.....

perhubungan, komunikasi dan informatika.	prasarana perhubungan.	perhubungan darat guna mendukung peningkatan pelayanan pergerakan penumpang dan barang/jasa.	2. % Rehabilitasi terminal angkutan	%	50%	80%	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	Urusan Perhubungan	Dinas Hubkominfo
	2) Meningkatkan kualitas pemeliharaan prasarana lalu lintas serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas.	b. Meningkatkan jumlah prasarana lalu lintas untuk mendukung keselamatan berlalu lintas di wilayah kota.	1. Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	buah	1310 buah	2500 buah	Program Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas	Urusan Perhubungan	Dinas Hubkominfo
			2. Jumlah lampu lalu lintas yang terpasang				Program Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas		
			- Traffic Light	unit	9 unit	12 unit			
			- Warning Light	unit	12 unit	18 unit			
			3. Jumlah marka jalan yang terpasang	M2	3.276 m2	6.326 m2	Program Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas		
			1. Jumlah kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa berbasis IT	Kegiatan	7 Kegiatan	8 Kegiatan	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
			2. kegiatan pengendalian menara telekomunikasi di Kota Metro	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Program Pengkajian & Penelitian Bidang Kominfo		
			3. kegiatan kemitraan pemerintah dengan media cetak dan elektronik	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa		
			4. kegiatan pengembangan pusat data dan elektronik	Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	Program Pengembangan Komunikasi Informasi & Media Massa		
			1. Jumlah dokumen perencanaan bidang tata ruang	Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	Program Perencanaan Tata Ruang		
1.4	Terwujudnya perencanaan dan pemanfaatan tata pengendalian tata ruang kota yang	a. Menjadikan RTRW sebagai acuan pembangunan dan investasi	2. Akurasi data bangunan IMB dalam Penataan ruang	%	80%	100%	Program Perencanaan tata ruang	Urusan Penataan Ruang	Bappeda dan Distakopar

RPMD KOTA METRO 2016-2021

	konsisten	ruang kota	serta peningkatan peran kelembagaan penataan ruang	3. % Ketaatan terhadap RTRW	%	100%	100%	Program Penantaaan ruang		
1.5	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	1) Melakukan rehabilitasi, konservasi dan integrasi regulasi terhadap pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	a. Perwujudan lingkungan hidup yang mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Tercapainya pengembangan kinerja pengelolaan Bank Sampah 2. Tercapainya peningkatan pengendalian polusi	unit	7 unit Bank Sampah	15 unit Bank Sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Urusan Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup
			a. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1. Tercapainya pengendalian pencemaran dan perusahaan LH 2. Tercapainya Peningkatan kualitas sumber dan akses informasi SDA dan LH	%	100%	100%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusahaan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas Sumber dan Akses Informasi SDA & LH		Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup
1.6	Peningkatan kualitas utilitas kota dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata	Mengembangkan potensi utilitas kota sebagai ikon pariwisata keluarga	a. Penataan, pengembangan dan pembangunan taman kota sebagai tujuan wisata keluarga b. Pengembangan dan pembangunan rest area sebagai daya tarik wisatawan	1. % kunjungan wisata 2. % potensi pariwisata yang berpotensi dipromosikan	%	50%	80%	Program Pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata	Urusan Penataan Ruang	Distakopar Distakopar

REVISI 1

1.7	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bencana	1) Meningkatkan sistem proteksi bahaya kebakaran	a. Menyediakan sarana dan prasarana sistem proteksi bahaya kebakaran	1. Respon time penanggulangan kebakaran	Menit	0	15 menit	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
				2. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bencana kebakaran	%	0	100%	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		
				3. Petugas Pemadam Kebakaran yang handal	orang	0	50 orang	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		
		2) Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	b. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan serta mitigasi bencana	1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan bencana alam/non alam	orang	200 orang	1050 orang	Program Pencegahan Dini dan Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam/Non Alam	Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
				2. Kesiagaan menghadapi bencana kekeringan	unit	Sumur bor siaga kekeringan 16 unit	88 unit	Program Pencegahan Dini dan Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam/Non Alam		
				3. Tersedianya peralatan dan logistik dalam menghadapi bencana alam/non alam	unit	Mobil Damkar = 3 unit, logistik, peralatan dan perlengkapan Damkar	Mobil Damkar = 5 unit, logistik, peralatan dan perlengkapan Damkar	Program Penyediaan Sarana Dalam Menghadapi Bencana Alam/ Non Alam		



Misi IV : Mewujudkan Pemerintahan Kota Metro yang Good Governance Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah	Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan meningkatkan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal	a. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	1. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	%	100%	100%	Program peningkatan dan pengembangan system pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan SKPD	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,	Seluruh Satker
				2. Terkoordinasinya pemberdayaan masyarakat dan aparatur dalam program kebijakan dan pelayanan	Kegiatan	2 Keg	3 Keg	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kota	Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,	Sekretariat Daerah
				3. Meningkatkan kelancaran tugas-tugas kedinasan walikota dan wakil walikota	Kegiatan	9 Keg	10 keg	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
				4. Meningkatkan disiplin aparatur	%	70%	100%	Program peningkatan disiplin aparatur		Seluruh Satker
				5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	%	70%	100%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Seluruh Satker
				6. Meningkatkan pelayanan adm. perkantoran	%	100%	100%	Program pelayanan adm perkantoran		Seluruh Satker
				7. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur	orang	4871	4871	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		BKD
				8. Tersedianya pelayanan terhadap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas Legislasi	orang	26	26	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Setwan
			b. Upaya Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui	9. Persentase pencapaian pengawasan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan	%	92%	100%	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah		Inspektorat

keuangan daerah		Keuangan Daerah		2. Terwujudnya penyusunan dasar hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah dari proses penganggaran hingga pertanggungjawaban		%		95%		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan		Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		Seluruh Satker	
				3. Terlaksananya laporan keuangan		Dokumen		6 dokumen		6 dokumen		Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan		Seluruh Satker	
		b. Penguatan regulasi daerah untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan		1. % Ketercapaian target PAD		%		100%		100%		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah		BPKAD dan Dinas Pendapatan	
		c. Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah		2. % Ketercapaian target PAD		%		100%		100%		Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		BPKAD dan Dinas Pendapatan	
		a. Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui		1. % Ketercapaian target PAD		%		100%		100%		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Dinas Pendapatan	
	2) Upaya Peningkatan PAD harus Selalu dilakukan baik Melalui Intensifikasi														

		maupun Ekstensifikasi	optimalisasi potensi pendapatan	2. Terlaksananya pendapatan pajak dan retribusi daerah	Kelurahan	22 kelurahan	22 kelurahan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Dinas Pendapatan
1.5	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi	1) Meningkatkan setiap aspek-aspek pelayanan, guna tercapainya kepuasan yang baik bagi masyarakat.	a. Dorongan untuk memperoleh kategori baik dalam pencapaian IKM.	1. % Administrasi Kependudukan	%	100%	100%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Disdukcapil dan Sekretariat daerah
				2. Tercapainya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah melalui penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, penatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur	Kegiatan	16 Keg	17 Keg	Program Penataan Kelembagaan, Optimalisasi Kinerja, Penataan Sistem dan Mekanisme Kerja Perangkat Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	KPMPTSP
				3. % Capaian IKM	%	79,13%	84%	Program Pelayanan Perizinan terpadu		RSUD A. Yani
				4. % Cakupan Kemitraan Pelayanan kesehatan	%	100%	100%	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
1.6	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum	Penegakan regulasi sesuai konsekuensi hukum, didukung oleh penyediaan informasi publik secara transparan, serta optimalisasi penegakan dan kepastian hukum melalui usulan atau penerbitan peraturan	a. Penegakan sistem reward dan punishment sesuai dengan regulasi yang berlaku	1. Jumlah Kegiatan Peningkatan ketertiban dan kenyamanan Lingkungan masyarakat	Kegiatan	7 Keg	7 Keg	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian	Satpol PP
				2. Jumlah kegiatan peningkatan anggota yang dilatih	Kegiatan	2 Keg	2 keg	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
				3. Terpeliharanya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Kegiatan	4 Keg	4 Keg	Program Pemeliharaan Kantratiimas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian	Kesbangpol

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program prioritas pembangunan sesuai bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Setiap bidang urusan pemerintahan dihubungkan dengan SKPD terkait yang bertanggung jawab mengelola alokasi pendanaan yang direncanakan. Indikasi rencana program baik prioritas maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan pada tabel terlampir. Setiap program prioritas telah ditetapkan indikator kinerjanya dan target yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan yang kemudian akan dibandingkan dengan perencanaan pada awal periode perencanaan. Perbandingan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pada akhir periode masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PENDIDIKAN																	
Rutin/Non Wajib pendidikan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran																	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas Sarana Prasarana aparatur yang memadai																	
Meningkatnya kualitas SDM SKPD																	
Meningkatnya kualitas SDM SKPD																	
Terpenuhinya laporan keuangan																	
Urusan Wajib Pendidikan																	
Meningkatnya APK PAUD																	
Rasio Jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD (3-6 tahun) meningkat																	
Meningkatnya lulusan SD																	
Meningkatnya lulusan SMP																	
Meningkatnya nilai rata2 UN SD																	
Meningkatnya nilai rata2 UN SMP																	
Meningkatnya Jumlah sekolah berbasis inklusif																	
Meningkatnya Jumlah penduduk berkebutuhan khusus yang tertampung di sekolah inklusif																	
Meningkatnya kompetensi guru yang telah mengikuti pendidikan inklusif																	
Meningkatnya prestasi siswa																	
Meningkatnya pembinaan siswa berprestasi																	
Meningkatkan keterampilan kecakapan hidup																	
Meningkatnya kompetensi pendidik SD berkualifikasi S1																	
Meningkatnya kompetensi pendidik SMP berkualifikasi S1																	
Meningkatnya kompetensi pendidik SD yang memiliki sertifikasi																	
Meningkatnya Jumlah pendidik SMP yang memiliki sertifikasi																	
Meningkatnya jumlah guru dan keahliannya																	
Meningkatnya angka Partisipasi Sekolah SD																	
Meningkatnya angka Partisipasi Sekolah SMP																	
Meningkatnya APK SD																	
Meningkatnya APK SMP																	
Meningkatnya APK UN SD																	

Bidang Ususan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KESKIHATAN	Meningkatnya angka APM SMP	86,47%		88,73%		90,99%		93,25%		95,51%		97,77%		100%		Dikbudpora
	Tersedianya fasilitas ruang kelas SD yang baik/memadai	316 ruang		326		336		346		356		366		376		Dikbudpora
	Tersedianya fasilitas ruang kelas SMP yang baik/memadai	299 ruang		308		317		326		335		344		346		Dikbudpora
	Jumlah sekolah SD yang memiliki perpustakaan sekolah	56 unit		56		57		57		57		57		57		Dikbudpora
	Jumlah SMP yang memiliki perpustakaan sekolah	19 unit		19		19		20		21		23		23		Dikbudpora
	Jumlah SMP yang memiliki laboratorium sekolah	19 unit		19		19		20		21		23		23		Dikbudpora
	Jumlah SD dan SMP berfasilitas Wifi	8 sekolah		13		18		23		28		33		38		Dikbudpora
	Tersedianya administrasi perkantoran	1 tahun		1 tahun	913.328.000	1 tahun	1.009.284.000	1 tahun	1.160.676.000	1 tahun	1.334.778.000	1 tahun	1.534.994.804	1 tahun	1.534.994.804	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun		1 tahun	1.128.612.619	1 tahun	652.057.500	1 tahun	749.846.125	1 tahun	862.346.044	1 tahun	991.697.950	1 tahun	991.697.950	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 tahun		1 tahun	27.090.000	1 tahun	31.153.500	1 tahun	35.826.525	1 tahun	41.200.504	1 tahun	47.380.579	1 tahun	47.380.579	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 tahun		1 tahun		0	1 tahun	10.000.000	1 tahun	11.500.000	1 tahun	13.225.000	1 tahun	13.225.000	1 tahun	13.225.000	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 tahun		1 tahun	75.590.000	1 tahun	153.200.000	1 tahun	176.180.000	1 tahun	202.607.000	1 tahun	232.998.050	1 tahun	232.998.050	Dinas Kesehatan	
Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1 tahun		1 tahun	1.897.390.000	1 tahun	2.017.890.000	1 tahun	2.320.573.500	1 tahun	2.668.659.525	1 tahun	3.068.958.454	1 tahun	3.068.958.454	Dinas Kesehatan	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100%		100%	4.520.568.000		4.664.240.000		5.363.899.000		6.168.483.850		7.093.756.428		7.093.756.428	Dinas Kesehatan	
Program Pengawasan Obat & Makanan	1 tahun		1 tahun	58.000.000	1 tahun	86.700.000	1 tahun	99.205.000	1 tahun	114.660.750	1 tahun	131.859.863	1 tahun	131.859.863	Dinas Kesehatan	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	11 Puskesmas, 22 kelurahan		11 Puskesmas, 22 kelurahan	476.600.000	11 Puskesmas, 22 kelurahan	1.002.000.000	11 Puskesmas, 22 kelurahan	1.325.145.000	11 Puskesmas, 22 kelurahan	1.523.916.750	11 Puskesmas, 22 kelurahan	1.523.916.750	11 Puskesmas, 22 kelurahan	1.523.916.750	Dinas Kesehatan	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	100%		100%	120.000.000	100%	240.000.000	100%	276.000.000	100%	317.400.000	100%	365.010.000	100%	365.010.000	Dinas Kesehatan	
Program Lingkungan Sehat	%Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas/layak	89%		91%	101.077.600	91%	186.237.000	94%	214.172.550	100%	246.294.433	100%	283.243.197	100%	283.243.197	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB, Persentase cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko infeksi HIV	95%		95%	394.498.200	95%	645.755.000	97%	745.619.400	98%	840.402.310	98%	1.012.531.657	100%	1.012.531.657	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase cakupan puskesmas terakreditasi	0		2	345.000.000	5	335.000.000	5	580.250.000	11	440.007.500	12	509.493.125	12	509.493.125	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Pengembangan, Pemeliharaan Sarana, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Iatrogenya	Persentase cakupan peningkatan sarana puskesmas Pustu dan Iatrogenya	100%		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
Program Kemutakhiran Peningkatan Obat dan Makanan	Terdapatnya Program Kemutakhiran Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100%		100%	1.200.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase cakupan pelayanan kesehatan balita	95%		95%	94.015.400	95%	100.000.000	97%	115.000.000	98%	130.000.000	98%	150.000.000	100%	150.000.000	Dinas Kesehatan
Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase cakupan pelayanan kesehatan lansia	95%		95%	116.000.000	95%	125.000.000	97%	140.750.000	98%	165.510.500	98%	190.109.375	100%	190.109.375	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil, Menyusui dan Anak	Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%		95%	87.169.600	95%	210.762.000	97%	244.374.300	98%	278.731.745	99%	320.942.657	100%	320.942.657	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemenitah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target		Rp	Target		Rp
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3												13	14	15	16
Program Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100%	209.000.000	100%	234.500.000	100%	269.675.000	100%	310.126.250	100%	356.645.188	100%	356.645.188			356.645.188	Dinas Kesehatan
Program Pencanaraan Pembiayaan Bidang Kesehatan	Tersedianya Pengelolaan Kapitasi JKN, BOK, JAMIPERSAL	1 tahun	9.658.357.996	1 tahun	10.413.502.340	1 tahun	11.975.927.691	1 tahun	13.771.856.845	1 tahun	15.837.635.371	1 tahun	15.837.635.371			15.837.635.371	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sumber daya /jumlah SDM	100%	822.820.000	100%	905.080.000	100%	995.588.000	100%	1.095.146.800	100%	1.204.661.480	100%	1.204.661.480			1.204.661.480	RSUD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1 tahun	15.120.000	1 tahun	16.632.000	1 tahun	18.295.200	1 tahun	20.124.720	1 tahun	22.137.192	1 tahun	22.137.192			22.137.192	RSUD
Program Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakti/RS jiwa/RS paru-paru/RS mata	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RS yang memadai	70%	2.245.280.000	80%	2.469.808.000	85%	2.716.788.800	90%	2.988.467.680	95%	3.267.314.448	100%	3.267.314.448			3.267.314.448	RSUD
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase cakupan kemitraan pelayanan kesehatan	100%	48.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000			50.000.000	RSUD
P	Persentase capaian standar kompetensi SDM Rumah Sakit	75%	430.960.000	80%	441.056.000	80%	485.161.600	85%	533.677.760	85%	587.045.536	85%	587.045.536			587.045.536	RSUD
Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Persentase cakupan pelayanan Rumah Sakit sesuai standar	140 org	77.000.000.000	80%	84.708.000.000	85%	93.170.000.000	90%	102.487.000.000	95%	112.735.700.000	100%	112.735.700.000			112.735.700.000	RSUD
PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG																	
program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Alam Lain	jumlah embung / bangunan penampung air	3	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000			250.000.000	Kantor LH, Dinas PU
program pengendalian banjir	kawasan / lokasi banjir	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	Dinas PU
program penertiban perbaikan dan penataan sempadan sungai/anak sungai, situ, saluran irigasi dan waduk dalam keadaan baik	saluran irigasi dan waduk dalam keadaan baik	50%	300	65%	300	70%	300	75%	300	80%	300	85%	300			300	Dinas PU
program peningkatan regulasi sumber daya air dan pengendalian air bawah tanah	perda yang mengatur sumber daya air	1	0	1	100	0	0	0	0	1	0	2	0			0	Dinas PU
program pembangunan jalan dan jembatan	% panjang jalan dalam kondisi mantap																Dinas PU
	jalan	81% 450,9 km	30.000.000.000	82% 450,9 km	30.000.000.000	83% 450,9 km	30.000.000.000	84% 450,9 km	30.000.000.000	85% 450,9 km	30.000.000.000	85% 450,9 km	30.000.000.000			150.000.000.000	Dinas PU
	jembatan	55	4.500.000.000	1	4.500.000.000	0	0	0	0	0	0	57	0			9.000.000.000	Dinas PU
program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	% panjang jalan yang telah memiliki drainase	80% 450,9 km	2.000.000.000	85% 450,9 km	2.000.000.000	83% 450,9 km	2.000.000.000	84% 450,9 km	2.000.000.000	85% 450,9 km	2.000.000.000	85% 450,9 km	2.000.000.000			10.000.000.000	Dinas PU
program pembangunan turap	% peningkatan turap	45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100.000.000	Dinas PU
program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	% panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	80% 450,9 km	10.000.000.000	82% 450,9 km	10.000.000.000	83% 450,9 km	10.000.000.000	84% 450,9 km	10.000.000.000	85% 450,9 km	10.000.000.000	85% 450,9 km	10.000.000.000			50.000.000.000	Dinas PU
program rehabilitasi/pemeliharaan talud dan brojong	% peningkatan kondisi talud/brojong dalam kondisi baik	35%	605.000.000	53% 605.000.000	605.000.000	61,50% 605.000.000	605.000.000	65% 605.000.000	1.300.000.000	90% 605.000.000	605.000.000	90% 605.000.000	605.000.000			3.720.000.000	Dinas PU
program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	% peningkatan panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	80% 450,9 km	10.000.000.000	82% 450,9 km	10.000.000.000	83% 450,9 km	10.000.000.000	84% 450,9 km	10.000.000.000	85% 450,9 km	10.000.000.000	85% 450,9 km	10.000.000.000			50.000.000.000	Dinas PU
program pembangunan sistem drainase dan base layer dan embung	% pembangunan talud base dan brojong embung sy. krah disektor	40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			25.000.000	Dinas PU
program Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan	% peningkatan sarana prasarana pemerintahan dalam kondisi baik	13 tahun	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0			4.500.000.000	Dinas PU
program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan saluran perantara lainnya	% jaringan irigas	33% 44.42 m	1.175.000.000	34% 44.42 m	1.140.000.000	35% 44.42 m	1.140.000.000	36% 44.42 m	1.140.000.000	37% 44.42 m	1.175.000.000	37% 44.42 m	1.175.000.000			5.920.000.000	Dinas PU
	panjang irigasi, rawa dan saluran perantara lainnya	5 km	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	10	4.000.000.000			20.000.000.000	Dinas PU

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)			SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	Target		Rp
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	jumlah lokasi yang ditetapkan sebagai wilayah strategis dan cepat tumbuh	1	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	-	0	1	5.000.000.000	-	0	4	15.000.000.000	Dinas PU		
program perencanaan teknis dan proses pengadaan barang/jasa	jumlah perencanaan teknis	1	1	800.000.000	1	900.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	17	4.750.000.000	Dinas PU		
program pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan dan pemertintahan	% peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemertintahan dalam kondisi baik	57%	59%	3.960.000.000	60%	1.744.000.000	60,8%	1.740.000.000	61,1%	700.000.000	61,3%	700.000.000	61,3%	8.844.000.000	Dinas PU		
program metro bersih dan sehat	% tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan kota	93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PU, kecamatan		
program gerbang gotong royong	% keaktifan masyarakat dalam kegiatan gotong royong	87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PU, kecamatan		
Program Pelayanan Adm Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	100%	8.000.000.000	100%	8.500.000.000	100%	9.000.000.000	100%	9.500.000.000	100%	10.000.000.000	100%	15.000.000.000	DISTAKOPAR		
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	% Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	100%	100%	1.102.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.700.000.000	DISTAKOPAR		
Program Peningkatan disiplin aparatur	% Peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	13	100%	14.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	17.000.000	DISTAKOPAR		
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber daya aparatur	% Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan kompetensi jabatan	100%	100%	10.000.000	100%	13.000.000	100%	14.000.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	17.000.000	DISTAKOPAR		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	10.000.000	100%	13.000.000	100%	14.000.000	100%	16.000.000	100%	18.000.000	100%	19.000.000	DISTAKOPAR		
Program Perencanaan Tata ruang	% Akurasi data bangunan IMB dalam perataan ruang	80%	100%	168.000.000	100%	190.000.000	100%	195.000.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	DISTAKOPAR		
Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah luas kawasan yang sudah ditangani sesuai dengan entutikan (Zona yang ditetapkan RDTK)	1 keg	1 keg	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	140.000.000	DISTAKOPAR		
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	% sampah yang terangkut	70%	70%	775.000.000	75%	780.000.000	80%	790.000.000	85%	795.000.000	90%	800.000.000	90%	850.000.000	DISTAKOPAR		
Program Pembiayaan dan pengawasan bidang perimbangan	% ketepatan air tanah kota metro	50%	100%	150.000.000	100%	155.000.000	100%	160.000.000	100%	165.000.000	100%	170.000.000	100%	175.000.000	DISTAKOPAR		
Program pengembangan pemasaran pariwisata	% potensi pariwisata yang berpotensi dipromosikan	50%	55%	410.000.000	60%	430.000.000	65%	435.000.000	70%	450.000.000	75%	500.000.000	80%	525.000.000	DISTAKOPAR		
Program pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yang berpotensi masuk lingkungan	% peningkatan pengawasan lingkungan masyarakat	50%	55%	24.000.000	60%	26.000.000	65%	28.000.000	70%	30.000.000	75%	32.000.000	80%	35.000.000	DISTAKOPAR		
Program Pengembangan destinasi pariwisata	% kunjungan wisata	50%	55%	120.000.000	60%	125.000.000	65%	130.000.000	70%	135.000.000	75%	140.000.000	80%	145.000.000	DISTAKOPAR		
Program Pengendalian pemanfaatan ruang pariwisata	% peningkatan peran serta dalam masyarakat pengembangan kemutakhiran	60%	65%	120.000.000	70%	125.000.000	75%	130.000.000	80%	135.000.000	85%	140.000.000	90%	145.000.000	DISTAKOPAR		
Program Pengembangan kemutakhiran	% peningkatan peran serta dalam masyarakat pengembangan kemutakhiran	50%	55%	118.000.000	60%	120.000.000	65%	125.000.000	70%	130.000.000	75%	135.000.000	80%	140.000.000	DISTAKOPAR		
Program Pengelolaan RTH	% RTH yang sesuai standar	70%	75%	90.000.000	78%	95.000.000	80%	100.000.000	85%	105.000.000	90%	110.000.000	90%	115.000.000	DISTAKOPAR		
Program Peningkatan pelayanan PIR dan pengabdian	% Peningkatan pelayanan masyarakat dan pengabdian	70%	75%	80.000.000	78%	85.000.000	80%	90.000.000	85%	95.000.000	90%	100.000.000	90%	105.000.000	DISTAKOPAR		
Program Peningkatan Pelayanan Lintas Sektor	Jumlah tercapainya nilai T dan P	20/100	24/100	70.000.000	75%	75.000.000	78%	80.000.000	80%	85.000.000	85%	90.000.000	85%	95.000.000	DISTAKOPAR		
Program pengembangan RTH	% RTH yang sesuai standar	70%	75%	1.000.000.000	78%	1.050.000.000	80%	1.100.000.000	85%	1.150.000.000	90%	1.200.000.000	90%	1.250.000.000	DISTAKOPAR		
Program Pengembangan Teknik dan Proses Pengadaan barang dan jasa	% Kualitas teknis pengadaan barang gedung dan lainnya	40%	0	40%	40%	5.000.000.000	50%	1.000.000.000	60%	1.500.000.000	70%	1.000.000.000	80%	1.500.000.000	DISTAKOPAR		
PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN																	
program pengembangan perumahan	jumlah rumah layak huni	67%	67,5%	3.234.000.000	68%	3.234.000.000	68%	3.234.000.000	68,3%	300.000.000	68,5%	300.000.000	68,5%	7.048.000.000	Dinas PU		
	% luas permukiman yang layak	51%, 60%	51%	1.800.000.000	53%	1.800.000.000	53%	1.800.000.000	53%	1.800.000.000	57%	1.800.000.000	57%	4.930.000.000	Dinas PU		

Bidang Unsur Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
program lingkungan sehat perumahan program penyediaan dan pengelolaan air baku	luas lingkungan permukiman kumuh	8,93 Km2	1 km2	5.000.000.000	1 km2	5.000.000.000	1 km2	5.000.000.000	1 km2	5.000.000.000	1 km2	5.000.000.000	5 km2	25.000.000.000	Dinas PU	
	rasio permukiman layak huni	85%:15%	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas PU	
	% rumah tinggal bersentasi	30%	30%	750.000.000	20%	700.000.000	20%	700.000.000	10%	700.000.000	5%	700.000.000	85%	3.500.000.000	Dinas PU	
	rumah tangga pengguna air bersih	2300	2300	500.000.000	2620	500.000.000	2900	500.000.000	3200	500.000.000	3500	500.000.000	3800 pig	2.500.000.000	Dinas PU	
	program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	% sarana prasarana air minum dan air limbah dalam kondisi baik	87%	89,3%	4.980.000.000	89,3%	200.000.000	89,5%	200.000.000	89,7%	200.000.000	89,9%	200.000.000	89,9%	5.780.000.000	Dinas PU
program pemberdayaan komunitas perumahan	% sarana dan prasarana dasar permukiman	2,7 %	-	-	4,8%	1.830.000.000	6,9%	1.830.000.000	9,1%	1.830.000.000	11,3%	1.830.000.000	11,3%	7.320.000.000	Dinas PU	
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
SAT POL PP																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Satuan Polisi Pamong Praja	12 Kegiatan	12 Keg	2.685.961.686	12 Kegiatan	2.820.259.770	12 Kegiatan	2.961.272.759	12 Kegiatan	3.109.336.397	12 Kegiatan	3.264.803.217	12 Kegiatan	3.428.043.377	Sat Pol PP	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja di Kantor Sat	6 kegiatan	6 Keg	535.385.000	6 kegiatan	962.154.250	6 kegiatan	1.090.261.963	6 kegiatan	734.775.061	6 kegiatan	785.763.814	6 kegiatan	818.302.004	Sat Pol PP	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Sat Pol PP Kota Metro	1 Kegiatan	1 Keg	254.291.000	1 Kegiatan	262.375.050	1 Kegiatan	275.493.803	1 Kegiatan	297.533.307	1 Kegiatan	315.386.305	1 Kegiatan	334.308.423	Sat Pol PP	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	5 kegiatan	5 keg	35.639.000	5 kegiatan	26.920.950	5 kegiatan	28.246.998	5 kegiatan	29.680.347	5 kegiatan	31.161.365	5 kegiatan	32.722.583	Sat Pol PP	
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keterlibatan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	7 kegiatan	7 Keg	839.008.000	7 kegiatan	1.014.032.000	7 kegiatan	1.045.993.800	7 kegiatan	1.205.717.720	7 kegiatan	1.118.516.471	7 kegiatan	1.159.744.588	Sat Pol PP	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan Anggota yang dilatih	2 kegiatan	2 keg	349.882.000	2 kegiatan	78.626.100	2 kegiatan	82.557.405	2 kegiatan	86.685.275	2 kegiatan	91.019.539	2 kegiatan	95.570.516	Sat Pol PP	
KESBANGPOL																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kantor Kebangpol	12 kegiatan	12 keg	179.485.000	12 keg	179.485.000	12 keg	179.485.000	12 keg	179.485.000	12 keg	179.485.000	12 keg	179.485.000	Kesbangpol	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja di Kantor Kebangpol	5 kegiatan	5 keg	91.030.000	5 keg	91.030.000	5 keg	91.030.000	5 keg	91.030.000	5 keg	91.030.000	5 keg	91.030.000	Kesbangpol	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Kantor Kebangpol	1 kegiatan	1 keg	3.150.000	1 keg	3.150.000	1 keg	3.150.000	1 keg	3.150.000	1 keg	3.150.000	1 keg	3.150.000	Kesbangpol	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	3 kegiatan	3 keg	34.300.000	3 keg	34.300.000	3 keg	34.300.000	3 keg	34.300.000	3 keg	34.300.000	3 keg	34.300.000	Kesbangpol	
Program Pemeliharaan Kamtibmas & Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya ketertarikan & ketertiban masyarakat	4 Kegiatan	4 Keg	427.000.000	4 Kegiatan	450.000.000	4 Kegiatan	450.000.000	4 Kegiatan	480.000.000	4 Kegiatan	480.000.000	4 Kegiatan	480.000.000	Kesbangpol	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	4 Kegiatan	4 keg	437.355.000	4 Kegiatan	437.355.000	4 Kegiatan	437.355.000	4 Kegiatan	437.355.000	4 Kegiatan	450.000.000	4 Kegiatan	450.000.000	Kesbangpol	
Program Peningkatan Pemeliharaan Persatuan Masyarakat	Tertibnya kota metro dan persatuan masyarakat	4 Kegiatan	4 keg	180.100.000	4 Kegiatan	180.100.000	4 Kegiatan	180.100.000	4 Kegiatan	200.000.000	4 Kegiatan	200.000.000	4 Kegiatan	200.000.000	Kesbangpol	
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	5 Kegiatan	5 keg	127.900.000	5 Kegiatan	127.900.000	5 Kegiatan	127.900.000	5 Kegiatan	135.000.000	5 Kegiatan	135.000.000	5 Kegiatan	135.000.000	Kesbangpol	
SOSIAL																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	383.045.450	1 tahun	378.045.000	1 tahun	360.849.300	1 tahun	366.934.450	1 tahun	436.627.895	1 tahun	480.200.555	DISOSNAKER	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	118.099.000	1 tahun	83.000.000	1 tahun	91.300.000	1 tahun	100.430.000	1 tahun	110.473.000	1 tahun	121.530.309		

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab		
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Target		Rp		Target	Rp				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	DISOSNAKER	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1 tahun	1 tahun	13.230.000	4 keg	13.230.000	4 keg	14.553.000	4 keg	16.008.300	4 keg	17.609.130	4 keg	19.370.043			
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	1 tahun	1 tahun	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	11.000.000	1 keg	12.100.000	1 keg	13.310.000	1 keg	14.641.000			
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 tahun	1 tahun	10.000.000	1 keg	37.500.000	1 keg	41.250.000	1 keg	45.375.000	1 keg	49.912.500	1 keg	54.903.750			
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terampil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatnya Keberdayaan Fakir Miskin Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar	210 Fakir Miskin	210 Fakir Miskin	447.550.000	210 Fakir Miskin	482.042.500	210 Fakir Miskin	530.246.750	210 Fakir Miskin	583.271.425	210 Fakir Miskin	641.598.568	3091 Fakir Miskin	705.758.424			
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya keberfungsian Sosial Klien Individu (casework)	1885 Fakir Miskin	150 Klien	151.000.000	150 Klien	261.750.000	150 Klien	287.925.000	150 Klien	316.717.500	150 Klien	348.389.250	1135 Klien	383.228.175			
Program Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Anak	Terperluhnya Hak-Hak Dasar Anak	7 Kluster Anak (326 Anak)	1 Tahun Kegiatan		1 Tahun Kegiatan	50.000.000	1 Tahun Kegiatan	55.000.000	1 Tahun Kegiatan	60.500.000	1 Tahun Kegiatan	66.550.000	1 Tahun Kegiatan	73.205.000			
Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya Taraf Hidup, Terpenuhi dan Terlindungi Hak Penyandang Disabilitas	361 Disabilitas	1 Tahun Kegiatan	68.920.000	1 Tahun Kegiatan	73.500.000	1 Tahun Kegiatan	80.850.000	1 Tahun Kegiatan	88.935.000	1 Tahun Kegiatan	97.828.500	1 Tahun Kegiatan	107.611.350			
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kepedulian Lembaga dan Masyarakat Pada Usaha Kesejahteraan	12 Jenis PKKS	1 Tahun Kegiatan	186.940.000	1 Tahun Kegiatan	198.450.000	1 Tahun Kegiatan	205.634.000	1 Tahun Kegiatan	226.197.400	1 Tahun Kegiatan	248.817.140	1 Tahun Kegiatan	273.698.854			
Program Peranaman & Pembinaan Nilai Kebangsaan	Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Kesetiakawanan Sosial	100%	1 Tahun Kegiatan	102.291.000	1 Tahun Kegiatan	107.405.550	1 Tahun Kegiatan	112.520.100	1 Tahun Kegiatan	123.772.110	1 Tahun Kegiatan	136.149.321	1 Tahun Kegiatan	301.046.739			
TENAGA KERJA																	
Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkompetensi dan Mampu Berdayasaing	15	20	166.215.000	25	180.000.000	30	198.000.000	35	217.800.000	40	239.580.000	45	263.536.000			
Program Peningkatan Kemampuan Kerja	Menyebarkan informasi tentang pasar kerja baik lokal, antar daerah maupun antar negara	237	250	44.280.000	255	146.000.000	265	160.600.000	270	176.660.000	275	194.326.000	275	213.758.600			
Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Kelembagaan	Meningkatnya Perusahaan Yang Menjalankan Undang-Undang Ketenagakerjaan	350	400	119.413.500	500	135.000.000	550	148.500.000	600	163.350.000	650	179.685.000	700	197.653.500			
Program Pengembangan Partisipasi Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	1 keg	22	370.820.000	22	282.860.000	22	311.146.220	22	342.260.842	22	376.486.926	22	414.136.610			
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Realiti dan Global	Kurangnya pendapatan yang dapat menunjang pendapatan ini keluarga	22	932.772.330	22	1.050.036.800	22	1.164.043.780	22	1.281.438.158	22	1.409.581.974	22	1.550.540.171			
PANGAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan perkantoran yang tertib administrasi	431.420.000	100%	465.246.000	100%	490.700.000	100%	525.270.000	100%	561.447.000	100%	609.811.700	100%	659.911.700		BP4K	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur	143.543.000	100%	102.113.000	100%	110.035.000	100%	121.080.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	166.110.000		BP4K	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur	0	100%	15.121.000	100%	34.000.000	100%	67.495.000	100%	101.710.000	100%	145.254.000	100%	191.254.000		BP4K	
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur	0	100%	0	100%	7.100.000	100%	22.000.000	100%	44.000.000	100%	66.000.000	100%	91.400.000		BP4K	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	24.000.000	100%	27.600.000	100%	27.600.000	100%	29.700.000	100%	32.400.000	100%	35.637.000	100%	38.437.000		BP4K	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani	402.291.000	30%	561.546.000	35%	997.300.000	40%	546.700.000	45%	601.370.000	50%	661.507.000	50%	961.507.000		BP4K	

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	115.500.000	30%	120.000.000	40%	140.000.000	50%	154.000.000	60%	169.400.000	70%	186.340.000	70%	186.340.000	BPK
Program Peningkatan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pemanfaatan teknologi pertanian	33.000.000	60%	0	70%	33.000.000	80%	36.300.000	90%	39.930.000	100%	43.923.000	100%	43.923.000	BPK
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian/perkebunan	47.650.000	40%	0	45%	32.000.000	50%	35.200.000	55%	38.720.000	60%	42.592.000	60%	42.592.000	BPK
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Terwujudnya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	471.304.500	100%	534.375.000	100%	566.425.000	100%	623.049.500	100%	685.354.000	100%	753.689.000	100%	753.689.000	BPK
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Terwujudnya pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	27.500.000	100%	33.500.000	100%	33.500.000	100%	36.650.000	100%	40.535.000	100%	44.588.000	100%	44.588.000	BPK
Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan	Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyuluhan dan Petani	0	100%	0	100%	72.000.000	100%	79.200.000	100%	87.120.000	100%	95.832.000	100%	95.832.000	BPK
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan	0	100%	0	100%	190.000.000	100%	209.000.000	100%	229.900.000	100%	252.890.000	100%	252.890.000	BPK
Program Peningkatan, Penguatan, dan Pengembangan Kelembagaan	Terwujudnya Peningkatan, Penguatan, dan Pengembangan Kelembagaan	0	100%	0	100%	0	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	121.000.000	BPK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja aparatur	181.950.000	12 bulan	190.248.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	231.000.000	12 bulan	254.100.000	12 bulan	280.000.000	12 bulan	280.000.000	Kantor Kelembagaan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	117.600.000	1 paket & 12 Bulan	119.400.000	1 paket & 12 Bulan	131.340.000	1 paket & 12 Bulan	145.000.000	1 paket & 12 Bulan	159.500.000	1 paket & 12 Bulan	180.000.000	1 paket & 12 Bulan	180.000.000	Kantor Kelembagaan Pangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	2.000.000	10 orang	0	10 orang	3.000.000	10 orang	6.000.000	10 orang	9.000.000	10 orang	12.000.000	10 orang	12.000.000	Kantor Kelembagaan Pangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan-laporan	24.450.000	8 laporan	35.000.000	8 laporan	38.500.000	6 laporan	42.350.000	8 laporan	46.500.000	8 laporan	51.200.000	8 laporan	51.200.000	Kantor Kelembagaan Pangan
Program Peningkatan Kelembagaan Pangan	Meningkatnya cadangan pangan	726.350.000	1 tahun	625.620.000	1 tahun	1.053.182.000	1 tahun	1.158.500.000	1 tahun	1.274.350.000	1 tahun	1.401.785.000	1 tahun	1.401.785.000	Kantor Kelembagaan Pangan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK															
Program Kesterasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	Terdapatnya sosialisasi			0		65.000.000	5 kec	71.500.000	5 kec	78.650.000	5 kec	86.515.000	5 kec	86.515.000	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender & anak	2 kegiatan	2 keg	141.317.000	2 keg	134.386.000	3 keg	100.000.000	3 keg	100.000.000	3 keg	100.000.000	3 keg	100.000.000	BKKB PP
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan program perlindungan perempuan	6 kegiatan	6 keg	807.019.800	6 keg	807.427.160	6 keg	700.000.000	6 keg	700.000.000	6 keg	700.000.000	6 keg	700.000.000	BKKB PP
Program Peningkatan Pemasokan dan Ketersediaan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan pemasokan dalam pembangunan	2 kegiatan	2 keg	135.400.000	2 keg	80.000.000	2 keg	160.000.000	2 keg	160.000.000	2 keg	160.000.000	2 keg	160.000.000	BKKB PP
LINGKUNGAN HIDUP															
Program Administrasi Perkantoran	Kelembagaan pelayanan admin	100%	100%	216.951.350	100%	246.689.400	100%	266.346.300	100%	292.980.900	100%	322.279.023	100%	354.506.925	KLH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	117.973.500	100%	181.400.000	100%	145.000.000	100%	159.599.000	100%	175.558.900	100%	193.114.790	KLH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	4.950.000	100%	4.750.000	100%	5.325.000	100%	5.747.500	100%	6.320.250	100%	6.954.475	KLH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terdapatnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	1.150.000	100%	1.150.000	100%	1.150.000	100%	1.150.000	100%	1.150.000	100%	1.150.000	KLH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	KLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Desampar	Jumlah dan bank sampah yang terbangun	7 unit Bank Sampah	7 unit Bank Sampah	10.800.000	8 unit Bank Sampah	30.000.000	10 unit Bank Sampah	41.450.000	12 unit Bank Sampah	47.795.000	13 unit Bank Sampah	52.574.500	15 unit Bank Sampah	57.531.900	KLH

Bidang Urusan, Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengendalian Pencemaran dan Penyakit Lingkungan Hidup			100 % (penghar gaan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 titik sampel tanah, 20 dokume n LH, 120 pengusa ha/tahun)	496.925.000	100 % (penghar gaan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 titik sampel tanah, 20 dokume n LH, 120 pengusa ha/tahun)	1.583.487.000	100 % (penghar gaan adipura, 60 unit: pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 titik sampel tanah, 20 dokumen LH, 120 pengusa ha/tahun)	1.641.833.700	100 % (penghar gaan adipura, 60 unit: pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 titik sampel tanah, 20 dokumen LH, 120 pengusa ha/tahun)	1.806.019.270	100 % (penghar gaan adipura, 60 unit: pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 titik sampel tanah, 20 dokumen pengusa ha/tahun)	1.986.621.197	100 % (penghar gaan adipura, 60 unit: pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 titik sampel tanah, 20 dokumen pengusa ha/tahun)	2.185.253.317	KLH
Program Peningkatan Kualitas Sumber dan Akses Informasi SDA & LH		100%	100 % (penghar gaan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 titik sampel tanah, 20 dokume n LH, 120 pengusa ha/tahun)	178.461.000	100 % (penghar gaan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 titik sampel tanah, 20 dokumen LH, 120 pengusa ha/tahun)	207.021.100	100 % (penghar gaan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 titik sampel tanah, 20 dokumen LH, 120 pengusa ha/tahun)	227.723.100	100 % (penghar gaan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 titik sampel tanah, 20 dokumen LH, 120 pengusa ha/tahun)	250.495.410	100 % (penghar gaan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 titik sampel tanah, 20 dokumen LH, 120 pengusa ha/tahun)	275.544.951	100 % (penghar gaan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 titik sampel tanah, 20 dokumen LH, 120 pengusa ha/tahun)	303.094.446	KLH
Program Peningkatan Pengendalian Polisi		100%	16 titik sampel	48.110.000	30 titik sampel/tah un	85.000.000	30 titik sampel/tah un	93.500.000	30 titik sampel/tah un	102.850.000	30 titik sampel/tah un	113.135.000	100%	124.448.500	KLH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Ketertarikan Administrasi Perkantoran	95%	95%	574.404.035	95%	636.956.039	98%	664.500.000	98%	728.674.000	98%	810.800.000	100%	850.000.000	DISDUCAPIL KOTA METRO
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	92%	618.316.943	92%	1.550.648.638	92%	790.500.000	94%	744.600.000	94%	810.700.000	95%	815.700.000	DISDUCAPIL KOTA METRO
Program Peningkatan Disiplin Pegawai	Memangkuatnya disiplin pegawai	97%	98%	11.790.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.000.000	DISDUCAPIL KOTA METRO
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memangkuatnya kualitas SDM Aparatur	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.000.000	DISDUCAPIL KOTA METRO
Program Pengembangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya pengembangan kinerja dan keuangan	90%	95%	23.004.000	95%	14.376.200	95%	14.700.000	95%	15.120.000	95%	16.000.000	100%	17.800.000	DISDUCAPIL KOTA METRO
Program Terwujudnya Administrasi Kependudukan	Terwujudnya administrasi kependudukan	800%	800%	848.879.000	800%	848.879.000	800%	848.879.000	800%	848.879.000	800%	848.879.000	800%	848.879.000	DISDUCAPIL KOTA METRO
Program Terwujudnya Administrasi KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH	Terwujudnya administrasi koperasi, usaha, dan menengah	800%	800%	848.879.000	800%	848.879.000	800%	848.879.000	800%	848.879.000	800%	848.879.000	800%	848.879.000	DISDUCAPIL KOTA METRO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	150.280.840	100%	345.308.446	100%	423.346.864	100%	466.223.652	100%	512.846.234	100%	540.344.236	DISKOP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	102.431.000	100%	517.151.000	100%	193.146.100	100%	213.142.710	100%	234.456.981	100%	257.902.679	DISKOP

Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	DISKOP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	50.000.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	44.868.200	100%	49.355.020	100%	54.920.522	100%	59.719.574	100%	65.691.531	100%	72.260.684	72.260.684	DISKOP
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dikerjakannya produk-produk Kota Metro pada ajang pameran	100%	100%	1.090.216.800	100%	1.199.238.480	100%	1.319.162.328	100%	1.451.078.560	100%	1.596.186.417	100%	1.755.805.058	1.755.805.058	DISKOP
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100%	100%	0	100%	405.000.000	100%	445.500.000	100%	490.050.000	100%	539.055.000	100%	592.960.500	592.960.500	DISKOP
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	100%	230.000.000	100%	253.000.000	100%	27.830.000	100%	30.613.000	100%	33.674.300	100%	37.041.730	37.041.730	DISKOP
Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi	100%	100%	0	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	109.807.400	109.807.400	DISKOP
Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Koperasi Simpan Pinjam	Tercapainya Pengawasan dan Pengendalian Usaha Koperasi Simpan Pinjam	100%	100%	0	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	48.000.000	100%	53.240.000	100%	58.564.000	58.564.000	DISKOP
PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	348.156.800	1 tahun	235.194.380	1 tahun	258.713.818	1 tahun	281.585.200	1 tahun	313.043.720	1 tahun	344.346.092	344.346.092	BKKRB PP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	793.345.000	1 tahun	299.839.500	1 tahun	329.823.450	1 tahun	362.805.795	1 tahun	399.086.375	1 tahun	438.995.012	438.995.012	BKKRB PP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	1 tahun	1 tahun	17.010.000	1 tahun	299.839.500	1 tahun	329.823.450	1 tahun	362.805.795	1 tahun	399.086.375	1 tahun	438.995.012	438.995.012	BKKRB PP
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas SDM	1 tahun	0		0	0	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	10.000.000	BKKRB PP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 tahun	1 tahun	41.769.000	1 tahun	27.500.000	1 tahun	30.250.000	1 tahun	33.275.000	1 tahun	36.602.500	1 tahun	40.262.740	40.262.740	BKKRB PP
Program Kelangka Berencana	Tersedianya program Kelangka Berencana dengan baik	100%	100%	962.365.000	100%	816.001.070	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	1.200.000.000	BKKRB PP
Program Keselamatan Reproduksi, Remaja Berencana	Tersedianya pendampingan dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja	100%	100%	22.260.000	100%	19.486.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	39.500.000	39.500.000	BKKRB PP
Program Pelayanan Kontrasepsi	Tersedianya pelayanan perencanaan alat kontrasepsi	100%	100%	50.525.000	100%	45.577.500	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	60.000.000	BKKRB PP
Program Pemantauan Berat Badan Masyarakat dalam Pelaksanaan KB yang Mandiri	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam KB mandiri	100%	100%	367.361.800	100%	328.951.550	100%	420.000.000	100%	420.000.000	100%	440.000.000	100%	440.000.000	440.000.000	BKKRB PP
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelembagaan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu, bayi dan anak	100%	100%	138.302.700	100%	140.736.220	100%	154.509.642	100%	170.290.826	100%	187.319.904	100%	207.119.904	207.119.904	BKKRB PP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Memerankan Desa	Akting optimalisasi partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	960.000.000	22 tahun	960.000.000	22 tahun	960.000.000	22 tahun	960.000.000	22 tahun	960.000.000	22 tahun	960.000.000	960.000.000	DISKONAKER
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Desa	Meningkatnya kualitas kelembagaan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	1.105.000.000	Nasabah
PERHUBUNGAN																
Program Pengendalian & Penguatan Laju Pertumbuhan	Pertumbuhan dan perkembangan desa	1 tahun	1 tahun	85.500.000	1 tahun	112.800.000	1 tahun	112.800.000	1 tahun	112.800.000	1 tahun	112.800.000	1 tahun	112.800.000	112.800.000	DISKONAKOMINFO

Bidang Usuan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Pengembangan Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba						30.000.000		30.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	Dikbudpora	
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Menurutnya siswa pengguna narkoba		0	24.336.400	0	40.000.000	0	44.000.000	0	48.400.000	0	53.240.000	0	58.564.000	Dikbudpora	
Program Pembinaan dan Pemasaran Olahraga	Meningkatnya kualitas manajemen organisasi kepemudaan	4 organisasi kepemudaan	5	29.723.000	6	40.000.000	9	44.000.000	9	48.400.000	9	53.240.000	9	59.895.000	Dikbudpora	
Program Peningkatan sarana prasarana olahraga	Meningkatnya jumlah prestasi olahraga	25 prestasi	25	1.324.369.400	27	1.629.529.300	29	1.792.482.230	32	1.857.082.000	35	2.042.790.200	40	2.126.069.000	Dikbudpora	
PERPUSTAKAAN & ARSIP	Meningkatnya sarana prasarana olahraga	25 prestasi	25	305.692.000	27	336.761.000	29	369.887.320	32	406.876.000	35	447.563.000	40	492.320.000	Dikbudpora	
Program penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	terdelamarkanya dokumentarsip daerah pemerintahan kota metro baik fisik maupun informatika	82.830.000	100%	20.000.000	100%	46.000.000	100%	50.600.000	100%	55.660.000	100%	61.226.000		67.348.600		
program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan	terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	22 kel		27.925.000	diras/instansi	25.000.000	inas/instansi	27.500.000	diras/instansi	30.250.000	inas/instansi	33.275.000	100%	36.602.500	pustakardok	
program peningkatan kualitas layanan informasi	meningkatnya pelayanan informasi di bidang kearsipan			100%	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	29.282.000	pustakardok	
program wajib perpustakaan	lancarnya program administrasi perkantoran	344.961.000	12 bin	352.437.000	12 bin	321.510.700	12 bin	353.661.770	12 bin	389.027.947	12 bin	427.930.742	12 bin	470.723.816	pustakardok	
Program pelayanan administrasi perkantoran	tersedianya peralatan kantor dan kelengkapan kantor	331.546.000	6 kegiatan	351.010.000	6 kegiatan	158.948.000	6 kegiatan	174.842.800	6 kegiatan	192.327.080	6 kegiatan	211.559.788	6 kegiatan	232.715.767	pustakardok	
Program peningkatan disiplin aparat	keberagaman dan kerapihan pegawai	5 orang	31 orang	3.150.000		0		30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000	pustakardok	
program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	tersedianya sdm yang berkepeten	22.000.000			1 th	25.000.000	1 th	27.500.000	1 th	30.250.000	1 th	33.275.000	1 th	36.602.500	pustakardok	
program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan	455.242.500	6 keg	397.100.000	6 keg	527.762.000	6 keg	580.538.200	6 keg	638.592.020	6 keg	702.451.222	6 keg	772.696.344	pustakardok	
KEBUDAYAAN																
Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya jumlah sanggar yang aktif	40 sanggar	40	277.596.000	43	419.000.000	45	460.900.000	50	506.990.000	53	557.689.000	53	613.457.900	Dikbudpora	
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya jumlah even seni dan budaya berbasis masarakat	2 even	2	81.368.000	2	96.781.000	4	106.459.000	4	117.105.000	4	128.815.000	4	141.697.000	Dikbudpora	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya jumlah prestasi bidang seni dan budaya	5 prestasi	5	877.720.000	6	1.038.711.400	6	1.142.482.540	6	1.256.840.794	6	1.382.524.873	6	1.520.777.361	Dikbudpora	
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya kegiatan promosi di luar daerah	2 kali	3	302.501.000	5	314.437.100	5	345.880.610	5	380.468.891	5	418.515.780	5	460.367.358	Dikbudpora	
STATISTIK																
Program Pengembangan Data & Informasi	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	10 Dokumen	10 Dok	850.000.000	10 Dok	850.000.000	10 Dok	900.000.000	10 Dok	900.000.000	10 Dok	900.000.000	10 Dok	900.000.000	Rappeda	
Program Pengembangan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemerintahan pembangunan daerah	8 Dokumen	8 Dok	1.400.000.000	8 Dok	1.400.000.000	8 Dok	1.600.000.000	8 Dok	1.600.000.000	8 Dok	1.800.000.000	8 Dok	1.600.000.000	Rappeda	
Program Perencanaan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	3 Dokumen	3 Dok	867.000.000	3 Dok	867.000.000	4 Dok	930.000.000	4 Dok	930.000.000	5 Dok	930.000.000	5 Dok	930.000.000	Rappeda	
Program Perencanaan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Dokumen	1 Dok	191.000.000	1 Dok	191.000.000	2 Dok	270.000.000	2 Dok	270.000.000	3 Dok	270.000.000	3 Dok	270.000.000	Rappeda	
Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang tata ruang	2 Dokumen	2 Dok	248.000.000	2 Dok	248.000.000	3 Dok	340.000.000	3 Dok	340.000.000	4 Dok	340.000.000	4 Dok	340.000.000	Rappeda	
PERIKANAN																
Program Penguatan dan Pengembangan Sektor Perikanan dan Perikanan Sumberdaya Perikanan	Peningkatan produksi dan pendapatan perikanan	2.625.192.000	100%	65.082.000	100%	745.000.180	100%	839.554.365	100%	907.488.902	100%	991.637.792	100%	1.090.801.571	Dinas Perikanan	
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Pengembangan Budidaya Perikanan	2.625.192.000	100%	74.150.600	100%	83.771.760	100%	92.148.276	100%	101.104	100%	111.499.414	100%	122.146.355	Dinas Perikanan	
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemastian Kualitas Perikanan	Peningkatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemastian Kualitas Perikanan	86.134.400	100%	74.150.600	100%	83.771.760	100%	92.148.276	100%	101.104	100%	111.499.414	100%	122.146.355	Dinas Perikanan	

Bidang Unsur Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	0	100%	0	100%	0	100%	80.000.000	100%	88.000.000	100%	96.800.000	100%	106.480.000	Dinas Perikanan	
PERTANIAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	785.392.785	100%	988.361.259	100%	1.222.628.445	100%	1.344.891.290	100%	1.479.380.418	100%	1.627.318.460	100%	1.790.050.306	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperluuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur	279.273.500	100%	323.523.000	100%	357.613.850	100%	393.375.325	100%	423.712.759	100%	475.964.034	100%	523.582.438	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparat	0	100%	19.530.000	100%	45.000.000	100%	49.500.000	100%	54.450.000	100%	59.895.000	100%	65.884.500	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.000.000	100%	0	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	14.641.000	100%	16.105.100	100%	17.715.610	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	53.535.950	100%	61.665.950	100%	66.452.655	100%	73.097.921	100%	80.407.713	100%	88.448.484	100%	97.293.332	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Keselamatan Petani	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan bagi petani	455.273.343	100%	413.061.361	100%	460.010.497	100%	506.011.547	100%	556.612.701	100%	612.273.972	100%	673.501.369	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Terperluuhnya Peningkatan Ketahanan Pangan	409.015.000	100%	457.672.500	100%	504.088.750	100%	554.497.625	100%	609.947.388	100%	670.942.126	100%	738.036.339	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Pemasaan dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya nilai tambah serta akses pemasaran produk pertanian	68.995.500	100%	90.022.377	100%	99.024.615	100%	108.927.077	100%	119.819.784	100%	131.801.763	100%	144.981.939	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas lahan pertanian	184.575.000	100%	99.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	%	161.051.000	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Produksi Pertanian	Peningkatan produksi pertanian	8.163.712.750	100%	1.878.303.000	100%	5.571.161.300	100%	6.128.277.430	100%	6.741.105.173	100%	7.415.215.690	100%	8.156.737.259	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura	Peningkatan produksi pertanian Hortikultura	0	100%	0	100%	0	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Terperluuhnya Sarana dan Prasarana Pertanian	0	100%	0	100%	0	100%	8.000.000.000	100%	8.800.000.000	100%	9.680.000.000	100%	10.684.000.000	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Pelayanan Mutu	Meningkatnya kualitas dan akses sertifikasi/registrasi produk	0	100%	0	100%	0	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	Dinas Pertanian	
Program Perceghahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya status kesehatan hewan dan menurunnya kasus penyakit hewan	224.266.900	100%	207.987.400	100%	231.712.140	100%	254.883.354	100%	280.371.689	100%	308.408.858	100%	339.249.744	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Produkti Hasil Peternakan	Peningkatan kualitas dan produksi hasil peternakan	174.270.000	100%	138.475.000	100%	152.872.500	100%	168.159.750	100%	184.975.725	100%	203.473.298	100%	223.820.627	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Pemasaan Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya nilai tambah, daya saing, pangsa pasar, produk peternakan	90.380.000	100%	45.250.000	100%	49.775.000	100%	54.752.500	100%	60.227.750	100%	66.250.525	100%	72.875.578	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Peternakan	333.105.000	100%	222.180.000	100%	289.190.000	100%	318.109.000	100%	349.919.900	100%	384.911.890	100%	423.403.079	Dinas Pertanian	
Program Pengembangan Kinerja Organisasi Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Kinerja Organisasi Pendukung Pertanian	26.250.000	100%	25.000.000	100%	26.250.000	100%	28.675.000	100%	31.762.500	100%	34.938.750	100%	38.432.625	Dinas Pertanian	
PERDAGANGAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya dana untuk administrasi perkantoran	1.089.385.340	1 tahun	1.201.784.260	1 tahun	1.303.452.051	1 tahun	1.343.000.000	1 tahun	1.477.300.000	1 tahun	1.625.030.000	1 tahun	1.787.533.000	Dinasdagat	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dana, sarana dan prasarana aparat	263.121.400	1 tahun	177.631.720	1 tahun	420.651.892	1 tahun	445.000.000	1 tahun	489.500.000	1 tahun	538.450.000	1 tahun	597.245.000	Dinasdagat	
Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersednya dana disiplin aparat	57.456.000	1 tahun	56.440.000	1 tahun	48.450.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	107.145.500	1 tahun	117.960.000	1 tahun	129.144.000	Dinasdagat	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dana Sumber Daya Aparatur	175.000.000	1 tahun	1	1 tahun	3	1 tahun	18.000.000	1 tahun	19.500.000	1 tahun	21.000.000	1 tahun	22.500.000	Dinasdagat	
	Tersedianya dana Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	71.600.000	1 tahun	70.000.000	1 tahun	77.000.000	1 tahun	84.000.000	1 tahun	103.400.000	1 tahun	113.740.000	1 tahun	125.114.000	Dinasdagat	

Bidang Usuan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Target		Rp		Target	Rp			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Perilaku Konsumen dan Penguatan Perdagangan	Tersedianya dana konsumen dan penguatan perdagangan	226.000.000	1 tahun	226.000.000	1 tahun	401.000.000	1 tahun	410.000.000	1 tahun	451.000.000	1 tahun	496.100.000	1 tahun	545.710.000	Disdagar	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya dana perdagangan dalam negeri	281.963.550	1 tahun	293.908.950	1 tahun	529.000.000	1 tahun	605.000.000	1 tahun	665.500.000	1 tahun	732.050.000	1 tahun	805.255.000	Disdagar	
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tersedianya dana pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	300.995.500	1 tahun	250.580.005	1 tahun	343.000.000	1 tahun	364.000.000	1 tahun	400.400.000	1 tahun	440.440.000	1 tahun	464.484.000	Disdagar	
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Tersedianya dana pembangunan infrastruktur pedesaan	3.696.625.000	1 tahun	2.292.028.305	1 tahun	2.239.000.000	1 tahun	2.312.000.000	1 tahun	2.543.200.000	1 tahun	2.797.520.000	1 tahun	3.077.272.000	Disdagar	
PERINDUSTRIAN																
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tercapainya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kurang optimalnya pembinaan dan pelatihan	100%	261.455.000	100%	287.600.500	100%	316.360.550	100%	347.996.609	100%	382.796.265	100%	421.075.892	DISKOP	
Program Pengembangan Sentera-Sentra Industri Potensial	Tersedianya Pengembangan Sentera-Sentra Potensial	100%	0%	0	100%	145.000.000	100%	159.500.000	100%	175.450.000	100%	192.995.000	100%	212.294.500	DISKOP	
Program Penguatan Kemampuan Teknologi Industri	Tercapainya Penguatan Kemampuan Teknologi Industri	100%	0%	0	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.860.000	100%	87.846.000	DISKOP	
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Tercapainya Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Masih banyak produk yang belum diuji atau belum bersertifikasi	0%	0	100%	53.625.000	100%	58.987.500	100%	64.886.250	100%	71.374.875	100%	78.512.363	DISKOP	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetensi Usaha Kecil Menengah	Tercapainya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetensi Usaha Kecil Menengah	Kualitas SDM Kewirausahaan dan Keunggulan masih terbatas	0%	0	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	DISKOP	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																
Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bencana Kebakaran	1. Respon time penanggulangan kebakaran 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bencana kebakaran 3. Penguas Pemadam Kebakaran yang handal	0 0 0	45 menit 20% 10 orang	500.000.000 200.000.000	30 menit 40% 10 orang	600.000.000 300.000.000	25 menit 60% 10 orang	600.000.000 400.000.000	20 menit 80% 10 orang	560.000.000 500.000.000	15 menit 100% 10 orang	575.000.000 800.000.000	15 menit 100% 100%	632.000.000 1.030.000.000	BPRD	
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam/Sosial	Presentase bangunan/tahan pertanian/asum yang dilakukan rehabilitasi	0	20%	200.000.000	40%	300.000.000	60%	400.000.000	80%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	700.000.000	BPRD	
Program Pengendalian Banjir	Tersusun serta tersedianya rencana pengendalian banjir	0	20%	500.000.000	40%	600.000.000	60%	700.000.000	80%	900.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.300.000.000	BPRD	
Program Pencegahan Diri dan Peningkatan Keselamatan Penanggulangan Bencana Alam/Nor Alam	1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan bencana alam/non alam 2. Keselamatan menghadapi bencana kebakaran	Masyarakat telah memahami risiko bencana alam/non alam Sumut beresapua keselamatan 16 unit	200 org 12 unit	1.700.000.000 705.000.000	200 org 12 unit	1.700.000.000 795.000.000	200 org 12 unit	1.700.000.000 795.000.000	200 org 12 unit	1.700.000.000 795.000.000	250 org 24 unit	3.000.000.000 867.000.000	1000 org 88 unit	3.300.000.000 910.000.000	BPRD	
Program Perwujudan Satuan Dalam Menanggapi Bencana Alam, Nor Alam	Mobil Damkar	Mobil Damkar	45 org	705.000.000	45 org	795.000.000	45 org	795.000.000	45 org	867.000.000	45 org	867.000.000	45 org	910.000.000	BPRD	
Program Penguatan Administrasi Persamaan	Tersedianya jasa pendukung pelayanan administrasi persamaan	45 org	45 org	705.000.000	45 org	795.000.000	45 org	795.000.000	45 org	867.000.000	45 org	867.000.000	45 org	910.000.000	BPRD	

Bidang Ususan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)				SKPD Penanggung Jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target		Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		60%	60%	247.000.000	70%	271.000.000	80%	307.500.000	90%	335.000.000	100%	430.000.000	100%	452.000.000	BPRD		
1. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		60%	60%		70%		80%		90%		100%		100%				
2. Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=1 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=2 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=2 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=2 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=2 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=2 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=2 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=2 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=2 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=2 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=2 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=2 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompe=1 unit, Notebook=2 Unit, Printer=2 unit			
3. Terpeliharanya Kendaraan Dinas		10															
4. Terpeliharanya Gedung Kantor		gedung kantor	gedung kantor	gedung kantor	gedung kantor	gedung kantor	gedung kantor	gedung kantor	gedung kantor	gedung kantor	gedung kantor	gedung kantor	gedung kantor	gedung kantor			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	60%	75%	12.500.000	80%	13.500.000	85%	14.500.000	90%	14.500.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	BPRD		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	0	5 org	100.000.000	5 org	100.000.000	5 org	100.000.000	10 org	200.000.000	10 org	200.000.000	35 orang	200.000.000	BPRD		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Keuangan	70%	75%	45.000.000	80%	50.000.000	85%	55.000.000	90%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	BPRD		
DISPENDA																	
Program Pelaporan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya administrasi perkantoran	12 bulan	12 bln	830.833.000	12 bln	952.614.000	12 bln	1.047.860.000	12 bln	1.119.030.000	12 bln	1.200.000.000	12 bln	1.280.000.000	Dispenda		
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya fasilitas Sarana Prasarana Aparatur yang memadai	6 paket	6 Pkt	384.180.000	6 Pkt	422.750.000	4 Pkt	241.900.000	6 Pkt	368.000.000	3 Pkt	250.000.000	2 Pkt	247.000.000	Dispenda		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya disiplin aparatur	65 org	66 Org	13.750.000	0	0	-	0	70 Org	17.500.000	70 Org	24.000.000	70 Org	24.000.000	Dispenda		
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	3 org	-	0	3 Org	20.000.000	5 org	20.000.000	5 org	20.000.000	3 Org	20.000.000	3 Org	20.000.000	Dispenda		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya laporan keuangan	6 dokumen	6	83.914.000	6	68.827.000	6	74.700.000	6	79.000.000	6	84.000.000	4	94.000.000	Dispenda		
Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kebercapaian target PAD	100%	100	1.602.623.960	100	2.030.624.000	100	3.557.496.000	100	3.935.000.000	100	4.415.000.000	100	4.760.000.000	Dispenda		
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Terlaksananya Pendidikan, Pengkaderan, Pembinaan, dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	22 Kelurahan	22 Kel		22 Kel		22 Kel		22 Kel		22 Kel		22 Kel				
Program Pelaporan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	95%	10.000.000.000	98%	11.000.000.000	98%	12.000.000.000	98%	13.000.000.000	98%	14.000.000.000	98%	15.000.000.000	BPRD		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	95%	1.000.000.000	98%	1.100.000.000	98%	1.200.000.000	98%	1.300.000.000	98%	1.400.000.000	98%	1.500.000.000	BPRD		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Keuangan	70%	75%	45.000.000	80%	50.000.000	85%	55.000.000	90%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	BPRD		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	95%	1.000.000.000	98%	1.100.000.000	98%	1.200.000.000	98%	1.300.000.000	98%	1.400.000.000	98%	1.500.000.000	BPRD		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pengembangan Kinerja dan Keuangan	100%	95%	1.000.000.000	98%	1.100.000.000	98%	1.200.000.000	98%	1.300.000.000	98%	1.400.000.000	98%	1.500.000.000	BPRD		

Bidang Ususan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung jawab		
		Target	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	BPKAD	12.267.934.575	1.037.459.502
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Terwujudnya penyusunan dasar hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah dari proses penganggaran, hingga pertanggungjawaban	99,65%	95%	6.759.924.000	95%	7.553.544.600	95%	8.307.899.060	95%	10.138.788.906	95%	11.152.667.796	95%	12.267.934.575	16			
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya penilaian Barang Milik Daerah	100%	90%	566.328.000	90%	388.300.000	90%	427.130.000	90%	4.698.430.000	90%	51.682.730.000	95%	1.037.459.502		BPKAD		
INSPEKTORAT																		
Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	446.906.400	1	629.725.000	1	755.042.500	1	5.330.900.900	1	923.910.990	1	923.910.990	1	Inspektoral		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	416.718.000	1	965.964.800	1	1.028.731.280	1	824.944.408	1	942.198.849	1	942.198.849	1	Inspektoral		
Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat pencapaian disiplin aparatur	100%	100%	50.000.000	1	50.000.000	-	0	-	0	1	50.000.000	-	0	1	Inspektoral		
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kualitas penyusunan data base sektoral	N/A	100%	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	Inspektoral		
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan	100%	100%	130.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	Inspektoral		
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pencapaian pengawasan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan	92%	93%	5.745.893.100	1	7.172.505.220	1	8.909.791.522	1	8.790.084.274	1	9.657.092.700	1	10.610.751.965	1	Inspektoral		
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat tercapainya peningkatan capacity building SDM APUP	100%	100%	-	1	0	1	450.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	Inspektoral		
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tingkat tercapainya penyelenggaraan kegiatan pengawasan	100%	100%	-	1	0	1	225.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	Inspektoral		
Program Optimalisasi Pemantauan Teknologi Informasi	Tingkat ketersediaan dokumen hasil pengawasan secara optimal	N/A	0	-	-	0	1	225.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	Inspektoral		
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	20%	455.600.000	20%	501.160.000	20%	551.276.000	20%	606.403.600	20%	667.043.960	20%	733.748.356	20%	BKD		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	pasal	20%	1.30.901.600	20%	143.991.760	20%	156.390.936	20%	174.230.030	20%	191.653.033	20%	210.818.333	20%	BKD		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Pengawasan Pakaian Hari-hari tertentu)	Meningkatnya disiplin Aparatur	48 orang	51 orang	21.500.000	51 orang	24.000.000	51 orang	24.500.000	51 orang	25.000.000	51 orang	25.500.000	51 orang	26.000.000	51 orang	BKD		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan Formal)	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur setelah mengikuti diklat	4.871 orang	20%	99.104.500	20%	1.090.325.280	20%	1.319.293.585	20%	1.332.486.547	20%	1.465.735.201	20%	1.612.308.721	20%	BKD		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan tepat waktu	21 diseminasi	100%	57.800.000	100%	58.378.000	100%	64.215.500	100%	70.637.380	100%	77.701.118	100%	85.471.229	100%	BKD		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur	750 orang	100%	226.200.000	100%	1.107.894.810	100%	1.218.684.291	100%	1.340.552.720	100%	1.474.607.992	100%	1.622.068.791	100%	BKD		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Aparatur	4.871 orang	20%	3.900.000.000	20%	4.246.755.370	20%	4.673.430.900	20%	5.140.773.937	20%	5.654.851.306	20%	6.220.326.638	20%	BKD		
SEKRETARIAT DPRD																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	20%	4.310.000	20%	4.310.000	20%	4.310.000	20%	4.310.000	20%	4.310.000	20%	4.310.000	20%	Inspektoral		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	3.445.000	100%	3.445.000	100%	3.445.000	100%	3.445.000	100%	3.445.000	100%	3.445.000	100%	Inspektoral		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur	45 Orang	100%	249.550	100%	249.550	100%	249.550	100%	249.550	100%	249.550	100%	249.550	100%	Inspektoral		

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tertelaksananya Program: Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20 laporan	100%	371.898	100%	37.336	100%	386.923	100%	394.661	100%	402.554	100%	410.605	Serwan	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Lebih Sistematis, Mudah di mengerti dan mudah di akses	12 bulan	1 tahun	337.920	1 tahun	334.658	1 tahun	351.551	1 tahun	358.582	1 tahun	365.754	1 tahun	373.069	Serwan	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tersedianya Pelayanan terhadap Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas-tugas Legislatif	100%	1 tahun	6.816.366	1 tahun	6.952.693	1 tahun	7.091.747	1 tahun	7.233.582	1 tahun	7.378.254	1 tahun	7.525.819	Serwan	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Fasilitas Buku Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	100%	40.984	100%	41.804	100%	42.640	100%	43.493	100%	44.362	100%	45.250	Serwan	
Program Kerjasama dengan Media Massa	Tersedianya Fasilitas Kerjasama dengan Media Massa	54 media massa	100%	1.620.546	100%	1.652.957	100%	1.686.019	100%	1.719.736	100%	1.754.131	100%	1.789.214	Serwan	
SEKRETARIAT DAERAH																
Program Peningkatan Pelayanan Kedisnasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedisnasan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	9 kegiatan	9 keg	4.538.080.000	9 keg	5.079.984.000	10 keg	5.333.983.200	10 keg	5.603.682.360	10 keg	5.333.983.200	10 keg	5.333.983.200	Bag. Adm Pemerintahan	
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Terselenggaranya kerjasama antar Pemerintah Daerah	2 kegiatan	2 keg	49.000.000	2 keg	51.450.000	3 keg	54.022.500	3 keg	56.723.625	3 keg	54.022.500	3 keg	54.022.500	Bag. Adm Pemerintahan	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselenggaranya Penataan Daerah Otonomi Baru	6 kegiatan	6 keg	265.932.000	6 keg	279.228.600	7 keg	293.190.030	7 keg	307.849.532	7 keg	293.190.030	7 keg	293.190.030	Bag. Adm Pemerintahan	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Metro	1 kegiatan	1 keg	170.800.000	1 keg	179.340.000	1 keg	188.307.000	1 keg	197.722.350	1 keg	188.307.000	1 keg	188.307.000	Bag. Adm Pemerintahan	
Program Pembinaan terhadap kehidupan bergama Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya Kualitas pelayanan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat bergama Sosial Kemasyarakatan	25 kegiatan	25 keg	5.735.751.000	26 keg	6.022.528.080	26 keg	6.323.654.453	26 keg	6.639.837.175	26 keg	6.323.654.453	26 keg	6.323.654.453	Bagian Kesra	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya kelancaran tugas dan kegiatan kedisnasan Walikota dan Wakil	6 kegiatan	6 keg	692.106.800	6 keg	726.712.140	7 keg	763.047.747	7 keg	801.200.134	7 keg	763.047.747	7 keg	763.047.747	Bagian Protokol	
Program kerjasama dengan Media Massa	Meningkatnya pelayanan informasi pemberitaan	1 kegiatan	1 keg	123.000.000	1 keg	129.150.000	1 keg	135.607.500	1 keg	142.357.875	1 keg	135.607.500	1 keg	135.607.500	Bagian Protokol	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (NAT)	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pwardang masalah kesejahteraan sosial pemberdayaan	4 kegiatan	4 keg	386.230.000	4 keg	405.541.500	5 keg	425.818.575	5 keg	447.109.534	5 keg	425.818.575	5 keg	425.818.575	Bag. Adm Perencanaan	
Program Peningkatan Efisiensi Pengadangan Dalam Negeri	Tersusunnya pedoman penyelenggaraan kegiatan peningkatan efisiensi pengadangan perdagangan dalam negeri	10 kegiatan	10 keg	607.389.000	10 keg	658.758.450	11 keg	691.696.373	11 keg	726.281.191	11 keg	691.696.373	11 keg	691.696.373	Bag. Adm Perencanaan	
Pembinaan dan Fasilitas, Pengadaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya Pemberdayaan masyarakat dan aparatut dalam program dan berbagai pelayanan	2 keg	2 keg	125.018.400	2 keg	134.125.120	3 keg	139.851.086	3 keg	145.878.200	3 keg	139.851.086	3 keg	139.851.086	Bag. Adm Pemerintahan	
Pengawasan Sistem Pengawasan, Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH	Terwujudnya kegiatan peningkatan kualitas dan berbagai pelayanan	7 kegiatan	7 keg	1.587.635.800	7 keg	1.687.920.425	7 keg	1.951.396.446	7 keg	2.080.091.269	7 keg	1.951.396.446	7 keg	1.951.396.446	Bag. Adm Pemerintahan	
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terwujudnya inventarisasi laporan kegiatan antar tahun	2 kegiatan	2 keg	56.560.000	2 keg	60.888.300	3 keg	65.472.400	3 keg	70.324.000	3 keg	65.472.400	3 keg	65.472.400	Bag. Adm Pemerintahan	
Program Peningkatan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan antar di berbagai pelayanan	2 keg	2 keg	125.018.400	2 keg	134.125.120	3 keg	139.851.086	3 keg	145.878.200	3 keg	139.851.086	3 keg	139.851.086	Bag. Adm Pemerintahan	
Program Peningkatan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan antar di berbagai pelayanan	2 keg	2 keg	125.018.400	2 keg	134.125.120	3 keg	139.851.086	3 keg	145.878.200	3 keg	139.851.086	3 keg	139.851.086	Bag. Adm Pemerintahan	
Program Peningkatan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya produk hukum peraturan dan dan peraturan dengan penataan perundang-undangan yang berlaku	10 kegiatan	10 keg	1.135.351.000	10 keg	1.215.214.000	10 keg	1.275.480.580	10 keg	1.339.770.600	10 keg	1.275.480.580	10 keg	1.275.480.580	Bagian Hukum	

RPJMD KOTA METRO
2016-2021

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)				SKPD Penanggung Jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target		Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	15 kegiatan	15 keg	10.188.968.650	15 keg	10.698.417.083	15 keg	11.233.337.937	15 keg	11.795.004.833	15 keg	11.233.337.937	15 keg	15 keg		Bagian TU Keuangan	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperuhnya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	5 kegiatan	5 keg	4.512.000.000	5 keg	4.737.600.000	6 keg	4.974.480.000	6 keg	5.223.204.000	5 keg	5.481.364.300	5 keg	6 keg		Bagian TU Keuangan & Bag. Umum	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelakuan aparaturnya dalam mematuhi ketentuan disiplin	1 kegiatan	1 keg	242.870.000	1 keg	255.013.500	1 keg	267.764.175	1 keg	281.152.384	1 keg	295.210.003	1 keg	1 keg		Bagian TU Keuangan & Bag. Umum	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terperuhnya Sistem Pelaporan yang tepat dan akurat	4 kegiatan	4 keg	172.433.100	4 keg	181.054.755	4 keg	190.107.493	4 keg	199.612.867	4 keg	190.107.493	4 keg	4 keg		Bagian TU Keuangan	
Program Peningkatan Tata Usaha Keuangan	Terlaksananya kerja administrasi penatausahaan keuangan	7 kegiatan	7 keg	541.916.900	7 keg	569.012.745	7 keg	597.463.382	7 keg	627.336.551	7 keg	597.463.382	7 keg	597.463.382		Bagian TU Keuangan	
			359.289.646.175		417.104.368.353		436.672.486.727		480.432.115.808								

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Metro tahun 2016-2021 diuraikan dalam tabel 9.1

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Metro

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan PDRB	6,04	6,04	5,94	6,05	6,04	6,23	6,23
1.2.	Laju inflasi	3,7	3,7	4	4	4	4	4
1.3.	PDRB per kapita	27.327.844	27.327.844	29.090.490	30.966.827	32.964.187	35.090.377	35.090.377
	Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf	98,6	98,6	98,7	98,8	98,9	99	99
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	10,83	10,83	11,11	11,39	11,67	11,95	11,95
1.3.	Angka Partisipasi Sekolah SD	91	91,9	92	92,10	92,3	92,4	92,5

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.	Angka Partisipasi SMP	87,55	88,65	89,75	90,85	91,95	93,05	94,15
2.	<i>Kesehatan</i>							
2.1.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	109/100.000	109/100.000	90/100.000	80/100.000	75/100.000	70/100.000	70/100.000
2.2.	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	8/1000	8/1000	7,8/1000	7,5/1000	7,2/1000	7/1000	7/1000
2.3.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	7,5/1000	7,5/1000	7,2/1000	7/1000	6,8/1000	6,5/1000	6,5/1000
2.4.	Angka harapan hidup	71,15	71,15	71,31	71,47	71,63	71,79	71,79
3.	<i>Sumberdaya Manusia</i>							
3.1.	Indeks pembangunan manusia	75	75	75,61	75,78	75,94	76,00	76,00
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.	<i>Pendidikan</i>							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Rasio guru terhadap murid (SD)	1 : 15	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH X 1

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 (4)	Tahun 2 (5)	Tahun 3 (6)	Tahun 4 (7)	Tahun 5 (8)	
(1)	(2)	Thn 0n (3)						(9)
	- SMP	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit
1.1.10.	Jumlah sekolah yang memiliki laboratorium sekolah							
	- SMP	19 unit	19 unit	20 unit	21 unit	22 unit	23 unit	23 unit
1.1.11.	Jumlah sekolah berfasilitas internet	72 sekolah	72 sekolah	73 sekolah	76 sekolah	77 sekolah	80 sekolah	80 sekolah
1.1.12.	Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia 4-6	1 : 96	1 : 96	1 : 98	1 : 100	1 : 102	1 : 104	1 : 104
1.1.13.	Persentase kelulusan siswa: - SD - SMP	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
1.1.14.	Nilai rata-rata kelulusan siswa: - SD - SMP	70,62 66,06	70,62 66,06	70,92 66,59	71,17 67,09	71,42 67,59	71,67 68,09	71,67 68,09
1.1.15.	Persentase siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah							

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	Thn 0n (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.7.	Rasio posyandu terhadap jumlah balita	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100
2.8.	Cakupan peserta PBI-JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.9.	Terpenuhinya tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya	80 %	80 %	85 %	90%	95%	95%	95%
2.10.	Peningkatan srata upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	3 kelurahan	3 kelurahan	5 kelurahan	8 kelurahan	12 kelurahan	15 kelurahan	15 kelurahan
2.11.	Cakupan keluarga sehat	5.700 klg	5.700 klg	6.000 klg	6.200 klg	6.500 klg	6.800 klg	6.800 klg
3.	<i>Pekerjaan Umum</i>							
3.1.	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	81%	81%	82%	83%	84%	85%	85%
3.2.	Jembatan dalam kondisi baik	55 unit	55 unit	56 unit	57 unit	57 nit	57 unit	57 unit
3.3.	Panjang jalan yang memiliki trotoar	16 km	16 km	18 km	20 km	22 km	24 km	24 km
3.4.	Panjang Trotoar yang ramah difabel	2500 m	2500 m	2750 m	3000 m	3250 m	3500 m	3500 m
3.5.	% Drainase dalam kondisi baik	60%	60%	65%	70%	75%	80%	80%

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.2.	Status pengendalian pencemaran udara	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar
11.3.	Status kerusakan tanah	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan
11.4	Pengendalian pencemaran limbah B3	6 unit	6 unit	7 unit	8 unit	9 unit	10 unit	10 unit
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
12.1.	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	80%	80,5%	81%	81,5%	82%	82%
12.2.	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil :							
	- Akta kelahiran	75,16%	75,16%	85%	90%	95%	98%	98%
	- Akta kematian	20%	20%	40%	60%	80%	90%	90%
	- KTP elektronik	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	- Kartu keluarga	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
12.3.	Penerbitan KIA	13000 orang	13000 orang	35000 orang	5000 orang	5000 orang	5000 orang	5000 orang

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	Thn 0n (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
13.1.	% Usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
14.1.	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	70%	70%	70%	71%	71%	72%	72%
14.2.	Angka Kelahiran Total (TFR)/WUS (Wanita Usia Subur 15-49 th)	2,02	2,02	2,02	2,01	2,01	2,01	2,01
14.3.	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 th (ASFR)	20/1000 kelahiran	20/1000 kelahiran	18/1000 kelahiran	15/1000 kelahiran	10/1000 Kelahiran	5/1000 Kelahiran	5/1000 Kelahiran
15.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika							
15.1	Jumlah lampu lalu lintas : - (traffic light) - warning light)	9 unit 12 unit	9 unit 12 unit	10 unit 14 unit	11 unit 16 unit	11 unit 18 unit	12 unit 18 unit	12 unit 18 unit

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

RP-JMD KOTA METRO 2016-2021

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

RPJMD Kota Metro 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23.2	Jumlah Usaha Menengah	92	92	97	112	135	166	166
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Tingkat pertumbuhan realisasi PAD	5%	5%	6%	7%	7%	7%	7%
1.2.	% Alokasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja	50%	50%	50,5%	50,7%	50,8%	51%	51%

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kota Metro 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (*lima*) tahun, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Metro, dan RTRW Kota Metro, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setelah disusun, dokumen RPJMD ini menjadi pedoman pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu lima tahun.

RPJMD Kota Metro 2016-2021 ini memuat kondisi eksisting daerah, permasalahan dan isu strategis, arah kebijakan keuangan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, serta program lintas SKPD, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, sesuai dengan Visi, Misi, dan Program kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 harus memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

10.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025 tahap ketiga. Dengan mengusung visi “**Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif**” dan pelaksanaan 4 (empat) misi, RPJMD Kota Metro dijadikan pedoman dalam penyusunan :

1. Rencana Kerja Pemerintah daerah hingga tahun 2021
2. Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan perencanaan penganggaran

Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada

arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025, sesuai ketentuan pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dibuat untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program pembangunan, sehingga terwujud efisiensi dan efektifitas baik dalam pemanfaatan anggaran maupun waktu pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

RPJMD Kota Metro 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari empat tahap pelaksanaan RPJPD Kota Metro 2005-2025. Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan pola perilaku masyarakat yang transformatif.

Maksud tahapan ini adalah pengembangan kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kota, infrastruktur diseluruh sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan dengan pelibatan pemangku kepentingan secara aktif dan integratif, dengan penekanan pada moral dan nilai agama sebagai landasan berperilaku dan bertindak. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk membangun perekonomian lokal melalui sumber daya manusia yang berkarakter wirausaha dan mandiri serta berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip *sustainable development* untuk kualitas hidup warga yang lebih baik.

Dalam RPJMD 2016-2021 ini, prioritas pembangunan yang mengacu pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota diarahkan pada sektor pendidikan melalui peningkatan dan pemerataan kualitasnya, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi lokal sebagai basis pembangunan wisata keluarga, serta penguatan karakter dan kearifan lokal dengan tetap menjadikan moral agama dan budaya sebagai landasannya.

Selanjutnya, kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Metro 2016-2021 merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021. Setelah

RPJMD Kota Metro ini disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dokumen ini harus dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk Renstra SKPD. Selanjutnya Renstra SKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) SKPD.

2. RPJMD Kota Metro 2016-2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan program dan kegiatan pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam RKPD setiap tahunnya harus memiliki hubungan atau keterkaitan dengan RPJMD ini. Hal ini berarti penetapan prioritas program dan kegiatan dalam RKPD harus sesuai dengan RPJMD Kota Metro 2016-2021. Dengan demikian RKPD dan Renja SKPD harus sinkron dan konsisten karena keduanya berpedoman pada dokumen yang sama yaitu RPJMD Kota Metro 2016-2021.
3. Bappeda Kota Metro melakukan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Metro.
4. Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab program adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusannya masing-masing.






BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun berdasarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Metro Periode 2016-2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro 2005-2025, yang selanjutnya menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai induk dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan Kota Metro, RPJMD menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Metro secara terkoordinir, terintegrasi, dan sinergi. RPJMD menjadi "kontrak kinerja" Kepala Daerah kepada masyarakat dalam mencapai target kinerja setiap tahun selama lima tahun.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 ditentukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, untuk bersama-sama mewujudkan visi pembangunan. Kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, serta kerja sama yang produktif dan konstruktif dengan seluruh unsur masyarakat, menjadi prasyarat untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama.

DAFTAR MENANDATANGI	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	jumlah lokasi yang ditetapkan sebagai wilayah strategis dan cepat tumbuh	1	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	-	0	1	5.000.000.000	-	0	4	15.000.000.000	Dinas PU
program perencanaan teknis dan proses pengadaan barang/jasa	jumlah perencanaan teknis	-	1	800.000.000	1	900.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	17	4.700.000.000	Dinas PU
program pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan dan pemertinaan	% peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemertinaan dalam kondisi baik	57%	59%	3.960.000.000	60%	1.744.000.000	60,8%	1.740.000.000	61,1%	700.000.000	61,3%	700.000.000	61,3%	8.844.000.000	Dinas PU
program metro bersih dan sehat	% tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan kota	93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PU, kecamatan
program gerbang gotong royong	% keaktifan masyarakat dalam kegiatan gotong royong	87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PU, kecamatan
Program Pelayanan Adm Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	100%	8.000.000.000	100%	8.500.000.000	100%	9.000.000.000	100%	9.500.000.000	100%	10.000.000.000	100%	15.000.000.000	DISTAKOPAR
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	% Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	100%	100%	1.102.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.700.000.000	DISTAKOPAR
Program peningkatan disiplin aparatur	% Peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	13	100%	14.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	17.000.000	DISTAKOPAR
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber daya aparatur	% Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan kompetensi jabatan	100%	100%	10.000.000	100%	13.000.000	100%	14.000.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	17.000.000	DISTAKOPAR
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	14.000.000	100%	16.000.000	100%	18.000.000	100%	19.000.000	DISTAKOPAR
Program Perencanaan Tata ruang	% Akurasi data bangunan IMB dalam penataan ruang	80%	100%	188.000.000	100%	190.000.000	100%	195.000.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	DISTAKOPAR
Program Pemanfaatan Ruang	jumlah luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan ketentuan (Zona yang ditetapkan RDTX)	1 keg	1 keg	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	140.000.000	DISTAKOPAR
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	% sampah yang terangkut	70%	70%	775.000.000	75%	780.000.000	80%	790.000.000	85%	795.000.000	90%	800.000.000	90%	850.000.000	DISTAKOPAR
Program Pembinan dan pengawasan bidang pertambangan	% ketebalan air tanah kota metro	30%	100%	150.000.000	100%	155.000.000	100%	160.000.000	100%	165.000.000	100%	170.000.000	100%	175.000.000	DISTAKOPAR
Program pengembangan pemasaran pariwisata	% potensi pariwisata yang berpotensi dipromosikan	50%	55%	410.000.000	60%	430.000.000	65%	435.000.000	70%	450.000.000	75%	500.000.000	80%	525.000.000	DISTAKOPAR
Program pengawasan dan pemberian sebagian rasyak yang berpotensi masuk lingkungan	% peningkatan pengawasan lingkungan masyarakat	50%	55%	24.000.000	60%	26.000.000	65%	28.000.000	70%	30.000.000	75%	32.000.000	80%	35.000.000	DISTAKOPAR
Program Pengembangan destinasi pariwisata	% kunjungan wisata	50%	55%	120.000.000	60%	125.000.000	65%	130.000.000	70%	135.000.000	75%	140.000.000	80%	145.000.000	DISTAKOPAR
Program Pengendalian pemanfaatan ruang	% pengendalian pemanfaatan ruang masyarakat pengembangan kemukiman	60%	65%	120.000.000	70%	125.000.000	75%	130.000.000	80%	135.000.000	85%	140.000.000	90%	145.000.000	DISTAKOPAR
Program Pengembangan kemukiman	% peningkatan peran serta dalam masyarakat pengembangan kemukiman	50%	55%	118.000.000	60%	120.000.000	65%	125.000.000	70%	130.000.000	75%	135.000.000	80%	140.000.000	DISTAKOPAR
Program Pengendalian RTH	% RTH yang kondusif baik	70%	71%	45.000.000	70%	46.000.000	80%	47.000.000	80%	100.000.000	85%	105.000.000	90%	110.000.000	DISTAKOPAR
Program Peningkatan pelayanan PU dan pengendalian	% Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana PU	70%	71%	8.000.000	70%	8.500.000	80%	9.000.000	80%	400.000.000	85%	450.000.000	90%	500.000.000	DISTAKOPAR
Program Peningkatan Pelayanan Lintas Sektor	jumlah kunjungan pelayanan PU	200.000	240	200.000.000	3.80	1.800.000.000	3.80	1.900.000.000	3.80	1.900.000.000	3.80	2.000.000.000	3.80	2.100.000.000	DISTAKOPAR
Program pengembangan RTH	% RTH yang kondusif baik	70%	71%	1.000.000.000	75%	1.050.000.000	78%	1.100.000.000	80%	1.150.000.000	83%	1.200.000.000	85%	1.250.000.000	DISTAKOPAR
Program Perencanaan Teknis dan Proses Pengadaan barang dan jasa	% Kualitas teknis pengadaan barang gedung dan lainnya	40%	0	-	40%	5.000.000.000	50%	1.000.000.000	60%	1.500.000.000	70%	1.000.000.000	90%	1.500.000.000	DISTAKOPAR
PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN															
program pengembangan perumahan	pasok rumah layak huni	67%	-	67,5%	-	3.224.000.000	65,3%	3.224.000.000	65,3%	300.000.000	65,5%	300.000.000	65,5%	7.048.000.000	Dinas PU
	% luas perumahan yang terdida	51%, 59%	-	-	-	0	51%	1.500.000.000	59%	1.500.000.000	57%	1.500.000.000	57%	4.800.000.000	Dinas PU

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab			
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Rp	Target				
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		luas lingkungan permukiman kumuh	8,93 Km2	5.000.000.000	1 km2	5.000.000.000	1 km2	5.000.000.000	1 km2	5.000.000.000	1 km2	5.000.000.000	5 km2	25.000.000.000	Dinas PU		
		rasio permukiman layak huni	85%-15%	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas PU		
		% rumah tinggal bersentasi	30%	750.000.000	20%	700.000.000	20%	700.000.000	10%	700.000.000	5%	700.000.000	85%	3.550.000.000	Dinas PU		
		rumah tangga pengguna air bersih	2300	500.000.000	2600	500.000.000	2900	500.000.000	3000	500.000.000	3500	500.000.000	3800 pig	2.500.000.000	Dinas PU		
		program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	89%	4.980.000.000	89,3%	200.000.000	89,5%	200.000.000	89,7%	200.000.000	89,9%	200.000.000	89,9%	5.780.000.000	Dinas PU		
		% sarana dan prasarana dasar permukiman	2,7 %	-	4,8%	1.830.000.000	6,9%	1.830.000.000	9,1%	1.830.000.000	11,3%	1.830.000.000	11,3%	7.320.000.000	Dinas PU		
		% sarana dan prasarana dasar permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
		SAT POL PP	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Satuan Polisi Pamong Praja	12 Kegiatan	2.685.961.686	12 Kegiatan	2.820.259.770	12 Kegiatan	2.961.272.759	12 Kegiatan	3.109.336.397	12 Kegiatan	3.264.803.217	12 Kegiatan	3.428.043.377	Sat Pol PP	
6 kegiatan	535.385.000			6 kegiatan	962.154.250	6 kegiatan	1.090.261.963	6 kegiatan	734.775.061	6 kegiatan	785.763.814	6 kegiatan	818.302.004	Sat Pol PP			
1 Kegiatan	254.291.000			1 Kegiatan	262.375.050	1 Kegiatan	275.493.803	1 Kegiatan	297.533.307	1 Kegiatan	315.385.305	1 Kegiatan	334.308.423	Sat Pol PP			
5 kegiatan	35.639.000			5 kegiatan	26.920.950	5 kegiatan	28.266.998	5 kegiatan	29.680.347	5 kegiatan	31.164.365	5 kegiatan	32.722.583	Sat Pol PP			
7 Kegiatan	839.008.000			7 kegiatan	1.014.032.000	7 kegiatan	1.045.993.800	7 kegiatan	1.205.717.720	7 kegiatan	1.118.516.471	7 kegiatan	1.159.744.586	Sat Pol PP			
2 kegiatan	349.882.000			2 kegiatan	78.626.100	2 kegiatan	82.557.405	2 kegiatan	86.685.275	2 kegiatan	91.019.539	2 kegiatan	95.570.516	Sat Pol PP			
KESBANGPOL																	
12 kegiatan	179.485.000			12 kegiatan	179.485.000	12 kegiatan	179.485.000	12 kegiatan	179.485.000	12 kegiatan	179.485.000	12 kegiatan	179.485.000	12 kegiatan	179.485.000	Kesbangpol	
5 kegiatan	91.030.000			5 kegiatan	91.030.000	5 kegiatan	91.030.000	5 kegiatan	91.030.000	5 kegiatan	91.030.000	5 kegiatan	91.030.000	5 kegiatan	91.030.000	Kesbangpol	
1 kegiatan	3.150.000			1 kegiatan	3.150.000	1 kegiatan	3.150.000	1 kegiatan	3.150.000	1 kegiatan	3.150.000	1 kegiatan	3.150.000	1 kegiatan	3.150.000	Kesbangpol	
KESBANGPOL	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol	3 kegiatan	34.300.000	3 kegiatan	34.300.000	3 kegiatan	34.300.000	3 kegiatan	34.300.000	3 kegiatan	34.300.000	3 kegiatan	34.300.000	Kesbangpol			
		4 Kegiatan	427.000.000	4 Kegiatan	450.000.000	4 Kegiatan	450.000.000	4 Kegiatan	480.000.000	4 Kegiatan	480.000.000	4 Kegiatan	480.000.000	Kesbangpol			
		4 Kegiatan	437.355.000	4 Kegiatan	437.355.000	4 Kegiatan	437.355.000	4 Kegiatan	437.355.000	4 Kegiatan	450.000.000	4 Kegiatan	450.000.000	Kesbangpol			
		4 Kegiatan	180.100.000	4 Kegiatan	180.100.000	4 Kegiatan	180.100.000	4 Kegiatan	200.000.000	4 Kegiatan	200.000.000	4 Kegiatan	200.000.000	Kesbangpol			
		5 Kegiatan	127.900.000	5 Kegiatan	127.900.000	5 Kegiatan	127.900.000	5 Kegiatan	135.000.000	5 Kegiatan	135.000.000	5 Kegiatan	135.000.000	Kesbangpol			
		SOSIAL															
		1 tahun	283.063.450	1 tahun	328.045.000	1 tahun	365.849.300	1 tahun	396.934.450	1 tahun	436.627.895	1 tahun	480.200.645	1 tahun	480.200.645	DISOSNAKER	
		1 tahun	118.099.000	1 tahun	83.000.000	1 tahun	91.300.000	1 tahun	100.430.000	1 tahun	110.473.000	1 tahun	121.520.300	1 tahun	121.520.300		

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1 tahun	13.230.000	4 keg	13.230.000	4 keg	14.553.000	4 keg	16.008.300	4 keg	17.609.130	4 keg	19.370.043	DISOSNAKER	
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	1 tahun	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	11.000.000	1 keg	12.100.000	1 keg	13.310.000	1 keg	14.641.000	DISOSNAKER	
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 tahun	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	41.250.000	1 keg	45.375.000	1 keg	49.912.500	1 keg	54.903.750	DISOSNAKER	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatnya Keberdayaan Fakir Miskin Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar lainnya	4.141 Fakir Miskin	447.550.000	210 Fakir Miskin	447.550.000	210 Fakir Miskin	530.246.750	210 Fakir Miskin	583.271.425	210 Fakir Miskin	641.598.568	3091 Fakir Miskin	705.758.424	DISOSNAKER	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya keberfungsian Sosial Klien Individu (casework)	1885 Fakir Miskin	151.000.000	150 Klien	151.000.000	150 Klien	287.925.000	150 Klien	316.717.500	150 Klien	348.389.250	1135 Klien	383.228.175	DISOSNAKER	
Program Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Anak	Terperuhinya Hak-Hak Dasar Anak dan Terlindunginya Hak Penyandang Disabilitas	7 Kluster Anak (326 Anak)		1 Tahun Kegiatan		1 Tahun Kegiatan	55.000.000	1 Tahun Kegiatan	60.500.000	1 Tahun Kegiatan	66.530.000	1 Tahun Kegiatan	73.205.000	DISOSNAKER	
Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya Taraf Hidup, Terpenuhi dan Terlindunginya Hak Penyandang Disabilitas	361 Disabilitas	68.920.000	1 Tahun Kegiatan	68.920.000	1 Tahun Kegiatan	80.850.000	1 Tahun Kegiatan	88.935.000	1 Tahun Kegiatan	97.828.500	1 Tahun Kegiatan	107.611.350	DISOSNAKER	
Program Pemberdayaan Kolembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kepedulian Lembaga dan Masyarakat Pada Usaha Kesejahteraan	12 Jenis PMKS	186.940.000	1 Tahun Kegiatan	186.940.000	1 Tahun Kegiatan	205.634.000	1 Tahun Kegiatan	226.197.400	1 Tahun Kegiatan	248.817.140	1 Tahun Kegiatan	273.698.854	DISOSNAKER	
Program Penanaman & Pembinaan Nilai Kebangsaan	Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Kesetiakawanan Sosial	100%	102.291.000	1 Tahun Kegiatan	102.291.000	1 Tahun Kegiatan	112.520.100	1 Tahun Kegiatan	123.772.110	1 Tahun Kegiatan	136.149.321	1 Tahun Kegiatan	301.048.739	DISOSNAKER	
TENAGA KERJA															
Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkompetensi dan Mampu Berdayasabang	15	166.215.000	25	166.215.000	30	196.000.000	35	217.800.000	40	239.580.000	45	263.538.000	DISOSNAKER	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Menyediakan informasi tentang pasar kerja baik lokal, antar daerah maupun antar negara	237	44.280.000	255	44.280.000	265	160.600.000	270	176.660.000	275	194.326.000	275	213.758.600	DISOSNAKER	
Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Kesejahteraan	Meningkatnya Penusaftaan Yang Melaksanakan Undang-Undang Kelangkaan	350 Perusahaan	119.413.500	500 perusahaan	119.413.500	550 perusahaan	146.500.000	600 perusahaan	163.350.000	650 perusahaan	179.685.000	700 perusahaan	197.653.500	DISOSNAKER	
Program Pengembangan Partisipasi Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	1 keg	370.820.000	22 keluarga	370.820.000	22 keluarga	311.146.220	22 keluarga	342.260.842	22 keluarga	376.486.926	22 keluarga	414.136.619	DISOSNAKER	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Realiti dan Global	Kurangnya pendapatan yang dapat menunjang pendapatan inti keluarga	930.772.300	22 keluarga	930.772.300	22 keluarga	1.164.943.780	22 keluarga	1.281.438.158	22 keluarga	1.409.551.974	22 keluarga	1.550.540.171	DISOSNAKER	
PANGAN															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan perkantoran yang tertib administrasi	431.420.000	465.246.000	100%	465.246.000	100%	538.770.000	100%	581.647.000	100%	639.811.700	100%	699.811.700	BPSK	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur	143.543.500	102.113.500	100%	102.113.500	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	166.410.000	BPSK	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	1	14.123.000	100%	14.123.000	100%	17.400.000	100%	19.400.000	100%	21.400.000	100%	23.400.000	BPSK	
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1	0	100%	0	100%	17.000.000	100%	24.000.000	100%	26.000.000	100%	28.000.000	BPSK	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.000.000	27.000.000	100%	27.000.000	100%	29.700.000	100%	32.670.000	100%	35.937.000	100%	39.937.000	BPSK	
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kesejahteraan rakyat	402.291.000	561.545.000	30%	561.545.000	40%	546.700.000	45%	601.370.000	50%	661.507.000	50%	721.507.000	BPSK	

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)			SKPD Penanggung Jawab
			Tahun-1	Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Rp	Target	Rp	Target	
			Target	Rp	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	115.500.000	30%	120.000.000	40%	140.000.000	50%	154.000.000	60%	169.400.000	70%	186.340.000	70%	186.340.000	BP4K	
Program Peningkatan Teknologi Pertanian	Meningkatnya pemanfaatan teknologi pertanian	33.000.000	60%	0	70%	33.000.000	80%	36.300.000	90%	39.930.000	100%	43.923.000	100%	43.923.000	BP4K	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian/perkebunan	47.850.000	40%	0	45%	32.000.000	50%	35.200.000	55%	38.720.000	60%	42.592.000	60%	42.592.000	BP4K	
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Terwujudnya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	471.304.500	100%	524.375.000	100%	566.425.000	100%	623.049.500	100%	685.354.000	100%	753.889.000	100%	753.889.000	BP4K	
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian	Terwujudnya Pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian	27.500.000	100%	33.500.000	100%	33.500.000	100%	36.650.000	100%	40.535.000	100%	44.588.000	100%	44.588.000	BP4K	
Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Petani	Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Petani	0	100%	0	100%	72.000.000	100%	79.200.000	100%	87.120.000	100%	95.832.000	100%	95.832.000	BP4K	
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan	0	100%	0	100%	190.000.000	100%	209.000.000	100%	229.900.000	100%	252.890.000	100%	252.890.000	BP4K	
Program Penataan, Penguatan, dan Pengembangan Kelembagaan	Terwujudnya Penataan, Penguatan, dan Pengembangan Kelembagaan	0	100%	0	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	121.000.000	BP4K	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja aparatur	181.950.000	12 bulan	190.248.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	231.000.000	12 bulan	254.100.000	12 bulan	280.000.000	12 bulan	280.000.000	Kantor Ketahanan Pangan	
Program Penguasaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	117.600.000	1 paket & 12 Bulan	119.400.000	1 paket & 12 Bulan	131.340.000	1 paket & 12 Bulan	145.000.000	1 paket & 12 Bulan	159.500.000	1 paket & 12 Bulan	180.000.000	1 paket & 12 Bulan	180.000.000	Kantor Ketahanan Pangan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	2.000.000	10 orang	0	10 orang	3.000.000	10 orang	6.000.000	10 orang	9.000.000	10 orang	12.000.000	10 orang	12.000.000	Kantor Ketahanan Pangan	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan-laporan	24.450.000	8 laporan	30.000.000	8 laporan	38.500.000	8 laporan	42.350.000	8 laporan	46.500.000	8 laporan	51.200.000	8 laporan	51.200.000	Kantor Ketahanan Pangan	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya cadangan pangan	726.380.000	1 tahun	625.620.000	1 tahun	1.053.182.000	1 tahun	1.158.500.000	1 tahun	1.274.350.000	1 tahun	1.401.785.000	1 tahun	1.401.785.000	Kantor Ketahanan Pangan	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK																
Program Kesetaraan Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	Terlaksananya sosialisasi			0		65.000.000	5 kec	71.500.000	5 kec	78.650.000	5 kec	86.515.000	5 kec	86.515.000		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender & anak	2 kegiatan	2 keg	141.317.000	2 keg	134.286.000	3 keg	100.000.000	3 keg	100.000.000	3 keg	100.000.000	3 keg	100.000.000	BKKSI PP	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan program perlindungan perempuan	6 kegiatan	6 keg	807.079.800	6 keg	807.427.160	6 keg	700.000.000	6 keg	700.000.000	6 keg	700.000.000	6 keg	700.000.000	BKKSI PP	
Program Peningkatan Pemasaran dan Kesetaraan Gender dalam Pengembangan	Peningkatan pemasaran dalam pengembangan	2 kegiatan	2 keg	1.144.400.000	2 keg	80.000.000	2 keg	160.000.000	2 keg	160.000.000	2 keg	160.000.000	2 keg	160.000.000	BKKSI PP	
LINGKUNGAN HIDUP																
Program Administrasi Perkantoran	Kelengkapan pelayanan adm.	100%	100%	216.004.350	100%	248.680.500	100%	266.346.300	100%	292.980.900	100%	322.279.023	100%	354.508.925	KLH	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	117.973.500	100%	181.400.000	100%	145.000.000	100%	159.599.000	100%	175.558.900	100%	193.114.790	KLH	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	6.900.000	100%	4.750.000	100%	5.235.000	100%	5.747.500	100%	6.322.250	100%	6.954.475	KLH	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	KLH	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KLH	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah unit bank sampah yang terbangun	7 unit Bank Sampah	7 unit Bank Sampah	13.800.000	8 unit Bank Sampah	29.000.000	10 unit Bank Sampah	43.450.000	12 unit Bank Sampah	47.790.000	13 unit Bank Sampah	52.574.900	15 unit Bank Sampah	57.831.900	KLH	

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)				
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Tahun-7	Tahun-8	Tahun-9	Tahun-10	Tahun-11	Tahun-12	Tahun-13	Tahun-14	Tahun-15
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1 Program Pengendalian Pencemaran dan Pemukiman Lingkungan Hidup	2 Tercapainya pengendalian pencemaran dan pemukiman LH	3 100% (penghar aan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 tik sampel tanah, 20 dukume n LH, 120 pengusa hul/tahun)	4 100 % (penghar aan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 tik sampel tanah, 20 dukume n LH, 120 pengusa hul/tahun)	5 496.925.000	6 100 % (penghar aan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 tik sampel tanah, 20 dukume n LH, 120 pengusa hul/tahun)	7 1.583.487.000	8 100 % (penghar aan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 tik sampel tanah, 20 dukume n LH, 120 pengusa hul/tahun)	9 1.641.835.700	10 100 % (penghar aan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 tik sampel tanah, 20 dukume n LH, 120 pengusa hul/tahun)	11 1.806.019.270	12 100 % (penghar aan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 tik sampel tanah, 20 dukume n LH, 120 pengusa hul/tahun)	13 1.986.621.197	14 100 % (penghar aan adipura, 60 unit pengusa ha, 1 paket pengada an, 4 tik sampel tanah, 20 dukume n LH, 120 pengusa hul/tahun)	15 2.185.283.317	16 KUH		
Program Peningkatan Kualitas Sumber dan Akses Informasi SDA & LH																	
	Tercapainya Peningkatan kualitas sumber dan akses informasi SDA dan LH	100%		178.461.000		207.021.100		227.723.100		250.495.410		275.544.951		303.094.446			
Program Peningkatan Pengendalian Polusi		100%		48.110.000		85.000.000		93.500.000		102.850.000		113.135.000		124.448.500			
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																	
Program Pelayanan Administrasi Perkawinan		93%		574.404.035		636.936.039		664.500.000		728.674.000		810.800.000		850.000.000		DISDUKAPIL KOTA METRO	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		75%		618.316.943		1.150.648.638		790.500.000		744.600.000		810.700.000		815.700.000		DISDUKAPIL KOTA METRO	
Program Peningkatan Disiplin Pegawai		0%		11.740.000		15.000.000		16.000.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000		DISDUKAPIL KOTA METRO	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%				15.000.000		18.000.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000		DISDUKAPIL KOTA METRO	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		90%		23.004.000		34.376.200		14.700.000		15.120.000		16.000.000		17.000.000		DISDUKAPIL KOTA METRO	
Program Reformasi Administrasi Kependudukan		8000000		515.575.000		648.879.000		648.879.000		648.879.000		648.879.000		648.879.000		DISDUKAPIL KOTA METRO	
Program Reformasi Administrasi Kependudukan		8000000		515.575.000		648.879.000		648.879.000		648.879.000		648.879.000		648.879.000		DISDUKAPIL KOTA METRO	
KOPERASI USAHA KECH & MENENGAH																	
Program Pelayanan Administrasi Perkawinan		100%		355.280.880		365.338.444		423.836.864		466.233.850		510.846.236		562.344.236		DISKOP	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%		100.437.000		5.176.151.000		193.766.100		213.423.710		234.456.981		257.907.674		DISKOP	

Bidang Usuan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
			Target	Target	Target	Target	Target							Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	DISKOP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	44.866.233	100%	49.355.020	100%	54.920.522	100%	59.719.574	100%	65.691.531	100%	72.260.684	DISKOP
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Diversifikasi produk-produk Kota Metro pada Ajang pameran	100%	100%	1.090.216.830	100%	1.199.238.480	100%	1.319.162.328	100%	1.451.078.960	100%	1.596.186.417	100%	1.755.825.058	DISKOP
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100%	100%	0	100%	405.000.000	100%	445.000.000	100%	490.000.000	100%	539.000.000	100%	592.960.500	DISKOP
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	100%	230.000.000	100%	253.000.000	100%	27.830.000	100%	30.613.000	100%	33.674.300	100%	37.041.730	DISKOP
Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi	100%	100%	0	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	109.807.500	DISKOP
Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Koperasi Simpan Pinjam	Tercapainya Pengawasan dan Pengendalian Usaha Koperasi Simpan Pinjam	100%	100%	0	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	48.000.000	100%	53.240.000	100%	58.544.000	DISKOP
PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	348.156.830	1 tahun	235.194.380	1 tahun	258.713.818	1 tahun	264.585.200	1 tahun	313.043.720	1 tahun	344.348.092	BKKRB PP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	793.345.000	1 tahun	299.639.500	1 tahun	329.823.450	5	362.805.795	1 tahun	399.086.375	1 tahun	438.995.012	BKKRB PP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Peningkatan Disiplin Aparatur	1 tahun	1 tahun	17.010.000	1 tahun	299.639.500	1 tahun	329.823.450	1 tahun	362.805.795	1 tahun	399.086.375	1 tahun	438.995.012	BKKRB PP
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas SDN Sumberdaya Aparatur	1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	BKKRB PP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 tahun	1 tahun	41.769.000	1 tahun	27.500.000	1 tahun	30.250.000	1 tahun	33.275.000	1 tahun	36.602.500	1 tahun	40.262.760	BKKRB PP
Program Keluarga Berencana	tersosialisasinya program Keluarga Berencana dengan baik	100%	100%	962.368.000	100%	816.001.070	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	BKKRB PP
Program Kesehatan Reproduksi, Remaja	Tertaksananya pendampingan dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja	100%	100%	22.260.000	100%	19.486.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	38.000.000	BKKRB PP
Program Pelayanan Kontrasepsi	Tertaksananya pelayanan pemasangan alat kontrasepsi	100%	100%	50.035.000	100%	45.577.500	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	BKKRB PP
Program Pembinaan Pranikah Serta Masyarakat dalam Pelaporan KB yang Mandiri	Montogkatnya peserta pranikah masyarakat dalam KB mandiri	100%	100%	397.361.800	100%	328.951.500	100%	420.000.000	100%	420.000.000	100%	440.000.000	100%	460.000.000	BKKRB PP
Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Kelompok KB Masyarakat	Montogkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu, bayi dan anak	100%	100%	138.304.700	100%	140.736.220	100%	154.809.642	100%	170.290.826	100%	187.319.909	100%	197.319.909	BKKRB PP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	960.000.000	22 tahun	960.000.000	22 tahun	960.000.000	22 tahun	960.000.000	22 tahun	960.000.000	22 tahun	960.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.800	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.105.000.000	DISKORAKER
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memerankan Desa	Montogkatnya partisipasi masyarakat dalam memerankan desa	22 tahun	22 tahun	1.105.000.000	22 tahun	1.059.									

Bidang Usuan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	2	0	100%	0	100%	0	100%	80.000.000	100%	88.000.000	100%	96.800.000	100%	106.480.000	16	Dinas Perikanan
PERTANIAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		785.392.785	100%	988.361.259	100%	1.222.628.445	100%	1.344.891.292	100%	1.479.380.418	100%	1.627.318.460	100%	1.790.050.306		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		279.273.500	100%	323.523.000	100%	357.613.850	100%	393.375.235	100%	423.712.759	100%	475.984.034	100%	523.582.438		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		0	100%	19.530.000	100%	45.000.000	100%	49.500.000	100%	54.450.000	100%	59.895.000	100%	65.884.500		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		11.000.000	100%	0	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	14.641.000	100%	16.105.100	100%	17.715.610		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		53.535.950	100%	61.665.950	100%	66.452.655	100%	73.097.921	100%	80.407.713	100%	88.448.484	100%	97.293.332		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		455.773.343	100%	413.061.361	100%	460.010.497	100%	506.011.547	100%	556.612.701	100%	612.273.972	100%	673.501.369		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan Pangan		409.015.000	100%	457.672.500	100%	504.088.750	100%	554.497.625	100%	609.947.388	100%	670.942.126	100%	738.036.339		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaan dan Pengelolaan Hasil Pertanian/Perkebunan		68.995.500	100%	90.022.377	100%	99.024.615	100%	108.927.077	100%	119.819.784	100%	131.801.763	100%	144.981.939		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		184.575.000	100%	99.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	%	161.051.000		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian		8.163.712.750	100%	1.878.303.000	100%	5.571.161.300	100%	6.128.277.430	100%	6.741.105.173	100%	7.415.215.690	100%	8.156.737.259		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura		0	100%	0	100%	0	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian		0	100%	0	100%	0	100%	8.800.000.000	100%	8.800.000.000	100%	9.680.000.000	100%	10.684.000.000		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pelayanan Mutu		0	100%	0	100%	0	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000		Dinas Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		224.266.900	100%	207.987.400	100%	231.712.140	100%	254.853.354	100%	280.371.689	100%	308.408.858	100%	339.249.744		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan		174.270.000	100%	138.475.000	100%	152.872.500	100%	168.159.750	100%	184.975.725	100%	203.473.298	100%	223.820.627		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaan Hasil Produksi Perikanan		90.380.000	100%	45.250.000	100%	49.775.000	100%	54.752.500	100%	60.227.750	100%	66.250.525	100%	72.875.578		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan		333.105.000	100%	222.180.000	100%	289.190.000	100%	318.109.000	100%	349.919.900	100%	384.911.890	100%	423.403.079		Dinas Pertanian
Program Pengembangan Kinerja Organisasi Pendukung Pertanian		26.250.000	100%	25.000.000	100%	26.250.000	100%	28.875.000	100%	31.763.500	100%	34.938.750	100%	38.432.625		Dinas Pertanian
PERDAGANGAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.089.385.340	1 tahun	1.201.784.260	1 tahun	1.303.452.051	1 tahun	1.343.000.000	1 tahun	1.477.300.000	1 tahun	1.625.030.000	1 tahun	1.787.533.000		Dinas Dagang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		262.121.400	1 tahun	477.631.720	1 tahun	420.651.892	1 tahun	445.000.000	1 tahun	489.500.000	1 tahun	538.450.000	1 tahun	592.245.000		Dinas Dagang
Program Peningkatan Pengembangan Daya Aparatur		87.486.000	1 tahun	76.340.000	1 tahun	88.450.000	1 tahun	90.000.000	1 tahun	107.345.000	1 tahun	117.868.000	1 tahun	129.446.000		Dinas Dagang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		27.600.000	1 tahun	0	1 tahun	0	1 tahun	18.000.000	1 tahun	21.000.000	1 tahun	27.500.000	1 tahun	32.500.000		Dinas Dagang
		21.600.000	1 tahun	77.000.000	1 tahun	77.000.000	1 tahun	94.000.000	1 tahun	103.400.000	1 tahun	113.740.000	1 tahun	125.114.000		Dinas Dagang

Bidang Ususan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung jawab
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
			Target	Rp	Target	Rp	Target							Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Penguasaan Perdagangan	Tersedianya dana konsumen dan pemasaran perdagangan	226.000.000	1 tahun	226.000.000	1 tahun	401.000.000	1 tahun	410.000.000	1 tahun	451.000.000	1 tahun	496.100.000	1 tahun	545.710.000	Disdagsar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya dana perdagangan dalam negeri	281.963.550	1 tahun	293.908.950	1 tahun	529.000.000	1 tahun	605.000.000	1 tahun	665.520.000	1 tahun	732.050.000	1 tahun	805.255.000	Disdagsar
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tersedianya dana pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	300.995.520	1 tahun	250.580.005	1 tahun	343.000.000	1 tahun	364.000.000	1 tahun	403.400.000	1 tahun	440.440.000	1 tahun	484.484.000	Disdagsar
Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan	Tersedianya dana pembangunan infrastruktur pedesaan	3.696.625.000	1 tahun	2.292.028.305	1 tahun	2.239.000.000	1 tahun	2.312.000.000	1 tahun	2.543.200.000	1 tahun	2.797.520.000	1 tahun	3.077.272.000	Disdagsar
PERINDUSTRIAN															
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tercapainya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kurang optimalnya pembinaan dan pelatihan	100%	261.455.000	100%	287.600.500	100%	316.360.550	100%	347.996.609	100%	382.796.265	100%	421.075.892	DISKOP
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Tersedianya Pengembangan Sentra-Sentra Potensial	100%	0%	0	100%	145.000.000	100%	159.500.000	100%	175.450.000	100%	192.995.000	100%	212.294.500	DISKOP
Program Penguatan Kemampuan Teknologi Industri	Tercapainya Penguatan Kemampuan Teknologi Industri	100%	0%	0	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.860.000	100%	87.846.000	DISKOP
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Tercapainya Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Masih banyak produk yang belum diuji atau belum bersertifikasi	0%	0	100%	53.625.000	100%	58.987.520	100%	64.886.250	100%	71.374.875	100%	78.512.363	DISKOP
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tercapainya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kualitas SDM masih terbatas	0%	0	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	DISKOP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bencana Kebakaran	1. Respon time penanggulangan kebakaran	0	45 menit	500.000.000	30 menit	600.000.000	25 menit	540.000.000	20 menit	560.000.000	15 menit	575.000.000	15 menit	632.000.000	BPRD
	2. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bencana kebakaran	0	20%		40%		60%		80%		100%		100%		
	3. Penguas Pemadam Kebakaran yang handal	0	10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		50 orang		
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam/Sosial	Presensi bangunan/jalan pertanian/dusun yang dilakukan rehabilitasi	0	20%	200.000.000	40%	300.000.000	60%	400.000.000	80%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	1.000.000.000	BPRD
Program Pengendalian Banjir	Tersusun serta tersedianya rencana pengendalian banjir	0	20%	500.000.000	40%	600.000.000	60%	750.000.000	80%	900.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.300.000.000	BPRD
Program Pencegahan Diri dan Peningkatan Keselamatan Peninggungan Bencana Alam/Nor Alam	1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan bencana alam/nor alam	Masyarakat selangkah selangkah sadar bencana	200 orang	1.700.000.000	200 orang	1.700.000.000	200 orang	1.700.000.000	200 orang	1.700.000.000	250 orang	3.000.000.000	1000 orang	3.300.000.000	BPRD
	2. Keselamatan menghadapi bencana kebakaran	Sumbu beres smpa kebakaran 16 unit	12 unit		12 unit		12 unit		12 unit		24 unit		88 unit		
Program Perwujudan Sarana Umum Menghadapi Bencana Alam/Nor Alam	Peningkatan kualitas sarana umum menghadapi bencana alam	Masih banyak sarana umum yang rusak	Masih banyak sarana umum yang rusak	450.000.000	Masih banyak sarana umum yang rusak	1.450.000.000	Masih banyak sarana umum yang rusak	450.000.000	Masih banyak sarana umum yang rusak	3.000.000.000	Masih banyak sarana umum yang rusak	450.000.000	Masih banyak sarana umum yang rusak	4.500.000.000	BPRD
Program Pemeliharaan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya jasa pelayanan pemerintahan	45 orang	45 orang	206.000.000	45 orang	245.000.000	45 orang	847.000.000	45 orang	86	45 orang	867.000.000	45 orang	910.000.000	BPRD

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	3	60%	247.000.000	70%	271.000.000	80%	307.500.000	90%	335.000.000	100%	430.000.000	100%	452.000.000	16 BPKD	
	1. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	60%	60%		70%		80%		90%		100%		100%			
	2. Tersedianya Peralengkapan Gedung Kantor	mesin tik = 1 unit, kompa= unit, Notebook=1 Unit, Printer=2 unit	mesin tik = 1 unit, kompa= unit, Notebook= 2 Unit, Printer=2 unit										mesin tik = 5 unit, kompa=10 unit, Notebook= 10 Unit, Printer=10 unit			
	3. Terpeliharanya Kendaraan Dinas	10											mobil damkar, mobil dinas dan kendaraan dinas lainnya			
	4. Terpeliharanya Gedung Kantor	gedung kantor	gedung kantor										gedung kantor			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	60%	75%	12.500.000	80%	13.500.000	85%	14.500.000	90%	14.500.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	RPHD	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	0	5 org	100.000.000	5 org	100.000.000	5 org	100.000.000	10 org	200.000.000	10 org	200.000.000	35 orang	200.000.000	RPHD	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	70%	75%	45.000.000	80%	50.000.000	85%	55.000.000	90%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	RPHD	
DISPENDA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bln	830.833.000	12 bln	952.614.000	12 bln	1.047.860.000	12 bln	1.119.000.000	12 bln	1.200.000.000	12 bln	1.282.000.000	Dispenda	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	6 paket	6 PKT	364.180.000	8 PKT	422.750.000	4 PKT	241.900.000	6 PKT	368.000.000	3 PKT	250.000.000	2 PKT	247.000.000	Dispenda	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya disiplin aparatur	65 org	66 Org	13.200.000	0	0	-	0	70 Org	17.500.000	70 Org	24.000.000	70 Org	24.000.000	Dispenda
	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	3 org	-	0	3 Org	20.000.000	5 org	20.000.000	5 org	20.000.000	3 Org	20.000.000	3 Org	20.000.000	Dispenda
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya laporan keuangan	6 dokumen	6	83.914.000	6	68.827.000	6	74.720.000	6	79.000.000	6	84.000.000	6	95.000.000	Dispenda
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Program Peningkatan target PAD	100%	100	1.602.023.900	100	2.630.624.000	100	3.557.496.000	100	3.935.000.000	100	4.415.000.000	100	4.765.000.000	Dispenda	
	Program Peningkatan kebutuhan administrasi perkantoran	22 Kelurahan	22 Kel		22 Kel		22 Kel		22 Kel		22 Kel		22 Kel		Dispenda	
	Program Peningkatan kebutuhan administrasi perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	95%	10.000.000, 42	40%	11.000.000.000	95%	12.150.181.250	95%	13.176.110.377	95%	14.482.601.414	95%	15.747.604.558	RPKAD
	Program Peningkatan kebutuhan administrasi perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	95%	4.000.000, 42	40%	4.000.000.000	95%	4.000.000.000	95%	4.000.000.000	95%	4.000.000.000	95%	4.000.000.000	RPHD
	Program Peningkatan kebutuhan administrasi perkantoran	Meningkatnya disiplin aparatur	70%	75%	45.000.000	80%	50.000.000	85%	55.000.000	90%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	RPKAD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	RPKAD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pengembangan Kinerja dan Keuangan	100%	95%	100.000.000	95%	110.000.000	95%	120.000.000	95%	130.000.000	95%	140.000.000	95%	150.000.000	RPKAD

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 Terlaksananya Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3 20 laporan	100%	5 371.898	7 37.336	6 100%	7 37.336	8 100%	9 386.923	10 394.661	11 394.661	12 100%	13 402.554	14 100%	15 410.605	16 Serwan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan SKPD	2 Tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan yang lebih Sistematis, Mudah di mengerti dan mudah di akses	12 bulan	1 tahun	337.920	334.658	1 tahun	351.551	1 tahun	358.582	1 tahun	365.754	1 tahun	373.069	1 tahun	379.069	Serwan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2 Tersedianya Pelayanan terhadap Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas-tugas Legislasi	100%	1 tahun	6.816.366	6.932.693	1 tahun	7.091.747	1 tahun	7.233.582	1 tahun	7.378.254	1 tahun	7.525.819	1 tahun	7.671.619	Serwan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2 Tersedianya Fasilitas Buku Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	100%	40.984	41.804	100%	42.640	100%	43.493	100%	44.362	100%	45.250	100%	46.139	Serwan
Program Kerjasama dengan Media Massa	2 Tersedianya Fasilitas Kerjasama dengan Media Massa	54 media massa	100%	1.620.546	1.652.957	100%	1.686.019	100%	1.719.736	100%	1.754.131	100%	1.789.214	100%	1.824.300	Serwan
SEKRETARIAT DAERAH																
Program Peningkatan Pelayanan Kedisnasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2 Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedisnasan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	9 kegiatan	9 keg	4.838.080.000	5.079.984.000	10 keg	5.333.983.200	10 keg	5.620.682.360	10 keg	5.933.983.200	10 keg	6.233.654.453	10 keg	6.538.365.606	Bag. Adm Pemerintahan
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	2 Terselenggaranya kerjasama antar Pemerintah Daerah	2 kegiatan	2 keg	49.000.000	51.450.000	3 keg	54.022.500	3 keg	56.723.625	3 keg	59.422.500	3 keg	62.123.625	3 keg	64.824.750	Bag. Adm Pemerintahan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	2 Terselenggaranya Penataan Daerah Otonomi Baru	6 kegiatan	6 keg	265.932.000	279.218.600	7 keg	293.190.030	7 keg	307.849.532	7 keg	323.190.030	7 keg	338.190.030	7 keg	353.480.630	Bag. Adm Pemerintahan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2 Terwujudnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Metro	1 kegiatan	1 keg	170.800.000	179.340.000	1 keg	188.307.000	1 keg	197.722.350	1 keg	207.137.000	1 keg	216.552.000	1 keg	225.967.000	Bag. Adm Pemerintahan
Program Pembinaan terhadap seluruh masyarakat Kota Metro	2 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat	25 kegiatan	25 keg	6.735.741.000	6.822.528.000	26 keg	6.910.315.000	26 keg	7.000.100.000	26 keg	7.090.885.000	26 keg	7.182.670.000	26 keg	7.274.455.000	Bagian Kesa
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2 Meningkatnya kelancaran tugas dan kegiatan kedisnasan Walikota dan Wakil Walikota	6 kegiatan	6 keg	692.106.500	726.712.140	7 keg	763.047.747	7 keg	801.200.134	7 keg	839.357.747	7 keg	877.509.747	7 keg	915.661.747	Bagian Protokol
Program Kerjasama dengan Media Massa	2 Meningkatnya pelayanan informasi dan pembangunan	1 kegiatan	1 keg	123.100.000	129.150.000	1 keg	135.607.500	1 keg	142.187.575	1 keg	148.797.500	1 keg	155.427.500	1 keg	162.037.500	Bagian Protokol
Program Pemberdayaan Faksi Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat peryandang masalah kesejahteraan sosial dan pembangunan	4 kegiatan	4 keg	386.230.000	405.541.500	5 keg	425.818.575	5 keg	447.109.804	5 keg	468.386.875	5 keg	489.673.875	5 keg	510.964.875	Bag. Adm Pemerintahan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2 Tersusunnya pedoman penyelenggaraan kegiatan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	10 kegiatan	10 keg	607.396.000	658.758.450	11 keg	691.606.373	11 keg	726.381.191	11 keg	763.047.747	11 keg	798.828.747	11 keg	834.610.191	Bag. Adm Pemerintahan
Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan Keuangan Kabupaten/Kota	2 Terkoordinasinya Pembinaan, pengawasan dan aparat dalam program dan kegiatan pembinaan	2 kegiatan	2 keg	108.734.400	114.175.320	3 keg	119.644.086	3 keg	125.178.290	3 keg	130.747.086	3 keg	136.366.086	3 keg	141.985.086	Bag. Adm Pembangunan
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH	2 Terselenggaranya kegiatan pembangunan fisik	7 kegiatan	7 keg	1.797.635.500	1.887.520.425	7 keg	1.981.596.446	7 keg	2.080.991.269	7 keg	2.181.596.446	7 keg	2.282.196.446	7 keg	2.382.796.446	Bag. Adm Pembangunan
Optimalisasi Pemantauan Teknologi Informasi	2 Terlaksananya inventarisasi laporan kegiatan di kabupaten	2 kegiatan	2 keg	56.540.000	60.888.000	3 keg	65.422.400	3 keg	70.134.000	3 keg	74.922.400	3 keg	79.754.400	3 keg	84.586.800	Bag. Adm Pembangunan
Program Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	2 Terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 keg	1.100.000.000	1.150.000.000	1 keg	1.200.000.000	1 keg	1.250.000.000	1 keg	1.300.000.000	1 keg	1.350.000.000	1 keg	1.400.000.000	Bag. Adm Pembangunan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2 Tersusunnya produk hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku	10 kegiatan	10 keg	1.150.151.000	1.215.214.000	10 keg	1.275.490.580	10 keg	1.336.776.160	10 keg	1.398.061.740	10 keg	1.459.347.320	10 keg	1.520.632.900	Bagian Hukum

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (tahun 2021)			SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Rp		Target	Rp	Target		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	15 kegiatan	15 keg	10.188.968.650	15 keg	10.698.417.083	15 keg	11.233.337.937	15 keg	11.795.004.833	15 keg	11.233.337.937	15 keg	15 keg			Bagian TU Keuangan		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperuhnya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	5 kegiatan	5 keg	4.512.000.000	5 keg	4.737.600.000	6 keg	4.974.480.000	6 keg	5.223.204.000	5 keg	5.485.364.000	5 keg	6 keg			Bagian TU Keuangan & Bag. Umum		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya ketaatan aparatur dalam mematuhi ketentuan disiplin	1 kegiatan	1 keg	242.970.000	1 keg	255.013.500	1 keg	267.764.175	1 keg	281.152.904	1 keg	295.210.003	1 keg	1 keg			Bagian TU Keuangan & Bag. Umum		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terperuhnya Sistem Pelaporan yang tepat dan akurat	4 kegiatan	4 keg	172.433.100	4 keg	181.054.755	4 keg	190.107.493	4 keg	199.612.867	4 keg	190.107.493	4 keg	4 keg			Bagian TU Keuangan		
Program Peningkatan Tata Usaha Keuangan	Terlaksananya terib administrasi pendataan keuangan	7 kegiatan	7 keg	541.916.900	7 keg	569.012.745	7 keg	597.463.382	7 keg	627.336.551	7 keg	597.463.382	7 keg	597.463.382			Bagian TU Keuangan		
				359.869.646.175		417.104.366.353		436.672.486.727		482.432.115.808									

#####

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Metro tahun 2016-2021 diuraikan dalam tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Metro

Tabel 9.1

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan PDRB	6,04	6,04	5,94	6,05	6,04	6,23	6,23
1.2.	Laju inflasi	3,7	3,7	4	4	4	4	4
1.3.	PDRB per kapita	27.327.844	27.327.844	29.090.490	30.966.827	32.964.187	35.090.377	35.090.377
	Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf	98,6	98,6	98,7	98,8	98,9	99	99
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	10,83	10,83	11,11	11,39	11,67	11,95	11,95
1.3.	Angka Partisipasi Sekolah SD	91	91,9	92	92,10	92,3	92,4	92,5

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.	Angka Partisipasi SMP	87,55	88,65	89,75	90,85	91,95	93,05	94,15
2.	<i>Kesehatan</i>							
2.1.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	109/100.000	109/100.000	90/100.000	80/100.000	75/100.000	70/100.000	70/100.000
2.2.	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	8/1000	8/1000	7,8/1000	7,5/1000	7,2/1000	7/1000	7/1000
2.3.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	7,5/1000	7,5/1000	7,2/1000	7/1000	6,8/1000	6,5/1000	6,5/1000
2.4.	Angka harapan hidup	71,15	71,15	71,31	71,47	71,63	71,79	71,79
3.	<i>Sumberdaya Manusia</i>							
3.1.	Indeks pembangunan manusia	75	75	75,61	75,78	75,94	76,00	76,00
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.	<i>Pendidikan</i>							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Rasio guru terhadap murid (SD)	1 : 15	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.3.	Angka Partisipasi Kasar SD	100	100	100	100	100	100	100
1.1.4.	Angka Partisipasi Kasar SMP	100	100	100	100	100	100	100
1.1.5.	Angka Partisipasi Murni SD	100	100	100	100	100	100	100
1.1.6.	Angka Partisipasi Murni SMP	86,47	88,73	90,99	93,25	95,51	97,77	100
1.1.7.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :							
	- SD	1 : 251	1 : 251	1 : 276	1 : 301	1 : 326	1 : 351	1 : 351
	- SMP	1 : 420	1 : 420	1 : 459	1 : 498	1 : 537	1 : 576	1 : 576
1.1.8.	Tersedianya fasilitas ruang kelas yang baik/memadai							
	- SD	548 ruang kelas	548 ruang kelas	552 ruang kelas	556 ruang kelas	560 ruang kelas	564 ruang kelas	564 ruang kelas
	- SMP	302 ruang kelas	302 ruang kelas	305 ruang kelas	308 ruang kelas	311 ruang kelas	314 ruang kelas	314 ruang kelas
1.1.9.	Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan sekolah							
	- SD	56 unit	56 unit	56 unit	58 unit	58 unit	58 unit	58 unit

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- SMP	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit
1.1.10.	Jumlah sekolah yang memiliki laboratorium sekolah							
	- SMP	19 unit	19 unit	20 unit	21 unit	22 unit	23 unit	23 unit
1.1.11.	Jumlah sekolah berfasilitas internet	72 sekolah	72 sekolah	73 sekolah	76 sekolah	77 sekolah	80 sekolah	80 sekolah
1.1.12.	Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia 4-6	1 : 96	1 : 96	1 : 98	1 : 100	1 : 102	1 : 104	1 : 104
1.1.13.	Persentase kelulusan siswa:							
	- SD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- SMP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.1.14.	Nilai rata-rata kelulusan siswa:							
	- SD	70,62	70,62	70,92	71,17	71,42	71,67	71,67
	- SMP	66,06	66,06	66,59	67,09	67,59	68,09	68,09
1.1.15.	Persentase siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah							

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- SD	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	- SMP	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
1.1.16.	Varian ekstrakurikuler di sekolah							
	- SD	12 jenis	12 jenis	13 jenis	14 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis
	- SMP	10 jenis	10 jenis	12 jenis	13 jenis	14 jenis	15 jenis	15 jenis
1.1.17.	Jumlah sekolah berbasis inklusif dan pusat sumber	18 sekolah	18 sekolah	23 sekolah	28 sekolah	33 sekolah	38 sekolah	38 sekolah
2.	Kesehatan							
2.1.	Jumlah puskesmas berstatus terakreditasi	2 unit	2 unit	4 unit	6 unit	8 unit	11 unit	11 unit
2.2.	Jumlah puskesmas berstatus BLUD	4 unit	4 unit	6 unit	8 unit	11 unit	11 unit	11 unit
2.3.	Jumlah puskesmas ramah anak	0	0	1 unit	0	0 unit	1 unit	1 unit
2.4.	Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai	70%	70%	80%	85%	90%	95%	95%
2.6.	Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per satuan penduduk	1 : 5.700	1 : 5.700	1 : 5.700	1 : 5.700	1 : 5.700	1 : 5.600	1 : 5.600

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	Thn 0n (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.7.	Rasio posyandu terhadap jumlah balita	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100
2.8.	Cakupan peserta PBL-JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.9.	Terpenuhinya tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya	80 %	80 %	85 %	90%	95%	95%	95%
2.10.	Peningkatan srata upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	3 kelurahan	3 kelurahan	5 kelurahan	8 kelurahan	12 kelurahan	15 kelurahan	15 kelurahan
2.11.	Cakupan keluarga sehat	5.700 klg	5.700 klg	6.000 klg	6.200 klg	6.500 klg	6.800 klg	6.800 klg
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	81%	81%	82%	83%	84%	85%	85%
3.2.	Jembatan dalam kondisi baik	55 unit	55 unit	56 unit	57 unit	57 nit	57 unit	57 unit
3.3.	Panjang jalan yang memiliki trotoar	16 km	16 km	18 km	20 km	22 km	24 km	24 km
3.4.	Panjang Trotoar yang ramah difabel	2500 m	2500 m	2750 m	3000 m	3250 m	3500 m	3500 m
3.5.	% Drainase dalam kondisi baik	60%	60%	65%	70%	75%	80%	80%

RP-JMD KOTA METRO 2016-2021

[illegible]

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.2.	Tingkat Kemiskinan	9,82	9,82	9,32	8,82	8,32	7,82	7,82
8.	Tenaga Kerja							
8.1.	Tingkat pengangguran terbuka	5,12	4,75	4,50	4,25	4	4	4
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
9.1.	% Kelompok Wanita (KWT) yang melaksanakan teknologi	25%	25%	30%	35%	45%	50%	50%
9.2.	Persentase penanganan kasus untuk perempuan dan anak korban kekerasan	25%	25%	40%	50%	60%	70%	70%
9.3.	Jumlah kelurahan layak anak	0	0	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan
10.	Pangan							
10.1.	Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras)	58 ton	58 ton	70 ton	80 ton	90 ton	100 ton	100 ton
10.2	Skor Pola Harapan	85%	85%	86%	87%	89%	90%	90%
11.	Lingkungan Hidup							
11.1.	% Penanganan sampah	72%	72%	76%	78%	80%	80%	80%

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.2.	Status pengendalian pencemaran udara	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar
11.3.	Status kerusakan tanah	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan
11.4	Pengendalian pencemaran limbah B3	6 unit	6 unit	7 unit	8 unit	9 unit	10 unit	10 unit
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
12.1.	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	80%	80,5%	81%	81,5%	82%	82%
12.2.	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil :							
	- Akta kelahiran	75,16%	75,16%	85%	90%	95%	98%	98%
	- Akta kematian	20%	20%	40%	60%	80%	90%	90%
	- KTP elektronik	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	- Kartu keluarga	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
12.3.	Penerbitan KIA	13000 orang	13000 orang	35000 orang	5000 orang	5000 orang	5000 orang	5000 orang

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
13.1.	% Usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
14.1.	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	70%	70%	70%	71%	71%	72%	72%
14.2.	Angka Kelahiran Total (TFR)/WUS (Wanita Usia Subur 15-49 th)	2,02	2,02	2,02	2,01	2,01	2,01	2,01
14.3.	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 th (ASFR)	20/1000 kelahiran	20/1000 kelahiran	18/1000 kelahiran	15/1000 kelahiran	10/1000 kelahiran	5/1000 kelahiran	5/1000 kelahiran
15.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika							
15.1	Jumlah lampu lalu lintas : - (traffic light) - warning light)	9 unit 12 unit	9 unit 12 unit	10 unit 14 unit	11 unit 16 unit	11 unit 18 unit	12 unit 18 unit	12 unit 18 unit

RPJMD KOTA METRO 2016-2021



RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.	<i>Kebudayaan</i>							
18.1.	Partisipasi publik (sanggar) dalam proses kebudayaan	40 sanggar	40 sanggar	43 sanggar	45 sanggar	50 sanggar	53 sanggar	53 sanggar
18.2.	Jumlah event seni dan budaya yang berbasis masyarakat	4 event	4 event	5 event	6 event	7 event	8 event	8 event
19.	<i>Perpustakaan dan Kearsipan</i>							
19.1.	Jumlah rumah pintar dan perpustakaan sekolah yang terbina	17 unit	17 unit	20 unit	20 unit	21 unit	22 unit	22 unit
19.2.	Jumlah pemustaka yang berkunjung	63.525 orang	63.525 orang	63.752 orang	64.064 orang	64.065 orang	64.065 orang	64.065 orang
19.3.	Jumlah koleksi bahan pustaka yang tersedia	29.022 judul buku	29.022 judul buku	30.022 judul buku	31.022 judul buku	31.722 judul buku	32.422 judul buku	32.422 judul buku
20.	<i>Pariwisata</i>							
20.1.	Jumlah taman kota yang tertata	6 buah	6 buah	8 buah	10 buah	12 buah	14 buah	14 buah
20.2.	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 destinasi	1 destinasi	2 destinasi	3 destinasi	3 destinasi	3 destinasi	3 destinasi
20.3.	Jumlah industri kreatif dan industri pendukung pariwisata daerah	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20.4.	Jumlah wisatawan	7.800 wisatawan	7.800 wisatawan	8.000 wisatawan	8.100 wisatawan	8.300 wisatawan	8.500 wisatawan	8.500 wisatawan
20.5.	Jumlah promosi wisata	30 event	30 event	35 event	40 event	45 event	50 event	50 event
20.6.	Jumlah investor pendukung pariwisata	60	60	65	70	75	80	80
20.7.	Jumlah agen travel/perjalanan wisata	35 unit	35 unit	36 unit	37 unit	38 unit	39 unit	39 unit
21.	Pertanian							
21.1	Jumlah KK Tanaman Pangan dan Hortikultura	10.034	10.034	9.934	9.884	9.864	9.864	9.864
21.2	Jumlah RTP Peternakan	29.946	29.946	29.946	29.946	29.946	29.946	29.946
21.3	Jumlah RTP Perikanan	1.153	1.153	1.178	1.203	1.228	1.253	1.253
22.	Perdagangan							
22.1	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang terbina	100 pedagang	100 pedagang	100 pedagang	100 pedagang	100 pedagang	100 pedagang	100 pedagang
22.2	Persentase pencapaian PAD dari sektor perdagangan dan pasar	50%	65%	65%	70%	75%	80%	80%
23.	Perindustrian							
23.1	Jumlah Usaha Mikro Kecil	7433	7433	7147	7040	7491	7723	7723

RPJMD KOTA METRO 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23.2	Jumlah Usaha Menengah	92	92	97	112	135	166	166
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Tingkat pertumbuhan realisasi PAD	5%	5%	6%	7%	7%	7%	7%
1.2.	% Alokasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja	50%	50%	50,5%	50,7%	50,8%	51%	51%

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kota Metro 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (*lima*) tahun, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Metro, dan RTRW Kota Metro, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setelah disusun, dokumen RPJMD ini menjadi pedoman pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu lima tahun.

RPJMD Kota Metro 2016-2021 ini memuat kondisi eksisting daerah, permasalahan dan isu strategis, arah kebijakan keuangan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, serta program lintas SKPD, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, sesuai dengan Visi, Misi, dan Program kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 harus memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

10.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025 tahap ketiga. Dengan mengusung visi “**Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif**” dan pelaksanaan 4 (empat) misi, RPJMD Kota Metro dijadikan pedoman dalam penyusunan :

1. Rencana Kerja Pemerintah daerah hingga tahun 2021
2. Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan perencanaan penganggaran

Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada

arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025, sesuai ketentuan pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dibuat untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program pembangunan, sehingga terwujud efisiensi dan efektifitas baik dalam pemanfaatan anggaran maupun waktu pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

RPJMD Kota Metro 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari empat tahap pelaksanaan RPJPD Kota Metro 2005-2025. Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan pola perilaku masyarakat yang transformatif.

Maksud tahapan ini adalah pengembangan kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kota, infrastruktur diseluruh sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan dengan pelibatan pemangku kepentingan secara aktif dan integratif, dengan penekanan pada moral dan nilai agama sebagai landasan berperilaku dan bertindak. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk membangun perekonomian lokal melalui sumber daya manusia yang berkarakter wirausaha dan mandiri serta berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip *sustainable development* untuk kualitas hidup warga yang lebih baik.

Dalam RPJMD 2016-2021 ini, prioritas pembangunan yang mengacu pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota diarahkan pada sektor pendidikan melalui peningkatan dan pemerataan kualitasnya, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi lokal sebagai basis pembangunan wisata keluarga, serta penguatan karakter dan kearifan lokal dengan tetap menjadikan moral agama dan budaya sebagai landasannya.

Selanjutnya, kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Metro 2016-2021 merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021. Setelah

RPJMD Kota Metro ini disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dokumen ini harus dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk Renstra SKPD. Selanjutnya Renstra SKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) SKPD.

2. RPJMD Kota Metro 2016-2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan program dan kegiatan pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam RKPD setiap tahunnya harus memiliki hubungan atau keterkaitan dengan RPJMD ini. Hal ini berarti penetapan prioritas program dan kegiatan dalam RKPD harus sesuai dengan RPJMD Kota Metro 2016-2021. Dengan demikian RKPD dan Renja SKPD harus sinkron dan konsisten karena keduanya berpedoman pada dokumen yang sama yaitu RPJMD Kota Metro 2016-2021.
3. Bappeda Kota Metro melakukan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Metro.
4. Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab program adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusannya masing-masing.

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun berdasarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Metro Periode 2016-2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro 2005-2025, yang selanjutnya menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai induk dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan Kota Metro, RPJMD menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Metro secara terkoordinir, terintegrasi, dan sinergi. RPJMD menjadi "kontrak kinerja" Kepala Daerah kepada masyarakat dalam mencapai target kinerja setiap tahun selama lima tahun.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 ditentukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, untuk bersama-sama mewujudkan visi pembangunan. Kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, serta kerja sama yang produktif dan konstruktif dengan seluruh unsur masyarakat, menjadi prasyarat untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama.

PARAF HIERARKIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN